

SALINAN



**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025 - 2045**

**PEMERINTAH KOTA BINJAI**



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Daerah harus dilaksanakan secara menyeluruh di tengah dinamika global dan domestik yang begitu tinggi untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2025-2045 sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Binjai memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
14. Peraturan Daerah .....

14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

dan

WALI KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

11. Evaluasi .....

11. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
20. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan .....

- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan RPJPD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

## BAB II KEDUDUKAN RPJPD TAHUN 2025-2045

#### Pasal 5

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD.

#### Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

## BAB III SISTEMATIKA RPJPD TAHUN 2025-2045

#### Pasal 7

- (1) Sistematika RPJPD ini terdiri dari:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
  - BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
  - BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
  - BAB VI : PENUTUP
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV .....

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
  - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
  - c. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan:
  - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
  - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional; dan
  - c. kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

BAB V  
PERUBAHAN RPJPD TAHUN 2025-2045

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 18 Desember 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

  
MUHAMMAD IQBAL, SH, MH  
NIP. 19791120 200501 1 004

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR: (4-171/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah harus menyusun sejumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2025-2045 ini disusun dengan maksud memberikan arah dalam menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Binjai dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kota Binjai ini akan Menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai untuk jangka waktu lima tahunan, melalui serangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Daerah secara berjenjang.

Kota Binjai telah mencatat kemajuan dari tahapan Pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap pencapaian upaya pencapaian sasaran visi Pemerintah Daerah Kota Binjai dan visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan Pembangunan.

Pemerintah Kota Binjai dalam menjalankan fungsi pemerintahannya harus mampu mewujudkan cita-cita Negara Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Binjai harus menjalankan fungsi utamanya yakni *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development Function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan).

*Good governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objective* bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari Perangkat Daerah dapat tercapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 .....

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparan” dalam ketentuan ini adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “responsif” dalam ketentuan ini adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisien” dalam ketentuan ini adalah pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efektif” dalam ketentuan ini adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabel” dalam ketentuan ini adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” dalam ketentuan ini adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “terukur” dalam ketentuan ini adalah penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” dalam ketentuan ini merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” dalam ketentuan ini adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” dalam ketentuan ini adalah pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 5 .....

- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 53

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH TAHUN 2025-2045

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KOTA BINJAI TAHUN 2025-2045**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum.....	4
1.3. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	9
1.4. Maksud dan Tujuan.....	13
1.5. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	16
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	16
2.1.1. Aspek Geografi.....	19
2.1.2. Aspek Demografi.....	78
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	95
2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi .....	96
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya .....	111
2.3. Aspek Daya Saing Daerah .....	120
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah .....	120
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia .....	129
2.3.3. Daya Saing Fasilitas Infrastruktur Wilayah .....	138
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi .....	142
2.4. Aspek Pelayanan Umum .....	146
2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi .....	146
2.4.2. Indeks Pelayanan Publik .....	147
2.4.3. Indeks Inovasi Daerah .....	149
2.4.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .....	150
2.4.5. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan .....	151
2.4.6. Indikator Kemandirian Keuangan Daerah .....	152
2.4.7. Opini BPK.....	153
2.4.8. Indeks Kepatuhan Publik.....	154
2.5. Evaluasi RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025.....	154
2.6. Proyeksi Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik .....	160
2.6.1. Proyeksi Demografi .....	160

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	171
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	181
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	189
3.1. Permasalahan Pembangunan .....	189
3.2. Isu Strategis .....	202
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH .....	224
4.1. Visi Kota Binjai .....	224
4.2. Sasaran Visi Kota Binjai.....	227
4.3. Misi Kota Binjai .....	234
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH .....	242
5.1. Arah Kebijakan .....	242
5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I Periode 2025-2029.....	242
5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap II Periode 2030-2034.....	245
5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap III Periode 2035-2039.....	247
5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV Periode 2040-2045.....	250
5.2. Sasaran Pokok .....	254
5.2.1. Kesehatan untuk Semua Masyarakat Binjai.....	258
5.2.2. Pendidikan Masyarakat Kota Binjai yang Unggul dan Merata .....	259
5.2.3. Masyarakat Kota Binjai yang Sejahtera dan Terlindungi .....	260
5.2.4. Masyarakat Kota Binjai yang Produktif dengan Keunggulan Iptek dan Inovasi serta Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan .....	262
5.2.5. Pemerintahan Kota Binjai yang Berintegritas dan Adaptif Didukung Partisipasi Masyarakat yang Tinggi .....	267
5.2.6. Kota Binjai yang Demokratis dan Aman dengan Stabilitas Ekonomi Makro yang Unggul dan Berdaya Gantar Kawasan.....	269
5.2.7. Kota Binjai yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan ...	270
5.2.8. Implementasi Transformasi Kota Binjai .....	273

5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kota Binjai ....	275
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>278</b>
6.1. Kaidah Pelaksanaan .....	278
6.2. Pembiayaan Pembangunan .....	294
6.3. Kesimpulan .....	296
6.4. Saran .....	297

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Luas Wilayah Kota Binjai .....	21
Tabel 2. 2.	Kondisi Curah dan Hari Hujan Kota Binjai .....	24
Tabel 2. 3.	Kuantitas Air Permukaan Kota Binjai .....	30
Tabel 2. 4.	Kualitas Air Permukaan Kota Binjai .....	30
Tabel 2. 5.	Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Binjai.....	33
Tabel 2. 6.	Jenis <i>Ecoregion</i> Kota Binjai .....	49
Tabel 2. 7.	Sebaran Penggunaan Lahan di Kota Binjai Tahun 2020 .....	49
Tabel 2. 8.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai Tahun 2023 .....	79
Tabel 2. 9.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai .....	81
Tabel 2. 10.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Jenis Kelamin .....	82
Tabel 2. 11.	Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Kecamatan Tahun 2023 .....	82
Tabel 2. 12.	Komposisi Penduduk Kota Binjai Menurut Kegiatan Utama Tahun 2019-2023 .....	90
Tabel 2. 13.	Komposisi Penduduk Kota Binjai Menurut Agama Tahun 2022 .....	93
Tabel 2. 14.	Persentase Penduduk 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi di Kota Binjai Tahun 2023 .....	94
Tabel 2. 15.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Berdasarkan Lapangan Usaha.....	98
Tabel 2. 16.	Indeks Perlindungan Anak Kota Binjai .....	113
Tabel 2. 17.	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Binjai Tahun 2010-2023 .....	120
Tabel 2. 18.	PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kota Binjai Tahun 2010-2023 .....	121
Tabel 2. 19.	PDRB per Kapita Kota Binjai Tahun 2018-2023...	124
Tabel 2. 20.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD, SMP, SMTA, dan Perguruan Tinggi Binjai 2019-2023 ...	129
Tabel 2. 21.	Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD, SMP, SMTA, dan Perguruan Tinggi Binjai 2018-2023 ...	130
Tabel 2. 22.	Angka Partisipasi Sekolah Binjai 2018-2023.....	130
Tabel 2. 23.	<i>Dependency Ratio</i> Kota Binjai.....	137
Tabel 2. 24.	Indikator Infrastruktur Kota Binjai 2018-2023 ....	139

Tabel 2. 25.	Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kota Binjai Tahun 2023 .....	139
Tabel 2. 26.	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama di Kota Binjai 2018-2023 .....	140
Tabel 2. 27.	Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Sanitasi Dasar Sehat Kota Binjai 2019-2022 .....	141
Tabel 2. 28.	Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023 .....	146
Tabel 2. 29.	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Binjai Tahun 2021-2023 .....	147
Tabel 2. 30.	Indeks Pelayanan Publik Beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2021 .....	148
Tabel 2. 31.	Indeks Inovasi Daerah Kota Binjai.....	149
Tabel 2. 32.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Binjai Tahun 2021-2023 .....	150
Tabel 2. 33.	Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kota Binjai Tahun 2021-2023.....	151
Tabel 2. 34.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045 .....	161
Tabel 2. 35.	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045 .....	162
Tabel 2. 36.	Proyeksi Penduduk Kota Binjai 2025-2045 Menurut Kelompok Umur dari Jenis Kelamin Laki-Laki .....	163
Tabel 2. 37.	Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045 Menurut Kelompok Umur dari Jenis Kelamin Perempuan .....	164
Tabel 2. 38.	Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045 Menurut Kelompok Umur.....	165
Tabel 2. 39.	Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045 Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin .....	167
Tabel 2. 40.	Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045 Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif ...	169
Tabel 2. 41.	Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045 Menurut Kecamatan .....	170
Tabel 2. 42.	Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal Kota Binjai Tahun 2025-2045 .....	172
Tabel 2. 43.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Binjai.....	173
Tabel 2. 44.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Binjai .....	174
Tabel 2. 45.	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah Kota Binjai Tahun 2025-2045 .....	175
Tabel 2. 46.	Asumsi Rasio per Fasilitas Kesehatan.....	176

Tabel 2. 47.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2025-2045 .....	177
Tabel 2. 48.	Asumsi Rasio per Unit dan Ruang Kelas Fasilitas Pendidikan.....	178
Tabel 2. 49.	Proyeksi Angka Partispasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni per Jenjang Pendidikan.....	179
Tabel 2. 50.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2025-2045 .....	179
Tabel 2. 51.	Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas Fasilitas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2025-2045 .....	180
Tabel 4. 1.	Perumusan Visi RPJPD Kota Binjai .....	225
Tabel 4. 2.	Indikator Utama Sasaran Visi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2025-2045 .....	237
Tabel 4. 3.	Perumusan dan Penjelasan Misi RPJPD Binjai.....	237
Tabel 4. 4.	Keterkaitan Agenda Pembangunan Kota Binjai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ....	240
Tabel 5. 1	Fokus Arah Kebijakan Penguatan Fondasi Transformasi.....	244
Tabel 5. 2	Fokus Arah Kebijakan Percepatan Transformasi ..	246
Tabel 5. 3	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Daya Saing .....	249
Tabel 5. 4	Fokus Arah Kebijakan Perwujudan Kota Binjai yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan .....	251
Tabel 5. 5.	Arah Kebijakan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 .....	253
Tabel 5. 6.	Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 .....	256
Tabel 5. 7.	Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Kesehatan untuk Semua Masyarakat Kota Binjai.....	258
Tabel 5. 8.	Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Pendidikan Masyarakat Kota Binjai yang Unggul dan Merata .....	260
Tabel 5. 9.	Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Masyarakat Kota Binjai yang Sejahtera dan Terlindungi .....	261
Tabel 5. 10.	Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Masyarakat Kota Binjai yang Produktif dengan Keunggulan Iptek dan Inovasi serta Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan .....	265

Tabel 5. 11.	Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Pemerintahan Kota Binjai yang Berintegritas dan Adaptif didukung Partisipasi Masyarakat yang Tinggi.....	268
Tabel 5. 12.	Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Kota Binjai yang Demokratis dan Aman dengan Stabilitas Ekonomi Makro yang Unggul dan Berdaya Gantar Kawasan .....	270
Tabel 5. 13.	Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Kota Binjai yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan .....	272
Tabel 5. 14.	Arah Kebijakan Pengembangan Wisata Binjai .....	277

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Hubungan RPJPD Kota Binjai dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	11
Gambar 2. 1.	Batas Wilayah Administrasi Kota Binjai .....	22
Gambar 2. 2.	Peta Curah Hujan Kota Binjai .....	25
Gambar 2. 3.	Peta Geologi Kota Binjai.....	26
Gambar 2. 4.	Peta Hidrologi dan DAS Kota Binjai.....	29
Gambar 2. 5.	Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kota Binjai.....	57
Gambar 2. 6.	Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Kota Binjai...	58
Gambar 2. 7.	Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kota Binjai .....	59
Gambar 2. 8.	Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir Kota Binjai .....	60
Gambar 2. 9.	Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam Kota Binjai .....	61
Gambar 2. 10.	Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Kota Binjai.....	62
Gambar 2. 11.	Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kota Binjai.....	63
Gambar 2. 12.	Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Binjai .....	64
Gambar 2. 13.	Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika Alam Kota Binjai .....	65
Gambar 2. 14.	Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kota Binjai.....	66
Gambar 2. 15.	Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer (Produksi Oksigen, Penyediaan Habitat Spesies) Kota Binjai.....	67
Gambar 2. 16.	Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kota Binjai .....	68
Gambar 2. 17.	Indeks Risiko Bencana Kota Binjai.....	69
Gambar 2. 18.	Indeks Ketahanan Pangan Kota Binjai.....	72
Gambar 2. 19.	Piramida Penduduk Kota Binjai Tahun 2023.....	80
Gambar 2. 20.	Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Binjai dengan Wilayah Lain di Sumatera Utara 2023....	83

Gambar 2. 21.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Binjai .....	84
Gambar 2. 22.	Persebaran Penduduk Kota Binjai Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	86
Gambar 2. 23.	Kepadatan Penduduk Kota Binjai Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	87
Gambar 2. 24.	<i>Total Fertility Rate</i> Kota Binjai Menurut Sensus Penduduk Tahun 2010 dan 2020.....	88
Gambar 2. 25.	Angka Migrasi Risen Kota Binjai .....	89
Gambar 2. 26.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Binjai Tahun 2023.....	91
Gambar 2. 27.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Menurut Golongan Umur di Kota Binjai Tahun 2023 .....	91
Gambar 2. 28.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Binjai Tahun 2023 .....	92
Gambar 2. 29.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Dibandingkan Kabupaten/ Kota Lain di Sumatera Utara Tahun 2023 .....	96
Gambar 2. 30.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Binjai Dibandingkan Sumatera Utara dan Nasional 2010-2023 .....	97
Gambar 2. 31.	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara Tahun 2023 .....	99
Gambar 2. 32.	Perbandingan Indeks Gini Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional.....	100
Gambar 2. 33.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Binjai .....	101
Gambar 2. 34.	Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Binjai dengan Sumatera Utara dan Nasional .....	102
Gambar 2. 35.	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2023.....	103
Gambar 2. 36.	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Binjai dengan Sumatera Utara dan Nasional ....	104
Gambar 2. 37.	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2022 .....	104
Gambar 2. 38.	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Binjai dengan Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	106
Gambar 2. 39.	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2022 .....	106
Gambar 2. 40.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional .....	107
Gambar 2. 41.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2023 .....	108

Gambar 2. 42.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai, Sumatera Utara, dan Nasional .....	109
Gambar 2. 43.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara Tahun 2023.....	110
Gambar 2. 44.	Indeks Pembangunan Gender Kota Binjai, Sumatera Utara, dan Nasional .....	114
Gambar 2. 45.	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Binjai, Sumatera Utara, dan Nasional .....	115
Gambar 2. 46.	Indeks Ketimpangan Gender Kota Binjai, Sumatera Utara, dan Nasional .....	117
Gambar 2. 47.	Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Kota Binjai 2010-2023 ...	122
Gambar 2. 48.	Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Binjai Tahun 2018-2023.....	124
Gambar 2. 49.	Laju Inflasi Kota Penghitung di Sumatera Utara Tahun 2019-2023 .....	126
Gambar 2. 50.	Perbandingan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Binjai, Sumatera Utara dan Nasional...	127
Gambar 2. 51.	Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Kota Binjai 2023 .....	132
Gambar 2. 52.	Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Kota Binjai 2023 ....	133
Gambar 2. 53.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Binjai, Sumatera Utara, dan Nasional .....	134
Gambar 2. 54.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Binjai, Sumatera Utara, dan Nasional .....	136
Gambar 2. 55.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Kota Binjai Tahun 2018-2023 ....	140
Gambar 2. 56.	Perkembangan Opini BPK Kota Binjai .....	153
Gambar 2. 57.	Rencana Pola Ruang Kota Binjai 2020-2040.....	183
Gambar 2. 58.	Rencana Kawasan Pembangunan di Sumatera Utara.....	185
Gambar 6. 1.	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan pada Skala Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota .....	279
Gambar 6. 2.	Kerangka Kerja MRPN.....	283
Gambar 6. 3.	Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJPD .....	284

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien ketika proses pembangunan didasarkan pada perencanaan yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam menjalankan amanat tersebut, Pemerintah Kota Binjai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

RPJPD merupakan kerangka besar perencanaan pembangunan yang membingkai dan memberikan batasan (koridor) bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam lingkup waktu yang lebih pendek yang berlangsung secara kontinyu dari periode ke periode. Dengan demikian, RPJPD akan berfungsi menjamin keterkaitan dan keberlanjutan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek guna mencapai tujuan utama pembangunan jangka panjang yang telah ditentukan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kota Binjai yang disusun dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai Tahun 2020-2040. RPJPD Kota Binjai disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan batas

kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Kota Binjai, sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian, perdagangan, dan industri, namun juga menghadapi tantangan seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, serta keterbatasan infrastruktur dasar akibat urbanisasi yang pesat. Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional dan kurangnya diversifikasi ekonomi menjadi tantangan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Masalah sosial, seperti rendahnya akses pendidikan berkualitas dan kesenjangan layanan kesehatan, turut menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, posisi geografis yang strategis dan potensi agrikultur serta pariwisata memberikan peluang besar bagi Kota Binjai untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan teknologi modern.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kota Binjai akan mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan industri berbasis teknologi dan kreatif, memperkuat sektor pertanian dengan teknologi berkelanjutan, serta meningkatkan akses pasar melalui digitalisasi. Dalam sektor sosial, pemerintah berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, penambahan ruang terbuka hijau, dan pengelolaan limbah akan diutamakan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan sinergi kebijakan nasional dan global, Pemerintah Kota Binjai berkomitmen untuk melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengacu pada sasaran Indonesia Emas, maka disusunlah Visi Indonesia Tahun 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, melalui 8 (delapan) misi atau

agenda transformasi, yaitu transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta kesinambungan pembangunan. Secara garis besar, kedelapan misi atau agenda transformasi tersebut dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan atau sasaran pokok yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Kota Binjai sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu memberikan sumbangsih pada pencapaian cita-cita nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Tidak hanya itu, Kota Binjai juga perlu memberikan respons yang tepat terhadap megatrend global berdasarkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki, hal ini guna memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di tingkat global bagi pembangunan sosial, ekonomi, industri, teknologi, dan hal lainnya bagi Kota Binjai.

Penyusunan dokumen RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 mengikuti arahan kebijakan Nasional dan juga Provinsi Sumatera Utara, mengingat Kota Binjai harus mendukung perwujudan Indonesia Emas melalui visi RPJPN berupa “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” maupun visi RPJPD Sumatera Utara melalui “Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan” yang dijadikan orientasi akhir guna mendukung cita-cita Nasional. Selain itu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 7 bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas, juga perlu adanya pendekatan secara substansi HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial), dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap factor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah

Kota Binjai. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah sehingga arah pembangunan Kota Binjai menjadi lebih terarah, konsisten dan relevan dengan tujuan yang diharapkan oleh Nasional dan Provinsi, serta masyarakat Kota Binjai.

Penyusunan RPJPD Kota Binjai dilakukan melalui proses partisipatif yang melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Proses ini mencakup Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan lokal. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait prioritas pembangunan, sementara sektor swasta berkontribusi dalam diskusi mengenai investasi dan pengembangan ekonomi. Pendekatan inklusif ini memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan Kota Binjai lebih responsif terhadap kondisi nyata, sekaligus mendukung visi jangka panjang yang berkelanjutan.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa peraturan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
  11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
  21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

- Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  27. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala

- Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
28. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 70);
  32. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33).

### **1.3. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Binjai tidak terlepas dari hierarki Perencanaan Pembangunan Nasional

maupun Perencanaan Pembangunan Provinsi, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

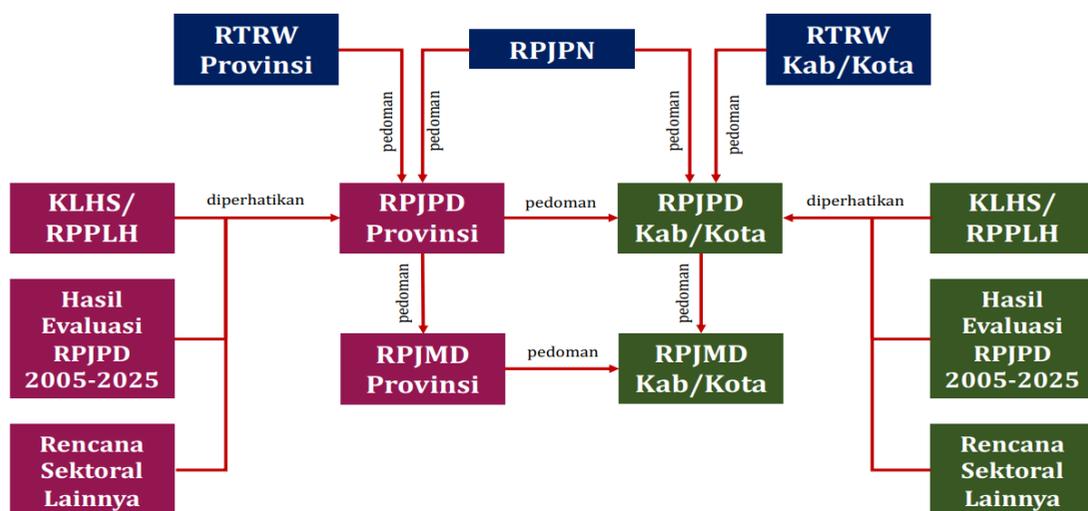
RPJPD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 memperhatikan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, dan sebagaimana pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJPD juga berpedoman pada RTRW sehingga RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 berpedoman pada RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040.

RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 ini memiliki hubungan dan tidak terlepas dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan akan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sehingga perlu adanya sinkronisasi kebijakan dengan dokumen perencanaan lain yang relevan. Adapun keterkaitan dokumen RPJPD Kota Binjai dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 merupakan implementasi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang ada di Kota Binjai.
- b. Dokumen RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 merupakan pedoman umum dalam penyusunan RPJMD dan Renstra OPD di lingkungan Pemerintah Kota Binjai pada periode yang sama.

- c. Dokumen RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 menjadi dasar gambaran arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Kota Binjai.
- d. Dokumen RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran operasional lima tahunan yang dilakukan melalui RPJMD Kota Binjai yang akan diturunkan menjadi Renstra setiap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Binjai.
- e. Dokumen RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 juga memperhatikan dan menyelaraskan dengan dokumen RTRW dan KLHS RPJPD yang ada di Kota Binjai sesuai dengan periodesasinya.

**Gambar 1. 1. Hubungan RPJPD Kota Binjai dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024 (diolah)

Dengan melihat gambar tersebut, dalam rangka untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat sehingga RPJPD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu.

**a. Hubungan Antara RPJPD dan RPJMD Kota Binjai**

RPJMD Kota Binjai merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 dan dibagi menjadi 4 (empat) tahapan periodisasi RPJMD. Sasaran pokok RPJPD pada tahap Pertama akan dijadikan sebagai pedoman pada penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029. Berbagai evaluasi RPJPD periode sebelumnya juga akan digunakan

untuk menyempurnakan dokume perencanaan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029.

**b. Hubungan Antara RPJPD dengan Renstra OPD Kota Binjai**

Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah penjabaran dari RPJMD dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari Renstra OPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Renstra OPD.

**c. Hubungan Antara RPJPD dan RTRW Kota Binjai**

Implementasi RPJPD didasarkan pada RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040, baik dari aspek kebijakan, aspek operasionalisasinya maupun aspek keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Binjai. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kota Binjai dalam RPJPD akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

**d. Hubungan Antara RPJPD dan RPJPN**

RPJPD harus mempedomani RPJPN terkait sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja, baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJPD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJPN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi

pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam penyusunan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 telah memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui penyesuaian arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan.

#### **e. Hubungan Antara RPJPD dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara**

RPJPD Kota Binjai juga harus mempedomani RPJPD Provinsi Sumatera Utara sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja, baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja pada sasaran RPJPD Kota Binjai harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJPD Provinsi Sumatera Utara. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah Kota Binjai harus memerhatikan isu-isu strategi pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk sinkronisasi kebijakan. Selain itu juga untuk memastikan dukungan Pemerintah Kota Binjai dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPD Provinsi dan RPJPN.

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

#### **1.4.1. Maksud**

RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kota Binjai yang pada hilirnya memberikan dukungan agregasi terhadap pencapaian pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara serta cita-cita Indonesia Emas 2045.

#### **1.4.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 adalah:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun atau 4 (empat) periode dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kota Binjai;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai;
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas dan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dengan Kota Binjai.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dokumen RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat penjelasan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang; maksud dan tujuan; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen (RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJMD, Renstra, RTRW); serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat penjelasan gambaran umum tentang kondisi Kota Binjai sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek daya saing daerah; aspek pelayanan umum; evaluasi hasil RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025; *trend* demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Memuat penjelasan permasalahan daerah paling utama dan strategis yang menjadi penghambat dan harus ditangani dengan baik melalui pemanfaatan potensi daerah hingga akhir masa periode pembangunan jangka panjang disertai isu strategis pembangunan daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (Nasional dan Provinsi).

#### **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**

Memuat penjelasan dan penjabaran visi pembangunan jangka panjang Kota Binjai yang memuat 5 (lima) sasaran visi dan 8 (delapan) misi pembangunan jangka panjang Kota Binjai yang merujuk pada muatan RPJPN Tahun 2025-2045 melalui sinkronisasi serta penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045.

#### **BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Memuat penjabaran tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Binjai untuk menjelaskan keterhubungan sasaran pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap 5 tahun selama 4 periode. Sasaran pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode pembangunan jangka panjang Kota Binjai Tahun 2025-2045 yang memuat 17 (tujuh belas) arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dengan menyesuaikan kondisi dan karakteristik Kota Binjai.

#### **BAB VI PENUTUP**

Memuat penjelasan kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Kota Binjai.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2025-2045 ini mengandung hasil analisis gambaran kondisi Kota Binjai, analisis permasalahan pembangunan daerah, serta analisis terhadap isu strategis yang termuat dalam dokumen perencanaan yang ada saat ini, untuk kemudian dianalisis apakah isu tersebut akan menjadi isu krusial dan berdampak terhadap perencanaan pembangunan di Kota Binjai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Aspek-aspek yang menjadi bahan pertimbangan analisis mencakup sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi aspek kondisi geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

#### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Pada masa silam Kota Binjai disebut sebagai sebuah kota yang terletak di antara Sungai Mencirim di sebelah Timur dan Sungai Bingai di sebelah Barat, terletak di antara dua kerajaan Melayu yaitu Kesultanan Deli dan Kerajaan Langkat. Berdasarkan penuturan para leluhur, baik yang dikisahkan atau yang dicitrakan dalam berbagai tulisan yang pernah dijumpai, Kota Binjai itu berasal dari sebuah kampung yang kecil terletak di pinggir Sungai Bingai, kira-kira di Kelurahan Pekan Binjai yang sekarang. Upacara adat dalam rangka pembukaan kampung tersebut diadakan di bawah sebatang pohon Binjai (*Mangifera Caesia*) yang rindang yang batangnya amat besar, tumbuh kokoh di pinggir Sungai Bingai yang bermuara ke Sungai Wampu, sungai yang cukup besar dan dapat dilayari sampan-sampan besar yang berkayuh sampai jauh ke udik.

Di sekitar pohon Binjai yang besar itulah kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan menjadi besar dan luas yang

akhirnya berkembang menjadi bandar atau pelabuhan yang ramai didatangi oleh tongkang-tongkang yang datang dari Stabat, Tanjung Pura, dan juga dari Selat Malaka. Kemudian nama pohon Binjai itulah yang akhirnya melekat menjadi nama Kota Binjai. Konon pohon Binjai ini adalah sebangsa pohon embacang dan istilahnya berasal dari bahasa Karo.

Dalam versi lain yang merujuk dari beberapa referensi, asal-muasal kata "Binjai" merupakan kata baku dari istilah "Binjéi" yang merupakan makna dari kata "ben" dan "i-jéi" yang dalam bahasa Karo artinya "bermalam di sini". Pengertian ini dipercaya oleh masyarakat asli Kota Binjai, khususnya etnis Karo merupakan cikal-bakal Kota Binjai pada masa kini. Hal ini berdasarkan fakta sejarah, bahwa pada masa dahulu kala, Kota Binjai merupakan perkampungan yang berada di jalur yang digunakan oleh "Perlanja Sira" yang dalam istilah Karo merupakan pedagang yang membawa barang dagangan dari dataran tinggi Karo dan menukarnya (barter) dengan pedagang garam di daerah pesisir Langkat.

Perjalanan yang ditempuh Perlanja Sira ini hanya dengan berjalan kaki menembus hutan belantara menyusuri jalur tepi sungai dari dataran tinggi Karo ke pesisir Langkat dan tidak dapat ditempuh dalam waktu satu atau dua hari, sehingga selalu bermalam di tempat yang sama, begitu juga sebaliknya, kembali dari dataran rendah Karo yaitu pesisir Langkat. Para perlanja sira ini kembali bermalam di tempat yang sama pula, selanjutnya seiring waktu menjadi sebuah perkampungan yang mereka namai dengan "Kuta Benjéi".

Pada tahun 1823, Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang mengutus John Anderson ke pesisir Sumatera Timur dan dalam catatannya disebutkan sebuah kampung yang bernama "Ba Bingai". Sejak tahun 1822, Binjai telah dijadikan bandar/pelabuhan dimana hasil pertanian lada yang diekspor adalah berasal dari perkebunan lada di sekitar Ketapangai (Pungai) atau Kelurahan Kebun Lada/ Damai.

Selanjutnya pada tahun 1864, Daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pioner Belanda bernama J. Nienkyis yang mendorong didirikannya Deli Maatschappij pada tahun 1866. Orang Belanda berusaha menguasai Tanah Deli menggunakan politik pecah belah melalui pengangkatan datuk-datuk. Usaha ini ditentang oleh Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat, sementara Datuk Sunggal tidak menyetujui pemberian konsensi tanah kepada perusahaan Rotterdammy oleh Sultan Deli karena tanpa persetujuan. Dibawah kepemimpinan Datuk Sunggal bersama rakyatnya di Timbang Langkat (Binjai) membuat benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda.

Belanda merasa terhina atas tindakan ini dan memerintahkan Kapten Koops untuk menumpas para datuk yang menentang Belanda. Pada 17 Mei 1872 terjadilah pertempuran yang sengit antara datuk/ masyarakat dengan Belanda. Peristiwa perlawanan inilah yang menjadi tonggak sejarah dan ditetapkan sebagai hari jadi Kota Binjai. Perjuangan para datuk/ rakyat terus berkobar dan pada akhirnya pada 24 Oktober 1872 Datuk Kocik, Datuk Jalil, dan Suling Barat dapat ditangkap Belanda dan kemudian pada tahun 1873 dibuang ke Cilacap. Pada tahun 1917 oleh Pemerintah Belanda dikeluarkan Instelling Ordonantie Nomor 12 dimana Binjai dijadikan Gemeente dengan luas 267 Ha.

Pada tahun 1942-1945, Binjai dibawah Pemerintahan Jepang dengan Kepala Pemerintahan Kagujawa (dengan sebutan Guserbu) dan tahun 1944/ 1945 pemerintahan kota dipimpin oleh ketua Dewan Eksekutif J. Runnanbi dengan anggota Dr. R.M. Djulham, Natangsa Sembiring, dan Tan Hong Poh. Pada tahun 1945, (saat revolusi) sebagai Kepala Pemerintahan Binjai adalah R.M. Ibnu. Pada 29 Oktober 1945, T. Amir Hamzah diangkat menjadi Residen Langkat oleh Komite Nasional. Pada masa pendudukan Belanda tahun 1947, Binjai berada dibawah Asisten Residen J. Bunger dan R.M. Ibnu sebagai Wakil Wali Kota Binjai. Pada tahun 1948-1950, Pemerintahan Kota Binjai dipegang oleh ASC More. Tahun 1950-

1956, Binjai menjadi Kota Administratif Kabupaten Langkat dan sebagai Wali Kota adalah OK Salamuddin, kemudian T. Ubaidullah Tahun 1953-1956. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Kota Binjai menjadi otonom dengan Wali Kota pertama S.S. Parumuhan.

Dalam perkembangannya Kota Binjai sebagai salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sumatera Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, wilayah kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 km<sup>2</sup> dengan 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993, maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. Perubahan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 140-1395/SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang Pembentukan 6 Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 desa menjadi kelurahan.

### **2.1.1. Aspek Geografi**

Pembahasan aspek geografi memperlihatkan kondisi fisik wilayah Kota Binjai saat ini. Menurut hasil lokakarya Ikatan Geografi Indonesia (IGI) di Semarang pada tahun 1988, dijelaskan bahwa geografi merupakan persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan (Aksa, Utaya, & Bachri, 2019). Aspek ini akan menjelaskan luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

### **1. Letak dan Kondisi Geografi**

Kota Binjai merupakan kota yang terdekat dengan ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan dan diapit oleh dua kabupaten besar yaitu Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli

Serdang. Secara astronomis Kota Binjai terletak diantara koordinat 3° 31' 40" – 3° 40' 2" Lintang Utara dan 98° 27' 3" – 98° 32' 32" Bujur Timur. Kota Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidangro yang meliputi kawasan Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang serta Kabupaten Karo.

Kota Binjai terletak 21 km di sebelah Barat Kota Medan yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang terhubung oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara dengan Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, Kota Binjai terletak di daerah strategis dimana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari Provinsi Aceh. Selain itu, Kota Binjai juga terhubung dengan jaringan jalan Tol Trans Sumatera yang akan memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan barang dan orang antar kota maupun provinsi di Pulau Sumatera.

Posisi geografis Kota Binjai yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, berdekatan dengan Kota Medan, memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dan infrastruktur kota. Sebagai kota penyangga Medan, Binjai memiliki akses strategis ke jalur transportasi utama, seperti jalan tol dan jalur kereta api, yang memudahkan mobilitas barang dan orang. Hal ini menjadikan Binjai sebagai wilayah transit penting dalam rantai distribusi barang, terutama untuk komoditas pertanian dan perdagangan yang menjadi sektor unggulan kota. Posisi ini juga membuka peluang bagi pengembangan sektor logistik dan perdagangan yang dapat menarik investasi dari sektor swasta.

Namun, posisi geografis ini juga membawa tantangan bagi infrastruktur Kota Binjai. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti sistem transportasi publik yang belum memadai, tekanan terhadap jaringan jalan akibat arus kendaraan dari dan ke Medan, serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan air bersih dan sanitasi menjadi tantangan penting yang harus diatasi. Selain

itu, posisi yang dekat dengan kawasan metropolitan juga meningkatkan laju urbanisasi di Binjai, sehingga mempercepat kebutuhan pembangunan infrastruktur perumahan, kesehatan, pendidikan, dan ruang publik. Untuk menghadapi tantangan ini, Kota Binjai perlu mengoptimalkan perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan agar dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan populasi akibat dampak posisi geografisnya yang strategis.

## 2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Binjai adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Kota Binjai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata  $\pm 28$  meter di atas permukaan laut, terletak sekitar 21 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Luas wilayah Kota Binjai sebesar 90,45 km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kota Binjai hanya 0,08 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Wilayah administrasi kota dengan luas 9.371 hektar terdiri dari 5 Kecamatan. Berdasarkan data BPS Kota Binjai, luas wilayah Kota Binjai mencakup sebesar 9.023 hektar.

**Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kota Binjai**

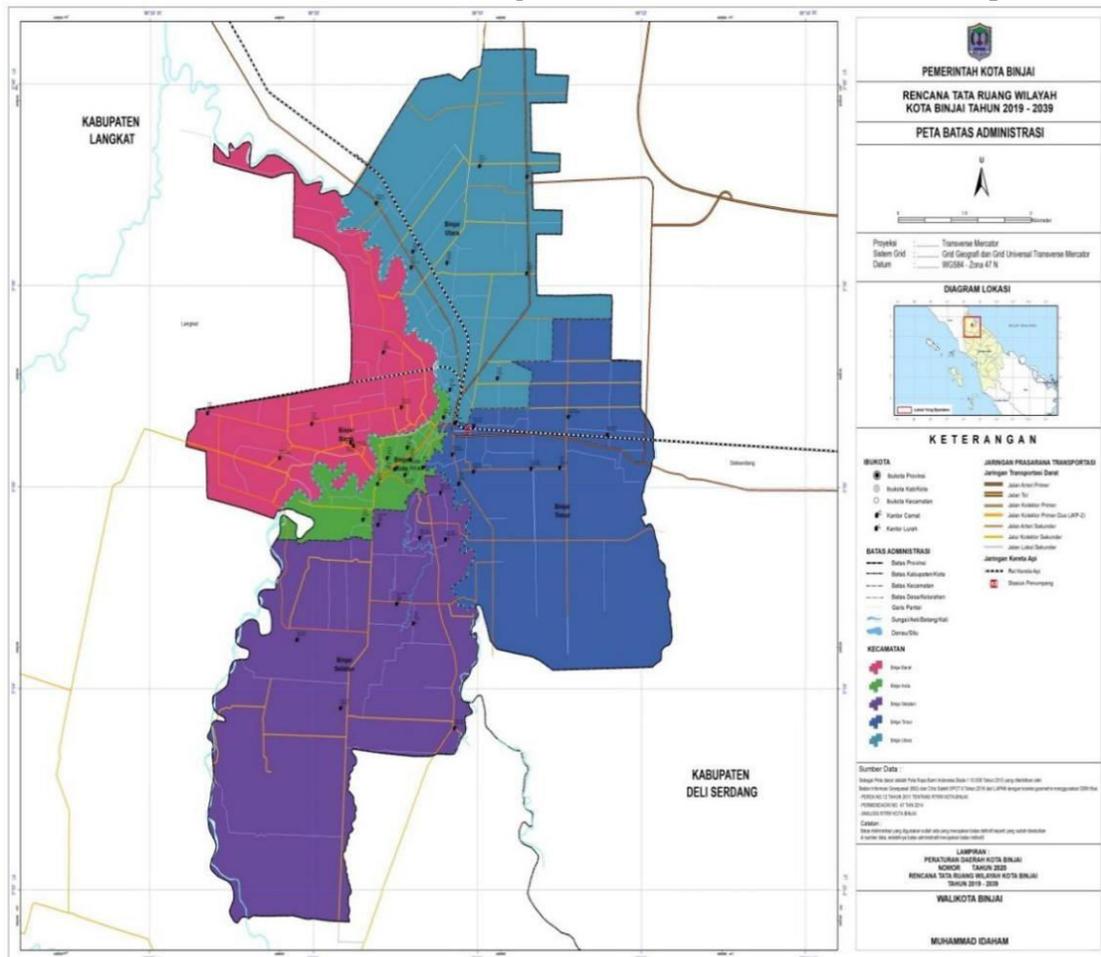
Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	Luas Wilayah Menurut BPS (ha)	Luas Wilayah Menurut Permendagri 47/2017 (ha)	Persentase (%)
Binjai Selatan	Binjai Estate	8	61	2.996	3.056,73	32,62
Binjai Kota	Kartini	7	51	412	387,44	4,13
Binjai Timur	Timbang Langkat	7	65	2.170	2.366,83	25,25
Binjai Utara	Kebun Lada	9	64	2.359	2.159,42	23,04
Binjai Barat	Limau Mungkur	6	43	1.086	1.401,16	14,95
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>284</b>	<b>9.023</b>	<b>9.371,58</b>	<b>100,00</b>

Sumber: RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040 dan BPS Kota Binjai

Kecamatan Binjai Selatan merupakan wilayah terluas di Kota Binjai luasnya mencapai 29,96 km<sup>2</sup> atau sekitar 32,62 % dari total luas Kota Binjai, sedangkan Kecamatan Binjai Kota merupakan wilayah terkecil di Kota Binjai dengan luas hanya sebesar 4,12 km<sup>2</sup> atau sekitar 4,13 % dari total luas Kota Binjai. Kecamatan Binjai Utara merupakan wilayah di Kota Binjai yang memiliki jumlah

kelurahan paling banyak dibandingkan wilayah lain di Kota Binjai yaitu sebanyak 9 kelurahan, sedangkan Kecamatan Binjai Barat merupakan wilayah di Kota Binjai dengan jumlah kelurahan paling sedikit yaitu sebanyak 6 kelurahan.

**Gambar 2. 1. Batas Wilayah Administrasi Kota Binjai**



Sumber: RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

Secara administratif, wilayah Kota Binjai memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat.

### 3. Kondisi Topografi

Karakteristik fisik dasar Kota Binjai pada umumnya berada pada topografi yang datar yang memanjang dari bagian Utara Kota Binjai sampai bagian wilayah Selatan Kota Binjai dengan bentang

alam yang tidak berbukit, hanya sebagian kecil saja daerah wilayah Kota Binjai yang memiliki bentang alam yang berbukit yaitu di wilayah bagaian Selatan. Sehingga secara umum kawasan Kota Binjai merupakan wilayah dengan kemiringan yang relatif landai dengan tingkat kelerengan 0,8% atau datar sehingga memiliki tingkat kestabilan lereng yang sangat tinggi. Secara keseluruhan lahan yang ada di wilayah perencanaan termasuk dalam kategori tingkat kemudahan pemanfaatan tinggi.

Kota Binjai secara keseluruhan berada di ketinggian berkisar antara 3 sampai 76,5 mdpl. Sehingga secara umum daerah Kota Binjai adalah kawasan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 28 mdpl. Topografi Kota Binjai yang didominasi oleh wilayah datar dengan kemiringan sangat rendah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Dengan bentang alam yang landai dan kestabilan lereng yang tinggi, Kota Binjai memiliki tingkat kemudahan tinggi dalam pemanfaatan lahan. Hal ini memfasilitasi pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, perumahan, dan fasilitas publik lainnya dengan biaya yang relatif lebih rendah karena tidak ada kebutuhan untuk stabilisasi tanah yang kompleks atau penggalian besar. Selain itu, kemiringan tanah yang rendah juga meminimalkan risiko bencana alam seperti tanah longsor, yang sering menjadi tantangan di wilayah dengan topografi berbukit.

Dari sisi pengelolaan infrastruktur, lahan datar memudahkan pembangunan jaringan transportasi dan utilitas publik, seperti sistem distribusi air, listrik, dan drainase. Namun, ada tantangan terkait pengelolaan air, terutama dalam sistem drainase dan pengendalian banjir. Dengan topografi datar, air cenderung mengalir lebih lambat, yang dapat meningkatkan risiko genangan atau banjir di beberapa wilayah, terutama saat curah hujan tinggi. Oleh karena itu, perlu ada perencanaan yang matang dalam pembangunan sistem drainase yang efektif untuk

mengalirkan air hujan secara optimal. Selain itu, pembangunan ruang terbuka hijau dan wilayah resapan air menjadi penting untuk mengimbangi potensi aliran permukaan yang tinggi. Secara keseluruhan, topografi datar Kota Binjai memberikan keuntungan besar dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir.

#### 4. Kondisi Klimatologi

Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan pada tiap bulan terjadinya musim.

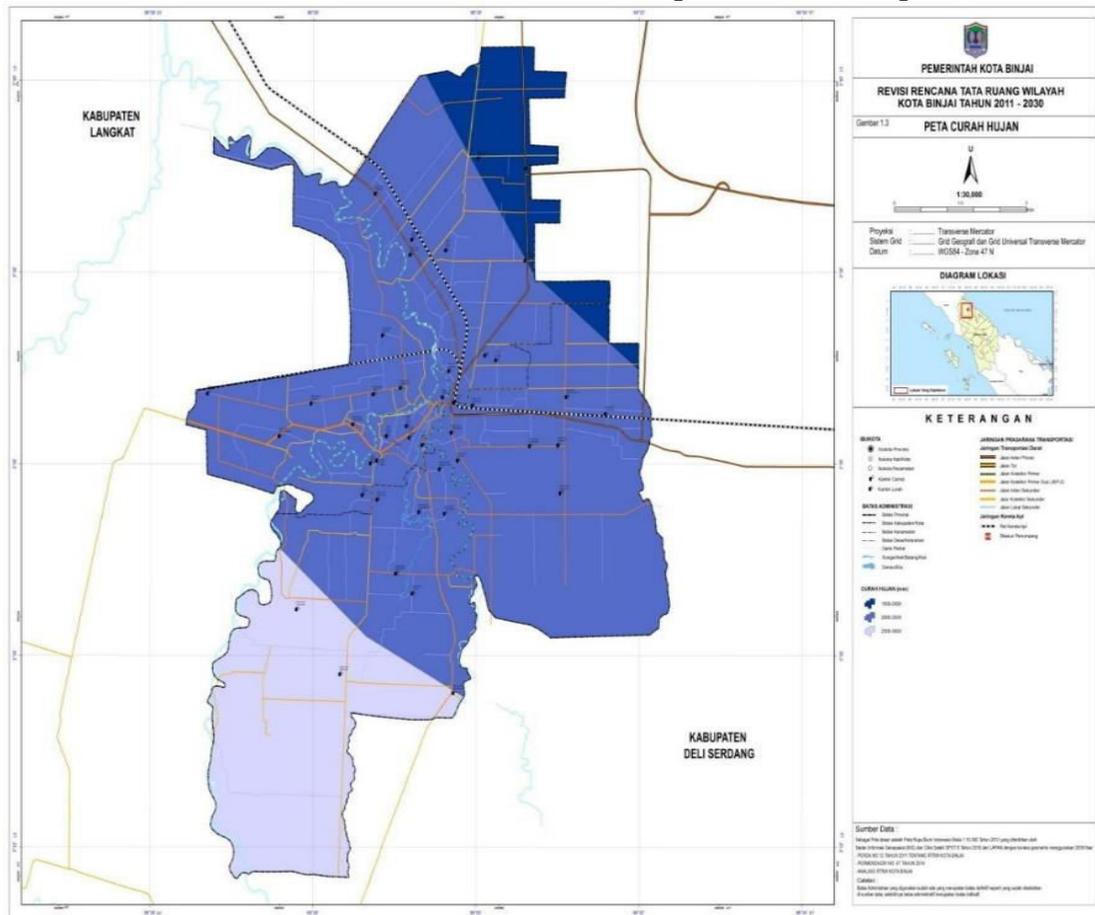
**Tabel 2. 2. Kondisi Curah dan Hari Hujan Kota Binjai**

Kecamatan	Rata-rata Tahun 2023	
	Hari Hujan	Jumlah Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )
Binjai Selatan	16	283,50
Binjai Kota	-	-
Binjai Timur	14	178,50
Binjai Utara	12	185,42
Binjai Barat	14	220,67

Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Kecamatan yang memiliki curah hujan tertinggi di tahun 2023 adalah Kecamatan Binjai Selatan sebesar 283,5 mm<sup>3</sup>/16 hari hujan dan Kecamatan Binjai Barat sebesar 220,67 mm<sup>3</sup>/14 hari hujan.

**Gambar 2. 2. Peta Curah Hujan Kota Binjai**



Sumber: RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

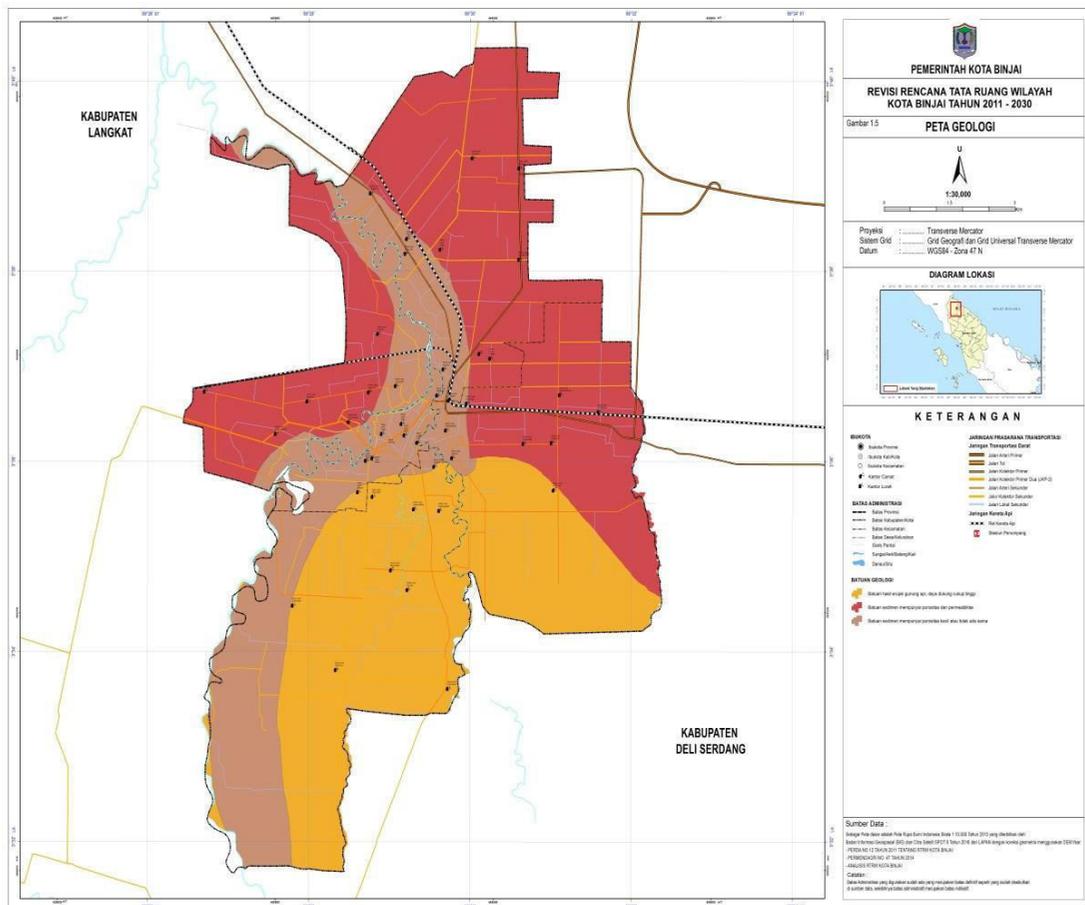
Perubahan iklim diprediksi akan memberikan dampak signifikan bagi Kota Binjai di masa mendatang, antara lain peningkatan suhu yang dapat mempengaruhi pola cuaca dan kesehatan masyarakat, serta variabilitas curah hujan yang berpotensi menyebabkan curah hujan ekstrem dan periode kekeringan yang lebih panjang, yang berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Meskipun tidak berada di tepi laut, kenaikan permukaan laut dapat mempengaruhi aliran sungai dan kualitas sumber daya air, sementara frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir dan tanah longsor mungkin meningkat, menambah risiko bagi daerah yang sebelumnya aman. Selain itu, kesehatan masyarakat dapat terancam oleh penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor, seperti demam berdarah, akibat perubahan suhu dan kelembapan. Untuk menghadapi tantangan ini, Kota Binjai perlu mengimplementasikan strategi adaptasi komprehensif, termasuk penguatan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta kebijakan

pembangunan berkelanjutan yang mendukung mitigasi perubahan iklim guna melindungi masyarakat dan lingkungan di masa depan.

### 5. Kondisi Geologi

Secara geologis, wilayah Kota Binjai memiliki struktur dan satuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik. Kondisi geologi di Kota Binjai terdiri dari batuan hasil erupsi gunung api, daya dukung cukup tinggi, batuan sedimen mempunyai porositas dan permeabilitas, dan batuan sedimen mempunyai porositas kecil atau tidak ada sama. Kondisi geologi di Kota Binjai dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2. 3. Peta Geologi Kota Binjai**



Sumber: RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

Berdasarkan data yang diperoleh, maka secara garis besar jenis tanah dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis tanah yaitu Andosol dan Aluvial. Kedua jenis tanah ini menyebar secara merata di wilayah Kota Binjai. Untuk tanah yang berjenis terdapat di Kecamatan Binjai Kota dengan luas 297 ha, Kecamatan Binjai Selatan dengan luas 2.949 ha, Kecamatan Binjai Timur dengan

luas 585 ha, dan Kecamatan Binjai Barat dengan proporsi luas 7 Ha. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam, kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak (*smearly*), kadang-kadang berpadas lunak, agak asam, kejenuhan basa tinggi dan daya absorpsi sedang, kelembaban tinggi, permeabilitas sedang dan peka terhadap erosi.

Sedangkan untuk jenis tanah Aluvial terdapat di Kecamatan Binjai Selatan dengan proporsi luas sebesar 47 ha, Kecamatan Binjai Kota dengan luas 438 ha, Kecamatan Binjai Timur dengan luas 1.798 ha, Kecamatan Binjai Barat seluas 1.407 ha, dan Kecamatan Binjai Utara sebesar 2.234 ha. Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk Aluvium, tekstur beranekaragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat, PH bermacam-macam, kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai dan daerah cekungan (depresi), sehingga baik untuk pengembangan pertanian karena tersedia cukup mineral yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan dan jika digunakan untuk bangunan tanah jenis ini mempunyai daya tahan yang kuat karena merupakan endapan tanah liat yang bercampur pasir halus.

Struktur geologi wilayah Kota Binjai terbagi kedalam 3 (tiga) jenis batuan. Jenis bantuan tersebut adalah *alluvium*, konglomerat, dan *extrusive intermediate pyroclastic* yang menyebar di seluruh wilayah Kota Binjai. Bentang alam Kota Binjai sendiri lebih berada pada bentang alam yang datar meskipun ada beberapa bagian Kota Binjai yang berada pada bentang perbukitan sehingga di dalam melakukan pembangunan tidak begitu terdapat kendala. Berdasarkan kemungkinan terjadinya bencana alam geologi berupa gempa bumi, maka wilayah Kota Binjai termasuk ke dalam skala daerah yang mempunyai tingkat kebesaran gempa berkisar antara IV hingga V (skala MMI), yaitu skala IV – V yang

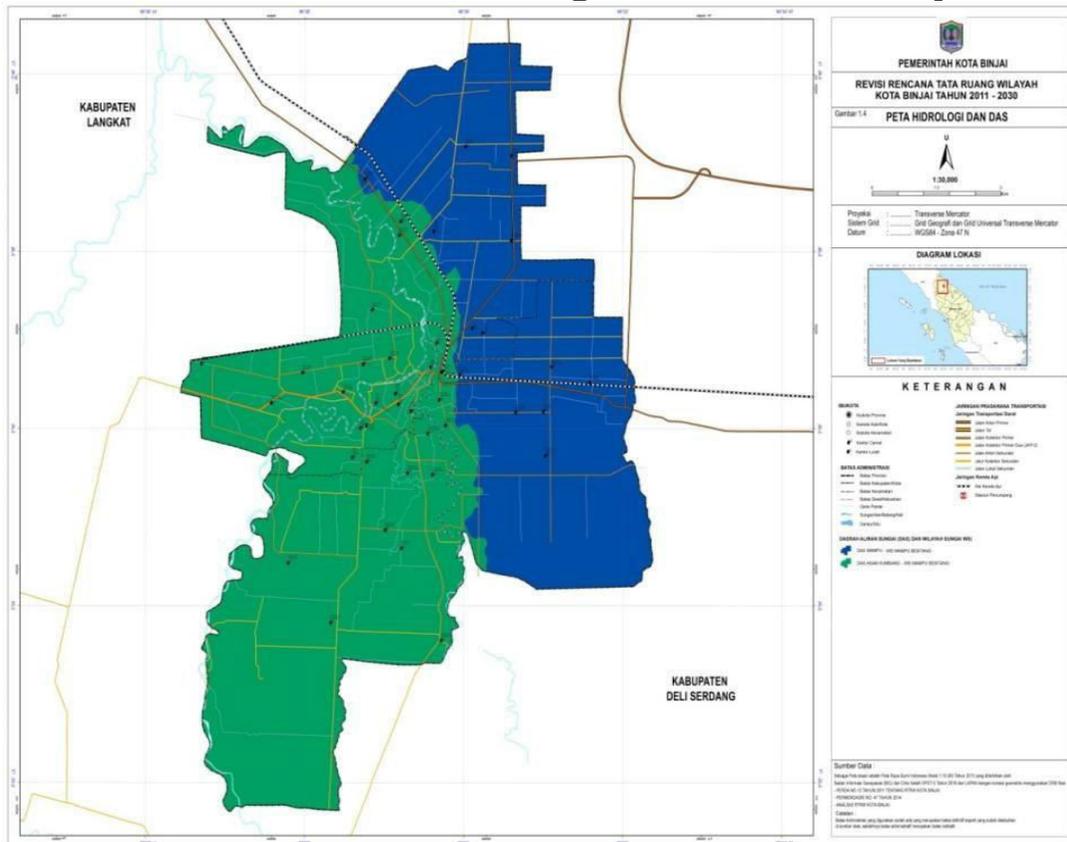
tersebar di bagian Selatan Galang dan Medan, daerah Binjai hingga Pulau Tiga bagian Barat Laut Pulau Sumatera, dengan bahaya guncangan termasuk ke dalam zona D : 0,25-0,30 g yang tersebar pada bagian Utara Danau Toba, Kabanjahe, Gunung Sinabung menerus ke arah Barat-Barat Laut Laubaleng, Mardinding, DK. Tusamserang, Selatan Bohorok, Buluh, Kutacane hingga Gunung Bandhara (Mebidangro).

Kota Binjai menunjukkan potensi gempa bumi sebagai salah satu ancaman utama yang dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan keselamatan masyarakat. Kondisi ini menuntut perhatian khusus dalam perencanaan dan desain struktur bangunan, agar dapat memenuhi standar ketahanan terhadap gempa. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan risiko geologi ini ke dalam rencana pembangunan jangka panjang, dengan melakukan kajian geoteknik yang mendalam, menerapkan regulasi yang ketat terkait konstruksi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana.

## **6. Kondisi Hidrologi**

Kota Binjai memiliki 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS). Dimana sebagian besar wilayah bagian Barat termasuk kedalam DAS Wampu dan sebagian kecil wilayah daerah Timur termasuk kedalam DAS Belawan. Kota Binjai dilalui oleh 3 (tiga) sungai besar yang menjadi sumber air permukaan yaitu Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan.

**Gambar 2. 4. Peta Hidrologi dan DAS Kota Binjai**



Sumber: RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

Sungai Bangkatan merupakan anak Sungai Mencirim yang bertemu di Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, begitu juga Sungai Mencirim merupakan anak sungai dari Sungai Bingai yang keduanya Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara. Pada Tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala regional di Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung layanan air minum perpipaan di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang). SPAM Regional Mebidang direncanakan akan melayani kebutuhan air minum untuk 80.000 Sambungan Rumah (SR) atau setara 400.000 jiwa.

Sumber air baku SPAM Regional Mebidang berasal dari Sungai Bingai yang melintasi wilayah Kabupaten Langkat dan Kota Binjai dengan kapasitas total sebesar 2.200 liter per detik. Total Luas Daerah Aliran Sungai yang berpengaruh terhadap Kota Binjai, khususnya Kecamatan Binjai Kota dan Kecamatan Binjai Utara seluas 422 km<sup>2</sup>. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan atas kejadian banjir yang sering terjadi di Kota Binjai.

**Tabel 2. 3. Kuantitas Air Permukaan Kota Binjai**

Sungai	Panjang (km)	Luas (km <sup>2</sup> )	Area	Debit Maksimum (diambil pada musim penghujan)
Sungai Bingai	15	150	Binjai Utara	0,7 m <sup>3</sup> /det
Sungai Mencirim	15	150	Binjai Utara	0,3 - 0,5 m <sup>3</sup> /det
Sungai Bangkatan	9	45	Binjai Selatan	0,1 - 0,3 m <sup>3</sup> /det

Sumber: RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

Dari hasil monitor Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai yang dilakukan setiap setahun sekali kualitas air sungai dapat dilihat dari empat parameter penting berikut:

- DO untuk Sungai Bingai Hulu dan Sungai Mencirim memiliki DO dibawah 3 sehingga peruntukannya masuk kedalam kelas IV. Kualitas DO yang masih memenuhi untuk kelas I adalah Sungai Mencirim;
- BOD untuk ketiga sungai sudah melebihi baku mutu karena diatas 12 mg/l yang merupakan standar untuk kelas IV;
- Kadar Phospat sangat tinggi untuk ketiga sungai karena diatas baku mutu 5 mg/l yang merupakan standar untuk kelas IV;
- Kadar Fe cukup tinggi untuk kelas I tetapi masih memenuhi untuk pengolahan air baku air minum secara konvensional dimana baku mutu berada di bawah 5 mg/l.

**Tabel 2. 4. Kualitas Air Permukaan Kota Binjai**

Parameter	Sungai Bingai	Sungai Mencirim	Sungai Bangkatan
Warna	Jernih	Coklat	Jernih
Bau	Tak berbau	Tidak berbau	Tak berbau
Temperatur (°C)	26.4 – 28.3	28.9 – 29	28.6 – 30.4
pH	7 – 7.54	7.24 – 7.3	6.96 – 7.11
DHL (Umhos/cm)	0.30 – 256	256	157 – 256
TDS (mg/l)	56 – 227	227	140 – 227
TSS (mg/l)	9 – 7.5	9	3 – 9
DO (mg/l)	2.1 – 4.5	2.1	7.4
BOD (mg/l)	16 – 17.0	17.5	7.5
COD (mg/l)	28	31	12
NO <sub>2</sub> (mg/l)	0.06 – 0.08	0.013	0.05 – 0.15
NO <sub>3</sub> (mg/l)	2.8 – 3.24	0.04 – 0.06	3.15 – 3.24
NH <sub>3</sub> (mg/l)	0.17 – 10.2	0.17	0.03 – 0.15
PO <sub>4</sub> (mg/l)	8.8 – 10.6	17 – 21.6	11.6 – 15.9
Minyak (ug/l)	0.1 - 0.6	0.5	0.2 – 0.5

Parameter	Sungai Bingai	Sungai Mencirim	Sungai Bangkatan
Lemak (ug/l)	0.6 – 1.10	0.5	0.2 – 0.5
Fe (mg/l)	0.51 – 0.67	1 – 1.36	1.36
Mn (mg/l)	0.001 – 0.003	0.002 – 0.003	0.04
Klorin Bebas	0.09 – 0.12	n.a.	0.3 – 0.45

Sumber: RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

Kualitas air di Kota Binjai memiliki dampak signifikan terhadap pemanfaatan sumber daya air oleh masyarakat dan sektor pertanian. Dengan tingkat oksigen terlarut (DO) yang rendah dan BOD yang melebihi baku mutu, kualitas air sungai tidak memenuhi syarat untuk digunakan langsung sebagai air minum tanpa proses pengolahan yang intensif. Pencemaran air, terutama di Sungai Bingai dan Sungai Mencirim, dapat mengancam kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada sumber air tersebut. Di sisi lain, sektor pertanian juga terpengaruh oleh kualitas air, dimana air yang terkontaminasi dapat mempengaruhi hasil pertanian dan kesehatan tanaman, serta berpotensi mengalirkan zat berbahaya kedalam rantai makanan. Dengan demikian, diperlukan strategi pengelolaan sumber daya air yang baik, termasuk program pemantauan dan pemulihan kualitas air, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai agar dapat mendukung pertanian berkelanjutan dan memastikan akses air bersih yang aman bagi semua.

## 7. Zonasi Pola Ruang Kota Binjai

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040, rencana pola ruang wilayah Kota Binjai meliputi peruntukan lindung seluas kurang lebih 1.671 hektar dan kawasan peruntukan budidaya seluas kurang lebih 7.630 hektar.

### 1) Kawasan Peruntukan Lindung

Pola ruang kawasan peruntukan lindung di wilayah Kota Binjai secara umum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung

kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana. Sasarannya adalah untuk:

- a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
- b. Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Rencana pola ruang kawasan peruntukan lindung yang terdapat di Kota Binjai terdiri dari:

a) Kawasan Perlindungan Setempat

Bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman segar, indah dan bersih. Rencana kawasan perlindungan setempat di wilayah Kota Binjai meliputi sempadan sungai yang merupakan garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

b) Kawasan Cagar Budaya

Merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik serta pelestarian lingkungan alami yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Binjai. Berdasarkan kriteria tersebut bangunan kawasan cagar budaya di Kota Binjai adalah sebagai berikut:

- Stasiun Kereta Api Kota Binjai;
- Kantor Walikota Binjai;
- Pengadilan Agama Kota Binjai;
- Masjid Raya Kota Binjai;
- Kelenteng Setia Budha dan Kuil Hindu; dan

- Kawasan bangunan rumah-rumah tua di sekitar Pasar Tavip dan Jalan Kapten Muslim.

Rencana pengelolaan bangunan bersejarah direkomendasikan untuk tetap memfungsikan kondisi awal bangunan tersebut, namun perlu ditetapkan peraturan bangunan untuk tidak merubah kondisi arsitektur bangunan dan untuk selalu melakukan pemeliharaan agar kondisi bangunan tidak rusak.

**Tabel 2. 5. Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Binjai**

No.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas (ha)	Persentase (%)
1	RTH Hutan Kota	1.244,00	66,38
2	RTH Taman Kota	29,00	1,54
3	RTH Pemakaman	12,00	0,64
4	RTH Sempadan Jalur Kereta Api	58,00	3,09
5	RTH Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	92,00	4,90
6	RTH Sempadan Sungai	236,00	12,59
7	RTH Taman Lingkungan	203,00	10,83
	<b>Jumlah</b>	<b>1.874,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

#### c) Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, dengan rincian 20 (dua puluh) persen diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat.

#### 2) Kawasan Peruntukan Budidaya

Pola ruang kawasan budidaya perkotaan penetapannya didasarkan pada kriteria yang meliputi aspek daya dukung atau kesesuaian lahan yang dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan fungsional perkotaan, serta aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan budidaya di wilayah Kota Binjai pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, sumber daya alam

dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia untuk menyetarakan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kawasan peruntukan budidaya yang akan dikembangkan di Kota Binjai meliputi:

a) Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian di Kota Binjai ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan pangan, pelestarian komoditas khas lokal, pengembangan pasar produk dan hasil produk pertanian kota, pengembangan kontribusi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, penyaring polusi air dan tanah, dan keberlanjutan iklim mikro Kota Binjai yang sejuk dan nyaman. Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Kota Binjai ditetapkan pada lahan-lahan pertanian yang beririgasi, meliputi:

- Daerah irigasi pada Kecamatan Binjai Selatan meliputi Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Tanah Seribu, Kelurahan Pujidadi dan Kelurahan Bhakti Karya seluas kurang lebih 614 Ha;
- Daerah irigasi pada Kecamatan Binjai Timur meliputi Kelurahan Sumber Mulyo Rejo seluas lebih kurang 36 Ha.

b) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Pertambangan di wilayah Kota Binjai meliputi:

- Kawasan Depo LPG Pertamina Tandem di Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara;
- Kawasan Pengeboran Gas di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara;
- Kawasan Gardu Induk Listrik di Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara.

Rencana pengembangan kawasan minyak dan gas bumi, berupa:

- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana terhadap bencana kecelakaan ledakan dan kebakaran di Depo LPG, Gardu Induk Listrik, dan Kawasan Pengeboran Gas;

- Pengendalian kegiatan pada radius 50 meter dari batas Depo LPG, Gardu Induk Listrik, maupun pengeboran gas sebagai batas daerah rawan kecelakaan ledakan dan kebakaran sebagai kawasan penyangga;
- Pengembangan prasarana dan Ruang Terbuka Hijau pada bagian pinggir kawasan.

#### c) Kawasan Peruntukan Industri

Merupakan kawasan yang diperuntukkan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kawasan Peruntukan Industri memiliki fungsi antara lain:

- Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
- Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
- Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan;
- Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Rencana kawasan peruntukan industri yang akan dikembangkan di Kota Binjai diperuntukkan bagi:

- Industri besar dan menengah dikembangkan pada Kawasan Peruntukan Industri Binjai yang berada di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur pada lahan seluas lebih kurang 132 hektar;
- Industri kecil dan rumah tangga makanan dan minuman berbasis kebutuhan wisata dan berbahan baku komoditas hasil pertanian yang tidak menimbulkan polusi dapat berlokasi di kawasan peruntukan industri ini, kawasan permukiman dan diarahkan berbentuk kluster;

- Pergudangan regional, baik kebutuhan distribusi dan koleksi bahan baku atau produksi industri maupun kebutuhan transportasi barang regional bagi Kota Binjai berada pada kawasan peruntukan industri.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan sentra industri di Kota Binjai meliputi:

- Industri-industri besar dan menengah yang telah memiliki izin dan beroperasi di Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Selatan, dan Kecamatan Binjai Barat tidak boleh melakukan pengembangan kapasitas produksi, penambahan volume produksi dan perluasan lahan, dan secara bertahap diarahkan pada kawasan industri di Kecamatan Binjai Timur;
- Industri kecil dan rumah tangga yang menimbulkan polusi diarahkan relokasi ke Kawasan Industri Binjai dan berdekatan dengan kawasan permukiman dan kawasan wisata di Kecamatan Binjai Selatan dengan mempertimbangkan pengurangan dampaknya terhadap lingkungan;
- Pengendalian pembangunan kegiatan industri pada kawasan industri di luar Kawasan Industri Binjai dengan peraturan zonasi;
- Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di pinggiran Kawasan Industri Binjai sebagai kawasan penyangga;
- Pengembangan sarana dan prasarana bagi kawasan industri mendukung operasional pergerakan barang dan penumpang yang lancar serta mendukung meminimalisasi pencemaran lingkungan (suara, udara, air, dan tanah).

#### d) Kawasan Pariwisata

Rencana pengembangan kegiatan pariwisata dan rekreasi yang direncanakan mencakup obyek wisata dan rekreasi, serta sarana pariwisata dan rekreasi. Obyek wisata dan rekreasi yang dikembangkan meliputi wisata bangunan

bersejarah, wisata belanja dan kuliner, dan wisata alam dan argowisata. Kawasan pariwisata di Kota Binjai berupa:

- Kawasan pariwisata alam ditetapkan pada:
  - Kawasan pariwisata Sungai Bingai (Pantai SB) yang terdapat di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan;
  - Kawasan *Botanical Garden* di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan berupa lahan pertanian dan kebun rambutan Binjai yang dapat difungsikan sebagai RTH, wisata, penelitian, dan pengembangan pertanian. Pengembangan kawasan wisata pertanian *Botanical Garden* ditujukan bagi: pelestarian komoditas khas lokal, pengembangan pasar produk, dan hasil produk pertanian kota dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan, pengembangan kontribusi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, penyaring polusi air dan tanah, dan keberlanjutan iklim mikro Kota Binjai yang sejuk dan nyaman; dan
  - Sungai Bingai yang membelah Kota Binjai berpotensi dikembangkan menjadi wisata air dan *river front*.
- Kawasan wisata budaya mencakup:
  - Kompleks bersejarah Stasiun Kereta Api Binjai;
  - Masjid Raya Kota Binjai di Jalan Wahid Hasyim, Kecamatan Binjai Kota;
  - Kelenteng Setia Budha dan Kuil Hindu di Kecamatan Binjai Kota;
  - Kantor Wali Kota Binjai di Kecamatan Binjai Kota;
  - Bangunan-bangunan tua di sekitar Pasar Tavip dan Jalan Kapten Muslim;
  - Bangunan sejarah Gedung Pengadilan Agama Kota Binjai di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Kartini;
  - Bangunan-Bangunan bersejarah sebagai hunian penduduk yang tersebar di berbagai lokasi Kota Binjai.

e) Kawasan Permukiman

Kawasan tempat tinggal dengan dominasi utama pemanfaatan berupa perumahan, yang di dalamnya sesuai kebutuhan bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum penunjang lingkungan berupa perdagangan dan jasa, serta fasilitas sosial-budaya.

Adapun perhitungan kebutuhan lahan perumahan Kota Binjai adalah untuk jangka 20 (dua puluh) tahun. Sebagai dasar perhitungan untuk perencanaan perumahan di Kota Binjai, luas kavling perumahan dibagi berdasarkan proporsi 1 : 2 : 3 dengan luas masing- masing  $500 \text{ m}^2$  :  $300 \text{ m}^2$  :  $150 \text{ m}^2$  untuk kavling rumah besar, sedang, dan kecil. Diasumsikan setiap keluarga menempati 1 (satu) rumah dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 5 (lima) jiwa/KK. Berdasarkan hasil analisis dapat diperkirakan kebutuhan lahan bagi perumahan sampai akhir tahun perencanaan yaitu berjumlah 2.008,23 ha yang terdiri dari 583 ha kavling rumah kecil (38.869 unit), 777 ha kavling rumah sedang (25.913 unit), serta 648 ha kavling rumah besar (12.956 unit). Fasilitas perumahan tersebut menyebar di seluruh Kecamatan dengan memanfaatkan kawasan budidaya permukiman yang ada.

Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi antara lain:

- 1) Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;
- 2) Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

f) Kawasan Perdagangan dan Jasa

Ruang yang didominasi kawasan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/ sosial

pendukungnya. Penetapan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Binjai didasarkan pada fungsi dan skala pelayanan sebagaimana Kota Binjai merupakan salah satu pusat pelayanan regional dan pelayanan kota pada kawasan metropolitan Mebidangro.

Arahan pengembangan pola ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Binjai secara umum adalah sebagai berikut:

- Kawasan perdagangan dan jasa untuk pelayanan seluruh wilayah Kota Binjai dialokasikan di Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Kawasan TOD, serta di koridor jalan-jalan utama kota;
- Kawasan pusat kondisi eksisting merupakan kawasan perdagangan dan jasa Kota Binjai dan merupakan pusat perkembangan Kota Binjai selama ini dan terintegrasi dengan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan TOD;
- Kawasan perdagangan dan jasa skala kota (sekunder) maupun skala kecamatan dikembangkan pada masing Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) dan koridor jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
- Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional dikembangkan pada Jalan Soekarno Hatta, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto, Jalan Perintis Kemerdekaan, rencana jalan arteri sekunder terusan Simpang Megawati ke arah selatan, serta SPPK Binjai Timur dan Binjai Utara;
- Perdagangan untuk pelayanan setingkat wilayah kelurahan dan lingkungan permukiman/perumahan yang tidak terjangkau oleh kawasan perdagangan dan jasa dapat dikembangkan menurut kebutuhan di pusat-pusat kelurahan dan di lingkungan-lingkungan permukiman/

perumahan yang terpadu dengan pengembangan pasar-pasar tradisional;

- Perdagangan informal dialokasikan di pusat-pusat perdagangan pada kawasan perdagangan skala kota dan SPPK di pusat-pusat perdagangan kecamatan secara terencana dan terintegrasi dengan lokasi perdagangan sektor formal, yang ditata dengan mempertimbangkan aspek keteraturan, ketertiban, estetika lingkungan, kenyamanan, dan keamanan bagi pergerakan lalu lintas dengan mengedepankan norma-norma pemanfaatan ruang publik secara rasional dan adil.

g) Kawasan Perkantoran

Bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/ sosial pendukungnya untuk menyediakan lahan menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta. Rencana kawasan perkantoran Pemerintah Kota Binjai meliputi:

- 1) Kantor Pemerintahan Kota Lama di Jalan Sudirman, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota;
- 2) Kawasan Kantor Pemerintahan Kota Baru di Jalan Bejomuna, Kelurahan Tunggurono dan Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur.

Sedangkan perkantoran swasta diarahkan di pusat kota Kecamatan Binjai Kota berlokasi pada kawasan perdagangan dan jasa di kawasan pusat kota, kawasan TOD, serta kawasan peruntukan industri berupa kegiatan perkantoran pendukung kegiatan industri.

h) Kawasan Pendidikan

Kawasan Pendidikan terdiri dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Untuk rencana peruntukan kawasan pendidikan SD, SMP dan SMA dialokasikan sesuai

kebutuhan pada setiap SPK. Untuk kawasan pendidikan setingkat perguruan tinggi perlu dilakukan pengaturan terkait dengan cara sebagai berikut:

- Membatasi lokasi pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal yang ada di wilayah pusat Kota Binjai;
- Membatasi pengembangan perguruan tinggi di wilayah pusat Kota Binjai pada lokasi-lokasi yang telah berkembang dengan mewajibkan memenuhi penyediaan prasarana dan parkir yang memadai;
- Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi di Kecamatan Binjai Utara dan Kecamatan Binjai Timur yang juga untuk menarik arah perkembangan kota ke luar dari pusat kota;
- Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan tinggi dengan mewajibkan memenuhi penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.

i) Kawasan Kesehatan

Rencana fasilitas kesehatan terdiri dari rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, dan praktek dokter. Rencana fasilitas kesehatan untuk rumah sakit selain mempertahankan pada lokasi yang ada adalah perlu dikembangkannya rumah sakit di Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) (kecuali di pusat kota), dikarenakan untuk menjaga sebaran fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut arahan rencana pengembangan fasilitas kesehatan adalah:

- Mengarahkan pengembangan fasilitas kesehatan di Wilayah Binjai Timur, Binjai Utara, Binjai Barat dan Binjai Selatan;
- Mempertahankan dan meningkatkan prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan yang ada agar tingkat pelayanan setiap jenis fasilitas kesehatan dapat lebih optimal. Sarana dan prasarana pendukung disini

diantaranya adalah sekolah keperawatan yang lokasinya direncanakan berdekatan dengan rumah sakit dan prasarana pengolahan limbahnya perlu mendapat perhatian khusus karena sifat limbahnya yang sangat berbahaya bagi penduduk kota.

- Mewujudkan keseimbangan penyebaran prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan.

j) Kawasan RTNH Kota

Bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan pemerintahan, komersial, rekreasi dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial. Definisi dari RTNH adalah “Ruang terbuka di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori” (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009). Penyediaan RTNH di Kota Binjai diatur sebagai berikut:

- RTNH Pekarangan  
Penyediaan RTNH pekarangan dilakukan pada masing-masing pekarangan (lahan di luar bangunan), baik untuk pekarangan permukiman ataupun non permukiman.
- RTNH Wilayah Kota, meliputi:
  - RTNH berupa alun-alun kawasan pemerintahan dan plaza Kawasan pusat pemerintahan baru;
  - RTNH plaza pada kawasan komersial TOD;
  - RTNH berupa plaza bangunan ibadah;
  - RTNH berupa plaza monumen;
  - RTNH lapangan GOR;
  - RTNH ruang plaza tempat ibadah (masjid, gereja, klenteng, dan vihara), dan
  - RTNH tempat wisata.

#### k) Kawasan Evakuasi Bencana

Merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan evakuasi bencana agar memberikan ruang terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara dari suatu bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan letusan gunung api. Kawasan ruang evakuasi bencana diarahkan dengan memanfaatkan ruang-ruang terbuka yang memiliki kriteria:

- Ruangan-ruangan yang bersifat publik seperti lapangan-lapangan terbuka, kawasan parkir, tegalan ataupun area pertanian kering;
- Terletak tidak lebih dari 1 km dari konsentrasi penduduk yang harus diselamatkan;
- Tidak terletak pada daerah permukiman padat ataupun kawasan terbangun yang padat;
- Terletak pada jaringan jalan yang aksesibel/ mudah dicapai dari semua arah dengan berlari/ berjalan kaki;
- Tidak terletak pada daerah yang diperkirakan memiliki ketentuan terhadap bahaya lebih lanjut;
- Diperkirakan setiap orang akan membutuhkan ruang minimum 2 m<sup>2</sup>, sehingga daya tampung ruang penyelamatan dapat dihitung; dan
- Lokasi untuk evakuasi bencana dapat dikembangkan sebagai *multilayer space*, dimana pada waktu terjadi bencana alam dapat berfungsi sebagai ruang evakuasi dan pada waktu tidak terjadi bencana berfungsi sebagai ruang terbuka publik (baik berupa ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non hijau).

Kawasan ruang evakuasi bencana di Kota Binjai meliputi:

- Lapangan Merdeka di Kecamatan Binjai Kota;
- Stadion Olahraga Kota Binjai dan lapangan-lapangan olahraga pada SPK dan PL;
- RTH Taman Kecamatan di setiap SPK;

- RTH Kawasan Wisata *Botanical Garden* di Kecamatan Binjai Selatan;
- Jalan-jalan utama pada Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Samanhudi dan Jalan Soekarno Hatta.

#### 1) Kawasan Sektor Informal

Rencana pengaturan pedagang sektor informal dilakukan melalui:

- Penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menguasai ruang-ruang publik;
- Mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal.

Pola pengaturannya dilakukan sebagai berikut:

- Pengaturan kegiatan golongan usaha skala kecil/ informal merupakan kewajiban pada kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola pihak swasta yang berada pada peruntukan tanah bangunan umum dalam bentuk pusat perdagangan/ pusat perbelanjaan, plaza yang luas lantai bangunannya lebih besar dari 5.000 m<sup>2</sup> tidak termasuk lantai untuk parkir;
- Kewajiban tersebut besarnya minimal 10% dari luas lantai bangunan, yang lokasi dan besaran kewajibannya tersebut ini tidak dapat dialihkan atau diganti dalam bentuk apapun;
- Penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola pihak swasta yang menyediakan ruang untuk kegiatan golongan usaha kecil/ informal mendapat insentif dalam bentuk pembebasan KLB dan pemenuhan kebutuhan parkir sesuai kewajiban.
- Penataan kegiatan golongan usaha skala kecil direncanakan sebagai berikut:

- a. Besaran ruang untuk golongan usaha skala kecil/ informal ditetapkan dalam izin pemanfaatan lahan;
  - b. Penyediaan ruang tersebut ditetapkan dalam gambar arsitektur bangunan skala 1 : 200 yang merupakan lampiran perizinan.
- Persyaratan dan tata cara penempatan golongan usaha skala kecil/ informal diatur sebagai berikut:
- a. Usaha kecil/ informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
  - b. Apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil/ informal, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut;
  - c. Penempatan dan pengelolaan terhadap penempatan usaha bagi usaha kecil/ informal diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Jenis barang dagangan harus saling melengkapi dengan jenis perdagangan utamanya;
  - e. Mengendalikan penempatan sektor informal di ruas jalan arteri primer dan arteri sekunder.
- Pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model *time sharing* dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu dengan komoditas yang memiliki ciri tertentu sehingga dapat membentuk *image* ruang melalui pengembangan kegiatan yang spesifik, dengan demikian maka pada ruang yang sama dapat dikembangkan 2 (dua) fungsi yang berbeda dengan pengaturan waktu yang berbeda (*multilayer space*).
  - Penertiban pedagang kaki lima yang menguasai ruang-ruang publik sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi ruang tersebut atau mengganggu kelancaran lalu-lintas.
- m) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Rencana kawasan pertahanan perlu dipikirkan untuk direncanakan dengan:

- Mempertahankan Markas Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang 11/Wira Bhuna Yudha di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur;
- Mempertahankan kawasan pertahanan Brimob di Kecamatan Binjai Timur dan menterpadukan pengembangan dengan rencana pengembangan kawasan pusat pemerintahan di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur;
- Penyebaran lokasi Kantor Polisi Sektor (Polsek) diarahkan pada setiap SPK dan Pos-Pos Polisi ditempatkan di jalan-jalan utama kota;
- Merelokasi aset-aset militer yang ada di pusat kota seperti asrama polisi dekat kantor DPRD dan beberapa kantor militer ke pinggir kota.

Evaluasi kesesuaian antara rencana zonasi dan pelaksanaan nyata menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, dimana beberapa area yang telah ditetapkan dalam rencana zonasi tidak diikuti dengan ketat dalam praktiknya. Misalnya, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan mengakibatkan konflik antara pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Dampak dari ketidaksesuaian ini mencakup penurunan kualitas lingkungan, peningkatan risiko bencana, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan ruang yang tidak transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki koordinasi antara perencanaan dan implementasi agar tujuan zonasi dapat tercapai dengan efektif dan berkelanjutan.

## **8. Potensi Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya**

Kota Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Kota Binjai terletak 21 km di

sebelah Barat Kota Medan yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang terhubung oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara dengan Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, Kota Binjai terletak di daerah strategis dimana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari Provinsi Aceh. Selain itu, Kota Binjai juga terhubung dengan jaringan jalan Tol Trans Sumatera yang akan memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan barang dan orang antar kota maupun provinsi di Pulau Sumatera.

Terdapat beberapa potensi sumber daya alam yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu: pertanian, pertambangan, mineral galian C, industry, dan pariwisata. Pengembangan pertanian di wilayah Kota Binjai pada Kecamatan Binjai Selatan (614 ha) dan Kecamatan Binjai Timur (36 ha) ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan pangan, pelestarian komoditas khas lokal, pengembangan pasar produk dan hasil produk pertanian kota, pengembangan kontribusi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, penyaring polusi air dan tanah serta keberlanjutan iklim mikro Kota Binjai yang sejuk dan nyaman.

Potensi pengembangan pertambangan di wilayah Kota Binjai meliputi kawasan Depo LPG Pertamina Tandem di Kecamatan Binjai Utara, Kawasan Pengeboran Gas di Kecamatan Binjai Utara, serta kawasan Gardu Induk Listrik di Kecamatan Binjai Utara. Potensi pengembangan kawasan industri Kota Binjai direncanakan untuk industri besar dan menengah pada Kawasan Industri Binjai (KIB) yang berada di Kecamatan Binjai Timur dengan lahan seluas 132 Ha. Industri kecil dan rumah tangga berbasis kebutuhan wisata dan berbahan baku komoditas hasil pertanian yang tidak menimbulkan polusi dapat berlokasi pada KIB, kawasan permukiman dan berbentuk klaster. Kawasan Industri Binjai (KIB) juga diarahkan sebagai wilayah pergudangan regional, baik kebutuhan distribusi dan koleksi bahan baku atau produksi

industri maupun kebutuhan transportasi barang regional bagi Kota Binjai.

Potensi pengembangan pariwisata Kota Binjai diarahkan kepada kawasan pariwisata alam di Kecamatan Binjai Selatan yaitu Pantai SB seluas 10,18 ha dan *Botanical Garden* seluas 86,21 ha serta Sungai Bingai yang membelah Kota Binjai sebagai pengembangan wisata air dan *river front*. Kemudian terdapat wisata buatan maupun wisata budaya yang bisa dikembangkan di Kota Binjai sehingga pelestarian budaya tetap terjaga dan terlestarikan.

Hambatan dalam pengembangan potensi Kota Binjai meliputi kurangnya infrastruktur yang memadai, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan risiko konflik antara sektor pertanian, industri, dan pariwisata. Untuk mengatasi hambatan ini, strategi mitigasi yang dapat diterapkan termasuk peningkatan investasi dalam infrastruktur transportasi dan utilitas untuk mendukung aksesibilitas, serta penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya yang terpadu untuk memastikan keberlanjutan. Selain itu, perlu dilakukan dialog antara pemangku kepentingan di berbagai sektor untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan, serta kampanye kesadaran untuk masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan potensi pengembangan Kota Binjai dapat dimaksimalkan secara efektif dan berkelanjutan.

## **9. Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah rawan bencana di Kota Binjai, yang terletak sepanjang perlintasan sungai seperti Sungai Bingai, Mencirim, dan Bangkatan, menghadapi risiko tinggi terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor. Keberadaan sungai-sungai ini, meskipun memberikan sumber daya air dan keindahan alam, juga menambah kerentanan kawasan tersebut terhadap perubahan iklim dan curah hujan yang ekstrem. Strategi mitigasi yang dapat diterapkan meliputi penguatan infrastruktur pengendalian banjir,

seperti pembuatan tanggul dan sistem drainase yang efisien, serta program rehabilitasi lahan dan reboisasi di daerah tangkapan air untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, perlu ada pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana, sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

## 10. *Ecoregion*

Wilayah Kota Binjai merupakan pertemuan 3 (tiga) jenis *ecoregion*, yaitu dataran aluvial, dataran fluvio-vulkanik, dan dataran perkotaan. Dataran perkotaan tersebar oleh proses antropogenik pada wilayah terbangun di Kota Binjai (seluruh kecamatan). Dataran aluvial berada di Kecamatan Binjai Barat, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Timur, dan Kecamatan Binjai Utara. Sedangkan dataran fluvio-vulkanik terbanyak di Kecamatan Binjai Selatan selain Kecamatan Binjai Barat, Kecamatan Binjai Kota, dan Kecamatan Binjai Timur.

**Tabel 2. 6. Jenis *Ecoregion* Kota Binjai**

Kecamatan	Jenis <i>Ecoregion</i>			Total Luas (ha)
	Dataran Aluvial (ha)	Dataran Fluvio-Vulkanik (ha)	Dataran Perkotaan (ha)	
Binjai Barat	539,63	54,98	806,55	1.401,16
Binjai Kota	1,58	105,76	280,10	387,44
Binjai Selatan	-	2.304,65	752,08	3.056,73
Binjai Timur	635,39	671,70	1.059,74	2.366,83
Binjai Utara	408,81	-	1.750,61	2.159,42
<b>Total</b>	<b>1.585,41</b>	<b>3.137,09</b>	<b>4.649,08</b>	<b>9.371,58</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

## 11. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa penggunaan lahan di Kota Binjai secara umum menampakkan lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Guna lahan masih didominasi oleh penggunaan lahan yang tidak terbangun yaitu sebesar 5.427,58 ha atau 57,92% dari luas wilayah Kota Binjai dibandingkan lahan terbangun sebesar 42,08% atau 3.944,00 ha. Penggunaan lahan tidak terbangun, terutama kebun/perkebunan

seluas 2.280 ha atau 24,33%, sawah 1.594,00 ha atau 17,01% dan ladang 1.269,00 ha atau 13,54%.

Lahan terbangun terbesar berupa perumahan permukiman serta perdagangan dan jasa, dan guna lahan lainnya, seperti perkantoran, fasilitas, gudang, pertambangan dan Pertamina, militer, serta lainnya. Lahan terbangun terdapat di semua kecamatan dan paling sedikit berada di Kecamatan Binjai Kota. Kondisi besarnya lahan terbangun terkait dengan luas lahan yang ada. Sedangkan, lahan non terbangun berupa kebun, sawah dan ladang kebanyakan pada Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Timur, dan Kecamatan Binjai Utara. Sejalan dengan itu, dari sebaran guna lahan terlihat bahwa lahan terbangun berpusat di pusat kota (Kecamatan Binjai Kota dan sekitarnya) dan di sekitar koridor-koridor jalan utama hingga pada jalan lingkungan akses koridor jalan utama. Terdapat kecenderungan walaupun masih sedikit perkembangan lahan-lahan terbangun meluas ke pinggiran kota secara sporadis (*sprawl*). Memperhatikan kemampuan pengembangan lahan wilayah Kota Binjai dengan guna lahan yang berbentuk menunjukkan korelasi kuat yaitu bagaimana dominasi guna lahan berkembang pada kemampuan lahan pengembangan sangat tinggi.

Penggunaan lahan di masa depan di Kota Binjai diprediksi akan mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan pertumbuhan populasi dan permintaan akan perumahan serta infrastruktur. Dengan meningkatnya lahan terbangun, terutama di kawasan pinggiran kota, ada potensi untuk memicu perluasan permukiman dan perkembangan ekonomi. Namun, perubahan ini juga membawa implikasi serius terhadap lingkungan, termasuk pengurangan lahan pertanian, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan risiko pencemaran akibat aktivitas pembangunan yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pendekatan yang berkelanjutan dalam perencanaan penggunaan lahan, seperti pengembangan zona hijau, rehabilitasi

lahan terdegradasi, dan integrasi ruang terbuka publik. Langkah-langkah ini tidak hanya akan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Binjai dengan menciptakan ruang yang lebih sehat dan lebih inklusif bagi semua warga.

**Tabel 2. 7. Sebaran Penggunaan Lahan di Kota Binjai Tahun 2020**

Penggunaan Lahan	Kecamatan (ha)					Kota Binjai (ha)	Persentase
	Binjai Barat	Binjai Kota	Binjai Selatan	Binjai Timur	Binjai Utara		
Area parkir dan lapangan		4,00				4,00	0,04%
Bangunan industri dan perdagangan	68,00	6,00	8,00		46,00	128,00	1,37%
Bangunan non permukiman lain			3,00			3,00	0,03%
Bangunan permukiman kelurahan	31,00		44,00	23,00	13,00	111,00	1,18%
Bangunan permukiman kota	809,00	274,00	734,00	820,00	1.061,00	3.698,00	39,46%
<b>Lahan Terbangun</b>	<b>908,00</b>	<b>284,00</b>	<b>789,00</b>	<b>843,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>3.944,00</b>	<b>42,08%</b>
Kebun campuran	147,00					147,00	1,57%
Ladang/ tegalan dengan palawija	3,00	1,00	256,00	162,00	847,00	1.269,00	13,54%
Lahan terbuka lain		4,00	2,08		2,00	8,08	0,09%
Pekarangan	42,00	4,00	22,00	2,00	12,00	82,00	0,87%
Perkebunan kelapa sawit	281,00	77,00	1.416,00	252,00	107,00	2.133,00	22,76%
Sawah dengan padi diselingi tanaman lain			426,00			426,00	4,55%
Sawah dengan padi terus menerus			18,00	1.108,00	42,00	1.168,00	12,46%
Semak		8,00	62,00			70,00	0,75%
Semak belukar			56,00		20,00	76,00	0,81%
Sungai	19,00	9,00	11,00	0,50	9,00	48,50	0,52%
<b>Lahan Non Terbangun</b>	<b>492,00</b>	<b>103,00</b>	<b>2.269,08</b>	<b>1.524,50</b>	<b>1.039,00</b>	<b>5.427,58</b>	<b>57,92%</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.400,00</b>	<b>387,00</b>	<b>3.058,08</b>	<b>2.367,50</b>	<b>2.159,00</b>	<b>9.371,58</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

## 12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam kajian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar bagi kebijakan, dan/atau program pembangunan suatu wilayah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur 6 (enam) muatan kajian lingkungan hidup strategis, yang mencakup:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.
3. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
4. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
5. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
6. Kinerja layanan/ jasa ekosistem.

### **Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Pembangunan yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Adapun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Binjai dengan hasil sebagai berikut:

- Daya dukung pangan pada tahun 2022 hingga tahun 2045 diproyeksikan defisit. Daya dukung pangan Kota Binjai secara keseluruhan sudah terlampaui defisit sebesar 125,77 milyar kkal/tahun. Akan tetapi Kecamatan Binjai Utara, daya dukung pangannya masih belum terlampaui disebabkan ketersediaan kalori pangan yang cukup besar di Kecamatan Binjai Utara oleh produksi komoditi hewani yang cukup besar. Daya dukung pangan di Kota Binjai terlampaui hingga tahun 2030, dengan defisit pada tahun 2025 sebesar 133,24 milyar kkal/tahun dan pada tahun 2045 sebesar 254,85 milyar kkal/tahun.
- Daya dukung air pada tahun 2022 hingga tahun 2045 diproyeksikan defisit. Berdasarkan ketersediaan air untuk kebutuhan air bersih total diperoleh daya dukung air bersih di Kota Binjai berdasarkan air limpasan belum terlampaui sebesar 40,45 juta m<sup>3</sup>/tahun. Dimana surplus terbesar terdapat di Kecamatan Binjai Utara sebesar 28,41 juta m<sup>3</sup>/tahun. Daya dukung penyediaan air di Kota Binjai akan mengalami perubahan pada tahun 2025 yang diperkirakan sudah terlampaui dengan defisit sebesar 10,35 juta m<sup>3</sup>/tahun dan

defisit meningkat hingga tahun 2030 menjadi 13,18 juta m<sup>3</sup>/tahun yang sejalan dengan tambahan kebutuhan SPAM Regional Mebidangro. Pasokan air Sungai Bingai dimanfaatkan untuk layanan SPAM Regional Mebidang sebesar 1,1 m<sup>3</sup>/detik atau 34,69 juta m<sup>3</sup>/tahun. Kemudian direncanakan pasokan untuk SPAM Regional Mebidang akan ditambahkan lagi sebesar 1,1 m<sup>3</sup>/detik. Penambahan target layanan di Kawasan Mebidangro sebesar 80%. Setelah itu, kondisi defisit menurun terus hingga pada tahun 2045 berstatus belum terlampaui dengan surplus sebesar 1,86 juta m<sup>3</sup>/tahun. Penurunan defisit disebabkan pengurangan luas pertanian.

### **Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Analisis Risiko Lingkungan Hidup adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Adapun perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup Kota Binjai dengan hasil sebagai berikut:

- Timbulan sampah diproyeksikan akan meningkat dari 156,08 ton/hari pada tahun 2025 menjadi 183,13 ton/hari pada tahun 2045.
- Lumpur tinja diproyeksikan akan meningkat dari 56.812,12 m<sup>3</sup>/tahun pada tahun 2025 menjadi 66.659,87 m<sup>3</sup>/tahun pada tahun 2045.
- Volume limbah cair domestik diproyeksikan akan meningkat dari 124.862,40 m<sup>3</sup>/tahun pada tahun 2025 menjadi 146.505,20 m<sup>3</sup>/tahun pada tahun 2045.
- Dominan wilayah Kota Binjai sebesar 51,53% dari luas wilayah berada pada daerah rawan banjir rendah, dan 16,47% dari luas wilayah berada pada daerah rawan banjir tinggi.

- Potensi cuaca ekstrim Kota Binjai 81,76% dari luas wilayah berada pada daerah rawan tinggi, dan selebihnya berada pada daerah rawan sedang.

### **Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya dengan pendekatan ekonomi/ valuasi lingkungan. Adapun efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Kota Binjai dengan hasil sebagai berikut:

- Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Kota Binjai berdasarkan izin pemanfaatan lahan untuk perkebunan pada lahan HGU dipegang oleh PT. Langkat Nusantara Kepong dan PT. Perkebunan Nusantara II dengan komoditas perkebunan kelapa sawit, hortikultura, dan tebu.
- Pemanfaatan sumber daya air sungai Bingai sebagai air baku bagi kebutuhan air minum bukan hanya untuk rumah tangga di Kota Binjai, bahkan juga tetap berfungsi direncanakan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kegiatan industri di Kawasan Mebidangro yang diproduksi dan dikelola oleh PDAM Tirta Sari;
- Untuk mengetahui efisiensi pemanfaatan sumber daya alam agar dianalisis tumpang tindih perizinan di Kota Binjai dan tumpang tindih tutupan lahan dengan RTRW Kota Binjai.

### **Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim**

Perubahan iklim telah berdampak pada semakin tingginya intensitas dan jenis bencana perubahan iklim yang terjadi seperti banjir, kekeringan, angin puting beliung, ketidakpastian musim, penurunan produktivitas pertanian, serta wabah penyakit. Hal ini mengakibatkan besarnya kerugian yang dialami masyarakat di perkotaan, baik secara material maupun immaterial. Maka, langkah antisipatif perlu dilakukan dari sekarang sebelum keadaan semakin memburuk. Maka dari itu, dibutuhkan suatu

perencanaan ketahanan iklim. Adapun kerentanan dan risiko perubahan iklim Kota Binjai dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK), oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, bahwa hampir seluruh kelurahan di Kota Binjai memiliki kerentanan sedang, dan hanya Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara memiliki kerentanan yang sangat rendah.
- Untuk mengetahui analisis kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim Kota Binjai agar dianalisis data Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha dan data Folu Net Sink 2030.

### **Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati**

Analisis tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2017. Adapun ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Kota Binjai dengan hasil sebagai berikut:

- Kota Binjai terdapat situ bagi flora/ tanaman endemik buah-buahan Rambutan Brahrang yang saat ini masih dikelola oleh masyarakat pada suatu area/ tapak di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara.
- Hanya ada 1,11 ha di Kota Binjai yang memiliki ketahanan keanekaragaman hayati tinggi.
- Jasa lingkungan pendukung keanekaragaman hayati Kota Binjai, dominan jasa sedang sebesar 85,34% dari luas wilayah, sedangkan yang memiliki jasa sangat tinggi dan tinggi hanya mencapai 0,51%.
- Perlu dilakukan analisis ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Binjai terkait tingkat ketahanan keanekaragaman hayati, keberadaan *home range* satwa, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi di Kota Binjai.

## **Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan**

Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikro organisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional. Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem. Jasa ekosistem dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*). Adapun jasa ekosistem/ jasa lingkungan Kota Binjai dengan hasil sebagai berikut:

- Jasa lingkungan penyediaan pangan dominan rendah dan sangat rendah mencapai 45% dari luas wilayah, sedangkan jasa tinggi dan sangat tinggi hanya memiliki proporsi 18%.
- Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan jasa rendah 66% dari luas wilayah, kemudian diikuti kategori sedang mencapai 34% dari luas wilayah.
- Hampir seluruh wilayah Kota Binjai (99%) memiliki jasa lingkungan pengaturan iklim berkategori rendah dan sangat rendah.
- Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan pengendalian banjir, dominan jasa rendah mencapai 80% dari luas wilayah, sedangkan yang memiliki jasa sedang hanya mencapai 20%.
- Jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dominan jasa rendah mencapai 79% dari luas wilayah, sedangkan yang memiliki jasa sedang hanya mencapai 21%.

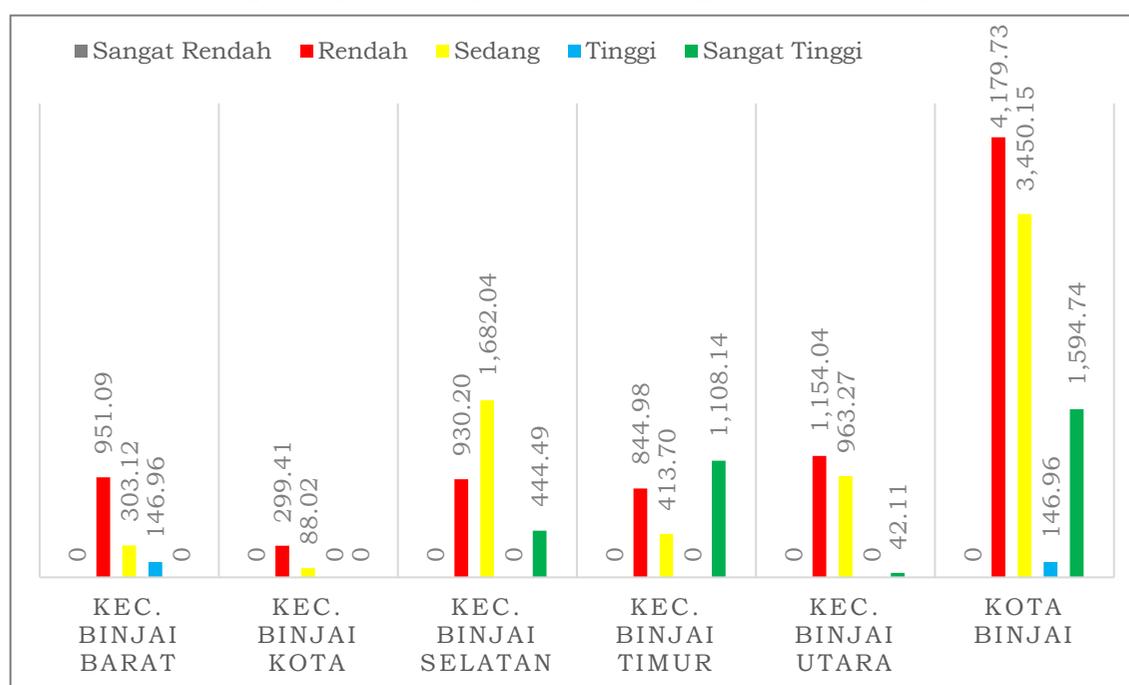
### **a. Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan**

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan

hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Di Kota Binjai, jasa penyediaan pangan kategori tinggi dan sangat tinggi, tersisa pada lahan seluas 1.741,70 ha atau sebesar 18,58% yang berada di Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Utara, dan Kecamatan Binjai Barat.

**Gambar 2. 5. Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kota Binjai**



Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

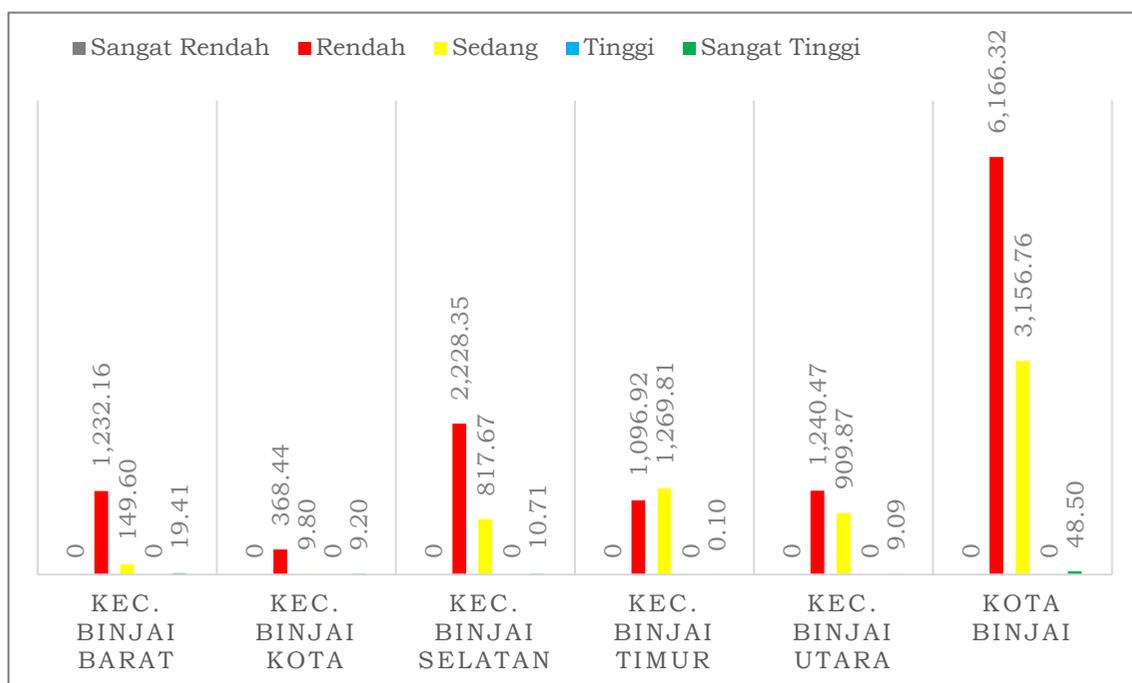
**b. Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih**

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih, baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri, maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah

atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti *ecoregion* bentang lahan.

Jasa lingkungan penyediaan air bersih di Kota Binjai, sudah dominan dalam kategori rendah pada lahan seluas 6.166,32 ha atau sebesar 65,80%. Kategori sangat tinggi terdapat pada badan air sungai-sungai. Sedangkan kategori cukup terdapat di seluruh kecamatan.

**Gambar 2. 6. Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Kota Binjai**



Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

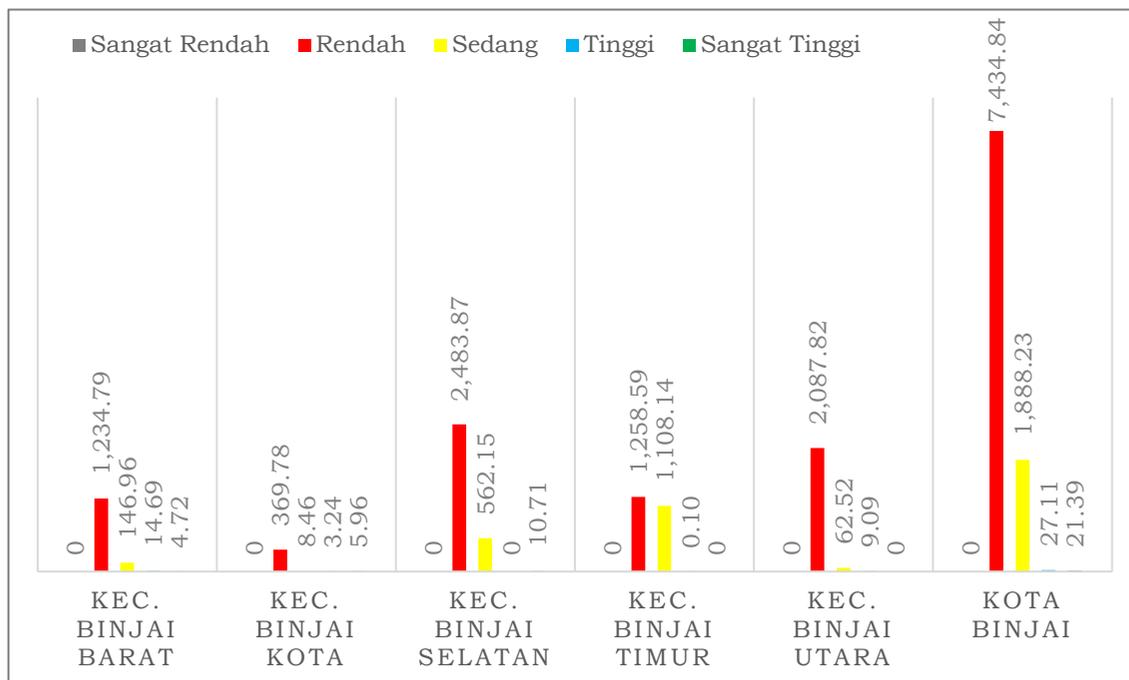
### c. Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban, hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek gas rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global

seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Kemampuan jasa lingkungan bagi pengaturan iklim telah berada pada kategori rendah dan sedang pada lahan seluas 9.323,08 ha atau sebesar 99,48%. Dominasi lahan perkerasan dan kerapatan vegetasi pada lahan-lahan perkebunan dan pertanian menyebabkan jasa lingkungan ini menurun ke kategori rendah.

**Gambar 2. 7. Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kota Binjai**



Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

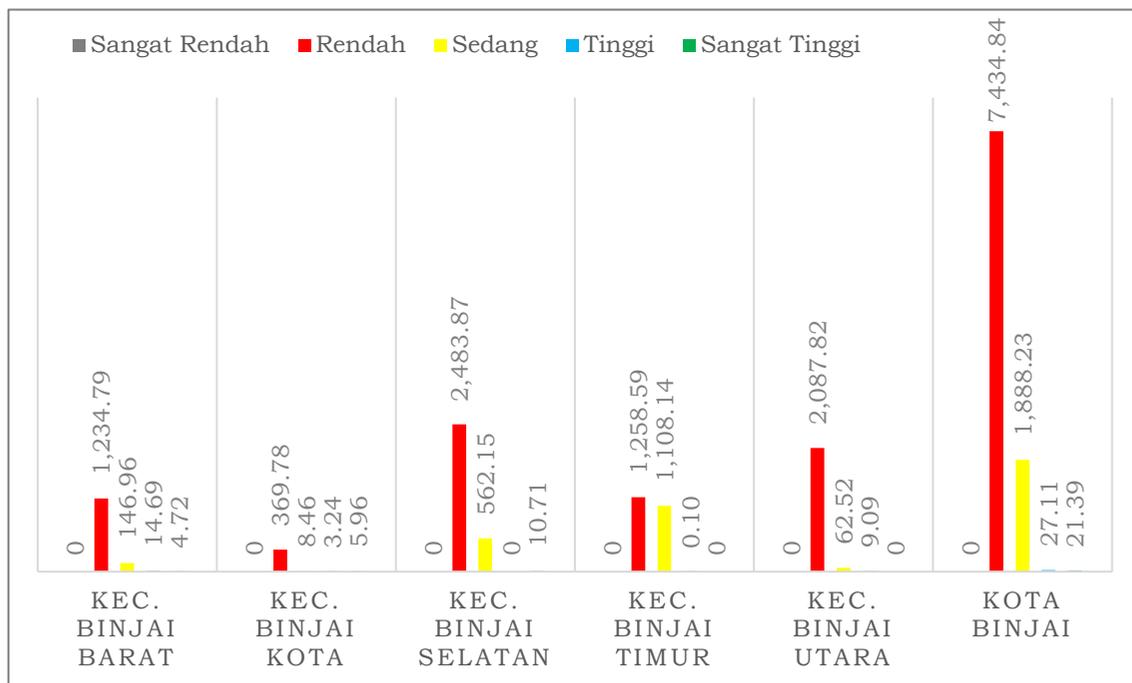
#### **d. Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir**

Siklus hidrologi (*hydrology cycle*), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, hujan, evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air,

pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Kondisi tutupan lahan perkerasan dan kerapatan vegetasi dalam kategori rendah terdapat lahan seluas 7.434,84 ha atau sebesar 79,33% yang berada di semua kecamatan.

**Gambar 2. 8. Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir Kota Binjai**



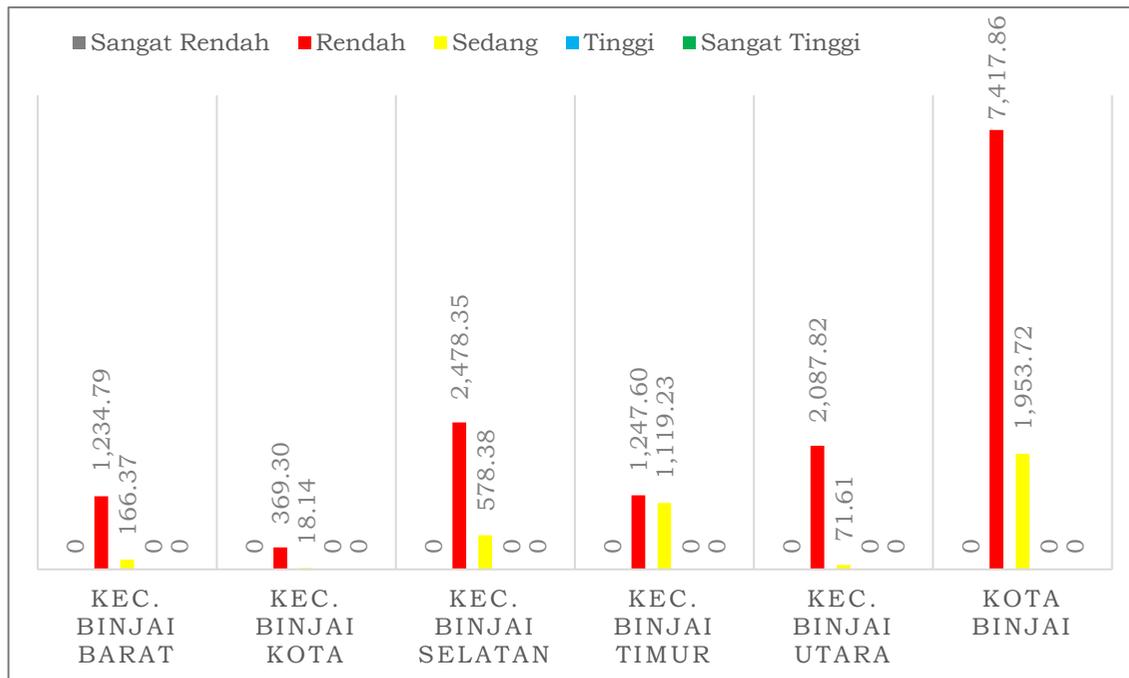
Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

**e. Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam**

Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai, dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu, bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Kondisi tutupan lahan seperti dijelaskan sebelumnya juga menyebabkan penurunan jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam di Kota Binjai.

**Gambar 2. 9. Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam Kota Binjai**



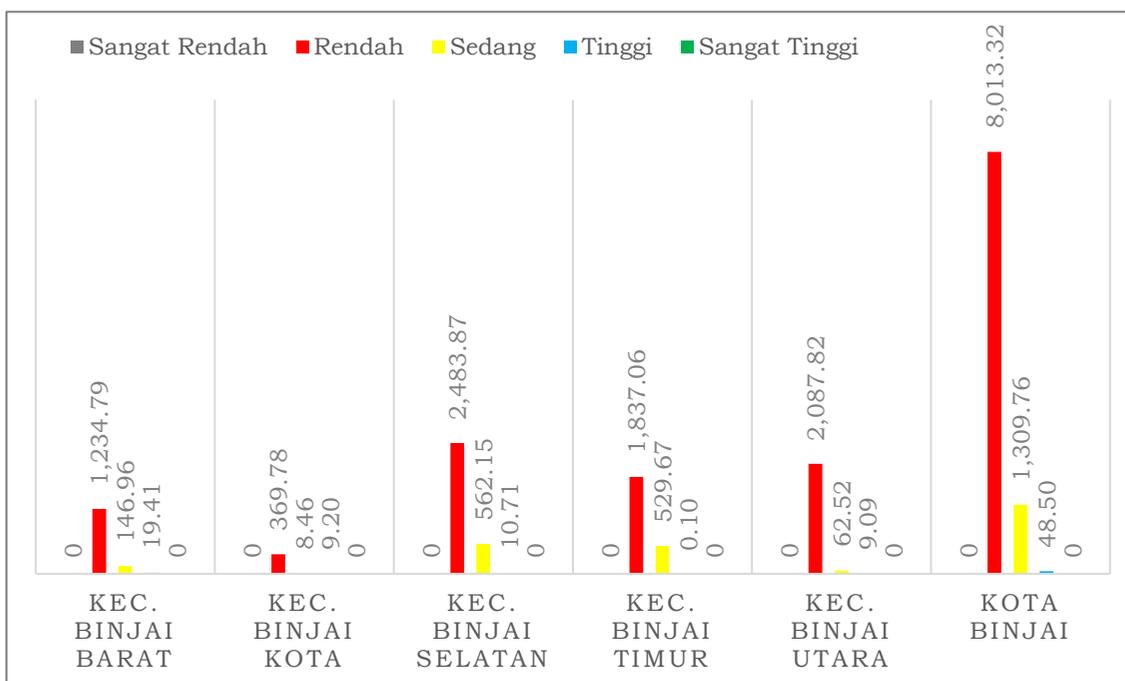
Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

#### **f. Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air**

Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self-purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

Kemampuan pengaturan pemurnian air di Kota Binjai telah berada pada kategori rendah dan sedang berada pada lahan seluas 9.323,08 ha atau sebesar 99,48% yang merata di semua kecamatan. Sedangkan kategori tinggi hanya pada pada badan air sungai-sungai.

**Gambar 2. 10. Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Kota Binjai**



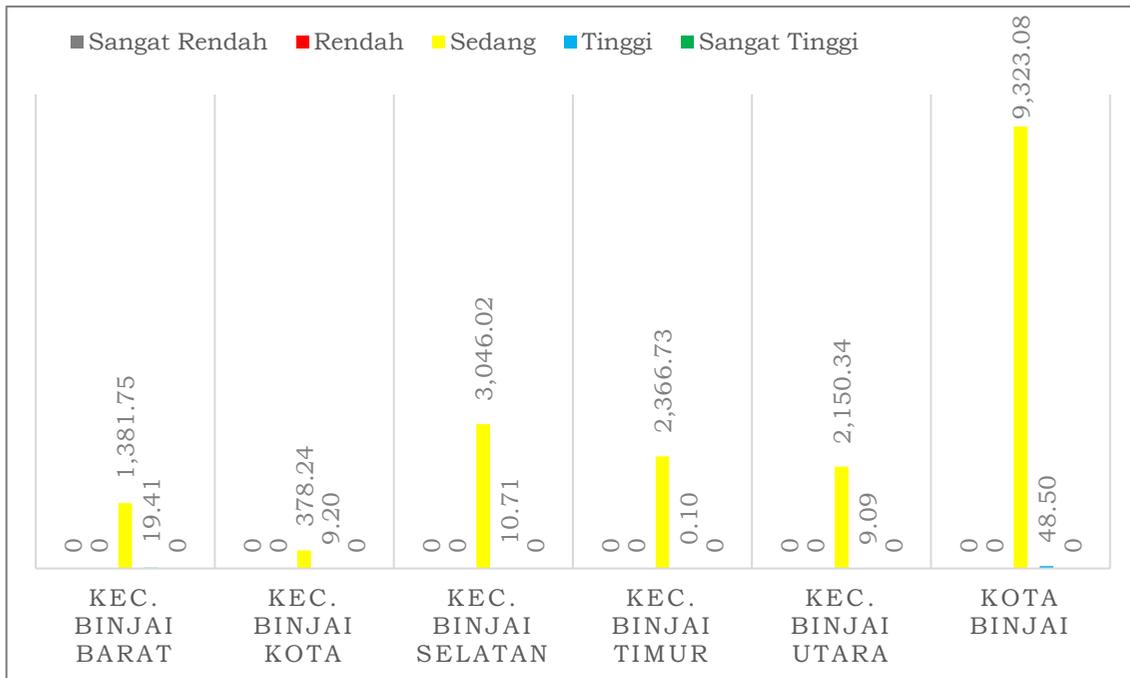
Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

**g. Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah**

Jasa ekosistem meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsisir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (*aerob*) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba *aerob* yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang.

Kemampuan pengaturan pengolahan dan penguraian limbah di Kota Binjai telah berada pada kategori sedang berada pada lahan seluas 9.323,08 ha atau sebesar 99,48% yang merata di semua kecamatan. Sedangkan kategori tinggi hanya pada pada badan air sungai-sungai.

**Gambar 2. 11. Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kota Binjai**



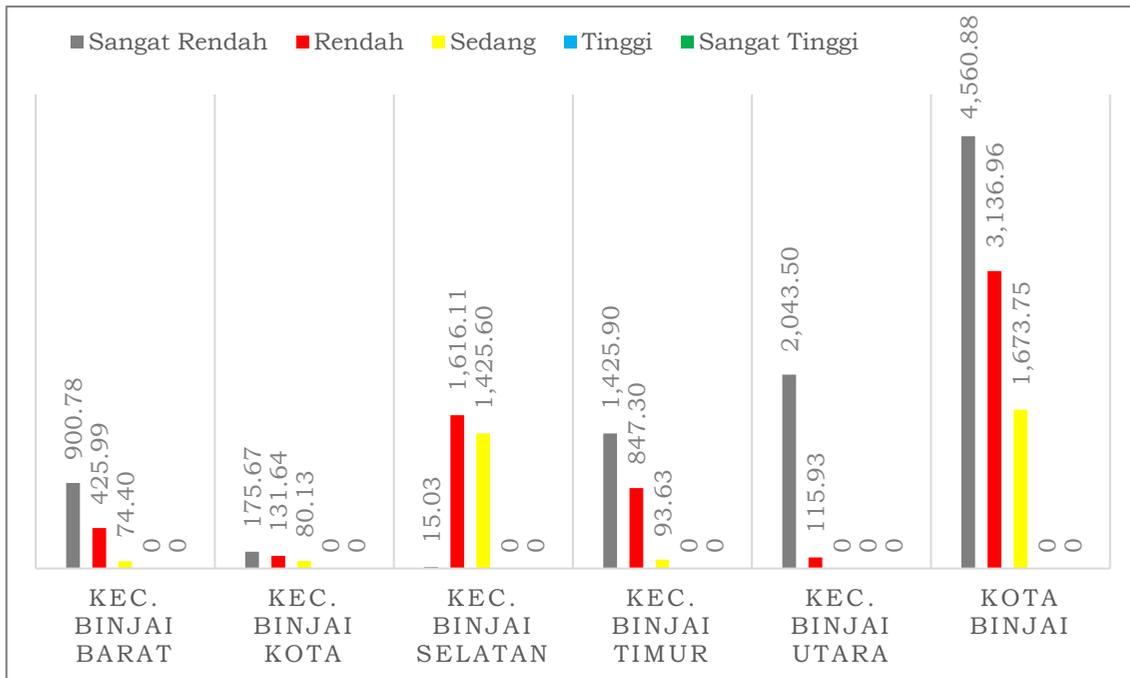
Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

#### **h. Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara**

Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan factor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.

Di Kota Binjai, lahan dengan jasa lingkungan pengaturan pemeliharaan kualitas udara menurun hingga rendah dan sangat rendah seluas 7.697,83 ha atau sebesar 82,14% terutama pada lahan-lahan terbangun (permukiman, bangunan perdagangan dan jasa, sarana dan prasarana, dan industri).

**Gambar 2. 12. Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Binjai**



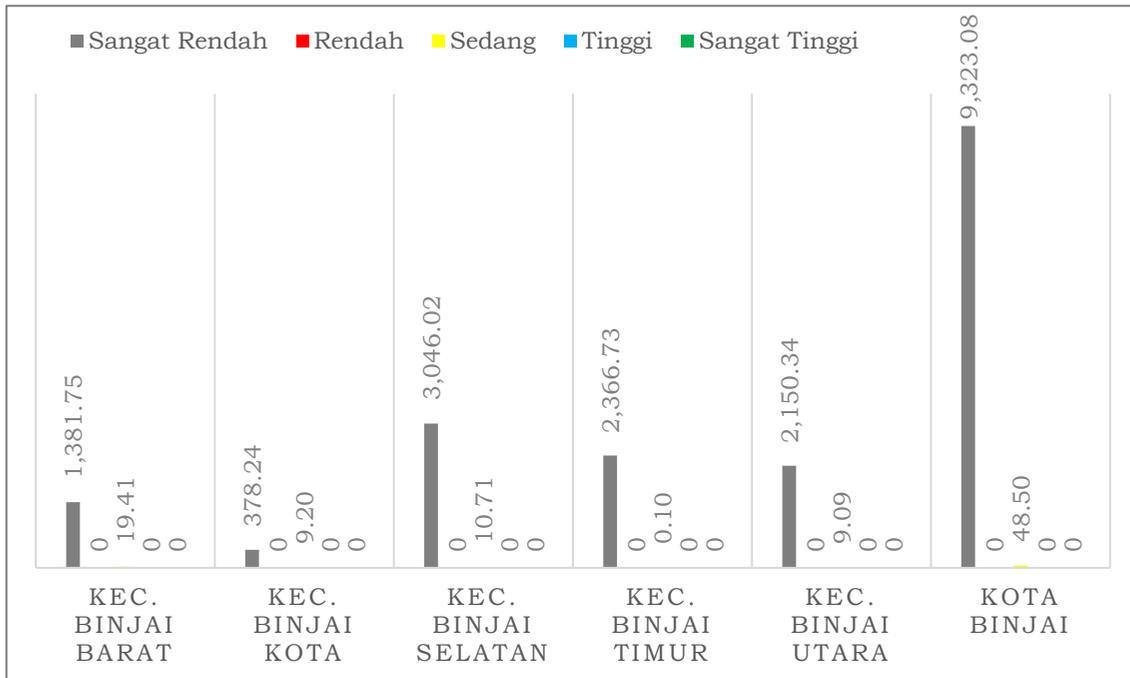
Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

**i. Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika Alam**

Ekosistem bentang alam seperti laut, pegunungan, lembah, Pantai, dan lain sebagainya telah memberikan nuansa keindahan alam dan nilai-nilai estetika yang mengagumkan dan memiliki nilai jual. Paduan bentang alam dan bentang budaya semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika yang telah diberikan oleh ekosistem.

Hampir seluruh wilayah Kota Binjai telah memiliki jasa lingkungan estetika alam yang menurun hingga kategori sangat rendah. Tersisa wilayah seluas 48,50 ha memiliki jasa lingkungan dalam kategori sedang, yaitu pada badan air sungai-sungai.

**Gambar 2. 13. Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika Alam Kota Binjai**

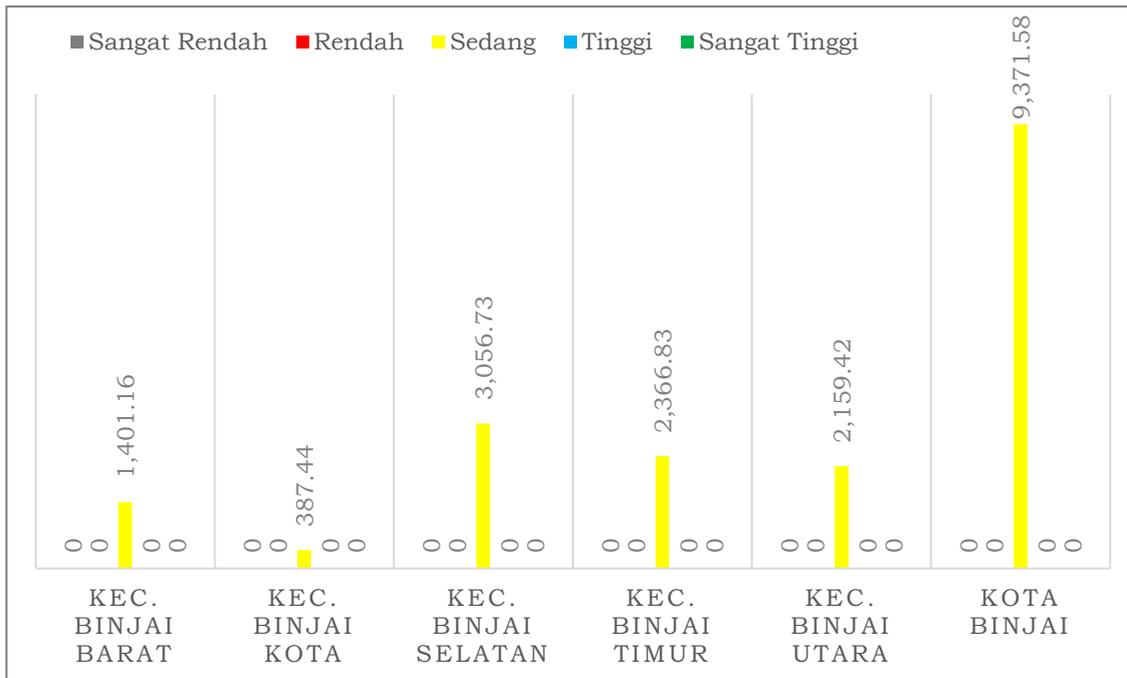


Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

**j. Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan**

Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organisme) air, dan udara. Mineral merupakan unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik dan mempunyai komposisi homogen. Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah maka pembentukan tanah semakin cepat. Seluruh wilayah Kota Binjai memiliki jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan dalam kategori cukup.

**Gambar 2. 14. Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kota Binjai**



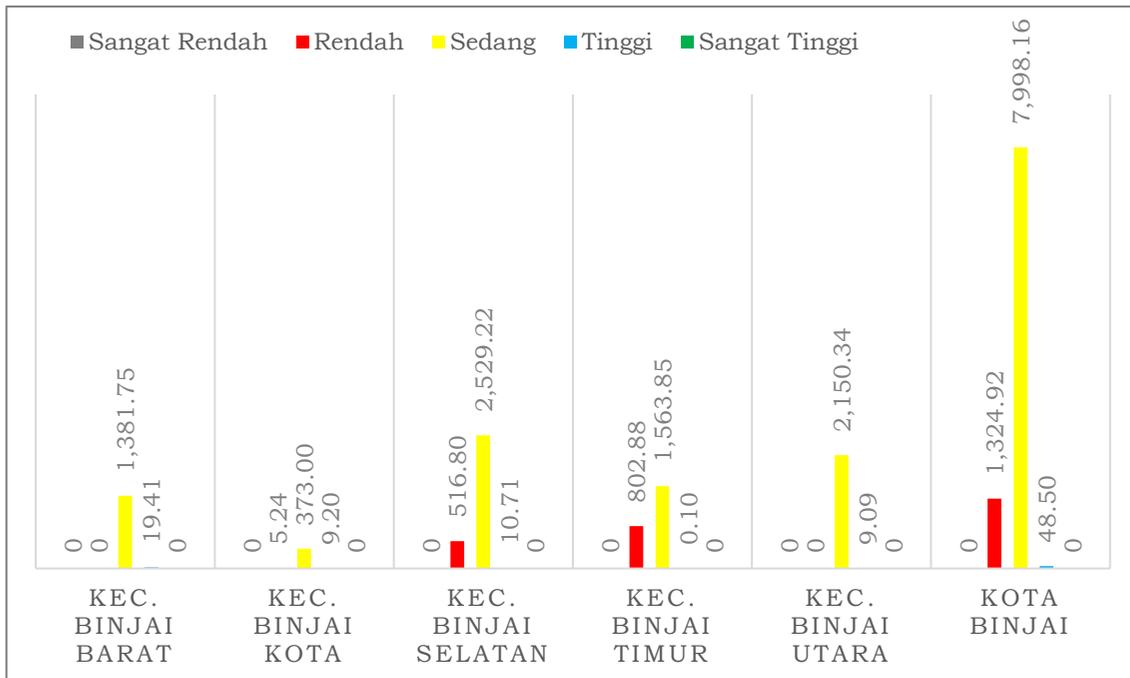
Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

**k. Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer (Produksi Oksigen, Penyediaan Habitat Spesies)**

Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Produksi oksigen memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan makhluk. Tanpa adanya oksigen, maka tidak akan ada kehidupan. Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen sekaligus mengurangi kadar karbondioksida dan polusi udara di bumi. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk pembuatan makanan (fotosintesis). Hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Inilah gas yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk beraktivitas dan memungkinkan tumbuhnya banyak habitat spesies. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan.

Di Kota Binjai, jasa lingkungan pendukung produksi primer dominan dalam kategori sedang seluas 7.998,16 ha atau sebesar 85,34%, walaupun masih ada wilayah dalam kategori tinggi yang berada pada sekitar badan air sungai-sungai.

**Gambar 2. 15. Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer (Produksi Oksigen, Penyediaan Habitat Spesies) Kota Binjai**



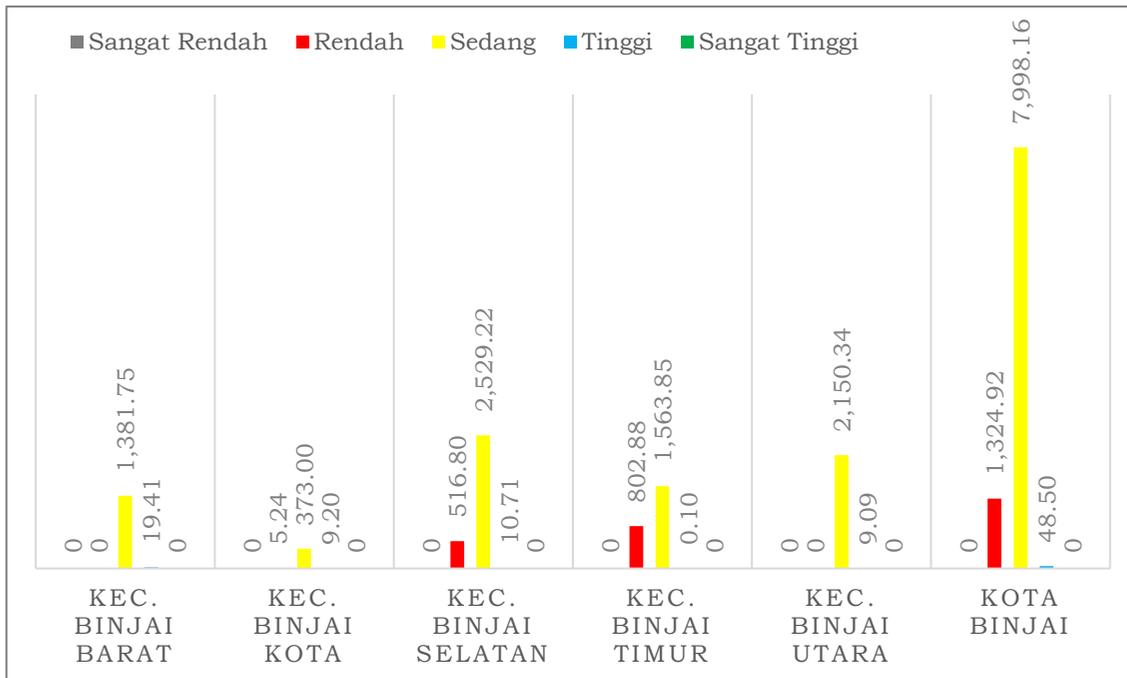
Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

### 1. Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah)

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya yang mencakup keanekaragaman didalam spesies, antara spesies, dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora dan fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Di Kota Binjai, dengan perluasan lahan perkerasan dan konversi lahan bervegetasi menyebabkan penurunan jasa lingkungan pendukung biodiversitas yang menurun hingga kategori rendah pada lahan seluas 1.324,92 ha atau sebesar 14,14%, sedangkan kategori tinggi berada pada badan air dan tepi sungai-sungai besar.

**Gambar 2. 16. Sebaran Kinerja Jasa Ekosistem/ Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kota Binjai**



Sumber: KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

### 13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh pada suatu daerah. IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Predikat IKLH terdiri dari 5 predikat, yaitu Sangat Baik (IKLH > 80), Baik (70 < IKLH ≤ 80), Cukup Baik (60 < IKLH ≤ 70), Kurang Baik (50 < IKLH ≤ 60) dan Sangat Kurang Baik (40 < IKLH ≤ 50).

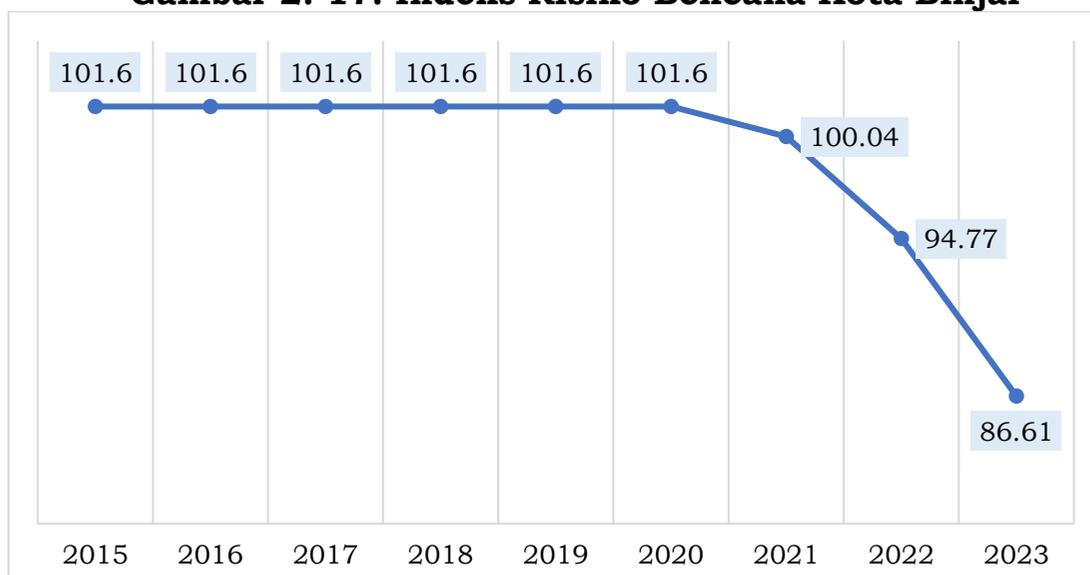
Pada tahun 2023, Kota Binjai menunjukkan kinerja yang beragam dalam hal Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Air tercatat sebesar 50,00, yang masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 53,91. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya air yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas air di kota ini. Sebaliknya, Indeks

Kualitas Udara mencatat angka yang mengesankan, yaitu 87,96, melampaui target 84,10. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya pengendalian polusi udara, yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat. Namun, kondisi Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih memprihatinkan dengan indeks 22,39 yang jauh dari target 27,23. Ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Secara keseluruhan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Binjai berada di angka 59,33, sedikit dibawah target 60,29. Hal ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan, agar Kota Binjai dapat menjadi tempat yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan.

#### 14. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada.

**Gambar 2. 17. Indeks Risiko Bencana Kota Binjai**



Sumber: <https://inarisk.bnppb.go.id/>

Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan

tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi Bencana. Indeks Risiko Bencana Kota Binjai dari tahun 2015 hingga tahun 2023 tetap pada kategori sedang dengan nilai Indeks Risiko Bencana yang cenderung menurun dari 101,6 pada tahun 2015 menjadi 86,61 pada tahun 2023.

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Binjai, yang berada di angka 86,61 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa risiko bencana di kota ini berada dalam kategori sedang. Namun, jika dibandingkan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, terlihat bahwa Kota Binjai memiliki tingkat risiko yang lebih rendah. Kabupaten Langkat mencatat nilai IRB yang signifikan lebih tinggi yaitu 214,8, yang mencerminkan kerentanan yang lebih besar terhadap bencana, terutama karena kondisi geografisnya yang rawan longsor dan banjir. Disisi lain, Kabupaten Deli Serdang dengan IRB sebesar 107,2 juga menunjukkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengelolaan lahan dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi risiko bencana. Penanganan risiko bencana di Kabupaten Langkat memerlukan pendekatan yang lebih intensif, seperti penguatan infrastruktur mitigasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, sementara Kabupaten Deli Serdang perlu fokus pada pengembangan sistem pemantauan dan peringatan dini. Dengan memahami perbedaan ini, semua daerah dapat saling belajar dan berkolaborasi untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

## **15. Indeks Ketahanan Daerah**

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/ kota dan provinsi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur

penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi Indeks Risiko Bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah.

Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana kebencanaan harus bisa dilakukan dan penyebarannya yang merata sehingga bisa semakin mempersingkat waktu tanggap terhadap kebencanaan, selain itu diperlukan juga penyuluhan kepada masyarakat untuk bisa menjadi pioner tanggap kebencanaan dan pengelolaan lingkungan tempat tinggal.

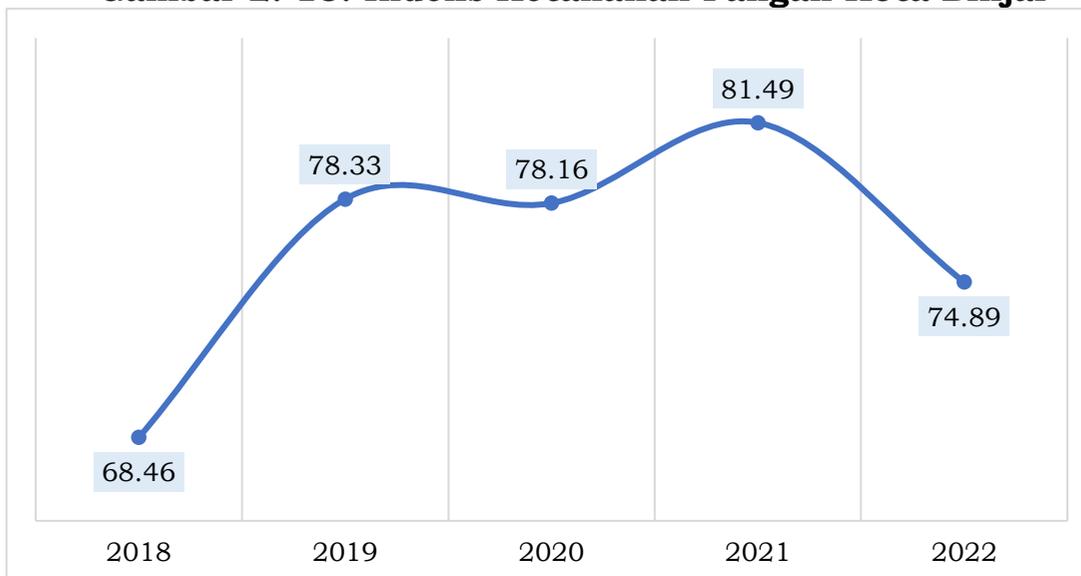
Untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan bencana, perlu dirumuskan rencana aksi yang komprehensif dan terintegrasi, yang mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen risiko bencana di antara aparat pemerintah dan masyarakat. Kedua, pengembangan infrastruktur yang tahan bencana, termasuk peningkatan kualitas bangunan publik dan fasilitas evakuasi yang dapat menampung masyarakat selama bencana. Ketiga, penyuluhan dan kampanye kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana, yang dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam simulasi dan pelatihan. Selanjutnya, pembentukan jaringan kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional untuk memperkuat

koordinasi dalam penanggulangan bencana. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan memberikan peringatan dini terhadap potensi bencana, sehingga masyarakat dapat lebih siap dan responsif terhadap situasi darurat. Dengan rencana aksi yang terpadu ini, diharapkan ketahanan daerah dapat meningkat, mengurangi dampak bencana, dan melindungi keselamatan masyarakat secara efektif.

## 16. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

**Gambar 2. 18. Indeks Ketahanan Pangan Kota Binjai**



Sumber: <https://fsva.badanpangan.go.id/>

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang

digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Untuk mengatasi potensi kerawanan pangan di masa mendatang, strategi konkret yang dapat diterapkan di Kota Binjai mencakup pengembangan sistem pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi modern seperti pertanian presisi dan hidroponik untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya. Selain itu, perlu dilakukan diversifikasi komoditas pangan agar masyarakat tidak bergantung pada satu jenis produk, serta memperkuat rantai pasokan pangan lokal melalui kolaborasi antara petani, distributor, dan pemerintah daerah. Penguatan program penyuluhan bagi petani dan masyarakat tentang praktik pertanian yang ramah lingkungan dan nutrisi seimbang juga sangat penting. Selanjutnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pasar dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan program bantuan untuk petani kecil dapat meningkatkan ketahanan pangan secara keseluruhan, serta memastikan bahwa pangan yang dihasilkan tidak hanya cukup, tetapi juga aman, bergizi, dan terjangkau.

## **17. Indeks Ketahanan Energi**

Ketahanan energi adalah kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014). Pengukuran Indeks Ketahanan Energi menggunakan 4 (empat) aspek yaitu *availability*, *accessibility*, *affordability*, dan *acceptability*.

Dalam situasi krisis energi, ketahanan energi lokal di Kota Binjai berperan krusial dalam memastikan ketersediaan dan aksesibilitas energi bagi masyarakat serta industri. Dengan mengembangkan sumber energi terbarukan seperti energi matahari, biomassa, dan angin, Kota Binjai dapat mengurangi

ketergantungan pada sumber energi fosil yang tidak hanya terbatas, tetapi juga rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan. Dampak positif dari ketahanan energi lokal ini termasuk peningkatan keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca, penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan, dan peningkatan ketahanan ekonomi lokal yang lebih tangguh terhadap krisis global. Selain itu, adanya infrastruktur energi yang mandiri dan diversifikasi sumber energi akan memperkuat daya saing daerah, memungkinkan Kota Binjai untuk tetap beroperasi dengan stabil meskipun menghadapi tantangan dari krisis energi yang lebih luas. Dengan demikian, penguatan ketahanan energi lokal bukan hanya sekedar respons terhadap krisis, tetapi juga investasi jangka panjang untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan keberlanjutan lingkungan, pentingnya mengurangi emisi gas rumah kaca adalah untuk mengatasi perubahan iklim global. Namun, berdasarkan data situs *climatetrace.org*, emisi gas rumah kaca Kota Binjai sebesar 180.364 ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2021 dan 202.987 ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2022 atau justru naik 12,54%. Oleh karena itu, Kota Binjai perlu lebih serius melakukan upaya-upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca meliputi penggunaan energi terbarukan, penghematan energi, pengelolaan limbah yang efisien, penanaman kembali hutan, serta pengembangan teknologi bersih.

## **18. Indeks Ketahanan Air**

Ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air serta perhitungan Indeks Ketahanan Air sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dimana kondisi air yang aman dan bermanfaat serta sebagai

penguat negara sehingga bisa menjadi produktif dan meminimalisir daya rusak. Dalam Peraturan Presiden tersebut disampaikan bahwa Indeks Ketahanan Air perlu disusun untuk menunjang strategi peningkatan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Indikator Ketahanan Air Indonesia berdasarkan 5 (lima) pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air.

Untuk mengembangkan pendekatan pengelolaan air yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Binjai, perlu diterapkan beberapa strategi yang saling mendukung. Pertama, penerapan sistem pengelolaan air hujan (*rainwater harvesting*) dapat menjadi solusi efektif untuk memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih, mengurangi tekanan pada sumber air tanah dan meningkatkan ketersediaan air di musim kemarau. Kedua, peningkatan infrastruktur untuk pengolahan air limbah yang efisien dan ramah lingkungan, seperti sistem biofiltrasi atau pengolahan air limbah berbasis alam, akan membantu meminimalkan pencemaran dan mengembalikan air yang sudah diolah ke dalam ekosistem. Ketiga, edukasi masyarakat mengenai pentingnya konservasi air dan praktik pengelolaan air yang bijaksana, termasuk penggunaan teknologi hemat air di rumah tangga dan industri, harus dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, pengembangan kawasan hijau dan ruang terbuka publik dengan vegetasi yang sesuai dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, membantu menjaga kualitas air dan mengurangi risiko

banjir. Terakhir, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta, sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dengan pendekatan holistik ini, Kota Binjai dapat memastikan ketersediaan air yang cukup, bersih, dan aman bagi seluruh masyarakat serta lingkungan hidup yang lebih sehat.

### **19. Peran Strategis Daerah Kota Binjai**

Kota Binjai yang terletak di antara Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang dan juga memiliki akses ke Kabupaten Karo dan cukup dekat dengan Kota Medan sehingga memiliki peran strategis yang sangat potensial untuk dikembangkan dan sangat strategis untuk dijadikan sebagai daerah penyanggah dan daerah transit. Kota Binjai masih memiliki banyak lahan dan wilayah yang bisa dikembangkan sebagai daerah perumahan maupun perindustrian yang mampu dijadikan sebagai daerah penyanggah daerah sekitarnya terutama Kota Medan. Kota Binjai juga bisa dijadikan sebagai daerah transit destinasi wisata di Kabupaten Langkat maupun Kabupaten Karo. Kota Binjai harus mampu memanfaatkan keunggulan strategis wilayah ini untuk mampu mendapatkan dampak pengganda yang berkaitan langsung dengan perekonomian maupun perdagangan dan jasa yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai.

Pengelolaan secara profesional berbagai potensi strategis maupun sumber daya yang ada di Kota Binjai akan mampu menjadikan Kota Binjai sebagai salah satu wilayah pengembangan industri yang baru dan juga dijadikan sebagai destinasi wisata terutama daerah persinggahan sebelum mencapai tujuan wisata di Kabupaten Langkat maupun Kabupaten Karo.

Untuk mendukung peran strategis daerah Kota Binjai secara nyata dan terukur, perlu disusun rencana aksi spesifik yang mencakup pengembangan infrastruktur transportasi dengan memperbaiki dan membangun jaringan jalan serta akses ke

transportasi publik untuk meningkatkan konektivitas; pembangunan kawasan industri terpadu di Kecamatan Binjai Timur dengan penyediaan lahan dan insentif bagi investor; promosi pariwisata melalui pengembangan paket wisata yang menonjolkan budaya dan alam Kota Binjai serta mengintegrasikannya dengan destinasi wisata di Kabupaten Langkat dan Karo; peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop bagi masyarakat lokal tentang keterampilan industri dan pariwisata; pengembangan program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis produk lokal dengan akses modal dan pelatihan; penyuluhan lingkungan dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam; serta pembentukan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholder* untuk merancang rencana pengembangan yang terintegrasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran strategis Kota Binjai dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

## **20. Potensi Wilayah Kota Binjai**

Kota Binjai terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Kecamatan Binjai Kota memiliki potensi sebagai daerah komersial dan pusat ekonomi serta potensi pariwisata dengan adanya Lapangan Merdeka dan banyaknya taman di wilayah tersebut. Kecamatan Binjai Selatan memiliki potensi sebagai daerah pertanian, perkebunan terutama rambutan serta memiliki potensi pariwisata dengan adanya beberapa pemandian alam. Kecamatan Binjai Utara bisa dikembangkan sebagai daerah perumahan serta juga memiliki potensi perdagangan dan jasa. Kecamatan Binjai Timur memiliki potensi sebagai daerah perindustrian dan juga pariwisata religi maupun mall. Kecamatan Binjai Barat berpotensi sebagai daerah peternakan dan juga memiliki beberapa potensi pengembangan pariwisata.

*Roadmap* pengembangan potensi wilayah Kota Binjai harus dimulai dengan pemetaan dan analisis mendalam terhadap potensi setiap kecamatan. Langkah pertama adalah meningkatkan infrastruktur di Kecamatan Binjai Kota untuk menjadikannya pusat komersial dan pariwisata, dengan memperbaiki aksesibilitas dan menyediakan fasilitas yang memadai. Selanjutnya, di Kecamatan Binjai Selatan, program pengembangan pertanian/ perkebunan harus diintensifkan dengan pelatihan bagi petani dan pemasaran produk, khususnya rambutan, sembari mempromosikan pariwisata alam. Di Kecamatan Binjai Utara, fokuskan pada menarik investasi sektor perumahan serta sektor perdagangan dan jasa dengan memberikan insentif dan dukungan bagi investor. Untuk Kecamatan Binjai Timur, fokuskan pada menarik investasi industri dengan memberikan insentif dan dukungan bagi pelaku usaha serta integrasikan pertanian berkelanjutan dengan pengembangan pariwisata religi, sedangkan di Kecamatan Binjai Barat, dorong pengembangan peternakan berbasis komunitas dan pariwisata berbasis alam. Semua langkah ini perlu dikombinasikan dengan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat, serta kerjasama lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat ekonomi yang maksimal bagi daerah.

### **2.1.2. Aspek Demografi**

Demografi adalah studi tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/ komposisi, persebaran keruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu (Harmadi, S., 2008). Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan sejarah kependudukan, ada 2 (dua) pemahaman terkait hubungan antara penduduk dan perubahannya dengan pembangunan suatu wilayah.

## 1. Struktur Penduduk

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Dari kelompok umur, susunan penduduk berdasarkan umurnya dapat mudah dipahami dari gambar piramida penduduk. Dari kelompok umur, susunan penduduk berdasarkan umurnya dapat mudah dipahami dari gambar piramida penduduk. Piramida penduduk tersebut merupakan piramida penduduk muda yang menggambarkan bahwa jumlah penduduk berusia muda lebih banyak dari jumlah penduduk usia tua.

**Tabel 2. 8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai Tahun 2023**

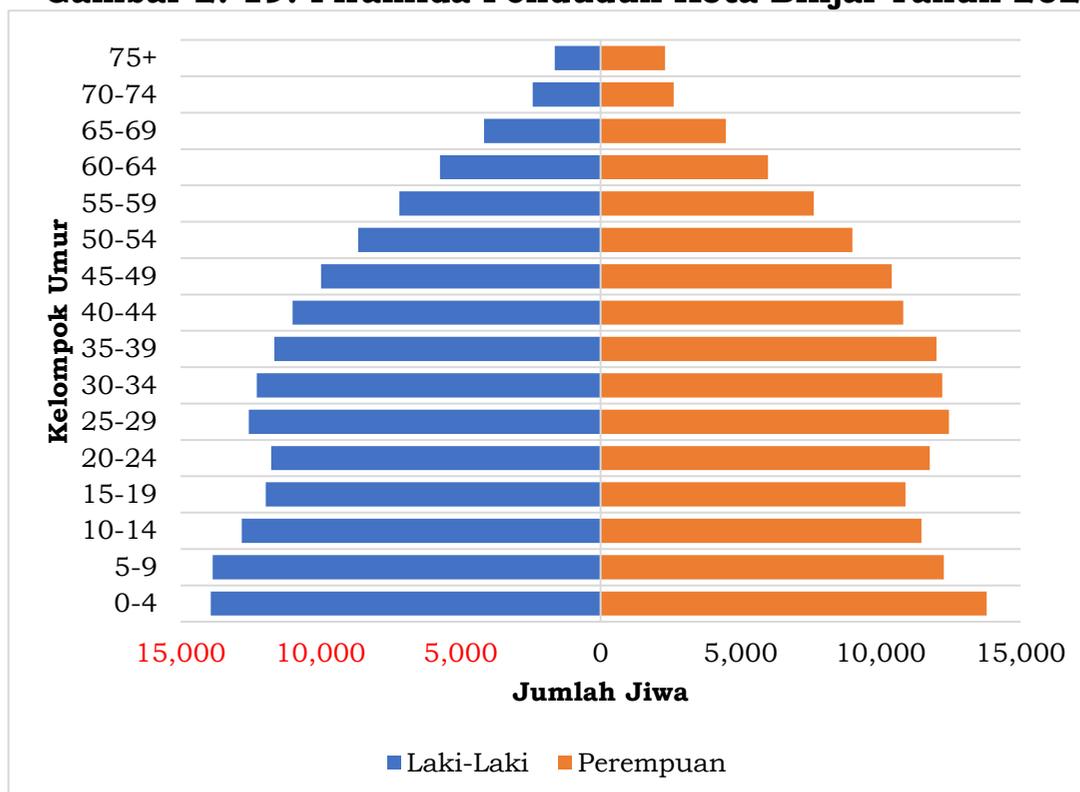
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	13.929	13.272	27.201
5-9	13.856	12.929	26.785
10-14	12.818	11.805	24.623
15-19	11.965	11.072	23.027
20-24	11.762	11.205	22.967
25-29	12.565	12.326	24.891
30-34	12.284	12.278	24.562
35-39	11.648	11.859	23.507
40-44	11.002	11.211	22.213
45-49	9.985	10.173	20.158
50-54	8.661	9.368	18.029
55-59	7.191	7.826	15.017
60-64	5.737	6.271	12.008
65-69	4.159	4.623	8.782
70-74	2.430	2.977	5.407
75+	1.635	2.450	4.085
<b>Kota Binjai</b>	<b>151.627</b>	<b>151.645</b>	<b>303.272</b>

Sumber: Binjai Dalam Angka 2024

Keterkaitan antara struktur penduduk dan perencanaan pembangunan sangatlah penting dalam menentukan arah serta keberhasilan pembangunan suatu daerah. Struktur penduduk yang mencakup distribusi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan dapat memberikan pandangan yang jelas mengenai kebutuhan dan potensi masyarakat. Struktur penduduk Kota Binjai yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin.

Dependensi ratio, yang merupakan rasio antara jumlah individu yang tidak bekerja (biasanya anak-anak dan lansia) dibandingkan dengan individu yang bekerja (biasanya usia produktif), memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan suatu negara atau daerah. Sebuah dependensi ratio yang tinggi cenderung menempatkan beban ekonomi yang berat pada populasi yang bekerja, karena mereka harus menyediakan dukungan finansial untuk populasi yang tidak bekerja. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi sumber daya yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan, penting untuk mempertimbangkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan partisipasi tenaga kerja, serta strategi untuk mengelola dampak dependensi ratio yang tinggi, seperti program pensiun yang berkelanjutan, pendidikan yang berkualitas, dan dukungan bagi keluarga yang memerlukan.

**Gambar 2. 19. Piramida Penduduk Kota Binjai Tahun 2023**



Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Dari data usia penduduk tersebut juga dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*). *Dependency ratio* adalah rasio

yang menggambarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan lebih dari 64 tahun) yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Pada tahun 2023, *dependency ratio* penduduk Kota Binjai adalah 46,94 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 47 penduduk yang berusia tidak produktif.

**Tabel 2. 9. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai**

Kelompok Umur	2005	2010	2015	2020	2023
0 - 4	23.342	24.230	26.097	24.683	27.201
5 - 9	24.512	23.785	24.556	25.158	26.785
10 - 14	26.965	23.537	23.239	24.813	24.623
15 - 19	29.938	23.518	24.658	25.282	23.027
20 - 24	23.712	22.868	24.768	25.694	22.967
25 - 29	20.831	22.954	22.738	23.125	24.891
30 - 34	18.475	19.801	20.718	20.832	24.562
35 - 39	17.202	18.670	19.885	20.554	23.507
40 - 44	15.117	16.635	17.979	19.086	22.213
45 - 49	11.363	14.661	16.385	17.677	20.158
50 - 54	8.099	12.335	14.226	15.754	18.029
55 - 59	5.869	8.642	11.389	13.280	15.017
60 - 64	5.013	4.998	7.377	9.717	12.008
65 - 69	7.466	9.520	4.721	6.690	8.782
70 - 74			3.116	3.705	5.407
75+			2.835	3.252	4.085
<b>Kota Binjai</b>			<b>237.904</b>	<b>246.154</b>	<b>264.687</b>

Sumber: BPS Kota Binjai

Struktur penduduk di Kota Binjai yang didominasi oleh usia muda, memberikan implikasi signifikan terhadap kebutuhan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja. Dengan populasi lebih dari 300.000 jiwa, Kota Binjai harus menyediakan program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal, yang dapat mencakup pelatihan keterampilan teknis dan *soft skills*. Untuk memenuhi kebutuhan ini, diperlukan peningkatan investasi dalam infrastruktur pendidikan dan program pelatihan, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan peluang kerja yang relevan. Dalam konteks RPJPD, strategi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus diarahkan untuk menyiapkan generasi muda Kota Binjai yang siap bersaing di pasar kerja, sehingga dapat mendukung pencapaian visi pembangunan

ekonomi lokal hingga tahun 2045 dengan menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif.

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Binjai tahun 2023 berjumlah 303.272 jiwa dengan rincian yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 151.627 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 151.645 jiwa. Jumlah penduduk Kota Binjai terus mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2005 yang berjumlah 137.904 jiwa dengan rincian yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 119.205 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 118.669 jiwa.

**Tabel 2. 10. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Jenis Kelamin**

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2005	119.205	118.699	137.904
2010	122.997	123.157	246.154
2015	132.197	132.490	264.687
2020	139.284	140.018	279.302
2021	147.664	147.697	295.361
2022	150.032	149.977	300.009
2023	151.627	151.645	303.272

Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Jumlah Penduduk di Kota Binjai paling banyak di Kecamatan Binjai Utara dengan jumlah penduduk mencapai 88.364 jiwa atau sekitar 29,14 persen penduduk Kota Binjai. Kecamatan Binjai Kota merupakan wilayah di Kota Binjai dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 32.452 jiwa atau sekitar 10,70 persen dari total penduduk Kota Binjai.

**Tabel 2. 11. Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Kecamatan Tahun 2023**

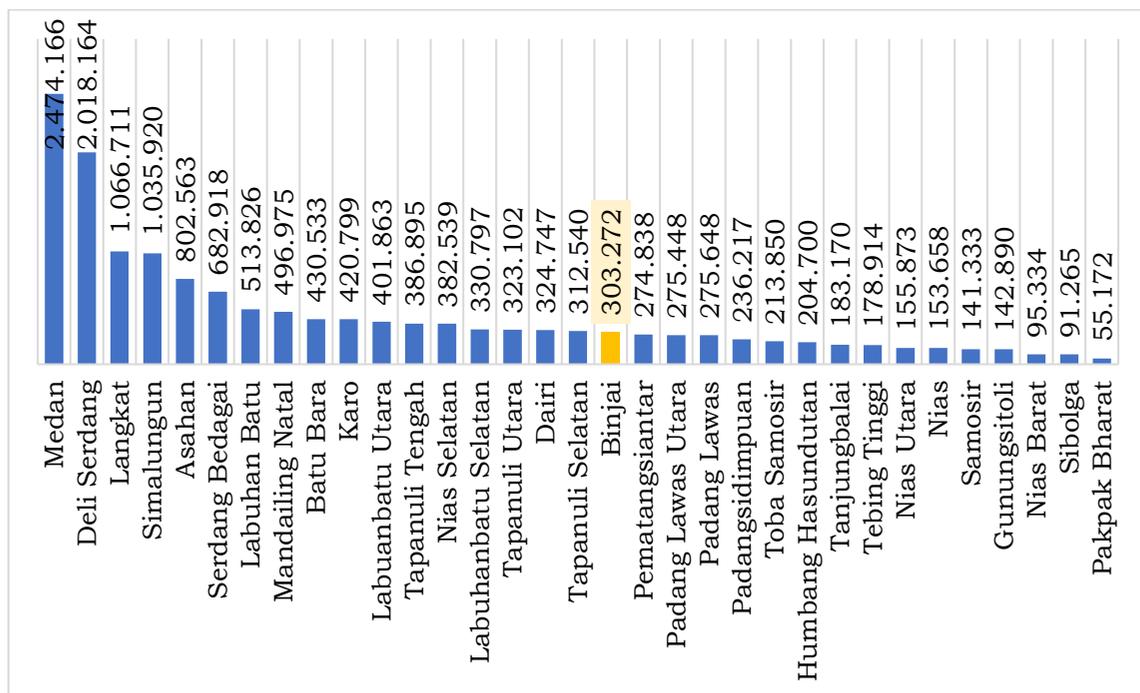
Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase
Binjai Selatan	60.894	20,08
Binjai Kota	32.452	10,70
Binja Timur	68.376	22,55
Binjai Utara	88.364	29,14
Binjai Barat	53.186	17,54
<b>Kota Binjai</b>	<b>303.272</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Jumlah penduduk Kota Binjai di tahun 2023 jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Provinsi Sumatera

Utara, maka Kota Binjai merupakan kota kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Utara. Namun jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, maka jumlah penduduk Kota Binjai tahun 2023 hanya menempati posisi kedelapan belas terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

**Gambar 2. 20. Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Binjai dengan Wilayah Lain di Sumatera Utara Tahun 2023**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

Kota Binjai mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan, dengan jumlah penduduk mencapai 303.272 jiwa pada tahun 2023, meningkat dari 137.904 jiwa pada tahun 2005, yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 4,4%. Proyeksi migrasi masuk yang diperkirakan mencapai 3.000 jiwa per tahun seiring dengan peningkatan peluang ekonomi dan daya tarik kawasan, sementara migrasi keluar diperkirakan mencapai 1.500 jiwa, mengindikasikan pertumbuhan bersih sekitar 1.500 jiwa per tahun. Tren historis menunjukkan bahwa kebutuhan layanan publik, khususnya dalam sektor kesehatan dan perumahan, harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan populasi, dengan kebutuhan rumah yang diperkirakan meningkat hingga 15% dalam 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mencapai target RPJPD yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup, Kota Binjai perlu

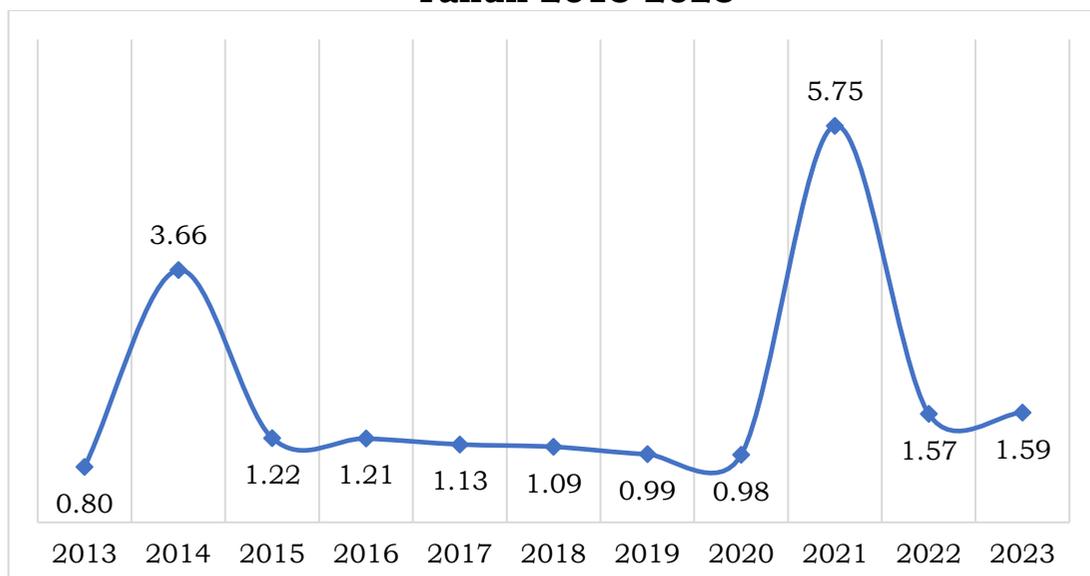
menyusun rencana penyediaan infrastruktur publik yang efisien, termasuk rumah sakit, sekolah, dan akses transportasi yang baik, guna memastikan layanan yang memadai dan berkelanjutan untuk semua penduduk yang terus berkembang.

### 3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan dalam dokumen ini adalah metode geometrik.

Berdasarkan olahan dari data BPS Kota Binjai, sejak tahun 2013 hingga 2023 laju pertumbuhan penduduk di Kota Binjai cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun meningkat. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk Kota Binjai yang signifikan terjadi pada tahun 2014 (mencapai 3,66%) dan pada tahun 2021 (sebesar 5,75%). Pada periode 2015 hingga 2020 cenderung stabil dan menunjukkan pergerakan melambat dari 1,22% di tahun 2015 menjadi 0,98% di tahun 2020.

**Gambar 2. 21. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Binjai Tahun 2013-2023**



Sumber: BPS Kota Binjai (data diolah)

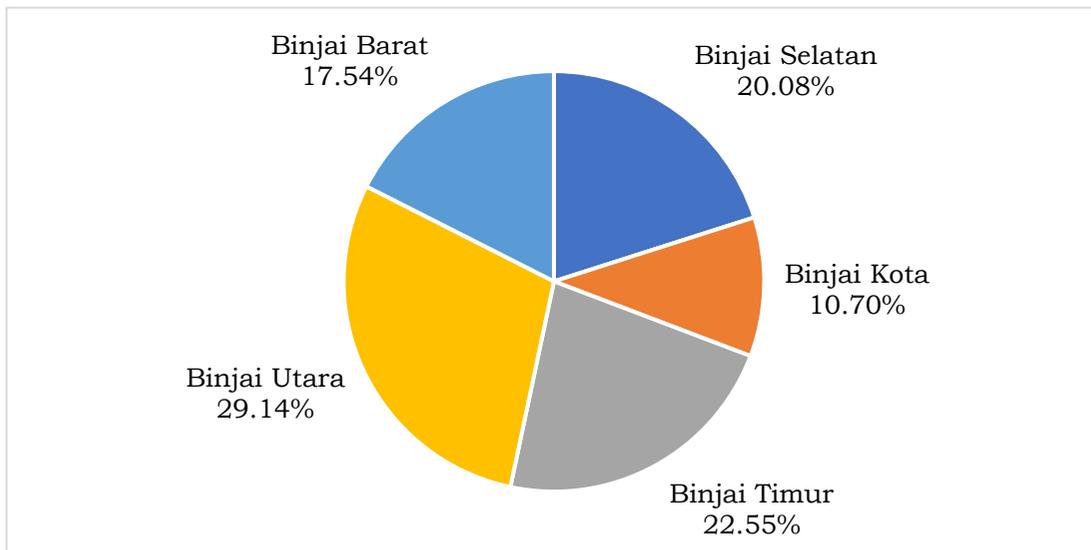
Laju pertumbuhan penduduk Kota Binjai menunjukkan peningkatan signifikan, dengan laju tertinggi mencapai 5,75% pada tahun 2021 dan stabil pada 0,98% di tahun 2020, mencerminkan dinamika demografis yang kompleks. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti angka kelahiran yang tinggi, angka kematian yang relatif rendah, dan migrasi masuk yang positif, terutama di Kecamatan Binjai Utara dan Kecamatan Binjai Timur, yang merupakan daerah dengan potensi ekonomi lebih besar. Sementara Kecamatan Binjai Kota menunjukkan pertumbuhan paling rendah akibat keterbatasan lahan dan aksesibilitas yang kurang, mengakibatkan kurangnya daya tarik bagi penduduk baru. Proyeksi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat ini memerlukan perhatian dalam perencanaan kebijakan pembangunan untuk memastikan penyediaan fasilitas umum, seperti sekolah, pusat kesehatan, dan infrastruktur transportasi, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks ini, strategi RPJPD harus menekankan pengendalian pertumbuhan yang berkelanjutan melalui kebijakan pengaturan penggunaan lahan dan peningkatan kualitas layanan publik, sehingga dampak negatif dari pertumbuhan populasi dapat diminimalkan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

#### **4. Distribusi Penduduk**

Distribusi penduduk ditunjukkan dari persebaran jumlah penduduk dan angka kepadatan penduduk di setiap Kecamatan di Kota Binjai. Analisis distribusi penduduk menentukan kesesuaian jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ada. Gambar berikut ini menunjukkan bahwa Kecamatan Binjai Utara memiliki jumlah proporsi penduduk paling tinggi di Kota Binjai dengan persebaran penduduk mencapai 29,14%, sedangkan Kecamatan Binjai Kota memiliki jumlah proporsi penduduk paling rendah yaitu mencapai 10,70%.

Secara lebih dalam, persentase penduduk paling banyak berada di Kecamatan Binjai Utara dengan kepadatan penduduknya sebesar 3.745,82 jiwa/km<sup>2</sup>, dan persentase penduduk paling rendah berada di Kecamatan Binjai Kota dengan kepadatan penduduk 7.876,70 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Binjai pada tahun 2023 adalah sebesar 3.352,92 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Gambar 2. 22. Persebaran Penduduk Kota Binjai Menurut Kecamatan Tahun 2023**



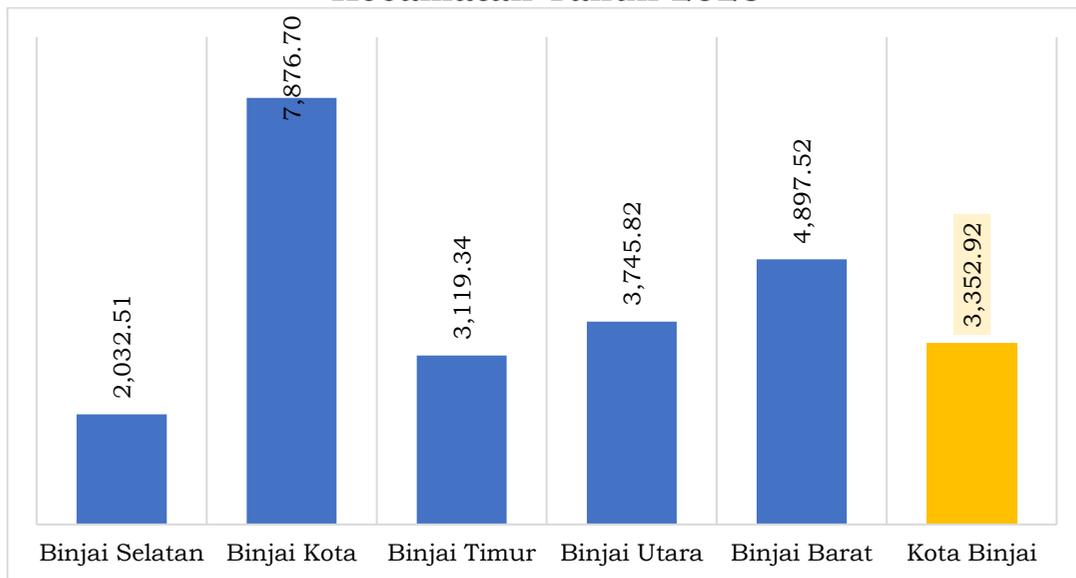
Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Kepadatan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah setiap kecamatan. Angka kepadatan penduduk memperlihatkan kesesuaian jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dimiliki. Sehingga Kecamatan Binjai Selatan dan Kecamatan Binjai Timur merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan terendah dibandingkan Kecamatan lainnya di Kota Binjai. Dengan demikian kedua Kecamatan tersebut memiliki potensi dan prospek yang bagus untuk dapat dikembangkan, mengingat ketersediaan wilayah yang masih mencukupi dibandingkan Kecamatan lainnya dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari dua Kecamatan tersebut.

Tingginya tingkat kepadatan penduduk menimbulkan berbagai dampak negatif atau permasalahan dalam pembangunan. Permasalahan tersebut mencakup berbagai bidang pembangunan,

yakni perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, sanitasi dan lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan, serta ketenagakerjaan. Adapun secara khusus di daerah perkotaan, akan banyak memunculkan *slum area*, atau yang lebih dikenal sebagai pemukiman kumuh.

**Gambar 2. 23. Kepadatan Penduduk Kota Binjai Menurut Kecamatan Tahun 2023**



Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Evaluasi kebutuhan layanan publik di Kota Binjai berdasarkan distribusi penduduk menunjukkan bahwa Kecamatan Binjai Utara, dengan kepadatan penduduk mencapai 3.745,82 jiwa/km<sup>2</sup>, membutuhkan perhatian khusus terhadap penyediaan layanan transportasi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai. Sementara itu, Kecamatan Binjai Kota, meskipun memiliki kepadatan tertinggi di 7.876,70 jiwa/km<sup>2</sup>, juga mengalami kekurangan dalam akses layanan publik, yang berpotensi memperburuk kondisi sosial masyarakat. Di sisi lain, Kecamatan Binjai Selatan dan Binjai Timur, dengan kepadatan yang lebih rendah, berpotensi untuk pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan RPJPD yang menekankan pada pemerataan akses layanan, diperlukan strategi peningkatan kapasitas layanan di daerah padat penduduk serta pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan di kecamatan yang kurang padat, sehingga setiap warga Kota Binjai dapat mengakses layanan

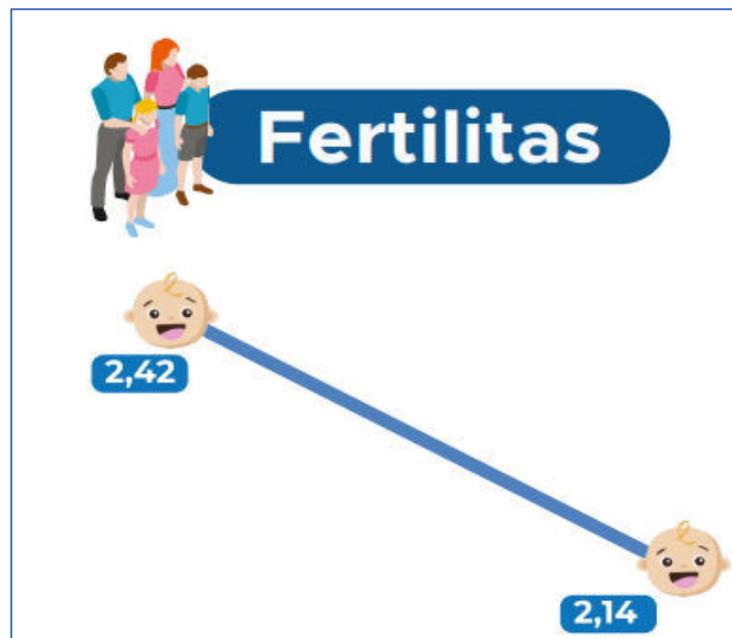
publik secara adil dan merata, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## 5. Dinamika Penduduk

Dinamika penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari natalitas, mortalitas, serta migrasi. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur natalitas adalah angka kelahiran kasar. Angka kelahiran kasar merupakan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk. Sedangkan *Total Fertility Rate* (TFR) adalah istilah yang digunakan di bidang demografi untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang akan terlahir dari seorang wanita sepanjang hidupnya, bila ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik usia terkini yang pasti dan ia akan selamat dari kelahiran sepanjang usia reproduktifnya.

Fertilitas Kota Binjai terlihat menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Sensus penduduk 2010 mencatat angka TFR sebesar 2,42 yang berarti seorang perempuan akan melahirkan sekitar 2 hingga 3 anak selama masa reproduksinya. Sementara *Long Form* Sensus Penduduk 2020 mencatat angka TFR sebesar 2,14 yang berarti sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya.

**Gambar 2. 24. Total Fertility Rate Kota Binjai Menurut Sensus Penduduk Tahun 2010 dan 2020**



Sumber: Long Form SP 2020 Kota Binjai

Migrasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah. Penduduk yang melakukan migrasi disebut migran. Badan Pusat Statistik membagi migran ke dalam dua kelompok, yaitu migran seumur hidup dan migran risen. Migran seumur hidup merupakan penduduk yang tempat tinggal saat pencacahan berbeda wilayah administrasi (provinsi maupun kabupaten/ kota) dengan tempat lahirnya. Sementara itu, migran risen merupakan penduduk yang tempat tinggal saat pencacahan berbeda wilayah administrasi dengan tempat tinggalnya pada lima tahun yang lalu.

Berdasarkan hasil *Long Farm Sensus Penduduk* tahun 2020 diperoleh angka migrasi risen Kota Binjai sebesar 5,88 % yang menunjukkan bahwa 6 dari 100 penduduk berumur 5 tahun keatas di Kota Binjai bertempat tinggal di kota/kabupaten lain pada 5 tahun sebelumnya. Kemudian sebanyak 51,59 % penduduk migran risen tersebut berjenis kelamin perempuan dan sisanya sebanyak 48,41 % merupakan penduduk migran risen yang berjenis kelamin laki-laki.

**Gambar 2. 25. Angka Migrasi Risen Kota Binjai**



Sumber: Long Farm SP 2020 Kota Binjai

Analisis tren kelahiran dan kematian di Kota Binjai menunjukkan bahwa angka kelahiran telah mengalami penurunan, dengan TFR yang menurun dari 2,42 pada tahun 2010 menjadi 2,14 pada tahun 2020, sementara angka kematian relatif stabil, menciptakan perubahan dalam struktur penduduk yang cenderung beralih menuju populasi yang lebih tua. Selain itu, dampak migrasi yang tercermin dari angka migrasi risen sebesar 5,88%, menunjukkan bahwa banyak penduduk yang pindah, dapat menyebabkan pergeseran komposisi demografi, terutama dengan dominasi migran perempuan. Tren ini berimplikasi langsung pada kebutuhan perumahan, karena pertumbuhan populasi yang melambat dapat mengurangi tekanan pada pasar perumahan, tetapi migrasi dapat menciptakan kebutuhan baru di area tertentu. Sementara itu, kebutuhan pendidikan juga menjadi lebih kompleks, mengingat struktur usia yang berubah dan penurunan fertilitas, yang berarti bahwa lebih sedikit anak yang memerlukan pendidikan, tetapi peningkatan dalam permintaan untuk pendidikan dan pelatihan yang relevan bagi populasi dewasa. Terakhir, pasar tenaga kerja harus beradaptasi dengan kondisi ini, dimana kebutuhan akan keterampilan baru mungkin meningkat akibat perubahan dalam ekonomi lokal dan kebiasaan migrasi, sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah untuk merancang kebijakan yang memastikan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan dinamika penduduk yang ada.

## **6. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan**

Komposisi penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja dalam usia 15-64 tahun. Jumlah angkatan kerja di Kota Binjai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

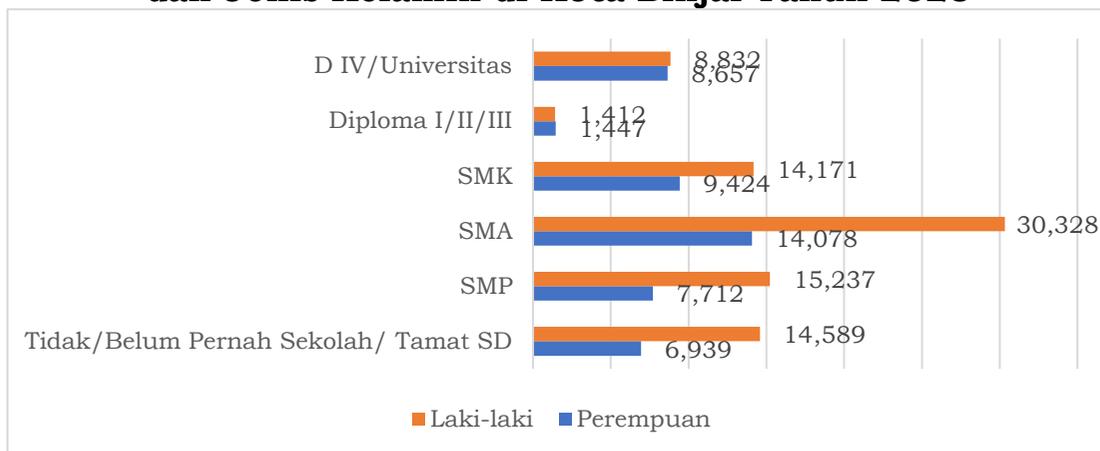
**Tabel 2. 12. Komposisi Penduduk Kota Binjai Menurut Kegiatan Utama Tahun 2019-2023**

<b>Kegiatan Utama</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Angkatan Kerja	135.352	139.445	136.357	129.157	141.448
Bukan Angkatan Kerja	67.009	74.635	80.878	91.195	83.808
Jumlah	202.361	214.080	217.235	220.352	225.256

*Sumber: BPS Kota Binjai*

Dari Tabel di atas diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Binjai dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 135.352 jiwa di tahun 2019 menjadi 141.448 jiwa di tahun 2023. Sedangkan jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja juga menunjukkan peningkatan dari 67.009 jiwa di tahun 2019 menjadi 83.808 jiwa di tahun 2023.

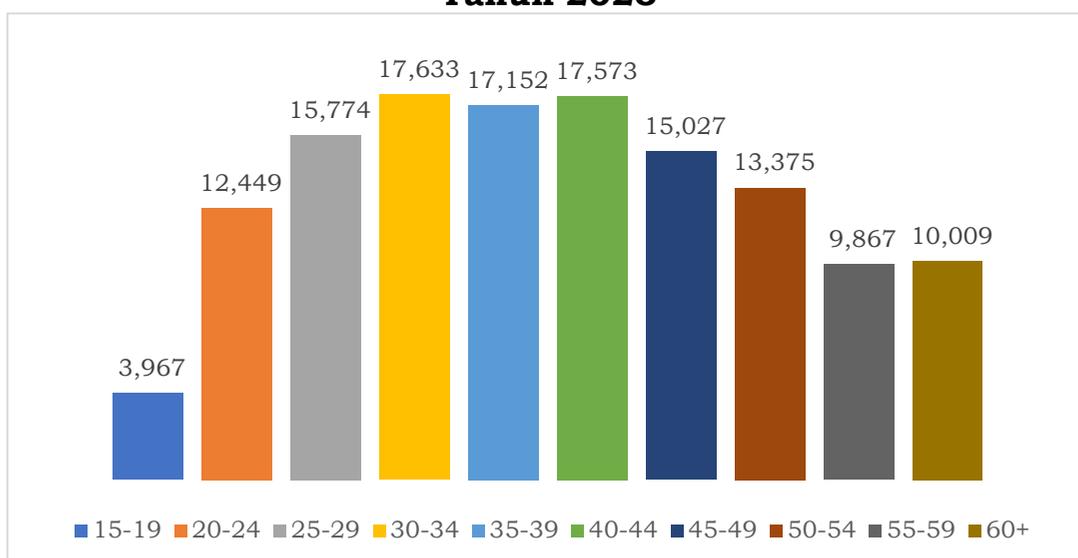
**Gambar 2. 26. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Binjai Tahun 2023**



Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Dari grafik di atas bisa dilihat bahwa mayoritas penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja di Kota Binjai adalah berpendidikan SLTA/ sederajat.

**Gambar 2. 27. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Golongan Umur di Kota Binjai Tahun 2023**

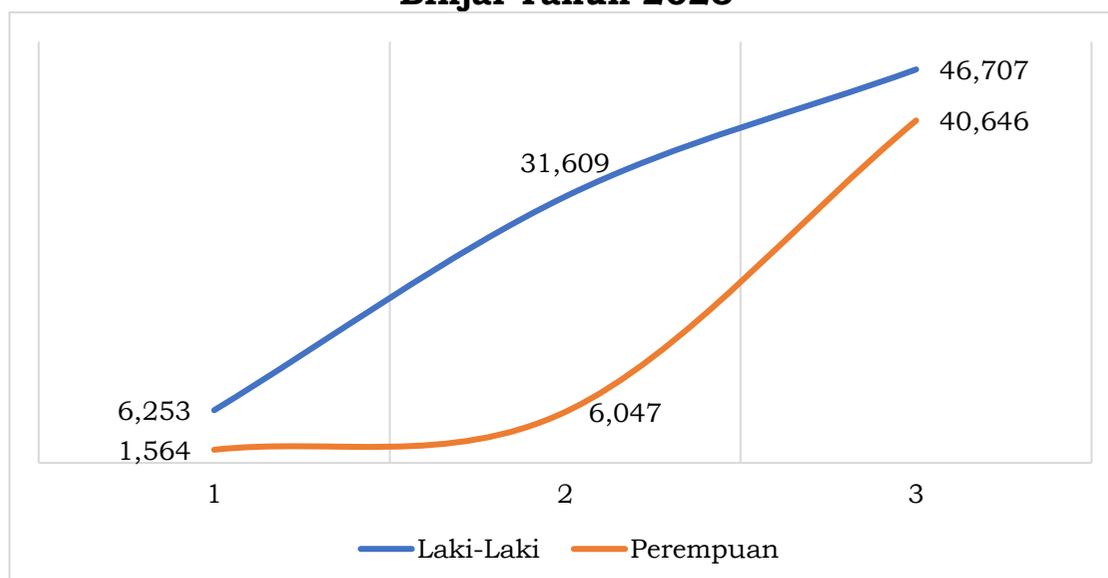


Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Jika dilihat dari usia, penduduk Kota Binjai berumur 15 tahun keatas yang bekerja didominasi golongan umur 30-34 tahun

sebanyak 17.633 jiwa dan golongan umur 40-44 tahun sebanyak 17.573 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 3.967 jiwa.

**Gambar 2. 28. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Binjai Tahun 2023**



Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Keterangan :

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan.
2. Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas, dan Air.
3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan.

Penduduk Kota Binjai menurut lapangan pekerjaan utama mayoritas bekerja di sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan.

Perubahan ekonomi global dan lokal telah memberikan dampak signifikan terhadap distribusi pekerjaan di Kota Binjai, dimana sektor-sektor seperti perdagangan, perhotelan, dan jasa menjadi lebih dominan akibat pergeseran tren konsumsi dan peningkatan permintaan untuk layanan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan agar tenaga kerja dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar yang terus berubah. Peningkatan keterampilan di bidang teknologi informasi,

pemasaran digital, serta manajemen bisnis akan sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Menyelaraskan strategi ini dengan tujuan RPJPD, penting untuk memperkuat akses ke pendidikan vokasional dan program pelatihan yang praktis, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan program-program pelatihan yang sesuai, diharapkan dapat tercipta tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap bersaing di pasar kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Binjai.

## 7. Penduduk Menurut Agama

Analisis jumlah penduduk menurut agama mengkategorikan penduduk di Kota Binjai berdasarkan agama yang dianut. Besaran jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan data dari publikasi Kota Binjai Dalam Angka 2023, agama yang dianut oleh penduduk Kota Binjai diantaranya adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan Kepercayaan. Kota Binjai didominasi oleh penduduk beragama Islam dengan angka mencapai 257.744 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara penduduk beragama Islam dengan agama lain hampir sebesar 85%.

**Tabel 2. 13. Komposisi Penduduk Kota Binjai Menurut Agama Tahun 2022**

Agama	Binjai Selatan	Binjai Kota	Binjai Timur	Binjai Utara	Binjai Barat	Kota Binjai
Islam	54.913	23.265	56.860	79.513	43.193	257.744
Kristen Katolik	332	316	1.436	813	466	3.363
Kristen Protestan	4.396	2.856	7.905	5.367	1.913	22.437
Hindu	65	220	301	46	94	726
Budha	148	7.501	115	2.236	6.278	16.278
Konghucu	0	3	0	0	1	4
Kepercayaan	6	1	0	0	0	7

Sumber: BPS Kota Binjai, 2023

Keragaman agama di Kota Binjai memiliki implikasi penting terhadap kebutuhan fasilitas keagamaan dan pengaruhnya terhadap kohesi sosial. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kebutuhan akan masjid dan fasilitas keagamaan lainnya

sangat mendesak, namun juga penting untuk memastikan ketersediaan fasilitas bagi penganut agama lain seperti gereja, pura, dan vihara untuk menciptakan ruang yang inklusif. Pemenuhan kebutuhan fasilitas ini dapat memperkuat rasa saling menghormati dan toleransi antar kelompok agama, yang pada gilirannya berkontribusi pada kohesi sosial di Kota Binjai. Dalam perencanaan ruang publik, penting untuk menciptakan ruang yang dapat digunakan bersama oleh berbagai komunitas, seperti taman terbuka, pusat kegiatan, dan ruang pertemuan, yang dapat mendukung interaksi antar agama dan kegiatan lintas budaya. Hal ini sejalan dengan tujuan RPJPD untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, dimana semua kelompok dapat hidup berdampingan secara damai dan saling mendukung dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, keberagaman agama bukan hanya dilihat sebagai tantangan, tetapi sebagai aset yang dapat memperkuat struktur sosial dan memperkaya kehidupan komunitas di Kota Binjai.

## 8. Penduduk Menurut Pendidikan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat memberi gambaran tentang jenjang pendidikan tertinggi dan kualitas penduduknya dari segi pendidikan. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai, persentase penduduk usia 15 tahun keatas menurut pendidikan hingga jenjang SMA/ sederajat sebesar 64,11%.

**Tabel 2. 14. Persentase Penduduk 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi di Kota Binjai Tahun 2023**

Jenis Kelamin	Tidak Punya Ijazah SD	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA keatas
Laki-laki	2,19	13,36	18,58	65,88
Perempuan	4,80	13,88	18,93	62,39
<b>Jumlah</b>	<b>3,15</b>	<b>13,62</b>	<b>18,76</b>	<b>64,11</b>

Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Jika melihat berdasarkan jenis kelamin, maka penduduk Kota Binjai yang berjenis kelamin perempuan masih lebih banyak yang belum menyelesaikan jenjang SMA keatas dibandingkan penduduk Kota Binjai yang berjenis kelamin laki-laki. Kondisi yang

sama juga terlihat pada jenjang SMP, SD dan juga yang tidak sekolah sama sekali.

Tingkat pendidikan yang baik di Kota Binjai memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian lokal. Pendidikan yang lebih tinggi tidak hanya meningkatkan keterampilan dan kompetensi individu, tetapi juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Penduduk dengan pendidikan yang memadai cenderung lebih inovatif dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, yang esensial untuk meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, adanya peningkatan tingkat pendidikan dapat menarik investasi dan pengembangan sektor-sektor baru, seperti industri kreatif dan teknologi, yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Dengan lebih banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, Kota Binjai berpotensi untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat basis ekonomi lokal. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan aksesibilitasnya menjadi prioritas strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan jangka panjang RPJPD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dianalisis melalui pembahasan laju pertumbuhan ekonomi, indeks gini, garis kemiskinan, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia. Kesejahteraan dan pemberdayaan sosial budaya dianalisis melalui pembahasan indeks keluarga sehat, indeks kualitas keluarga, indeks perlindungan anak, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, indeks ketimpangan gender, indeks pembangunan pemuda dan indeks pembangunan kebudayaan.

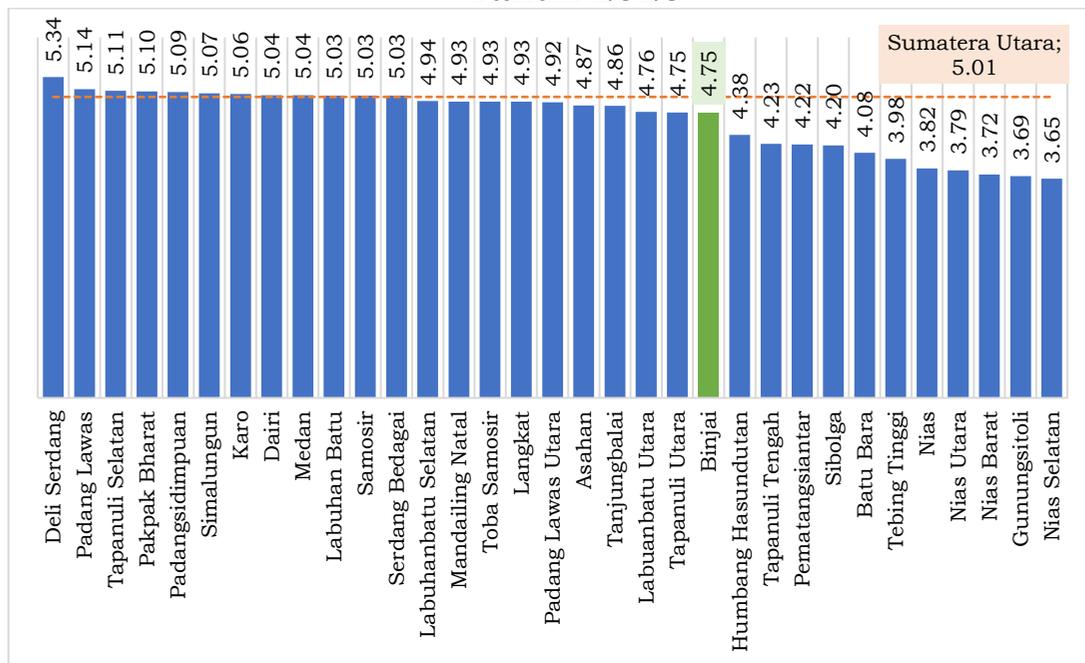
### 2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi

Aspek ini menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia.

#### 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun untuk menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah.

**Gambar 2. 29. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Dibandingkan Kabupaten/ Kota Lain di Sumatera Utara Tahun 2023**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

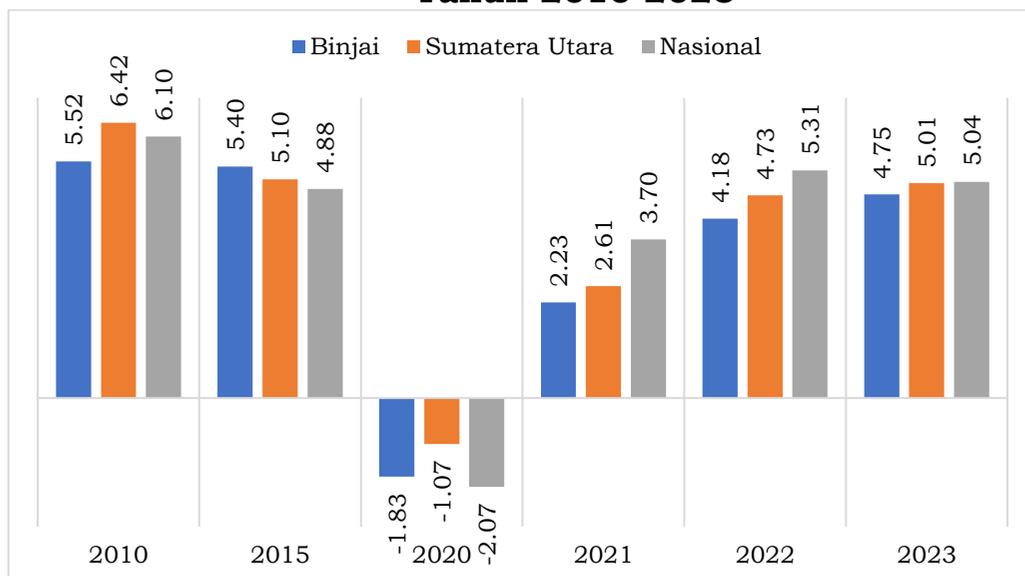
Berdasarkan gambar diatas, laju pertumbuhan PDRB Kota Binjai pada tahun 2023 berada di posisi tengah kanan, jika dibandingkan kabupaten/ kota di Sumatera Utara yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Ketika membandingkan pertumbuhan ekonomi Kota Binjai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional maka pada tahun 2010 hingga tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota

Binjai lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara maupun Nasional kecuali di tahun 2015.

Tahun 2021 hingga 2023, walaupun pertumbuhan ekonomi Kota Binjai terus meningkat tetapi lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya langkah-langkah strategis untuk bisa menciptakan kondisi yang bisa memicu pergerakan ekonomi yang lebih tinggi sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Binjai seperti tahun 2015.

Sektor yang memiliki laju pertumbuhan terbesar pada tahun 2023 adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,45%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas restoran maupun penginapan di Kota Binjai. Kemudian, sektor yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi terbesar kedua serta ketiga masing-masing adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,20% dan Sektor Jasa Perusahaan sebesar 6,20%.

**Gambar 2. 30. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2010-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor ekonomi di Kota Binjai tahun 2023 yang mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan

pengeluaran Pemerintah Kota Binjai yang sebelumnya tumbuh pesat sebagai langkah antisipasi dan *trigger* (penggerak) perekonomian Kota Binjai pada saat dan setelah pandemi Covid-19. Peran serta swasta dalam perekonomian Kota Binjai telah kembali normal dan diperlukan untuk bisa ditingkatkan sehingga perekonomian Kota Binjai kembali tumbuh dan memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Tabel 2. 15. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Berdasarkan Lapangan Usaha**

Lapangan Usaha	2010	2015	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,11	0,11	0,38	1,03	2,71	2,88
Pertambangan dan Penggalian	1,16	3,48	-1,28	2,74	2,32	1,65
Industri Pengolahan	3,78	3,75	-3,18	2,39	2,85	3,26
Pengadaan Listrik dan Gas	5,23	9,07	5,67	4,62	6,53	4,50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,43	11,18	2,37	-0,55	0,58	2,69
Konstruksi	9,89	5,43	-4,46	2,18	0,44	2,96
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,55	6,31	-1,02	3,63	5,47	5,53
Transportasi dan Pergudangan	7,27	7,57	-6,35	-1,48	5,79	8,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,66	3,56	-7,88	1,10	9,57	9,45
Informasi dan Komunikasi	13,95	12,26	7,34	6,87	7,27	6,05
Jasa Keuangan dan Asuransi	14,13	2,53	1,68	5,10	5,50	4,05
Real Estate	4,16	6,78	1,57	0,24	4,94	3,13
Jasa Perusahaan	5,95	4,67	-4,71	-0,14	6,82	6,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,37	6,04	-0,66	-0,45	-0,45	1,33
Jasa Pendidikan	4,58	4,62	1,52	3,05	2,25	4,77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,15	2,88	-1,20	0,94	4,25	4,62
Jasa Lainnya	5,03	3,24	-1,31	1,43	2,68	3,57
<b>Kota Binjai</b>	<b>5,52</b>	<b>5,40</b>	<b>-1,83</b>	<b>2,23</b>	<b>4,18</b>	<b>4,75</b>

Sumber: BPS Kota Binjai

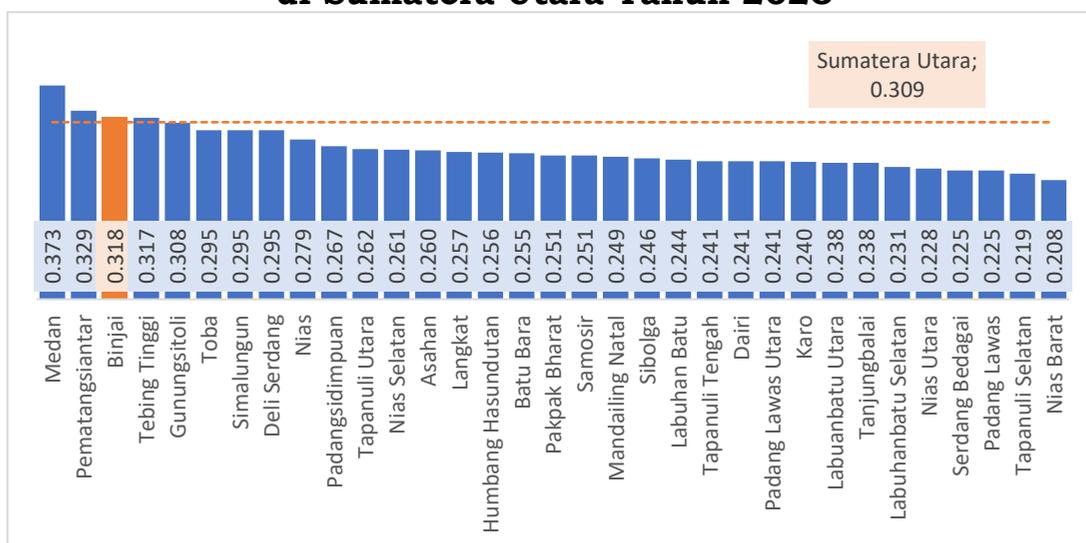
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Binjai, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi pengembangan sektor unggulan, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah pertama adalah mendorong investasi di sektor penyediaan akomodasi dan makanan serta transportasi, yang menunjukkan potensi pertumbuhan tinggi. Selanjutnya, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur transportasi dan utilitas untuk mendukung

kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Peningkatan akses pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan juga sangat penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan akan menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan pendekatan terintegrasi ini, diharapkan Kota Binjai dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Indeks Gini/ Koefisien Gini

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati 1 (satu) maka semakin parah ketimpangan di wilayah tersebut. Gambar berikut menunjukkan Indeks Gini kabupaten/ kota di Sumatera Utara pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya maka posisi Kota Binjai berada di posisi urutan ketiga tertinggi dengan nilai Indeks Gini sebesar 0,318 yang menunjukkan kondisi ketimpangan yang relatif tinggi dibandingkan ketimpangan pada kabupaten/ kota lainnya di Sumatera Utara.

**Gambar 2. 31. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara Tahun 2023**

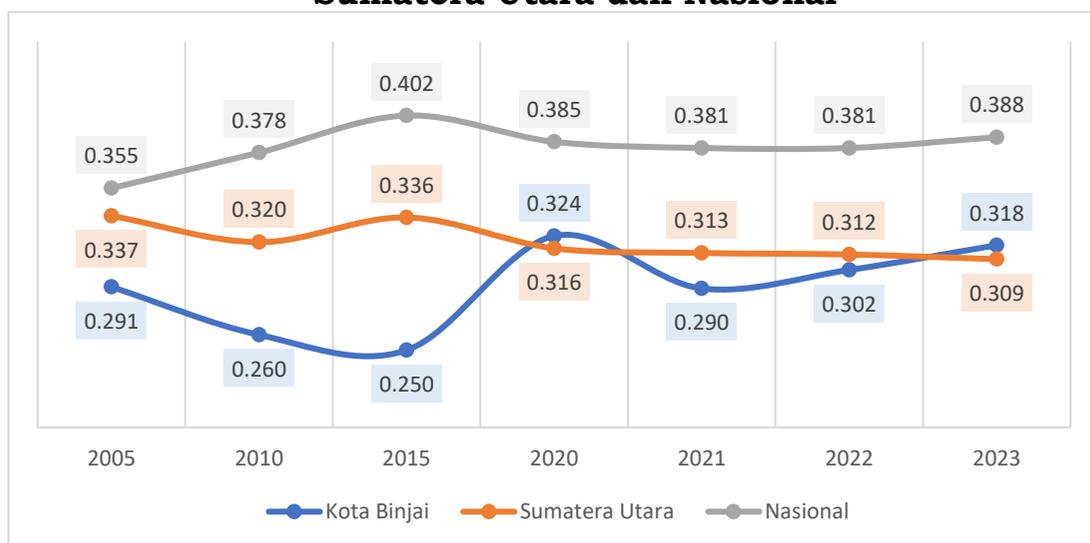


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

Indeks Gini Kota Binjai dari tahun 2005 hingga tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Dimana pada tahun 2005, Indeks Gini Kota Binjai ada pada angka 0,291 yang lebih rendah dibandingkan Indeks Gini Sumatera Utara maupun Nasional.

Untuk memperbaiki distribusi pendapatan di Kota Binjai, langkah kebijakan yang komprehensif perlu diimplementasikan dengan fokus pada penciptaan peluang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga angkatan kerja yang ada dapat bersaing di pasar kerja yang lebih luas. Selain itu, mendorong investasi di sektor-sektor yang padat karya seperti industri kecil dan menengah dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Kebijakan perpajakan yang progresif juga penting untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, dimana pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi dapat dialokasikan untuk program-program sosial yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memperkuat jaring pengaman sosial, diharapkan ketimpangan pendapatan dapat berkurang dan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai dapat meningkat secara keseluruhan.

**Gambar 2. 32. Perbandingan Indeks Gini Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Gini Kota Binjai pada tahun 2020 paling tinggi dibandingkan periode pengamatan dengan nilai sebesar 0,324 yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi tetapi masih lebih rendah dibandingkan Nasional. Indeks Gini Kota Binjai di tahun 2023 mencapai 0,318 yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi tetapi lebih rendah jika dibandingkan Nasional.

### 3. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS berisi gambaran persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Jumlah penduduk miskin di Kota Binjai menunjukkan trend fluktuasi yang cenderung menurun dari 16.700 jiwa di tahun 2005 menjadi 13.850 jiwa di tahun 2023.

**Gambar 2. 33. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Binjai**

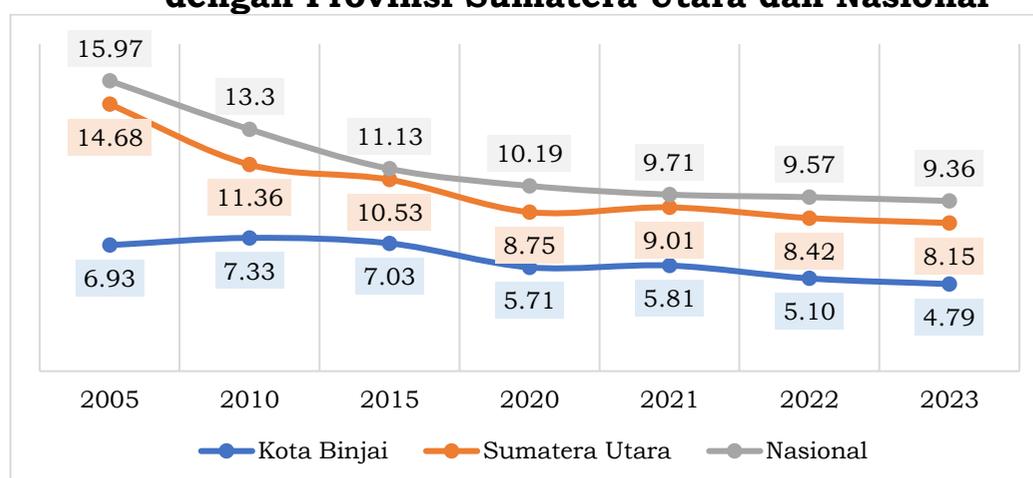


Sumber: BPS Kota Binjai

Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Binjai turun menjadi 15.910 jiwa dibandingkan kondisi pada tahun 2015, namun tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan jumlah penduduk miskin di Kota Binjai yang lebih disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penduduk miskin di Kota Binjai meningkat menjadi 16.460 jiwa pada tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 14.610 jiwa diakibatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan menjadi 13.850 jiwa pada tahun 2023.

Pergerakan persentase angka kemiskinan juga mengikuti pola pergerakan jumlah penduduk miskin di Kota Binjai. Dimana pada tahun 2005, angka kemiskinan Kota Binjai mencapai 5,93% yang kemudian meningkat menjadi 7,33% di tahun 2010 sebelum menurun menjadi 7,03% di tahun 2015 dan menurun kembali menjadi 5,71% pada tahun 2020. Angka kemiskinan Kota Binjai meningkat di tahun 2021 menjadi 5,81% yang kemudian kembali menurun menjadi 5,10% di tahun 2022 dan menjadi 4,79% pada tahun 2023.

**Gambar 2. 34. Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Binjai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional**



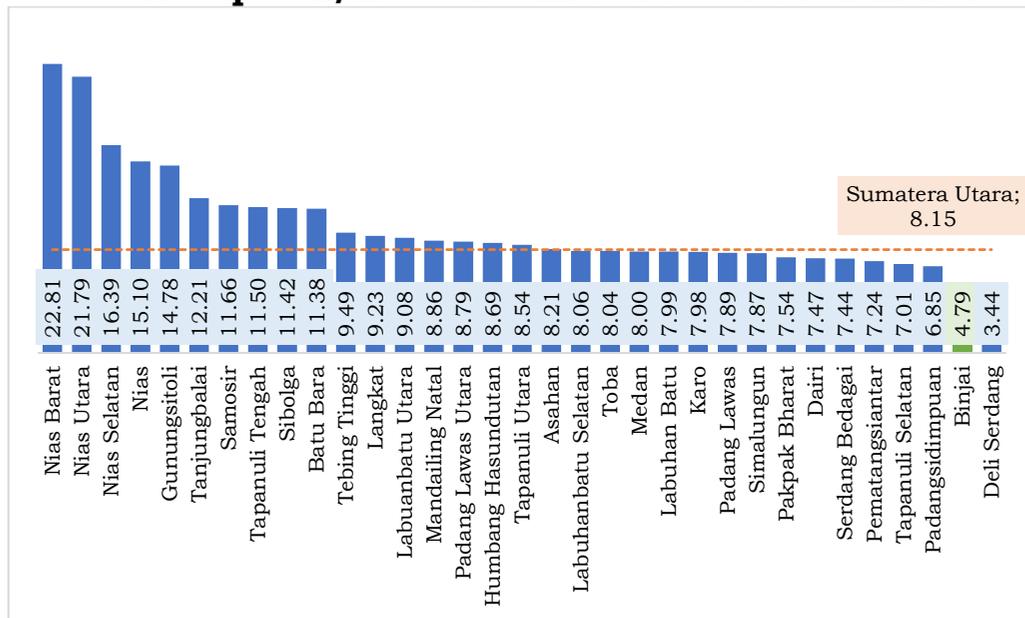
Sumber: BPS Kota Binjai

Tingkat kemiskinan Kota Binjai dari tahun 2005 hingga tahun 2023 cukup rendah jika dibandingkan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara maupun secara Nasional. Tingkat kemiskinan Kota Binjai cukup rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di Sumatera Utara pada tahun 2023. Dimana tingkat kemiskinan Kota Binjai menempati posisi kedua terendah setelah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara merupakan dua Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan kabupaten/ kota lainnya di Sumatera Utara pada tahun 2023.

Persoalan kemiskinan bukan hanya mengenai berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan

merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

**Gambar 2. 35. Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2023**

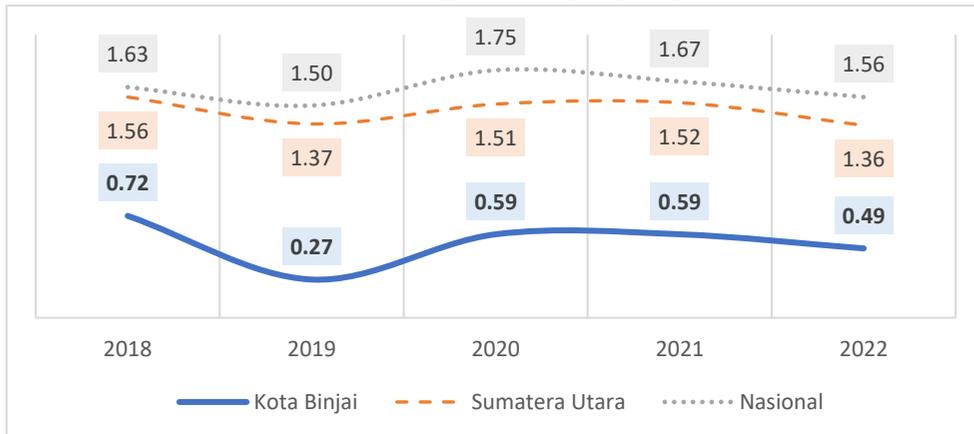


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Binjai tahun 2018-2022 cukup berfluktuasi dengan tren yang menurun. Pada tahun 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Binjai ada pada angka 0,72 yang kemudian menurun menjadi 0,27 di tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 0,59 di tahun 2020 dan juga di tahun 2021 yang kemudian menurun menjadi 0,49 pada tahun 2022 dan menurun tipis menjadi 0,48 pada tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan Sumatera Utara maupun secara Nasional, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Binjai masih lebih baik selama periode 2018 sampai 2022 dan juga pada tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Sumatera Utara, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Binjai di tahun 2022 menduduki peringkat pertama terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara dan kemudian menduduki peringkat kedua terendah setelah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023.

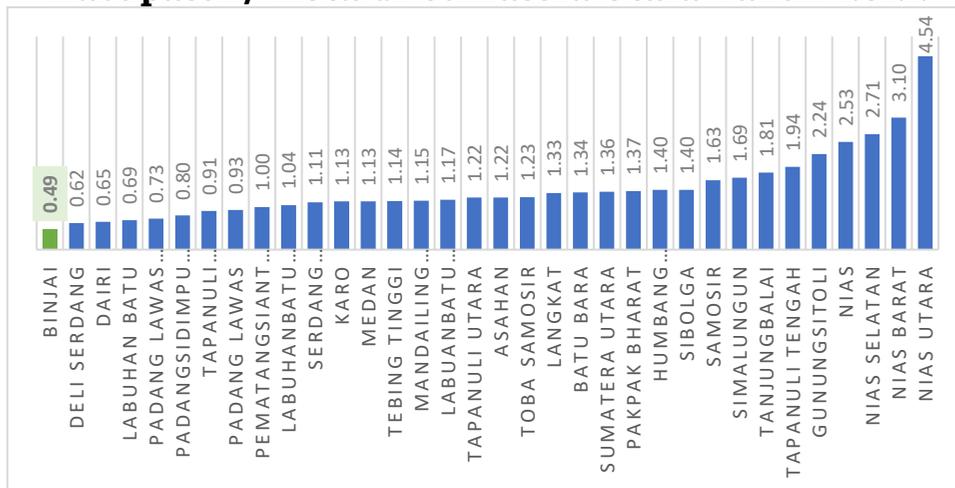
**Gambar 2. 36. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Binjai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kota Binjai lebih rendah dibandingkan kabupaten/ kota lainnya di Sumatera Utara pada tahun 2022 dan tahun 2023. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan paling tinggi di Sumatera Utara pada tahun 2022 ada di Kabupaten Nias Utara dan pada tahun 2023 ada di Kabupaten Nias Selatan.

**Gambar 2. 37. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara Tahun 2022**



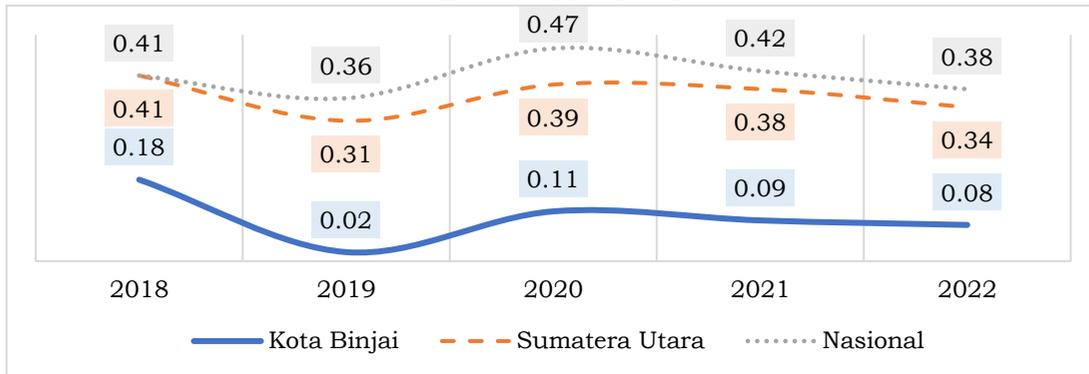
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi Indeks Keparahan Kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Binjai tahun 2018-2022 cukup berfluktuasi dengan tren yang menurun.

Pada tahun 2018, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Binjai ada pada angka 0,18 yang kemudian menurun menjadi 0,02 di tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 0,11 di tahun 2020 dan kembali menurun menjadi 0,09 di tahun 2021 yang kemudian menurun tipis menjadi 0,08 pada tahun 2022 dan kembali menurun tipis menjadi 0,06 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Sumatera Utara maupun secara Nasional, maka Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Binjai masih lebih rendah selama periode tahun 2018 sampai 2022 dan juga pada tahun 2023.

Strategi penanganan kemiskinan pasca-pandemi di Kota Binjai perlu dilakukan dengan pendekatan multi-sektoral yang lebih terintegrasi, fokus pada pengembangan program-program berbasis komunitas dan pelatihan keterampilan. Salah satu langkah awal adalah memperkuat jaringan bantuan sosial yang telah ada, dengan memperluas cakupan program penyaluran bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin, sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusinya. Selain itu, implementasi program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal harus menjadi prioritas, sehingga para penerima manfaat dapat mengakses peluang kerja yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan vokasional secara *daring* juga dapat menjadi solusi efektif, terutama di daerah dengan kemiskinan tertinggi. Disamping itu, pemerintah perlu melibatkan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberian akses modal yang lebih mudah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ketahanan ekonomi masyarakat dapat terbangun dan angka kemiskinan di Kota Binjai dapat terus menurun.

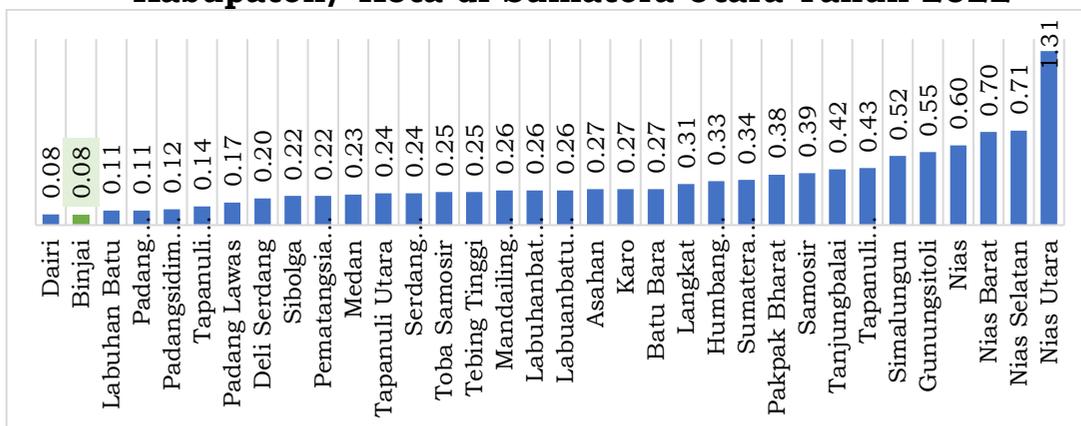
**Gambar 2. 38. Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Binjai dengan Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Binjai tahun 2022 sebesar 0,08 menempatkan Kota Binjai bersama Kabupaten Dairi menjadi 2 (dua) wilayah dengan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan paling rendah dibandingkan wilayah kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara dengan nilai sebesar 0,08. Dimana Kabupaten Nias Utara merupakan wilayah di Sumatera Utara dengan Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 1,31. Namun, Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi di Sumatera Utara pada tahun 2023 beralih kepada Kabupaten Nias Selatan dengan nilai sebesar 0,84. Sedangkan Kota Binjai menjadi wilayah dengan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan paling rendah dibandingkan wilayah kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 0,06.

**Gambar 2. 39. Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara Tahun 2022**



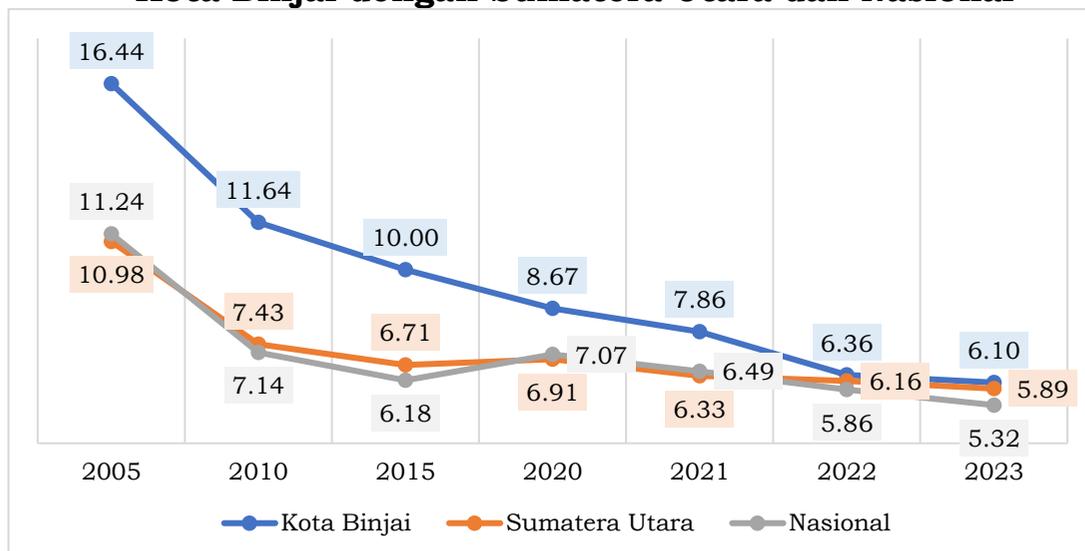
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023

#### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Binjai menunjukkan tren penurunan dari 16,44% di tahun 2005 menjadi 6,10% pada tahun 2023. Dimana akselerasi perekonomian setelah pandemi covid-19 menyebabkan banyak lapangan kerja baru yang tersedia di Kota Binjai yang mengurangi jumlah pengangguran sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Binjai selalu lebih tinggi dibandingkan TPT Sumatera Utara maupun Nasional dari tahun 2005-2023. Kondisi ini menunjukkan daya tarik Kota Binjai sebagai hub pusat pemerintahan maupun perdagangan dan jasa serta ekonomi di Sumatera Utara yang menyebabkan datangnya tenaga kerja dari berbagai wilayah di sekitar untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan wilayah asal tenaga kerja, sehingga menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Binjai walaupun ketersediaan lapangan pekerjaan tersebut lebih banyak dibandingkan ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah asal tenaga kerja tersebut.

**Gambar 2. 40. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai dengan Sumatera Utara dan Nasional**

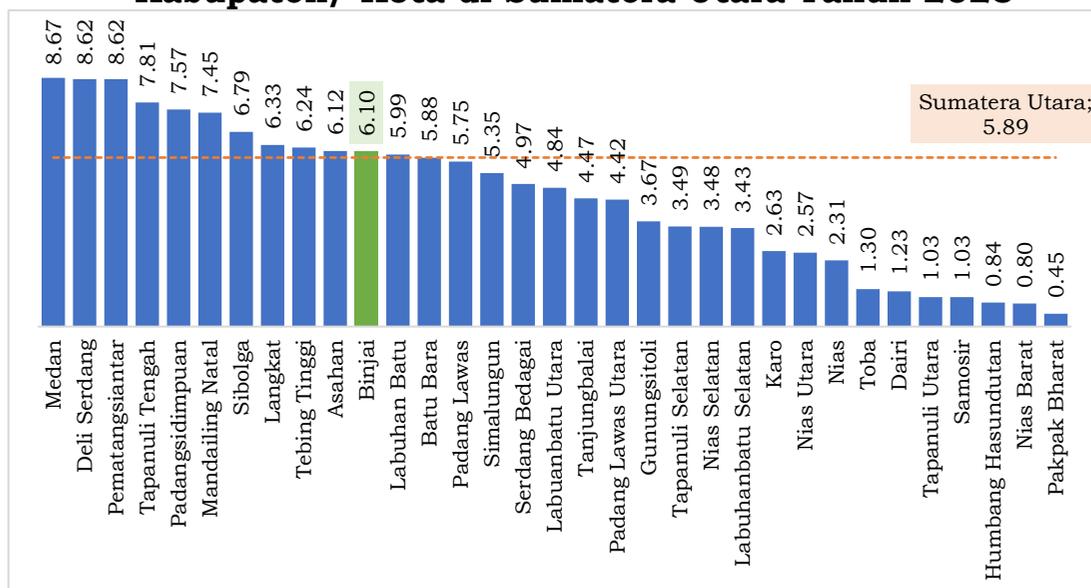


Sumber: Badan Pusat Statistik

Kondisi ini menjadi tantangan yang harus bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Binjai untuk bisa dijadikan sebagai sumber daya utama pendorong kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan mengundang para investor. Sehingga lapangan pekerjaan menjadi meningkat yang pada akhirnya akan bisa menurunkan tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Binjai kedepannya.

Dengan penambahan *output* total diharapkan terjadinya peningkatan pendapatan setiap orang, sehingga akumulasi tabungan juga bertambah. Akumulasi tabungan yang baik dari penduduk usia produktif saat ini dapat digunakan individu-individu tersebut untuk berinvestasi dan memenuhi kebutuhan hidup saat lanjut usia ke depannya, atau biasa disebut dengan bonus demografi tahap kedua. Jika kesempatan emas ini tidak dimanfaatkan dengan baik, justru menimbulkan masalah seperti angka pengangguran yang meningkat, ketidakseimbangan antara sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang dibutuhkan, dan risiko terjadinya *middle income trap*.

**Gambar 2. 41. Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara Tahun 2023**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

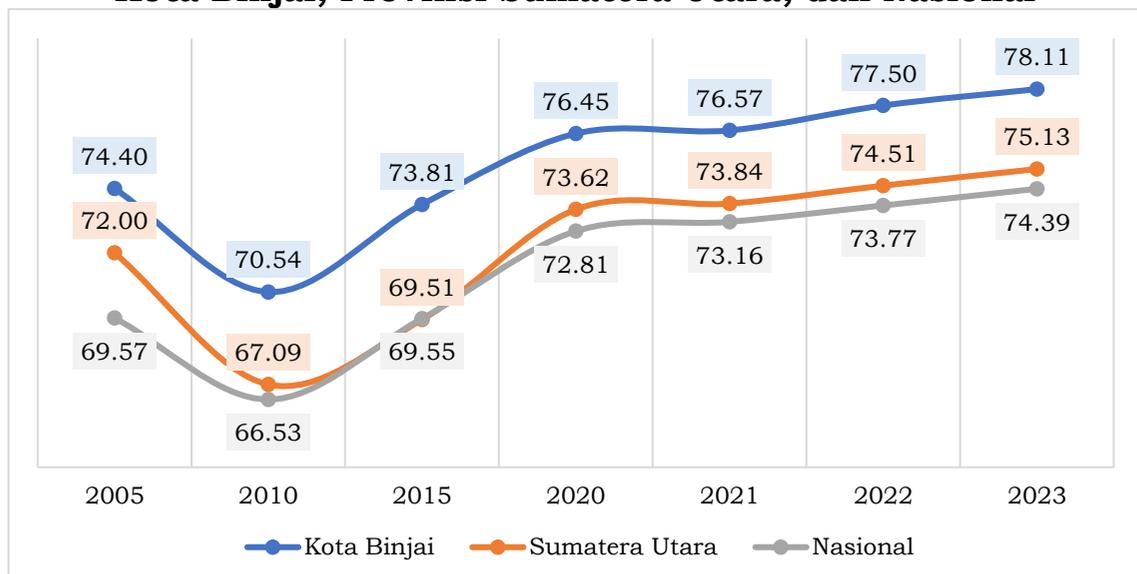
Program peningkatan kualitas tenaga kerja lokal di Kota Binjai sebaiknya difokuskan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Program

ini dapat mencakup penyelenggaraan pelatihan keterampilan teknis dan non-teknis melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, perusahaan, dan pemerintah daerah. Kegiatan pelatihan ini perlu dirancang untuk mencakup berbagai sektor, seperti teknologi informasi, kerajinan tangan, pertanian modern, dan layanan kesehatan. Selain itu, implementasi program magang di perusahaan lokal akan memberikan pengalaman langsung bagi tenaga kerja muda, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja. Untuk mendukung keberlanjutan program, penting juga untuk membangun jaringan antara lulusan pelatihan dengan industri, serta memberikan akses terhadap informasi pasar kerja yang *up to date*. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan kualitas tenaga kerja lokal dapat meningkat, sehingga mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis.

## 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran rata-rata capaian aspek utama pembangunan manusia yang meliputi umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

**Gambar 2. 42. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional**

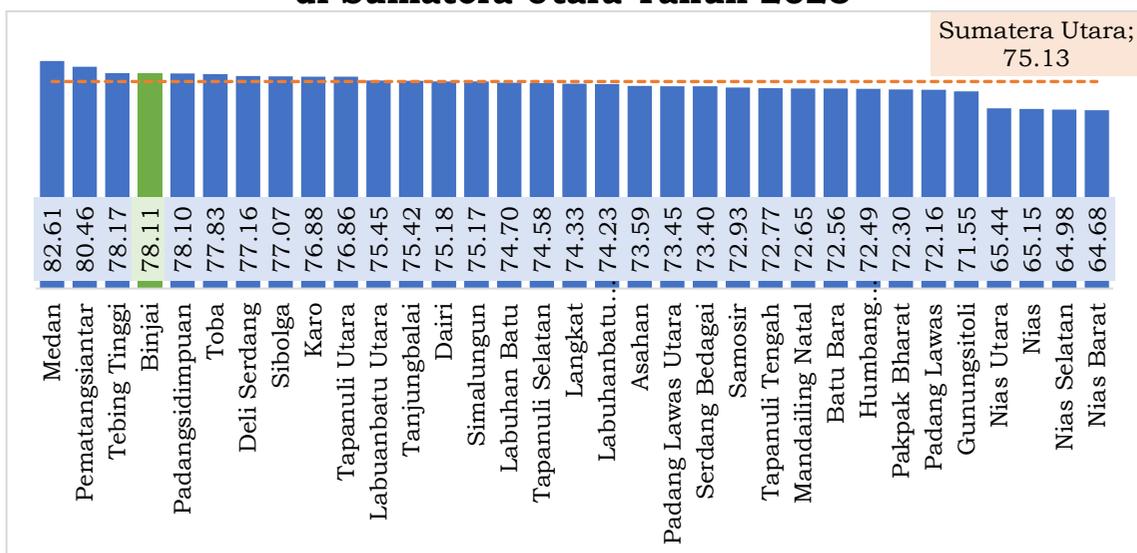


Sumber: Badan Pusat Statistik

Pengukuran IPM pada aspek kesehatan mengacu pada indikator angka harapan hidup. Aspek pengetahuan dapat diukur melalui indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk aspek hidup layak dapat diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Gambar diatas menunjukkan perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Binjai dengan Sumatera Utara dan Nasional dari tahun 2005 hingga tahun 2023 yang menunjukkan adanya *gap* antara IPM Kota Binjai dengan IPM Sumatera Utara maupun IPM Nasional walaupun tren ketiga IPM tersebut sama-sama menunjukkan peningkatan. IPM Kota Binjai meningkat dari 74,40 pada tahun 2005 menjadi 78,11 di tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan kualitas penduduk Kota Binjai dari sisi kesehatan, Pendidikan, dan standar kehidupan terus mengalami perbaikan dan peningkatan yang positif setiap tahunnya.

**Gambar 2. 43. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2023**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Binjai sangat baik dibandingkan kabupaten/kota di Sumatera Utara, dimana Kota Binjai menempati peringkat keempat tertinggi dari

seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2023. Dengan nilai IPM tahun 2023 sebesar 78,11 maka nilai IPM Kota Binjai pada tahun 2023 berada diatas rata-rata IPM Sumatera Utara dengan nilai sebesar 75,13 dan hanya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian IPM Kota Medan, Kota Pematangsiantar dan Kota Tebing Tinggi. Kondisi ini menunjukkan kualitas hidup penduduk Kota Binjai sudah sangat baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi kelompok rentan di Kota Binjai merupakan langkah krusial untuk mengejar peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Strategi ini harus mencakup penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih memadai, seperti puskesmas dan klinik di daerah pinggiran kota untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, program pendidikan yang inklusif perlu diperkenalkan, dengan fokus pada beasiswa dan program literasi yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta pelatihan keterampilan bagi orang dewasa guna meningkatkan kesempatan kerja mereka. Dalam sektor ekonomi, dukungan terhadap usaha mikro dan kecil melalui akses modal yang lebih mudah dan pelatihan kewirausahaan akan memberdayakan kelompok rentan untuk mandiri secara finansial. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini, diharapkan kelompok rentan tidak hanya mampu mengejar ketertinggalan dalam IPM, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial Kota Binjai.

### **2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya**

Aspek ini menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya yang ditunjukkan melalui Indeks Keluarga Sehat, Indeks Kualitas Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Gender, Indeks

Pemberdayaan Gender, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

### **1. Indeks Keluarga Sehat**

Keluarga sehat adalah pondasi masa depan bangsa yang gemilang. Menurut WHO, keluarga sehat berarti keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai.

### **2. Indeks Kualitas Keluarga**

Indeks Kualitas Keluarga atau IKK merupakan indikator dalam mengukur peningkatan kualitas keluarga yang dapat digunakan sebagai tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Hasil capaian IKK juga dapat digunakan untuk menemukenali permasalahan kualitas keluarga dan mengarahkan pada intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota.

### **3. Indeks Perlindungan Anak**

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah Indikator yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA disusun berdasarkan 5 klaster hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan perlindungan khusus. IPA terdiri dari 27 indikator yang mewakili 5 klaster hak anak, yaitu: Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan); Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif); Klaster III (Kesehatan Dasar dan

Kesejahteraan); Klaster IV (Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang); dan Klaster V (Perlindungan Khusus). Penghitungan IPA dilakukan dengan tahapan proses seleksi indikator, normalisasi, penentuan bobot, tiap kluster dan tahapan penghitungan indeks, baik untuk setiap kluster maupun keseluruhannya.

**Tabel 2. 16. Indeks Perlindungan Anak Kota Binjai**

Tahun	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
2021	46,22	76,35	79,00	36,14	85,71	<b>65,62</b>
2022	42,16	81,55	79,27	33,33	79,88	<b>64,21</b>

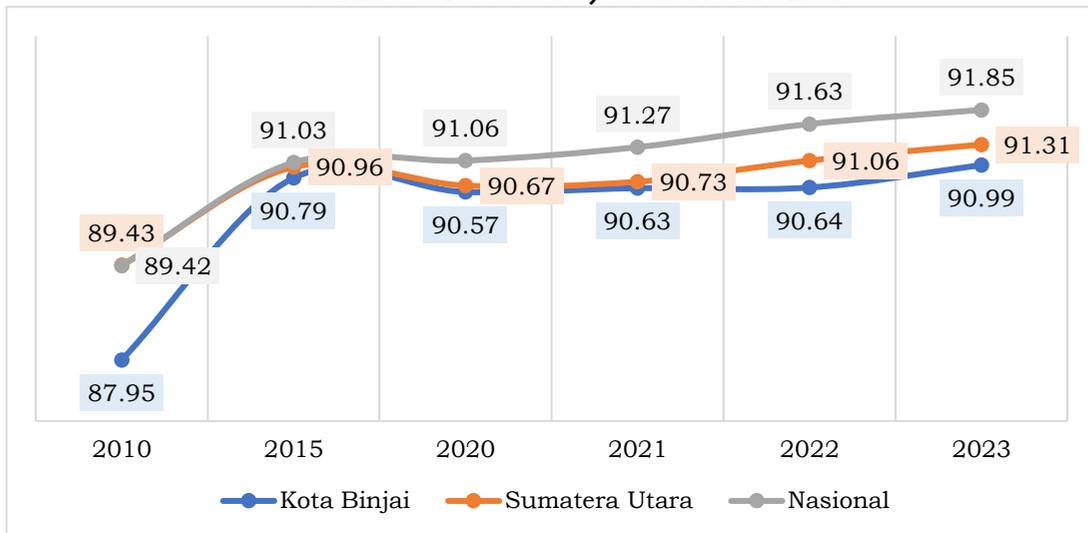
Sumber: <https://siga.kemenpppa.go.id/>

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Binjai mengalami penurunan dari 65,62 poin di tahun 2021 menjadi 64,21 poin pada tahun 2022. Penurunan IPA Kota Binjai didorong oleh penurunan komponen hak sipil dan kebebasan (dari 46,22 menjadi 42,16), pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (dari 36,14 menjadi 33,33) dan perlindungan khusus (dari 85,71 menjadi 79,88). Dua komponen lainnya mengalami peningkatan, yaitu komponen lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (dari 76,35 menjadi 81,55) dan komponen kesehatan dasar dan kesejahteraan (dari 79,00 menjadi 79,27).

#### **4. Indeks Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara IPM penduduk berjenis kelamin perempuan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Binjai cenderung meningkat dari 87,95 di tahun 2010 menjadi 90,99 di tahun 2023.

**Gambar 2. 44. Indeks Pembangunan Gender Kota Binjai, Sumatera Utara, dan Nasional**



Sumber: Badan Pusat Statistik

IPG Kota Binjai relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian Nasional maupun Sumatera Utara, dimana dalam kurun tiga tahun terakhir IPG Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan yang sedikit melambat sehingga Pemerintah Kota Binjai perlu meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, politik, maupun ekonomi kepada penduduk berjenis kelamin perempuan sehingga IPG Kota Binjai lebih baik posisinya dibandingkan dengan pencapaian Sumatera Utara maupun secara Nasional. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya terobosan untuk meningkatkan pembangunan manusia yang merata antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan yang berjenis kelamin perempuan.

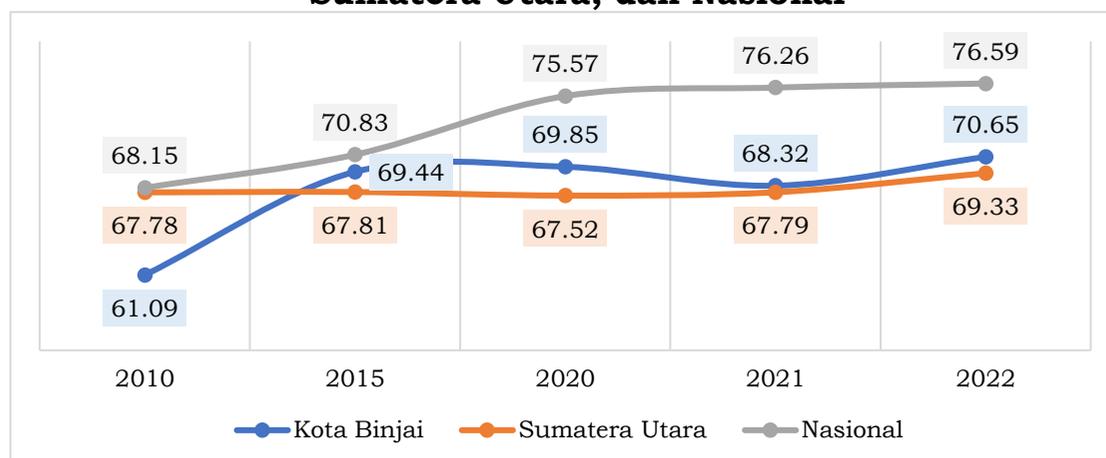
Peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan pasar tenaga kerja di Kota Binjai sangat penting untuk mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Untuk mencapai hal ini, perlu diimplementasikan program-program yang memberikan akses dan dukungan bagi perempuan, termasuk beasiswa pendidikan untuk mahasiswi, pelatihan keterampilan, serta program *mentoring* yang menghubungkan mereka dengan profesional berpengalaman di bidang yang diminati. Selain itu, kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan tinggi bagi perempuan dan keberadaan kesempatan kerja yang setara harus digalakkan, baik di tingkat

komunitas maupun melalui media. Dalam konteks pasar tenaga kerja, perusahaan juga perlu didorong untuk menerapkan kebijakan inklusif yang memfasilitasi perempuan, seperti fleksibilitas waktu kerja dan peluang untuk pengembangan karir. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan pasar tenaga kerja dapat meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing ekonomi Kota Binjai dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

## 5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencerminkan seberapa besar keterlibatan perempuan dalam pembangunan suatu daerah. Indeks ini mengukur partisipasi wanita dalam parlemen dan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Binjai terus meningkat dari 61,09 di tahun 2010 menjadi 70,65 di tahun 2022, namun jika dibandingkan dengan pencapaian IDG Nasional, maka IDG Kota Binjai masih lebih rendah, tetapi jika dibandingkan dengan pencapaian IDG Sumatera Utara, maka IDG Kota Binjai lebih baik sejak tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk berjenis kelamin perempuan di Kota Binjai masih perlu ditingkatkan sehingga berperan lebih aktif dalam bidang politik maupun pembangunan ekonomi. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kota Binjai ditampilkan dalam Gambar berikut.

**Gambar 2. 45. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Binjai, Sumatera Utara, dan Nasional**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik dan ekonomi di Kota Binjai memerlukan langkah-langkah konkret yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pertama, penting untuk menyelenggarakan program pelatihan kepemimpinan dan politik bagi perempuan, yang mencakup pembekalan tentang proses pengambilan keputusan, manajemen organisasi, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Selain itu, perlu ada inisiatif yang memfasilitasi akses perempuan ke sumber daya ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, serta penyediaan modal awal melalui program pinjaman lunak atau hibah. Keterlibatan perempuan dalam jaringan bisnis lokal dan forum diskusi ekonomi juga harus didorong untuk memperluas jejaring dan meningkatkan visibilitas mereka di dunia usaha. Disisi politik, mendorong partai politik untuk memberikan kuota minimal bagi perempuan dalam pencalonan legislatif dapat menjadi langkah signifikan dalam memperkuat representasi mereka. Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi harus digalakkan, untuk menumbuhkan dukungan dari masyarakat secara luas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perempuan di Kota Binjai dapat lebih aktif terlibat dalam politik dan ekonomi, serta berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan daerah.

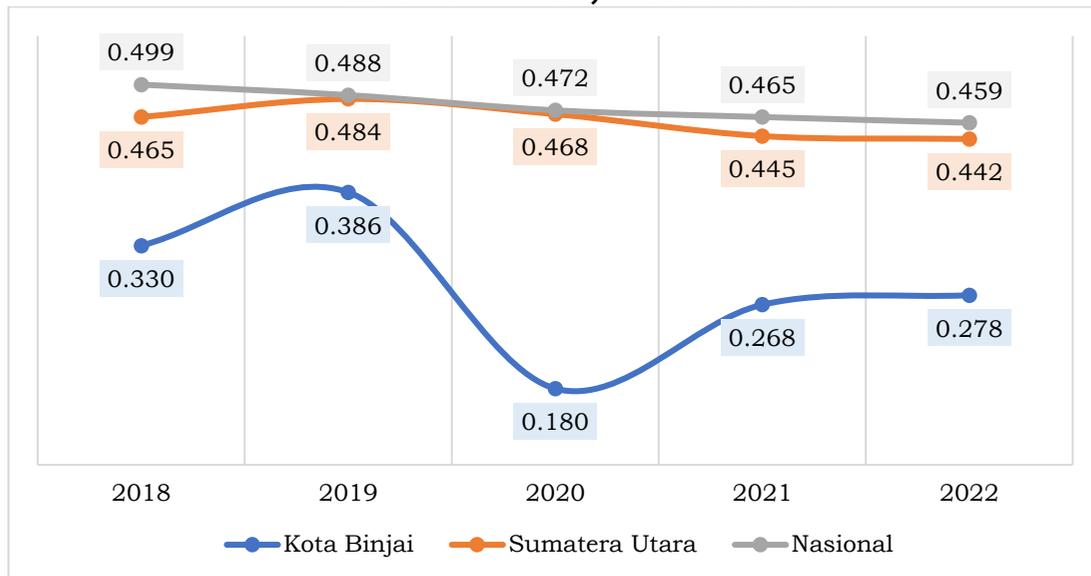
## **6. Indeks Ketimpangan Gender**

Indeks Ketimpangan Gender mencerminkan secara komposit pencapaian perempuan pada aspek kesehatan dan pendidikan, ekonomi, dan keterlibatan dalam parlemen. Indeks Ketimpangan Gender Kota Binjai cenderung membaik dari 0,330 poin menjadi 0,278 poin dalam kurun waktu 2018-2022.

Jika dilihat mulai dari tahun 2020, maka Indeks Ketimpangan Gender Kota Binjai ini sebenarnya mengalami peningkatan 0,180 poin menjadi 0,278 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar gender secara umum di Kota Binjai

mengalami penurunan. Ketimpangan Gender Kota Binjai lebih baik kesenjangan dibandingkan dengan pencapaian Sumatera Utara maupun Nasional. Capaian Indikator Ketimpangan Gender Kota Binjai dapat ditampilkan dalam Gambar berikut.

**Gambar 2. 46. Indeks Ketimpangan Gender Kota Binjai, Sumatera Utara, dan Nasional**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Untuk mempertahankan tren positif dalam pemberdayaan gender di Kota Binjai, penting untuk memperluas dan memperkuat program-program yang telah ada di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di sektor pendidikan, rekomendasi mencakup peningkatan akses bagi perempuan dan anak perempuan melalui beasiswa, program *mentoring*, dan pengembangan kurikulum yang responsif gender, serta fasilitas yang ramah perempuan di institusi pendidikan. Di bidang kesehatan, pengembangan program kesehatan reproduksi yang komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan prenatal dan pasca-persalinan. Selain itu, perluasan program kesehatan mental dan dukungan sosial bagi perempuan juga harus menjadi prioritas. Dalam aspek ekonomi, upaya untuk memberdayakan perempuan dalam dunia kerja bisa dilakukan dengan meluncurkan pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan program kewirausahaan yang

membantu perempuan mengembangkan usaha mereka sendiri. Kemitraan dengan sektor swasta juga perlu diperkuat untuk menciptakan peluang kerja yang lebih inklusif bagi perempuan. Terakhir, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap program-program ini penting untuk memastikan efektivitas dan pencapaian tujuan yang diinginkan, sehingga tren positif dalam pemberdayaan gender dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan.

## **7. Indeks Pembangunan Pemuda**

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda pada 5 (lima) domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Peningkatan keterampilan dan partisipasi pemuda merupakan aspek krusial dalam menciptakan generasi yang kompeten dan produktif di Kota Binjai. Kebijakan yang fokus pada pengembangan pemuda harus mencakup program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti pelatihan teknis, digital, dan kewirausahaan. Pemerintah daerah perlu melibatkan sektor swasta untuk menyediakan magang dan program kerja sama yang memberi pemuda pengalaman langsung di dunia kerja, sehingga mereka siap menghadapi tantangan di pasar kerja yang terus berkembang. Selain itu, perluasan akses pendidikan vokasional dan non-formal juga harus diprioritaskan, termasuk penyediaan beasiswa dan dukungan finansial untuk pemuda dari kelompok rentan. Kebijakan ini juga harus mencakup inisiatif untuk mendorong partisipasi pemuda dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat komunitas maupun pemerintah, agar suara dan aspirasi mereka terwakili. Melalui kebijakan yang inklusif dan terintegrasi, diharapkan pemuda di

Kota Binjai tidak hanya memiliki keterampilan yang memadai, tetapi juga terlibat aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

## **8. Indeks Pembangunan Kebudayaan**

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan.

Pembangunan kebudayaan di Kota Binjai menyimpan potensi yang besar, terutama dengan keberagaman budaya yang dimiliki masyarakatnya. Kota ini memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk tradisi, seni, dan kerajinan lokal yang dapat menjadi daya tarik wisatawan dan sumber identitas masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi ini, pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui festival budaya, pameran seni, dan program pelestarian warisan budaya. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan juga cukup signifikan. Perubahan sosial dan globalisasi dapat mengancam kelestarian budaya lokal, dengan banyaknya generasi muda lebih tertarik pada budaya luar yang lebih modern. Selain itu, kurangnya dukungan dan pendanaan untuk program kebudayaan dapat menghambat upaya pelestarian dan pengembangan seni lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang mendukung keberlangsungan budaya lokal, seperti peningkatan pendidikan seni di sekolah, pelatihan bagi seniman lokal, dan penciptaan ruang publik yang dapat menjadi tempat berkumpulnya komunitas budaya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan

pembangunan kebudayaan di Kota Binjai dapat berjalan seimbang antara pelestarian tradisi dan penerimaan inovasi budaya baru.

### 2.3. Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Aspek ini menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan. Analisis terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur Ekonomi, PDRB Per Kapita, Laju Inflasi, Indeks Ekonomi Inklusif, Indeks Ekonomi Hijau, dan Rasio Kewirausahaan.

#### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha menunjukkan komposisi perekonomian menurut jenis kegiatan yang mendukungnya. Tabel berikut menunjukkan perkembangan PDRB ADHB Kota Binjai dari tahun 2010 hingga tahun 2023. Dimana lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan sumbangan terbesar bagi PDRB ADHB dan menjadi penopang ekonomi Kota Binjai dari tahun 2010 hingga tahun 2023. Kemudian lapangan usaha Konstruksi, Industri Pengolahan, Real Estate serta Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor yang sangat potensial dikembangkan sehingga bisa menjadi sektor penopang utama ekonomi Kota Binjai untuk 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

**Tabel 2. 17. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Binjai Tahun 2010-2023**

Kategori/ Lapangan Usaha	2010	2015	2020	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	240,03	305,11	356,01	434,28
B. Pertambangan dan Penggalian	183,21	268,71	332,47	385,92
C. Industri Pengolahan	618,62	981,62	1.308,75	1.659,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,59	9,38	13,71	16,21
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,68	10,37	14,02	15,20
F. Konstruksi	492,53	1.046,06	1.459,46	1.740,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.392,61	2.195,98	3.433,33	4.378,22

Kategori/ Lapangan Usaha	2010	2015	2020	2023
H. Transportasi dan Pergudangan	358,47	676,89	894,06	1.160,63
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	354,46	480,90	591,13	776,82
J. Informasi dan Komunikasi	104,39	187,84	310,67	387,60
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	181,41	323,89	388,30	502,11
L. Real Estatet	347,11	622,42	952,91	1.071,21
M, N. Jasa Perusahaan	40,03	73,38	101,96	128,30
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	305,88	652,68	857,57	936,37
P. Jasa Pendidikan	251,02	411,23	558,55	637,87
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49,30	87,38	132,10	151,88
R, S, T, U. Jasa lainnya	29,06	48,50	64,07	77,14
<b>PDRB ADHB Kota Binjai</b>	<b>4.960,42</b>	<b>8.383,40</b>	<b>11.769,07</b>	<b>14.459,58</b>

Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas menjadi lapangan usaha yang paling kecil memberikan sumbangan terhadap PDRB ADHB Kota Binjai dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 hingga tahun 2023, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang menjadi lapangan usaha pemberi sumbangan terkecil bagi PDRB ADHB Kota Binjai.

**Tabel 2. 18. PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kota Binjai Tahun 2010-2023**

Jenis Pengeluaran	2010	2015	2020	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.994,26	4.936,34	6.854,46	8.603,43
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	90,77	123,28	171,80	205,57
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	90,77	628,21	724,37	860,85
Pembentukan Modal Tetap Bruto	574,12	2.636,29	3.791,70	4.798,58
Perubahan Inventori	1.620,99	76,12	137,59	66,32
Net Ekspor Barang dan Jasa	-398,71	-17,86	89,14	-75,17
<b>PDRB ADHB Kota Binjai</b>	<b>4.960,42</b>	<b>8.382,40</b>	<b>11.769,06</b>	<b>14.459,58</b>

Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Kinerja perekonomian PDRB juga dilihat dari sisi pengeluaran. PDRB ADHB berdasarkan jenis pengeluaran menunjukkan proporsi penyumbangan pengeluaran perekonomian di Kota Binjai tahun 2010-2023. Berdasarkan tabel diatas, komponen pengeluaran PDRB ADHB mengalami kenaikan tiap

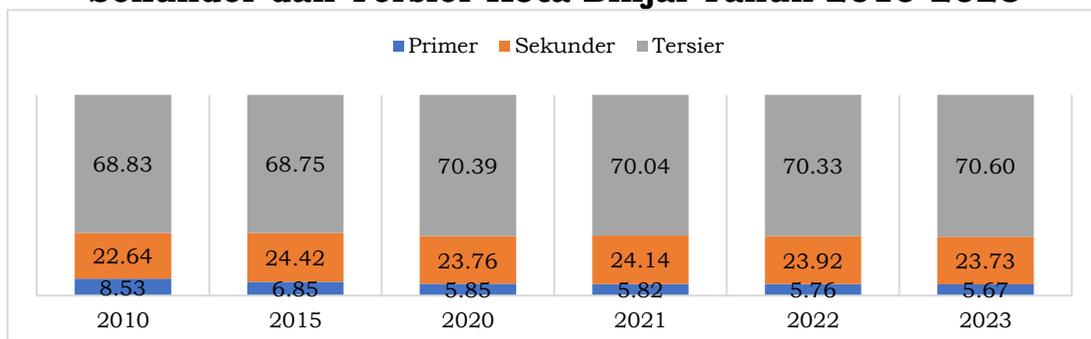
tahunnya kecuali pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19, namun kembali naik pada tahun 2021.

Proporsi terbesar penyumbang pengeluaran terhadap perekonomian adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 59,50% dari jumlah PDRB ADHB sisi pengeluaran Kota Binjai tahun 2023. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi di Kota Binjai yang mempengaruhi dengan daya beli masyarakat. Konsumsi barang dan jasa yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang memberikan gambaran investasi Kota Binjai memberikan kontribusi sebesar 33,19% kepada perekonomian Kota Binjai di tahun 2023. Hal tersebut berhubungan kondisi iklim investasi di Kota Binjai.

## 2. Struktur Ekonomi

Perekonomian Kota Binjai jika dilihat dari kontribusi lapangan usaha, maka terlihat sektor tersier atau kelompok lapangan usaha jenis jasa sangat dominan dan menunjukkan peningkatan dari 68,83% di tahun 2010 menjadi 70,60% di tahun 2023. Sektor sekunder atau kelompok lapangan usaha jenis industri menunjukkan tren peningkatan dari 22,64% di tahun 2010 menjadi 23,73% di tahun 2023. Kemudian sektor primer atau kelompok lapangan usaha jenis pertanian dan pertambangan yang menjadi kelompok lapangan usaha yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Binjai juga menunjukkan penurunan dari 8,53% di tahun 2010 menjadi 5,67% di tahun 2023.

**Gambar 2. 47. Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Kota Binjai Tahun 2010-2023**



Sumber: BPS Kota Binjai

Penurunan sektor primer di Kota Binjai, yang mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan, telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal, mengingat ketergantungan masyarakat pada sektor ini untuk mata pencaharian mereka. Penurunan ini tidak hanya berisiko memperburuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengurangi kontribusi sektor primer terhadap PDRB Kota Binjai. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengembangkan peluang baru, baik di sektor primer maupun sekunder. Strategi diversifikasi dapat mencakup peningkatan teknologi pertanian yang lebih efisien, pengembangan produk olahan pertanian, dan penguatan rantai pasok yang lebih baik untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Disisi lain, sektor sekunder seperti industri pengolahan dan manufaktur, juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan dan penyediaan fasilitas produksi yang memadai. Dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, Kota Binjai dapat membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, yang tidak hanya akan mendukung pemulihan sektor primer, tetapi juga memanfaatkan potensi sektor sekunder untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Implementasi strategi diversifikasi yang efektif akan memberikan fondasi yang lebih stabil bagi pertumbuhan ekonomi Kota Binjai di masa depan.

### **3. PDRB per Kapita**

PDRB per Kapita merupakan indikator makro ekonomi yang menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk selama kurun waktu tertentu. Tabel berikut menunjukkan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Binjai dari tahun 2005 hingga tahun 2023. PDRB per Kapita Kota Binjai atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 sebesar 47,68 juta rupiah yang mengalami peningkatan dari tahun

2022 sebesar 44,38 juta rupiah. Apabila diperhitungkan pendapatan masyarakat Kota Binjai setiap bulannya sebesar 3,69 juta dengan asumsi satu rumah tangga dengan 2 (dua) orang anak atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,43%. Hal yang sama jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada tahun 2022, PDRB Kota Binjai atas dasar harga konstan 2010 sebesar 28,34 juta rupiah dan tahun 2023 meningkat menjadi 29,37 juta rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,62%.

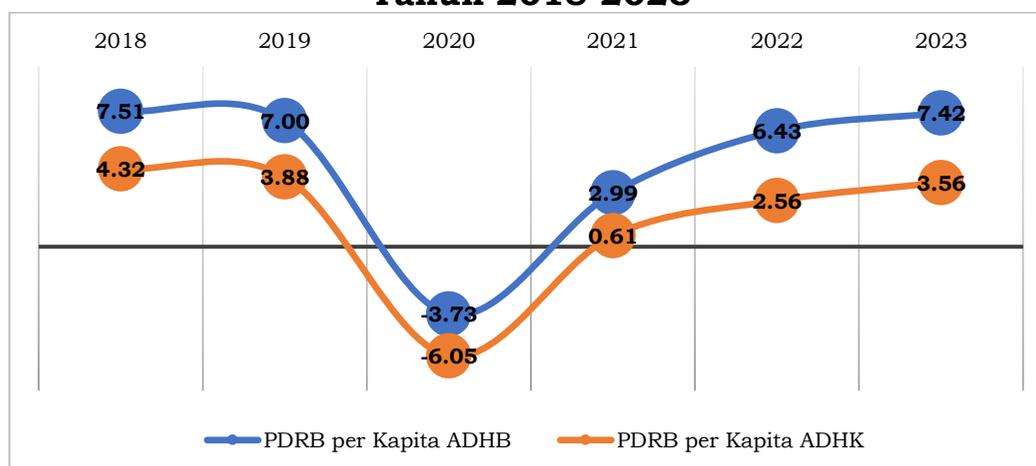
**Tabel 2. 19. PDRB per Kapita Kota Binjai Tahun 2018-2023**

Tahun	PDRB per Kapita ADHB	PDRB per Kapita ADHK
2005	10.486.444	6.439.516
2010	20.090.529	8.209.884
2015	31.669.122	24.826.319
2020	40.488.045	27.468.201
2023	47.678.590	29.370.130

Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan PDRB per Kapita sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami akselerasi. Pada tahun 2018, PDRB per Kapita Kota Binjai tumbuh sebesar 4,32%, namun tahun 2020 berkontraksi sebesar minus 6,05% dan kembali mengalami akselerasi di tahun 2021 sebesar 0,61%, sementara PDRB berdasarkan atas dasar harga berlaku tahun 2018 mengalami pertumbuhan 7,51% dan tahun 2023 mengalami pertumbuhan menjadi 7,42%.

**Gambar 2. 48. Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Binjai Tahun 2018-2023**



Sumber: BPS Kota Binjai

Peningkatan PDRB per Kapita Kota Binjai dipicu oleh beberapa faktor penting. Pertama, perkembangan sektor sekunder, seperti industri pengolahan dan penyediaan akomodasi, yang menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, investasi yang lebih besar dalam infrastruktur, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi distribusi barang dan jasa. Ketiga, pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 yang memacu konsumsi dan investasi juga berkontribusi pada pertumbuhan ini. Selain itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih baik serta dukungan kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif memperkuat peluang ekonomi. Dengan berbagai faktor ini, PDRB per Kapita Kota Binjai diharapkan terus tumbuh positif dan berkelanjutan.

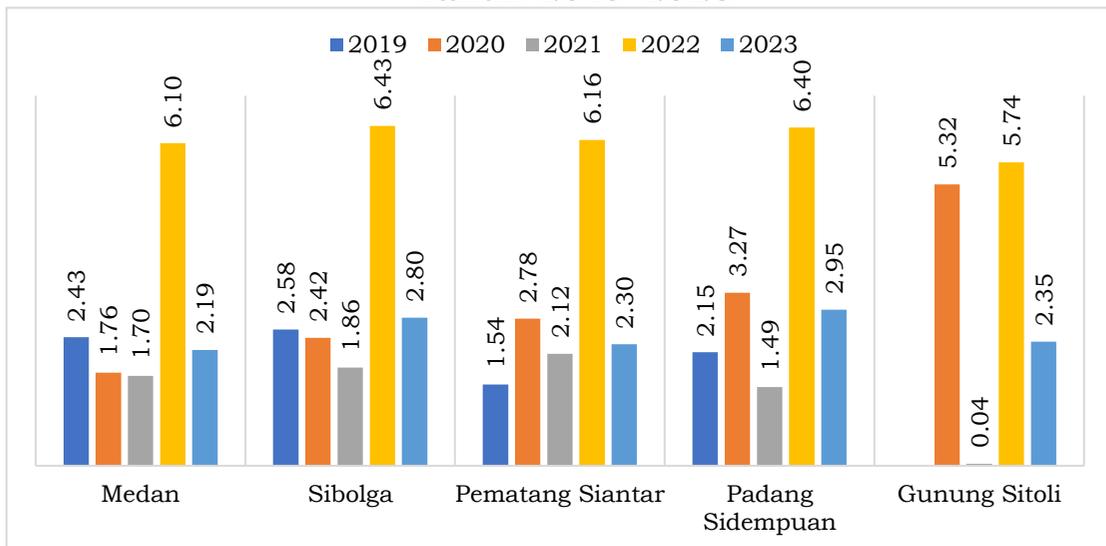
#### **4. Laju Inflasi**

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kecenderungan peningkatan harga barang dan jasa serta berpengaruh pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan tingkat inflasi umum kota-kota yang menjadi penghitung inflasi di Sumatera Utara (Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Padangsidempuan, Kota Sibolga, dan Kota Gunungsitoli).

Kota Binjai tidak termasuk kota penghitung inflasi di Sumatera Utara karena letaknya yang terlalu dekat dengan Kota Medan (sekitar 22 km), sehingga kita bisa mengacu kepada inflasi Kota Medan untuk menggambarkan kondisi inflasi yang terjadi di Kota Binjai. Berdasarkan grafik tersebut bahwa inflasi di Kota Binjai pada tahun 2022 mengalami lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 1,70% menjadi 6,10%. Kondisi ini bisa menunjukkan kondisi perekonomian yang mulai terakselerasi setelah pandemi Covid-19, sehingga momentum ini

harus bisa dimanfaatkan untuk bisa memberikan sumbangsih nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Binjai.

**Gambar 2. 49. Laju Inflasi Kota Penghitung di Sumatera Utara Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

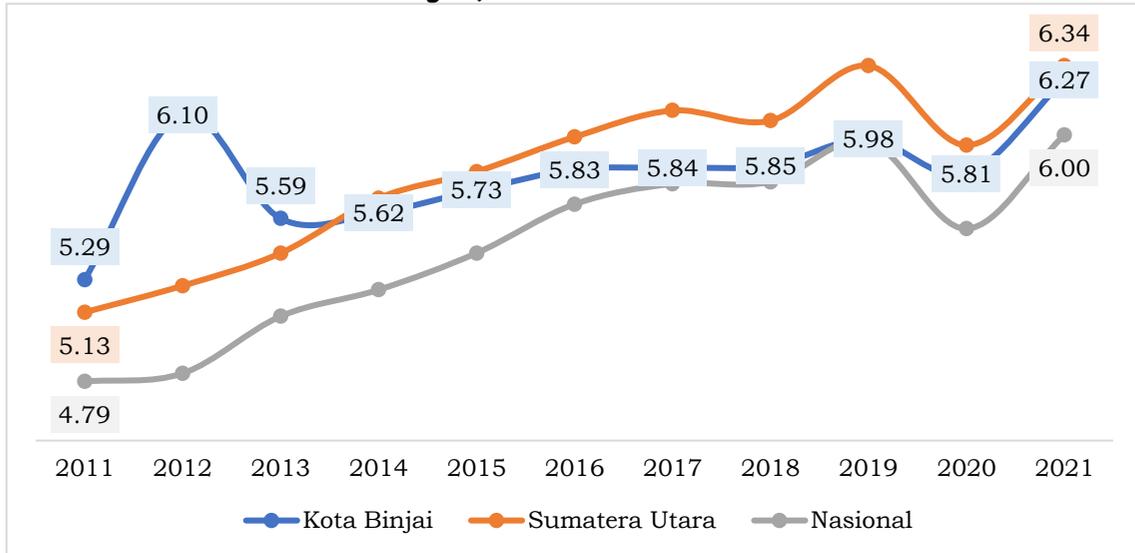
Pengumpulan data inflasi lokal akan memungkinkan pemangku kebijakan untuk memahami dengan lebih baik dinamika harga dan daya beli masyarakat, serta mengidentifikasi sektor-sektor yang paling terdampak oleh perubahan harga. Selain itu, data inflasi yang akurat akan membantu dalam merumuskan program-program ekonomi yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Inisiatif ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah, serta melibatkan komunitas lokal untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang aktual di Kota Binjai.

## 5. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia, baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 pilar dan 8 sub-pilar

serta 21 indikator pembentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.

**Gambar 2. 50. Perbandingan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional**



Sumber: <https://inklusif.bappenas.go.id//data>

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Binjai dari tahun 2011 hingga tahun 2021 secara umum menunjukkan peningkatan dari 5,29 poin menjadi 6,27 poin. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Binjai selalu lebih baik dibandingkan pencapaian Nasional, sedangkan jika dibandingkan dengan pencapaian Sumatera Utara maka Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Binjai lebih rendah sejak tahun 2014.

Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Kota Binjai, perlu diimplementasikan kebijakan yang fokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Program pemberdayaan ekonomi yang mendukung usaha mikro dan kecil, termasuk akses terhadap modal dan pasar, harus diperluas. Selain itu, kebijakan fiskal yang progresif, seperti pengenaan pajak yang lebih tinggi pada kelompok berpendapatan tinggi dan redistribusi melalui program sosial, perlu diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

kurang mampu. Pemerintah daerah juga harus mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, seperti fasilitas kesehatan dan transportasi, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesenjangan ekonomi dapat ditekan, dan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

## **6. Indeks Ekonomi Hijau**

Indeks Ekonomi Hijau atau *Green Economy Index (GEI)* adalah strategi untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan Bappenas. Tujuan adanya strategi ini adalah untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Strategis ini menjadi suatu upaya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Rencana strategis menuju pembangunan berkelanjutan di Kota Binjai berfokus pada integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan program yang diimplementasikan. Langkah awal mencakup penguatan kapasitas ekonomi lokal melalui diversifikasi sektor, dengan mengedepankan sektor yang ramah lingkungan dan berpotensi untuk memberikan lapangan kerja. Pendidikan dan pelatihan keterampilan akan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung inovasi, dan menciptakan tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan pasar. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, akan diperkuat untuk memastikan partisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk melindungi sumber daya alam melalui kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan, sambil menjaga keseimbangan sosial dengan menjamin akses yang adil terhadap layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Melalui

pendekatan yang holistik ini, Kota Binjai mengarah pada tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

### 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Aspek ini menjelaskan kondisi sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang didasarkan kepada Indikator Pendidikan, Angka Literasi/ Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Angka Ketergantungan.

#### 1. Indikator Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK, semakin tinggi tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan pada tingkat tertentu.

**Tabel 2. 20. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD, SMP, SMTA, dan Perguruan Tinggi Kota Binjai Tahun 2019-2023**

Tahun	SD (%)	SMP (%)	SMTA (%)	PT (%)
2019	106.74	86.7	93.73	30.59
2020	105.93	88.1	88.61	32.00
2021	103.26	86.8	96.29	29.73
2022	110.35	97.3	92.47	26.12
2023	104,93	96,17	97,46	46,55

Sumber: BPS Kota Binjai

Pada tabel di atas menggambarkan hingga tahun 2023, APK tertinggi berada pada jenjang SD sebesar 104,93%. Semakin tinggi jenjang pendidikan, terlihat persentase APK yang semakin menurun. Pada pendidikan jenjang SD, SMP dan SMTA masih menunjukkan penurunan yang angkanya relatif mendekati. Penurunan tajam terjadi pada APK Perguruan Tinggi yang hanya 46,55% di tahun 2023.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya

terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Semakin tinggi APM, semakin tinggi tingkat efisiensi sistem pendidikan dalam menjangkau dan mempertahankan siswa pada tingkat pendidikan tersebut. APM pada jenjang SD merupakan yang tertinggi, dengan capaian di tahun 2023 sebesar 99,25%. *Gap* penurunan yang cukup lebar dari jenjang SD dan SMTA dibandingkan capaian APM sebelumnya, dimana pada jenjang SMP di tahun 2023 sebesar 81,09%, SMTA 62,55%, dan Perguruan Tinggi sebesar 31,27%.

**Tabel 2. 21. Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD, SMP, SMTA, dan Perguruan Tinggi Kota Binjai Tahun 2018-2023**

Tahun	SD (%)	SMP (%)	SMTA (%)	PT (%)
2018	100	81.86	70.8	22.82
2019	99.26	83.43	72.62	20.40
2020	99.11	84.57	72.50	25.70
2021	99.19	83.62	73.11	23.20
2022	105.32	79.61	68.08	24.89
2023	99,25	81,09	62,55	31,27

Sumber: BPS Kota Binjai

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak usia sekolah yang bersekolah. Tabel di bawah menunjukkan bahwa pada umur rentang 7-12 tahun, partisipasi laki-laki untuk bersekolah mengalami penurunan dari 100% menjadi 99,23%.

**Tabel 2. 22. Angka Partisipasi Sekolah Kota Binjai 2018-2023**

Tahun	7 - 12 Tahun			13 - 15 Tahun			16 - 18 Tahun		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
2018	100	100	100	94,74	99,98	97,36	79,72	81,01	80,37
2019	100	99,31	99,66	96,82	99,98	98,40	n.a	n.a	n.a
2020	99,94	99,52	99,72	98,99	100	99,43	80,23	82,58	81,38
2021	99,42	98,93	99,19	99,9	98,11	98,99	84,51	77,19	80,68
2022	99,23	100	99,60	100	97,5	98,97	87,13	89,24	88,27
2023	n.a	n.a	99,25	n.a	n.a	96,79	n.a	n.a	77,95

Sumber: BPS Kota Binjai

Sedangkan partisipasi perempuan sempat mengalami penurunan di tahun 2019 hingga kemudian meningkat kembali menjadi 100% di tahun 2022. Untuk rentang umur 13-15 tahun (umur SMP/ MTs), partisipasi laki-laki mengalami peningkatan

dari 94,74% (2018) menjadi 100% (2022). Sedangkan partisipasi perempuan mengalami penurunan dari 99,98% (2018) menjadi 97,5% (2022). Pada rentang umur 16-18 tahun (SMA/ sederajat), partisipasi laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami peningkatan, dimana tingkat partisipasi perempuan memiliki persentase yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, untuk umur 7-12 tahun, partisipasi sekolah mengalami penurunan dari 100% menjadi 99,25%. Namun, partisipasi sekolah pada rentang usia SMP dan SMA mengalami peningkatan.

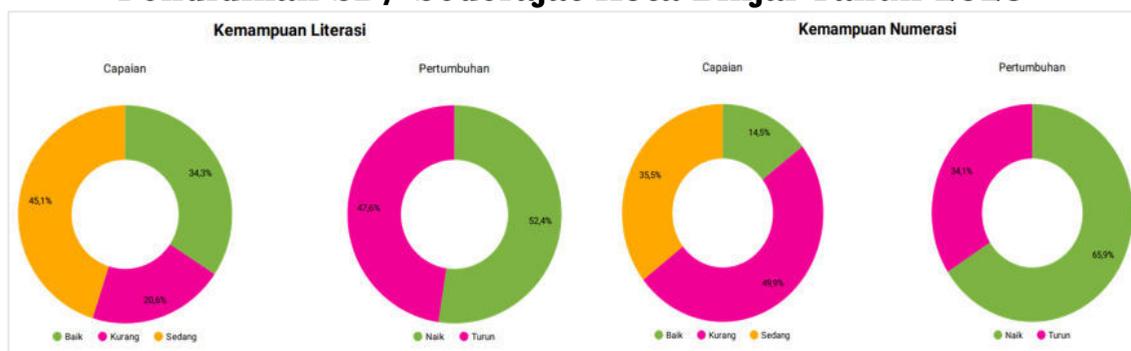
Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Binjai, terutama pada jenjang pendidikan tinggi, disebabkan oleh keterbatasan akses ke institusi pendidikan, kurangnya dukungan finansial, dan fasilitas yang belum memadai. Banyak siswa dari keluarga berpenghasilan rendah kesulitan melanjutkan pendidikan akibat biaya kuliah yang tinggi dan minimnya informasi tentang beasiswa. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan intervensi berupa pengembangan program beasiswa khusus bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta perbaikan fasilitas pendidikan, seperti peningkatan kualitas gedung, penyediaan laboratorium, dan akses internet yang memadai. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa di jenjang pendidikan tinggi dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik di Kota Binjai.

## **2. Angka Literasi dan Numerasi**

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Kemampuan literasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat tahun 2023 relatif masih belum baik karena 43,1% capaian kemampuan literasi pada kategori sedang dan hanya

34,3% capaian kemampuan literasi pada kategori baik dengan masih adanya sekitar 20,6% capaian kemampuan literasi pada kategori kurang. Pertumbuhan kemampuan literasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat tahun 2023 cukup baik, dimana 52,4% menunjukkan adanya kenaikan kemampuan literasi dan 47,6% menyatakan adanya penurunan kemampuan literasi.

**Gambar 2. 51. Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD/ Sederajat Kota Binjai Tahun 2023**



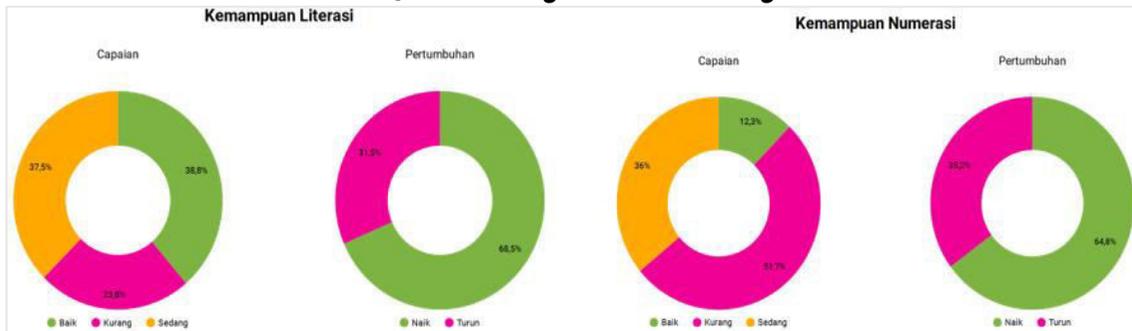
Sumber: BPMP Sumatera Utara

Kemampuan numerasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat tahun 2023 relatif masih kurang baik karena 49,9% capaian kemampuan numerasi pada kategori kurang dan hanya 14,5% capaian kemampuan numerasi pada kategori baik dengan masih adanya sekitar 35,5% capaian kemampuan numerasi pada kategori sedang. Pertumbuhan kemampuan numerasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat tahun 2023 cukup baik, dimana 65,9% menunjukkan adanya kenaikan kemampuan numerasi dan 34,1% menyatakan adanya penurunan kemampuan numerasi.

Kemampuan literasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat tahun 2023 relatif masih belum baik karena hanya 38,8% capaian kemampuan literasi pada kategori baik dan terdapat 37,5% capaian kemampuan literasi pada kategori sedang dengan masih adanya sekitar 23,8% capaian kemampuan literasi pada kategori kurang. Pertumbuhan kemampuan literasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat tahun 2023 cukup baik, dimana 68,5% menunjukkan adanya kenaikan kemampuan

literasi dan 31,5% menyatakan adanya penurunan kemampuan literasi.

**Gambar 2. 52. Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SMP/ Sederajat Kota Binjai Tahun 2023**



Sumber: BPMP Sumatera Utara

Kemampuan numerasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat tahun 2023 masih kurang baik karena 51,7% capaian kemampuan numerasi pada kategori kurang dan hanya 12,3% capaian kemampuan numerasi pada kategori baik dengan masih adanya sekitar 36% capaian kemampuan numerasi pada kategori sedang. Pertumbuhan kemampuan numerasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat tahun 2023 cukup baik, dimana 64,8% menunjukkan adanya kenaikan kemampuan numerasi dan 35,2% menyatakan adanya penurunan kemampuan numerasi.

Langkah perbaikan angka literasi dan numerasi di Kota Binjai memerlukan pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, penting untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru. Kedua, perluasan akses terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas. Selain itu, penerapan program remedial bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar bisa memberikan dukungan tambahan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Kegiatan ekstrakurikuler, seperti klub membaca atau kompetisi matematika, juga dapat diadakan untuk mendorong minat siswa dalam literasi dan numerasi. Terakhir, melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan, melalui workshop dan seminar, sehingga menciptakan lingkungan

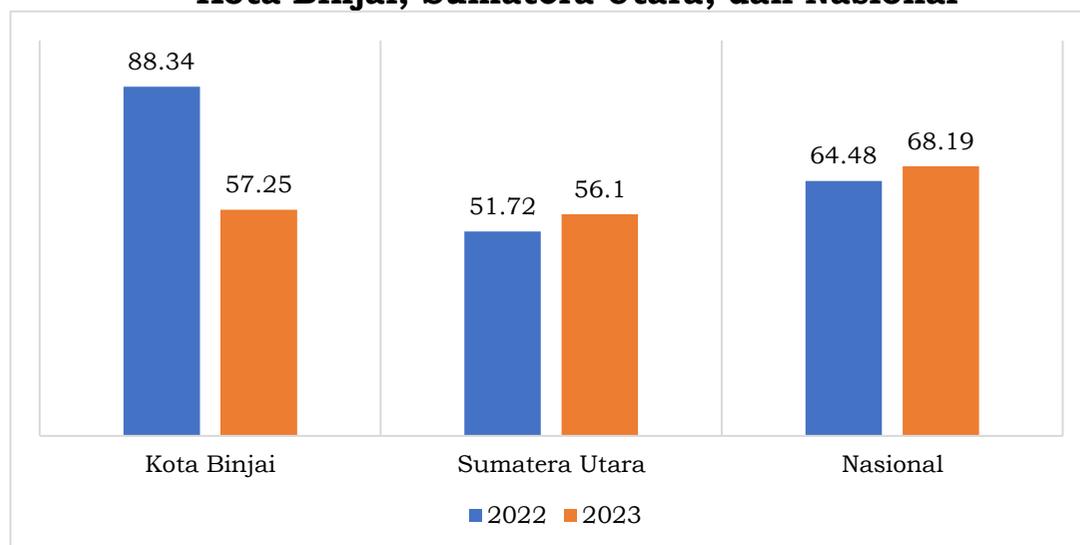
yang mendukung bagi siswa dalam mencapai kemampuan literasi dan numerasi yang lebih baik.

### 3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Binjai menurun dari 88,34 di tahun 2022 menjadi 57,25 yang menyebabkan IPLM Kota Binjai di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan IPLM Nasional dengan nilai IPLM sebesar 68,19 yang meningkat dari 64,48, namun masih lebih baik jika dibandingkan IPLM Sumatera Utara dengan nilai IPLM sebesar 56,10 yang juga meningkat dari 51,72.

**Gambar 2. 53. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Binjai, Sumatera Utara, dan Nasional**



Sumber: Perpustakaan Nasional RI

Penurunan ini dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap pengembangan perpustakaan, minimnya kegiatan literasi yang melibatkan masyarakat, serta kurangnya aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, rencana aksi yang terstruktur perlu diterapkan, termasuk pengembangan program komunitas yang mempromosikan literasi, penyediaan pelatihan keterampilan membaca dan menulis bagi semua usia,

serta revitalisasi perpustakaan daerah dengan koleksi buku yang lebih beragam dan modern. Selain itu, perlu dilakukan kerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan literasi rutin, seperti diskusi buku, lokakarya, dan pameran literasi, guna meningkatkan minat baca masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan IPLM Kota Binjai dapat pulih dan berkembang dengan pesat, menciptakan masyarakat yang lebih literat dan berbudaya.

#### **4. Indeks Literasi Digital**

Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya.

Perbaikan literasi digital di Kota Binjai sangat penting untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan era digital. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi implementasi program pelatihan untuk berbagai kelompok usia mengenai penggunaan perangkat lunak dasar, navigasi internet, keamanan siber, dan evaluasi sumber informasi. Selain itu, pengembangan aksesibilitas teknologi di perpustakaan daerah dan pusat komunitas sangat penting, dengan menyediakan komputer dan internet gratis serta menyelenggarakan workshop rutin. Kolaborasi dengan sekolah dan lembaga pendidikan tinggi untuk memasukkan literasi digital dalam kurikulum juga perlu dilakukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Kota Binjai dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal, meningkatkan kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam ekonomi digital dan masyarakat informasi.

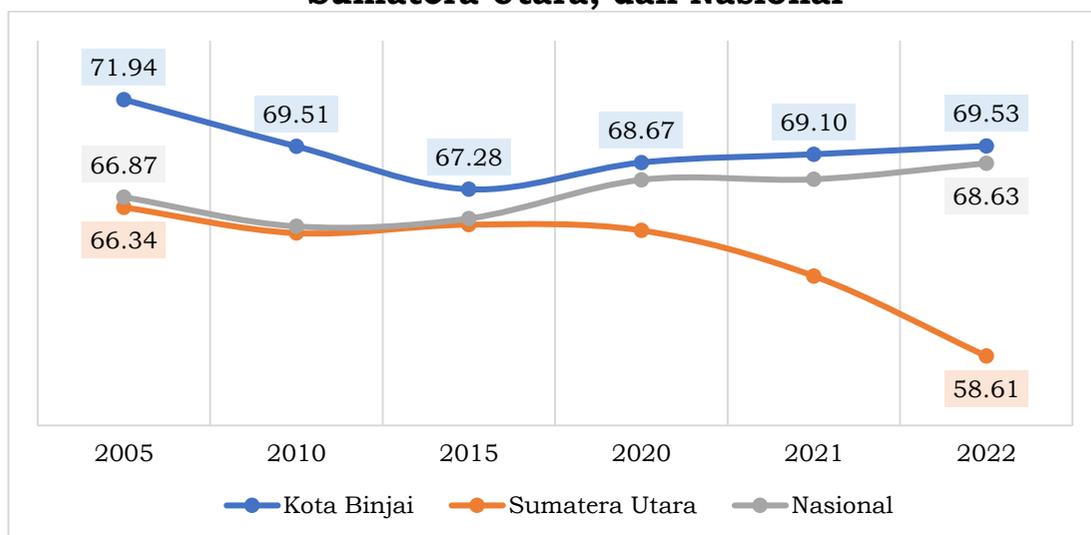
#### **5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Binjai secara

umum dari tahun 2005 hingga tahun 2022 menunjukkan tren penurunan dari 71,94 di tahun 2005 menjadi 69,53 di tahun 2022. TPAK Kota Binjai selama kurun waktu 2005-2022 mencapai titik terendah pada tahun 2015 dengan nilai TPAK sebesar 67,28.

Pada periode 2020-2022, TPAK Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan dari 68,67 di tahun 2020 menjadi 69,10 di tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai 69,53. TPAK Kota Binjai masih lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian TPAK Sumatera Utara maupun Nasional selama kurun waktu 2005-2022, dimana pada tahun 2022, TPAK Sumatera Utara sebesar 58,61 dan TPAK Nasional mencapai 68,63 yang mana kedua pencapaian TPAK tersebut masih lebih rendah dibandingkan TPAK Kota Binjai.

**Gambar 2. 54. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Binjai, Sumatera Utara, dan Nasional**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Meskipun TPAK Kota Binjai menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi angkatan kerja yang masih relatif rendah menuntut analisis lebih dalam terhadap faktor-faktor penyebabnya, seperti kurangnya keterampilan yang relevan dan keterbatasan kesempatan kerja. Untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja, direkomendasikan agar pemerintah daerah mengembangkan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, termasuk pelatihan vokasi untuk sektor industri dan jasa yang sedang berkembang. Selain itu,

insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja lokal dapat mendorong sektor swasta untuk lebih aktif berperan dalam peningkatan keterampilan angkatan kerja. Kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga menarik lebih banyak investasi dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas di Kota Binjai.

## 6. Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*Depencency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk dibawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Semakin tingginya persentase *Dependency Ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

**Tabel 2. 23. *Dependency Ratio* Kota Binjai**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	270.926	273.892	279.302	295.361	300.009	303.272
Rasio Ketergantungan Penduduk	46,48	45,00	46,03	46,39	46,68	46,94

Sumber: BPS Kota Binjai

Bonus demografi yang sedang berlangsung disatu sisi dapat menjadi peluang perekonomian dalam menghasilkan nilai tambah yang lebih berlipat akibat suplai dari penduduk usia produktif yang lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktifnya. Namun jika penduduk usia produktif ini banyak tidak terakomodir didalam dunia kerja dan dunia usaha, maka sebaliknya, yang terjadi adalah ancaman pembangunan, yang ditandai dengan meningkatnya pengangguran. Tabel di atas menginformasikan Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk Kota Binjai yang cukup rendah, yaitu berada di rentang 46-47 per 100 penduduk usia produktifnya. Angka ini mengisyaratkan bahwa 100

penduduk usia produktif menanggung sekitar 46-47 penduduk usia non produktif.

Untuk memanfaatkan bonus demografi, strategi yang terintegrasi sangat penting, berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, akses lapangan kerja, dan program kesehatan bagi usia produktif. Pertama, peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas dengan memperbaiki kurikulum, meningkatkan kompetensi pengajar, dan memfasilitasi akses pendidikan yang lebih baik, termasuk pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, memperluas akses lapangan kerja melalui kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja, terutama dalam sektor-sektor yang berkembang, seperti teknologi dan layanan kesehatan. Program kesehatan yang ditujukan untuk usia produktif juga sangat penting untuk memastikan mereka tetap sehat dan produktif, termasuk akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, program pencegahan penyakit, dan penyuluhan kesehatan. Dengan langkah-langkah ini, potensi bonus demografi dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

### **2.3.3. Daya Saing Fasilitas Infrastruktur Wilayah**

Perkembangan aspek infrastruktur yang dimaksud yaitu kondisi jalan baik, drainase, dan kondisi sanitasi. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik menggambarkan penurunan dari tahun 2018 hingga 2023 sebesar 88,58% menjadi 82,85%. Sedangkan panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2018 yaitu 321.003 km dan pada tahun 2023 menjadi 300.611 km. Sedangkan untuk infrastruktur berupa drainase dalam keadaan, baik mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2023 yaitu sebesar 82% dan meningkat menjadi 89%. Untuk akses rumah tangga terhadap kondisi sanitasi yang layak mengalami peningkatan kinerja yang

stabil dari tahun 2018 hingga 2023, yaitu sebesar 95,38% dan meningkat menjadi 95,44%.

**Tabel 2. 24. Indikator Infrastruktur Kota Binjai 2018-2023**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	88,58	88,58	89,86	88,20	84,63	82,85
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (km)	321.003	321.003	326.057	320.016	307.066	300.611
Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	82	84	85	86	89	89
Akses Rumah Tangga Terhadap Kondisi Sanitasi Layak (%)	95,38	95,62	96,20	95,21	95,53	95,44

Sumber: BPS Kota Binjai

Berdasarkan kondisi jalan, hingga tahun 2023, terdapat 300.611 km panjang jalan yang berkategori baik. Kondisi jalan berkategori sedang sepanjang 31.185 km, sedangkan kondisi jalan yang rusak dan rusak berat masing-masing sepanjang 24.935 km dan 6.100 km dari total panjang jalan Kota sepanjang 362.831 km. Infrastruktur jalan terkait erat dengan konektivitas antar lokasi, yang dapat mendorong perekonomian lebih mampu bergerak lebih cepat dan efisien. Diperlukan konsistensi dalam pembangunan jalan, baik pada pembangunan jalan baru maupun pemeliharannya.

**Tabel 2. 25. Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kota Binjai Tahun 2023**

Status	Kondisi Jalan (km)				Total Panjang Jalan
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
Jalan Kota	300.611	31.185	24.935	6.100	362.831

Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Sebagian besar penduduk Kota Binjai mengkonsumsi air minum berupa air isi ulang. Hal ini terlihat dari distribusinya dari tahun 2018 hingga 2021 yang mencapai lebih dari 50%. Hingga tahun 2021, rumah tangga yang mengakses air isi ulang mencapai 58,64%. Sedangkan rumah tangga yang mengkonsumsi air minum dari air kemasan bermerek sebanyak 2,63%. Peningkatan konsumsi air minum yang layak tergambar dari menurunnya

rumah tangga yang mengakses air minum dari sumur tak terlindung hingga 0% di tahun 2021.

**Tabel 2. 26. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama di Kota Binjai Tahun 2018-2023**

Jenis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Air Kemasan Bermerek	4,46	3,84	6,27	2,63	68,39	n.a.
Air Isi Ulang	58,18	49,23	59,65	58,64		
Leding	4,73	7,85	3,81	3,77	2,44	7,37
Sumur Bor/ Pompa	9,23	5,01	18,69	23,44	23,93	59,57
Sumur Terlindung	22,37	33,30	11,36	11,05	4,91	32,23
Sumur Tak Terlindung	1,02	0,45	0	0	0	0
Lainnya (mata air, air permukaan, air hujan, lainnya)	0	0,33	0,22	0,46	0,33	n.a.

Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Kualitas air leding yang semakin menurun dan tidak dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai air minum juga menjadi salah satu alasan menurunnya pemanfaatan air minum dari leding. Dominannya konsumsi air isi ulang disisi lain dapat mendukung usaha mikro kecil yang banyak berkecimpung pada jenis usaha ini. Namun pengawasan secara kontinyu akan kualitas air minum layak perlu diupayakan agar selain mendukung usaha mikro kecil juga dapat mendukung masyarakat kota yang lebih sehat.

**Gambar 2. 55. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Kota Binjai Tahun 2018-2023**



Sumber: BPS Kota Binjai, 2024

Terjadi peningkatan yang signifikan dari persentase rumah tangga dengan akses air minum yang layak sejak tahun 2018 hingga 2023. Berdasarkan gambar di atas, rumah tangga yang mengakses air minum layak masih sekitar 72,15% dan meningkat stabil hingga 98,05% di tahun 2023. Meskipun persentasenya di

tahun 2023 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 99,76%. Akses terhadap air minum yang layak dapat mendukung masyarakat yang lebih sehat. Untuk itu, perlu dipastikan ketercapaian indikator ini menjadi 100% ke depannya.

**Tabel 2. 27. Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Sanitasi Dasar Sehat Kota Binjai Tahun 2019-2022**

Jenis Sanitasi	2019	2020	2021	2022
Rumah Tangga Pengguna Tangki Septik/ SPAL (%)	97,19	97,88	95,79	98,14
Kolam/ Sawah/Sungai (%)	1,06	0,80	3,16	1,08
Lubang Tanah/ Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun (%)	0,65	0,22	0,35	0,7
Lainnya (%)	1,10	1,10	0,70	0,08

Sumber: BPS Kota Binjai

Sanitasi merupakan elemen kunci dalam pembangunan berkelanjutan dan pemeliharaan lingkungan yang sehat. Beberapa aspek seperti pengelolaan limbah, pengolahan air minum, dan sumber air bersih menjadi penentu dalam membentuk sanitasi yang sehat. Tangki septik adalah sistem pengolahan limbah yang terdiri dari sebuah wadah tertutup yang biasanya terbuat dari beton, plastik, atau bahan lainnya yang tahan terhadap air dan limbah.

Penggunaan tangki septik adalah solusi yang umum digunakan untuk rumah-rumah yang tidak terhubung dengan sistem saluran pembuangan umum. Tangki septik yang dipelihara dengan baik dapat membantu mencegah pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit.

Tempat penampungan yang memenuhi syarat kesehatan adalah menggunakan tangki septik atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Jika dilihat dari perkembangannya, rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat penampungan kotoran mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga 2021 dari 97,19% menjadi 95,79% dan meningkat kembali menjadi 98,14% pada tahun 2022. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan kolam/ sawah/ sungai untuk penampungan kotoran mengalami

peningkatan dari 1,06% menjadi 3,16% dan turun pada tahun 2022 menjadi 1,08%. Secara umum, meski penggunaan tangki septik mengalami penurunan, namun pemanfaatannya paling dominan dibanding jenis sanitasi yang lain.

### **1. Indeks Infrastruktur**

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen *City Development Index* (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. Indeks Infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon. Semakin tinggi Indeks Infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota, maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik.

### **2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna atas layanan infrastruktur yang tersedia. Indeks ini biasanya dihitung dengan mengukur tingkat ketidakpuasan atau kepuasan yang dirasakan oleh pengguna terhadap layanan yang tersedia.

#### **2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi**

Aspek ini menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi dan aspek situasi politik serta aspek keamanan dan ketertiban daerah yang dianalisis berdasarkan Indeks Demokrasi, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketentraman dan Ketertiban, Indeks Kerukunan Umat Beragama, dan Indeks Daya Saing Daerah.

#### **1. Indeks Demokrasi**

Indeks Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu daerah.

Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. Rencana aksi untuk memperbaiki persepsi demokrasi demi mendukung stabilitas investasi meliputi peningkatan transparansi pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat, dan penguatan institusi demokrasi.

Langkah pertama adalah meningkatkan transparansi dengan menyediakan data *real-time* tentang kebijakan dan proyek pemerintah melalui *platform online*. Kedua, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta melibatkan mereka dalam program pembangunan. Ketiga, penguatan institusi demokrasi melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, serta dukungan terhadap kebebasan pers dan perlindungan hak asasi manusia.

## **2. Indeks Rasa Aman**

Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Rasa aman memainkan peranan penting dalam menarik investasi, baik domestik maupun asing, karena investor cenderung mencari lingkungan yang stabil dan aman untuk menanamkan modal mereka. Tingginya tingkat kriminalitas, konflik sosial, atau ketidakstabilan politik dapat menghalangi investasi dan menciptakan kesan negatif tentang potensi ekonomi suatu daerah.

Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan dan persepsi publik sangat penting, termasuk peningkatan patroli keamanan, pembentukan komunitas pengawas, dan penggunaan teknologi keamanan seperti kamera pemantau. Selain itu, program penyuluhan yang melibatkan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kampanye komunikasi yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keamanan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab

masyarakat. Dengan menciptakan suasana yang aman, diharapkan lebih banyak investor akan tertarik untuk menanamkan modal di daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Indeks Ketentraman dan Ketertiban**

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Ketentraman dan stabilitas sosial adalah faktor kunci yang sangat mempengaruhi keputusan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketika masyarakat merasa aman dan damai, kepercayaan investor akan meningkat, sehingga mendorong aliran modal dan pengembangan ekonomi. Sebaliknya, ketidakamanan, konflik, atau gangguan sosial dapat menyebabkan penurunan minat investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan merugikan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan ketentraman dan stabilitas sosial, pemerintah perlu mengimplementasikan beberapa kebijakan strategis. Pertama, memperkuat aparat keamanan dengan pelatihan yang baik dan peningkatan jumlah personel di wilayah-wilayah rawan konflik. Kedua, menciptakan program-program dialog dan mediasi yang melibatkan masyarakat, sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai sebelum meluas. Ketiga, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan, untuk mengurangi ketidakpuasan sosial yang dapat memicu gangguan.

### **4. Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. Kerukunan dalam masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas sosial yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Ketika

hubungan antar kelompok sosial, agama, dan etnis terjaga dengan baik, potensi konflik dapat diminimalisir sehingga menciptakan suasana damai yang stabil. Kerukunan ini membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat keamanan, menciptakan persepsi positif di mata investor. Stabilitas sosial yang tercipta melalui kerukunan membuat lingkungan bisnis lebih aman dan terprediksi, sehingga menarik lebih banyak investasi baik domestik maupun asing. Selain itu, kerukunan juga mendorong peningkatan produktivitas karena masyarakat dapat berfokus pada pengembangan ekonomi tanpa terganggu oleh konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mempromosikan program-program toleransi dan dialog antar kelompok, serta memperkuat jaringan sosial yang inklusif, sebagai upaya memperkuat kerukunan yang berkontribusi langsung pada stabilitas ekonomi dan peningkatan investasi.

## **5. Indeks Daya Saing Daerah**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi (BRIN) dengan tujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif sehingga dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Skor IDSD Kota Binjai tahun 2023 sebesar 3,38 yang masih dibawah skor IDSD Nasional dan skor IDSD Sumatera Utara.

**Tabel 2. 28. Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023**

Wilayah	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekonomi Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Kota Binjai	3,96	3,70	4,71	3,01	4,06	4,20	4,78	3,41	1,11	4,03	1,44	2,15	3,38
Sumatera Utara	3,79	3,59	3,52	3,46	3,72	3,86	2,09	3,28	3,23	4,85	3,63	3,98	3,58
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44

Pilar 1: Institusi  
Pilar 2: Infrastruktur  
Pilar 3: Adopsi TIK  
Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro  
Pilar 5: Kesehatan  
Pilar 6: Keterampilan  
Pilar 7: Pasar produk  
Pilar 8: Pasar tenaga kerja  
Pilar 9: Sistem keuangan  
Pilar 10: Ukuran pasar  
Pilar 11: Dinamisme bisnis  
Pilar 12: Kapabilitas inovasi

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Daya saing daerah Kota Binjai lebih baik di pilar infrastruktur, adopsi TIK, kesehatan, stabilitas ekonomi makro, dan pasar produk dibandingkan Provinsi maupun Nasional. Kondisi ini menunjukkan masih diperlukannya kebijakan yang komprehensif untuk bisa meningkatkan daya saing daerah Kota Binjai dibandingkan daerah lainnya sehingga lebih menarik bagi investor untuk berinvestasi di Kota Binjai.

#### **2.4. Aspek Pelayanan Umum**

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Binjai dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

##### **2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Binjai tetap berada pada kategori “CC” (cukup pada rentang nilai 51-60) pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023, IRB Kota Binjai meningkat menjadi 61,74 untuk kategori “B”.

**Tabel 2. 29. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Binjai  
Tahun 2021-2023**

Tahun	Nilai IRB	Predikat
2021	42,92	CC
2022	47,55	CC
2023	61,74	B

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/>

Untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Binjai lebih lanjut, langkah-langkah konkret yang dapat diambil meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berfokus pada tata kelola pemerintahan modern, integritas, dan pelayanan publik. Selain itu, peninjauan ulang *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pelayanan yang efektif dan efisien juga penting dilakukan. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas dan transparan harus diterapkan untuk memantau pelaksanaan reformasi, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan. Hal ini akan mendukung terciptanya birokrasi yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

#### **2.4.2. Indeks Pelayanan Publik**

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (*excellent service*) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dalam rangka menjaga pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, diperlukan penilaian terhadap instansi pemerintah tersebut.

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur

kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Binjai tahun 2021 berada pada kategori “C-“ yang bermakna Cukup (dengan catatan). Pencapaian IPP Kota Binjai tahun 2021 masih belum optimal sehingga perlu inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik diseluruh instansi Pemerintahan Kota Binjai, sehingga diharapkan mampu mencapai kategori “A” yang bermakna pelayanan prima dimasa mendatang.

**Tabel 2. 30. Indeks Pelayanan Publik Beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2021**

Kabupaten/Kota	IPP
Binjai	C-
Medan	A-
Langkat	B
Deli Serdang	B
Karo	C

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/>

Rendahnya Indeks Pelayanan Publik Kota Binjai, yang berada pada kategori "C-", disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya profesionalisme SDM dalam memberikan pelayanan, terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan yang cepat dan efisien, serta minimnya inovasi dalam sistem informasi pelayanan publik yang mengakibatkan akses dan transparansi layanan kurang optimal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi pengembangan infrastruktur pelayanan, termasuk modernisasi fasilitas fisik dan teknologi pelayanan, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan intensif, dan penerapan inovasi digital dalam sistem informasi publik. Hal ini akan mempercepat proses pelayanan, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Monitoring dan evaluasi secara berkala

juga menjadi bagian dari rencana ini untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dan mendorong tercapainya pelayanan prima.

### 2.4.3. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil Indeks Inovasi Daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Pemingkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan, dan pembinaan bagi pemerintahan daerah.

**Tabel 2. 31. Indeks Inovasi Daerah Kota Binjai**

Tahun	Nilai	Kategori
2020	11,00	Kurang Inovatif
2021	0,48	Kurang Inovatif
2022	10,00	Kurang Inovatif
2023	42,04	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI

Hal ini diharapkan dapat lebih memacu kreativitas dan inovasi pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan, serta memotivasi pemerintah daerah lainnya untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kebijakannya di seluruh aspek, yang merupakan salah satu bentuk pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan inovasi daerah Kota Binjai didorong oleh beberapa faktor utama, termasuk dorongan untuk memperbaiki pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan adopsi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Kolaborasi lintas instansi serta keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal juga menjadi kunci dalam memacu kreativitas. *Roadmap* pengembangan keberlanjutan inovasi daerah mencakup pelatihan berkelanjutan bagi aparatur, pembenahan sistem digital untuk mendukung inovasi, dan

penerapan evaluasi berkala. Kedepan, fokus pada penyempurnaan infrastruktur teknologi, penguatan jejaring inovasi, serta pemberian insentif untuk inisiatif kreatif akan menjadi langkah strategis.

#### **2.4.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

**Tabel 2. 32. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Binjai Tahun 2021-2023**

Kota	2021	2022	2023
Binjai	1,670	1,821	2,975

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/>

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Binjai menunjukkan peningkatan dari 1,670 pada tahun 2021 menjadi 1,821 di tahun 2022 dan meningkat menjadi 2,975 pada tahun 2023. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau *e-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi

pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

#### **2.4.5. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi**

##### **Pemerintahan**

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 2. 33. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Binjai Tahun 2021-2023**

Kota	2021	2022	2023
Binjai	CC	CC	B

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/>

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Binjai tidak mengalami peningkatan, dimana tetap pada nilai “CC” (rentang nilai 51-60 dengan kategori “cukup”) di tahun 2021 dan 2022, namun mulai meningkat pada nilai “B” (rentang nilai 61-70 dengan kategori “baik”) di tahun 2023. Pencapaian nilai SAKIP yang diperoleh Pemerintah Kota Binjai di tahun 2023 mulai mengarah optimal sehingga perlu mempertahankan dan meningkatkan keterbukaan dan transparansi pengelolaan pemerintahan di Kota Binjai.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Binjai, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan sistem pelaporan kinerja melalui digitalisasi dan otomatisasi, yang memungkinkan pelacakan *progress* lebih *real-time* dan akurat. Kedua, memperkuat fungsi audit internal dengan audit yang lebih

rutin dan komprehensif, guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional dan integritas dalam pelaksanaan anggaran. Ketiga, memperluas transparansi anggaran dengan mempublikasikan rincian alokasi dan realisasi anggaran secara terbuka kepada publik, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan turut memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

#### **2.4.6. Indikator Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu ukuran penting yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari dalam daerah itu sendiri. Rasio kemandirian keuangan daerah tergolong sedang dan tinggi jika nilainya lebih dari 50% dan 75% (Dwiranda, 2007). Kemandirian keuangan yang dimaksud disini adalah proporsi dari PAD terhadap pendapatan total APBD. Semakin tinggi nilainya, maka semakin mandiri pula daerah tersebut, karena sebagian besar belanja daerahnya mampu ditopang oleh Pendapatan Asli Daerahnya.

Untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kota Binjai perlu fokus pada beberapa langkah strategis. Pertama, memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan, seperti pariwisata, industri lokal, dan perdagangan, serta memberdayakan potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap maksimal. Kedua, melakukan diversifikasi sumber pendapatan dengan memanfaatkan aset daerah secara lebih produktif dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan dan penagihan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Terakhir, memperkuat kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan pendampingan terkait pengelolaan keuangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas

perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran secara lebih mandiri.

#### 2.4.7. Opini BPK

Penyusunan laporan keuangan yang baik merupakan salah satu syarat dalam mendukung pencapaian-pencapaian target pembangunan yang optimal. Salah satu indikator yang menggambarkan baik tidaknya proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melihat opini BPK atas audit yang dilakukan. Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut “opini”. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

**Gambar 2. 56. Perkembangan Opini BPK Kota Binjai**



Sumber: Inspektorat Kota Binjai

Opini BPK terhadap kinerja laporan keuangan Kota Binjai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 berada pada kategori WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun pada tahun 2022 berada pada kategori WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan kembali pada kategori WTP pada tahun 2023. Untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di masa depan, Pemerintah Kota Binjai perlu mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan, seperti memperkuat sistem akuntansi dan pelaporan, meningkatkan kualitas pengawasan internal melalui audit yang

lebih ketat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Melibatkan semua pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tantangan yang dihadapi mencakup minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam akuntansi, kurangnya pemahaman regulasi, dan masalah dalam pengumpulan pajak. Oleh karena itu, fokus perbaikan harus diarahkan pada pengembangan kapasitas SDM, peningkatan sistem informasi keuangan, dan upaya efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.

#### **2.4.8. Indeks Kepatuhan Publik**

Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung. Adapun dimensi penilaian meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. Kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.

#### **2.5. Evaluasi RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025**

Evaluasi RPJPD Kota Binjai tahun 2005-2025 sudah dilakukan, dan ditemukan beberapa informasi berharga dalam rangka penguatan RPJPD Kota Binjai di tahun 2025-2045. Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja pembangunan, antara lain menguatnya pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan IPM. Beberapa hal yang mendorong penguatan kinerja IPM yaitu derajat kesehatan masyarakat Kota Binjai yang semakin meningkat melalui penyediaan sarana

prasarana kesehatan, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, dan meningkatnya kualitas tenaga kesehatan. Kemudian, kualitas pendidikan yang semakin meningkat melalui penyediaan fasilitas pendidik serta peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik maupun tenaga kependidikan. Dorongan lainnya adalah membaiknya perekonomian seiring dengan peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Binjai. Kontribusi sektor kesehatan dan pendidikan sangat signifikan terhadap peningkatan IPM Kota Binjai. Peningkatan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, serta pelatihan tenaga medis telah meningkatkan harapan hidup dan menurunkan angka kematian bayi. Di sektor pendidikan, penyediaan fasilitas yang lebih baik dan pelatihan guru telah meningkatkan angka partisipasi sekolah dan literasi. Kedepan, fokus pada peningkatan kapasitas layanan kesehatan dan pendidikan akan dilengkapi dengan program beasiswa, pelatihan intensif, serta indikator keberhasilan dan evaluasi berkala untuk memastikan dampak positif pada peningkatan IPM secara berkelanjutan.

Faktor pendorong berikutnya yaitu menurunnya angka kemiskinan sejak tahun 2005 hingga 2022. Meskipun terjadi lonjakan kemiskinan disaat pandemi Covid-19 tahun 2020, namun berbagai upaya yang dilakukan mampu menurunkan angka kemiskinan. Beberapa faktor yang mendorong penurunan kemiskinan di Kota Binjai antara lain adanya bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan dan pendidikan keterampilan, serta bantuan subsidi seperti subsidi bahan bakar. Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Binjai telah menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka kemiskinan, terutama dengan dukungan bantuan langsung tunai dan subsidi, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Program yang berhasil,

seperti pemberian subsidi bahan bakar dan pelatihan kewirausahaan, mampu mendorong peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin dan meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Namun, beberapa program pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya tepat sasaran, dengan adanya kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat maksimal akibat kurangnya pendataan yang komprehensif. Rekomendasi untuk perbaikan mencakup peningkatan mekanisme pendataan dan monitoring, serta pengembangan kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif, terutama dalam kondisi darurat seperti pandemi. Fleksibilitas kebijakan akan memastikan bahwa program tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Turunnya angka pengangguran juga diyakini sebagai salah satu faktor pendorong kinerja pembangunan di Kota Binjai. Beberapa upaya yang dilakukan dalam menekan angka pengangguran di Kota Binjai terbilang cukup efektif, seperti pengembangan usaha UMKM yang berdampak kepada penyerapan tenaga kerja. Selain itu, upaya dalam peningkatan kualitas SDM dengan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja turut serta dalam mempengaruhi penurunan angka pengangguran. Program pelatihan tenaga kerja di Kota Binjai telah memberikan kontribusi positif dalam menekan angka pengangguran, terutama dengan fokus pada pengembangan keterampilan berbasis kompetensi. Namun, efektivitas program ini dapat ditingkatkan melalui penyesuaian lebih baik terhadap kebutuhan spesifik pasar kerja lokal. Analisis menunjukkan bahwa sektor-sektor seperti manufaktur, jasa, dan teknologi informasi mulai berkembang di Binjai, namun tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis khusus masih terbatas. Oleh karena itu, program pelatihan harus lebih difokuskan pada keterampilan yang dibutuhkan oleh sektor-sektor ini. Selain itu, survei pasar tenaga kerja yang berkala diperlukan untuk terus mengidentifikasi tren kebutuhan keterampilan, sehingga pelatihan yang diselenggarakan tetap

relevan dan berdampak langsung pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Faktor pendorong lainnya yaitu kenaikan Pendapatan per Kapita sejak tahun 2005 hingga tahun 2022 dari 10,48 juta rupiah menjadi 44,34 juta rupiah. Faktor yang mendorong kenaikan Pendapatan per Kapita di Kota Binjai antara lain meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, serta program penanggulangan kemiskinan yang dinilai cukup efektif. Faktor lainnya adalah ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kota Binjai yang relatif rendah dibandingkan kabupaten/ kota lainnya di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi Kota Binjai yang tertahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor tertentu, seperti perdagangan dan UMKM, tanpa adanya diversifikasi ekonomi yang memadai. Keterbatasan dalam pengembangan sektor industri dan jasa yang lebih produktif juga turut membatasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dapat memberikan tekanan pada sumber daya dan fasilitas publik, sehingga menghambat kemajuan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan, kebijakan diversifikasi ekonomi sangat diperlukan, termasuk pengembangan sektor-sektor seperti industri kreatif, teknologi, dan pariwisata. Selain itu, pengendalian pertumbuhan populasi melalui program keluarga berencana (KB) dapat mengurangi tekanan pada layanan publik, serta memperbaiki kualitas hidup dan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa indikator mengalami kinerja yang tertahan, antara lain capaian pertumbuhan ekonomi Kota Binjai selama periode II, III dan IV yang masih belum mencapai target yang ditetapkan. Kemudian, terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk tepatnya pada periode III yang melebihi dari targetnya. Beberapa indikator lainnya yang belum mencapai target antara lain indikator Tingkat

Pengangguran Terbuka selama periode III dan IV, jumlah penduduk miskin selama 4 periodesasi, IPM pada periode III dan IV, kondisi jalan mantap di periode III dan IV, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang cenderung mengalami penurunan, serta kinerja Indeks Pembangunan Gender yang tertahan. Indikator kinerja pembangunan Kota Binjai yang tertahan, seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai target, tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, dan penurunan kualitas lingkungan hidup, menunjukkan perlunya strategi perbaikan yang konkret dan terukur. Untuk mengatasi masalah ini, fokus harus diberikan pada peningkatan program pemberdayaan perempuan guna meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi, pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung mobilitas dan akses layanan publik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga kualitas hidup. Rencana aksi harus mencakup penetapan target yang jelas, seperti peningkatan persentase perempuan yang terlibat dalam program pelatihan keterampilan hingga 50% dalam dua tahun, penyelesaian 80% proyek infrastruktur yang tertunda dalam lima tahun, dan pengurangan emisi karbon sebanyak 30% dalam periode yang sama. Evaluasi rutin diperlukan untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan hasil yang dicapai.

Beberapa rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan antara lain, diperlukan upaya peningkatan dampak dari program-program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta sarana infrastruktur yang diharapkan dapat bermuara kepada meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi. Program Keluarga Berencana perlu lebih diupayakan dalam rangka menekan angka TFR serta pemenuhan kebutuhan pelayanan KB. Perlunya upaya dalam mengurangi pengangguran dengan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme layanan antar kerja dan peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan dan

pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi. Kemudian, penguatan dalam proses pemberian subsidi dan bantuan sosial serta pengembangan usaha mikro kecil menengah yang lebih tepat sasaran. Untuk mencapai perbaikan signifikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan meliputi pengembangan kurikulum berbasis keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan fasilitas pendidikan seperti laboratorium dan teknologi informasi, serta penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Di sektor kesehatan, penting untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan melalui pembangunan puskesmas, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, serta program penyuluhan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. Dalam hal ekonomi, pengembangan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM, diversifikasi sektor ekonomi ke bidang baru seperti teknologi dan pariwisata, serta sistem monitoring dan evaluasi program yang efektif menjadi prioritas. Dengan pendekatan berbasis data dan evaluasi yang berkelanjutan, kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi di Kota Binjai diharapkan dapat meningkat secara signifikan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas pembangunan di beberapa wilayah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta tersedianya regulasi tentang muatan angkutan barang terhadap ketentuan muatan sumbu terberat suatu jalan sebagai upaya dalam mewujudkan peningkatan kondisi jalan mantap di Kota Binjai. Pengelolaan air limbah domestik rumah tangga dan penanganan persampahan perlu ditingkatkan sebagai upaya dalam peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang Kota Binjai merupakan dukungan dalam peningkatan

kualitas lingkungan seperti pengendalian dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Persoalan kekerasan pada perempuan dan perdagangan manusia perlu ditindaklanjuti lebih optimal dengan efek jera agar kasus-kasus tersebut semakin berkurang bahkan diharapkan menjadi nol kasus pada periode pembangunan berikutnya. Strategi peningkatan infrastruktur di Kota Binjai harus fokus pada pembangunan yang terukur dan ramah lingkungan, dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap proyek. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan audit lingkungan sebelum proyek dimulai dan memastikan bahwa setiap infrastruktur yang dibangun, seperti jalan dan fasilitas umum, dilengkapi dengan teknologi hijau yang meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang harus ditegaskan melalui peraturan yang mengatur zonasi penggunaan lahan yang jelas, serta pengembangan RTH yang seimbang dan terpadu untuk mendukung kualitas hidup masyarakat serta mitigasi perubahan iklim. Rencana aksi mencakup langkah konkret, seperti penetapan target area RTH yang harus dicapai setiap tahun, serta pengembangan program pengelolaan tata ruang yang efektif dan terintegrasi dengan strategi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum dan perlindungan sosial perlu diperkuat untuk mengurangi kasus kekerasan dan perdagangan manusia, melalui pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, serta edukasi publik, dengan target pengurangan kasus yang terukur setiap tahun.

## **2.6. Proyeksi Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**

### **2.6.1. Proyeksi Demografi**

#### **1. Proyeksi Jumlah Penduduk**

Penduduk merupakan subjek dan objek dari pembangunan. Untuk itu, aspek demografi menjadi instrumen penting dalam

memetakan kondisi kependudukan di Kota Binjai saat ini dan perkembangannya kedepan, serta sebagai alat bantu dalam menelusuri berbagai macam kebutuhannya di masa depan. Proyeksi jumlah penduduk Kota Binjai hingga tahun 2045 merupakan asumsi dasar yang digunakan untuk penghitungan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik di Kota Binjai.

**Tabel 2. 34. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045**

Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Jumlah Penduduk (orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
303.272	310.932	327.548	340.893	352.451	363.010

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Jumlah penduduk di Kota Binjai dari tahun 2023 hingga 2045 diproyeksikan mengalami kenaikan. Penduduk Kota Binjai di tahun 2023 sebanyak 303.272 jiwa, secara konsisten mengalami kenaikan hingga tahun 2045 menjadi 363.010 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2025 diproyeksi dengan nilai rasio geometri sebesar 0,069, kemudian kenaikannya semakin menyusut hingga periode 2045 dengan rasio sebesar 0,030.

Pertumbuhan penduduk yang signifikan di Kota Binjai hingga tahun 2045 memiliki implikasi besar terhadap kebijakan tata ruang dan kebutuhan lahan yang efisien. Kenaikan jumlah penduduk menuntut perencanaan yang lebih strategis dalam pengelolaan ruang, agar lahan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terjadi ketidakseimbangan dalam penggunaan lahan. Dalam menghadapi tantangan ini, strategi perencanaan kota yang berbasis teknologi, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan analisis *big data*, dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang cocok untuk pengembangan infrastruktur dan permukiman, serta untuk memantau kepadatan penduduk secara *real-time*. Implementasi *zoning* yang fleksibel dan pemanfaatan ruang campuran juga diperlukan untuk menciptakan kawasan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan peningkatan fasilitas publik harus

menjadi bagian integral dari perencanaan tata ruang, untuk menjaga kualitas hidup penduduk dan mitigasi dampak negatif dari pertumbuhan yang cepat. Melalui pendekatan ini, Kota Binjai dapat menciptakan lingkungan yang lebih terencana dan terkelola, mengurangi tekanan pada infrastruktur yang ada, dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

## 2. Proyeksi Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang positif dengan kondisi luas administratif Kota Binjai yang tetap yaitu seluas 93,71 km<sup>2</sup>, maka Kota Binjai kedepannya akan semakin padat penduduk. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk Kota Binjai sebesar 3.236 jiwa/km<sup>2</sup>, meningkat menjadi 3.874 jiwa/km<sup>2</sup> di tahun 2045.

**Tabel 2. 35. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045**

Kepadatan Penduduk Tahun 2023 (jiwa/km <sup>2</sup> )	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )				
	2025	2030	2035	2040	2045
3.236	3.318	3.495	3.638	3.761	3.874

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Semakin padatnya penduduk di Kota Binjai membawa konsekuensi yaitu semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan pembangunan secara fisik, seperti pembangunan fasilitas publik dan tempat tinggal. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif pembangunan fisik yang lebih efektif dan efisien kedepannya, baik berupa opsi pembangunan gedung bertingkat, serta dengan menyertakan kemajuan teknologi sebagai alat bantu pemecahan masalah yang akan dihadapi pada periode berikutnya.

Dalam menghadapi proyeksi kepadatan penduduk yang meningkat di Kota Binjai, strategi pembangunan fisik yang lebih adaptif sangat diperlukan. Penggunaan bangunan bertingkat dan pengembangan lahan vertikal dapat menjadi solusi efektif untuk memaksimalkan penggunaan ruang tanpa memperluas area terbangun, memungkinkan lebih banyak fasilitas publik dan perumahan tersedia di lahan yang terbatas. Selain itu, peningkatan kapasitas infrastruktur umum, seperti jalan, transportasi publik,

serta fasilitas kesehatan dan pendidikan, harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin padat. Rencana tata kelola lingkungan yang mendukung kualitas hidup juga harus diterapkan, termasuk pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) yang cukup, pengelolaan limbah yang efisien, dan mitigasi dampak lingkungan dari pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam semua aspek pembangunan, seperti penggunaan material ramah lingkungan dan teknologi efisien energi, juga sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan kota tidak hanya meningkatkan kepadatan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penduduk di kawasan yang padat.

### 3. Proyeksi Struktur Penduduk

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kota Binjai yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin. Gambaran umum diawali dengan informasi mengenai kondisi penduduk diawal pengamatan berdasarkan kelompok umur berjenis kelamin laki-laki, beserta proyeksinya hingga tahun 2045.

**Tabel 2. 36. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045 Menurut Kelompok Umur dari Jenis Kelamin Laki-Laki**

Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	13.929	14.711	14.803	14.867	14.918	14.960
5-9	13.856	13.162	13.293	13.385	13.457	13.517
10-14	12.818	12.476	12.613	12.711	12.787	12.851
15-19	11.965	11.592	11.691	11.760	11.815	11.860
20-24	11.762	12.166	11.983	11.857	11.761	11.680
25-29	12.565	12.951	13.258	13.477	13.650	13.796
30-34	12.284	12.603	13.096	13.452	13.737	13.980
35-39	11.648	12.208	12.834	13.294	13.663	13.982
40-44	11.002	11.313	12.021	12.546	12.971	13.340
45-49	9.985	10.529	11.491	12.222	12.827	13.359
50-54	8.661	9.039	9.969	10.685	11.280	11.808
55-59	7.191	7.679	8.598	9.315	9.918	10.457
60-64	5.737	6.186	7.061	7.757	8.350	8.886
65-69	4.159	4.367	5.140	5.774	6.326	6.835
70-74	2.430	2.694	3.584	4.409	5.197	5.978
75+	1.635	1.786	2.248	2.655	3.027	3.384
<b>Total</b>	<b>151.627</b>	<b>155.462</b>	<b>163.683</b>	<b>170.165</b>	<b>175.681</b>	<b>180.673</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (SP2020), data diolah

Perkembangan penduduk Kota Binjai berjenis kelamin laki-laki pada awal pengamatan di tahun 2023 sejumlah 151.627 jiwa. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk laki-laki terbanyak berada di rentang usia 0-4 tahun, sejumlah 13.929 jiwa. Sedangkan penduduk laki-laki paling sedikit berada di kelompok umur 75 tahun keatas, sebanyak 1.635 jiwa. Hasil proyeksi hingga tahun 2045 menunjukkan penduduk terbanyak tetap berada pada kelompok umur 0-4 tahun.

Hal ini menggambarkan tingkat kelahiran yang positif disertai dengan angka kematian balita yang semakin rendah seiring dengan perbaikan kualitas dimensi kesehatan masyarakat. Seluruh rentang usia penduduk laki-laki Kota Binjai mengalami kenaikan secara konsisten, kecuali pada rentang umur 20-24 tahun. Diasumsikan penduduk pada rentang umur tersebut melakukan migrasi keluar ke wilayah lain. Kenaikan jumlah penduduk laki-laki pada rentang umur 65 tahun keatas menunjukkan Kota Binjai ke depan akan mengalami masa *agging population*.

**Tabel 2. 37. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045 Menurut Kelompok Umur dari Jenis Kelamin Perempuan**

Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	13.272	13.859	13.980	14.068	14.139	14.200
5-9	12.929	12.380	12.561	12.693	12.800	12.891
10-14	11.805	11.660	11.962	12.184	12.366	12.522
15-19	11.072	10.908	10.960	10.998	11.028	11.054
20-24	11.205	11.471	11.130	10.891	10.705	10.548
25-29	12.326	12.530	12.666	12.765	12.845	12.914
30-34	12.278	12.509	12.948	13.275	13.543	13.776
35-39	11.859	12.442	13.078	13.560	13.959	14.309
40-44	11.211	11.229	11.829	12.283	12.661	12.992
45-49	10.173	11.031	11.946	12.661	13.266	13.806
50-54	9.368	9.601	10.484	11.180	11.773	12.305
55-59	7.826	8.278	9.267	10.065	10.759	11.389
60-64	6.271	6.620	7.589	8.390	9.098	9.751
65-69	4.623	5.090	6.046	6.864	7.607	8.307
70-74	2.977	3.198	4.180	5.105	6.010	6.915
75+	2.450	2.664	3.240	3.745	4.212	4.658
<b>Total</b>	<b>151.645</b>	<b>155.470</b>	<b>163.865</b>	<b>170.728</b>	<b>176.770</b>	<b>182.337</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (SP2020), data diolah

Penduduk usia tua semakin bertambah jumlahnya hingga tahun 2045, sejalan dengan perkembangan usia harapan hidup

yang semakin membaik. Perkembangan penduduk lansia terlihat dari jumlah penduduk pada rentang usia 65–69 tahun, 70–74 tahun, dan 75 tahun keatas di awal pengamatan tahun 2023 masing-masing sebanyak 4.159 jiwa, 2.430 jiwa, dan 1.635 jiwa yang semakin bertambah jumlahnya hingga tahun 2045 mencapai 6.835 jiwa, 5.978 jiwa, dan 3.384 jiwa atau bertambah sekitar dua kali lipatnya. Total penduduk laki-laki di tahun 2045 diperkirakan sebanyak 180.673 jiwa.

**Tabel 2. 38. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045 Menurut Kelompok Umur**

Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0–4	27.201	28.570	28.783	28.936	29.057	29.160
5–9	26.785	25.542	25.854	26.078	26.256	26.409
10–14	24.623	24.136	24.575	24.895	25.152	25.373
15–19	23.037	22.500	22.651	22.758	22.843	22.914
20–24	22.967	23.637	23.113	22.748	22.465	22.229
25–29	24.891	25.481	25.924	26.242	26.495	26.710
30–34	24.562	25.112	26.043	26.727	27.280	27.756
35–39	23.507	24.650	25.912	26.853	27.622	28.290
40–44	22.213	22.543	23.850	24.829	25.632	26.332
45–49	20.158	21.561	23.437	24.883	26.093	27.164
50–54	18.029	18.640	20.454	21.865	23.053	24.112
55–59	15.017	15.958	17.865	19.381	20.677	21.846
60–64	12.008	12.806	14.650	16.146	17.448	18.637
65–69	8.782	9.457	11.186	12.638	13.933	15.142
70–74	5.407	5.891	7.763	9.514	11.207	12.892
75+	4.085	4.450	5.489	6.400	7.239	8.042
<b>Total</b>	<b>303.272</b>	<b>310.932</b>	<b>327.548</b>	<b>340.893</b>	<b>352.451</b>	<b>363.010</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (SP2020), data diolah

Kenaikan angka kelahiran juga diperlihatkan dari penduduk berjenis kelamin perempuan. Penduduk usia 0–4 tahun semakin bertambah hingga tahun 2045, dari 13.272 jiwa menjadi 14.200 jiwa. Jumlah penduduk perempuan terbanyak di tahun 2023 berada di rentang umur 0–4 tahun. Secara absolut, jumlah penduduk perempuan meningkat hingga tahun 2045 dari 151.645 jiwa menjadi 182.337 jiwa.

Proses *aging population* juga terlihat dari komposisi penduduk perempuan. Kenaikan jumlah penduduk secara konsisten diperkirakan terjadi pada penduduk di berbagai segmen usia, kecuali pada rentang 5–9 tahun, 15–19 tahun, dan 20–24

tahun yang mengalami penurunan jumlah. Penduduk lansia berjenis kelamin perempuan diduga mengalami kenaikan jumlah hingga tahun 2045 dari 10.050 jiwa di tahun 2023 menjadi 19.880 jiwa di tahun 2045, atau terjadi penambahan lebih dari hampir dua kali lipat. Penduduk perempuan di Kota Binjai relatif memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan penduduk laki-laki. Kondisi ini salah satunya ditunjukkan dari penduduk perempuan yang berusia 75 tahun keatas yang masih lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki di kelompok umur yang sama.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan kenaikan jumlah penduduk di usia 0–4 tahun secara konsisten. Dengan kata lain, *Total Fertility Rate* di Kota Binjai kedepannya masih tumbuh dalam kondisi penduduk tumbuh seimbang (*replacement level fertility*). Penduduk Kota Binjai juga akan memasuki masa penuaan populasi, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk 65 tahun keatas dari 18.274 jiwa di tahun 2023 menjadi 36.076 jiwa di tahun 2045.

Penuaan populasi tergambar dari proyeksi yang dilakukan, dengan jumlah penduduk lansia yang bertambah secara konsisten. Asumsi bertambahnya umur harapan hidup serta meningkatnya kualitas hidup seseorang mendorong fenomena jumlah lansia yang semakin membesar. Hal ini perlu dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan yang pro lansia kedepannya, agar penduduk pada kelompok umur tersebut yang masih produktif dapat berkontribusi lebih banyak dalam pembangunan, serta fasilitasi dan dukungan perlindungan bagi lansia non produktif.

Untuk mendukung peningkatan jumlah penduduk lansia, Kota Binjai perlu mengimplementasikan kebijakan yang spesifik dan terintegrasi. Pertama, pengembangan layanan kesehatan khusus untuk lansia, termasuk pusat kesehatan yang fokus pada pencegahan penyakit dan manajemen kondisi kesehatan kronis, harus diperkuat. Selain itu, program tenaga kerja inklusif yang memfasilitasi partisipasi lansia produktif dalam kegiatan ekonomi,

seperti pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan, dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan mereka. Mendorong partisipasi aktif lansia dalam masyarakat melalui kegiatan sosial, seni, dan olahraga juga sangat penting, agar mereka dapat berkontribusi dan terhubung dengan komunitas. Dengan langkah-langkah ini, potensi lansia sebagai aset sosial dan ekonomi dapat dimaksimalkan, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Binjai secara keseluruhan.

**Tabel 2. 39. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045 Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	151.627	155.462	163.683	170.165	175.681	180.673
Perempuan	151.645	155.470	163.865	170.728	176.770	182.337
<b>Rasio</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>99,89</b>	<b>99,67</b>	<b>99,38</b>	<b>99,09</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Hasil proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah perempuan akan semakin banyak dibandingkan jumlah laki-lakinya. Pada tahun 2023, jumlah laki-laki di Kota Binjai sebanyak 151.627 jiwa, kemudian meningkat di tahun 2025 menjadi 155.462 jiwa. Jumlah laki-laki diproyeksikan konsisten meningkat hingga tahun 2045 menjadi 180.673 jiwa atau tumbuh sebesar 20,76% selama kurun waktu 20 tahun.

Sedangkan jumlah penduduk perempuan di tahun 2023 sebanyak 151.645 jiwa, dan meningkat menjadi 155.470 jiwa pada tahun 2025. Peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2045 dengan jumlah 182.337 jiwa, atau tumbuh sebesar 21,86% dari tahun 2025 hingga 2045. Perkembangan jumlah penduduk perempuan yang lebih tinggi ini sejalan dengan nilai rasio jenis kelamin di Kota Binjai yang semakin rendah dari angka 100. Pada tahun 2023 hingga tahun 2035, nilai rasionya sebesar 99,67 atau masih diatas 99,5 dan terus mengalami penurunan rasio di periode berikutnya menjadi 99,38 dan 99,09 atau sudah dibawah 99,5. Dengan kata lain, sejak tahun 2040 hingga tahun 2045 terdapat 100 perempuan berbanding 99 laki-laki di Kota Binjai.

Perbedaan kebutuhan layanan antara laki-laki dan perempuan di Kota Binjai harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan proyeksi demografi, perempuan cenderung memiliki umur yang lebih panjang, sehingga layanan kesehatan perlu diarahkan untuk mengatasi masalah kesehatan spesifik yang lebih umum di kalangan perempuan, seperti penyakit tidak menular dan layanan reproduksi. Disisi lain, layanan pendidikan perlu dirancang untuk memastikan akses yang setara bagi perempuan, terutama di kelompok usia produktif dan remaja, mengingat adanya kemungkinan penurunan jumlah perempuan dalam rentang usia 20-24 tahun akibat migrasi. Dengan menganalisis data gender secara mendalam, pemerintah dapat menciptakan program yang responsif dan inklusif, seperti pelatihan kesehatan untuk ibu dan remaja putri serta program pendidikan yang mendorong partisipasi perempuan di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika). Integrasi analisis gender dalam perencanaan layanan publik tidak hanya akan meningkatkan efektivitas layanan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kesenjangan gender dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel di bawah menunjukkan perkembangan jumlah penduduk berdasarkan tiga kelompok umur, yaitu umur 0-14 tahun (usia non produktif), umur 15-64 tahun (usia produktif), dan umur diatas 65 tahun (non produktif). Perkembangan umur 0-14 tahun mengalami kenaikan jumlah dengan pertumbuhan sebesar 2,93% hingga tahun 2045. Jumlah penduduk usia tersebut di tahun 2023 sebanyak 78.609 jiwa lalu meningkat hingga tahun 2045 menjadi 80.911 jiwa.

**Tabel 2. 40. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045 Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif**

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	78.609	78.246	79.204	79.894	80.443	80.911
15-64 Tahun	206.389	212.890	223.916	232.470	239.668	246.079
>65 Tahun	18.274	19.796	24.427	28.529	32.340	36.020
<b>Angka Ketergantungan</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>48</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif mengalami peningkatan dari 206.389 jiwa di tahun 2023, menjadi 246.079 jiwa di tahun 2045 atau tumbuh sebesar 19,23%. Kota Binjai hingga tahun 2045 masih mengalami bonus demografi, namun dengan angka ketergantungan yang semakin meningkat. Hal ini terlihat dari pergerakan angka ketergantungan yang berubah naik di tahun 2035 sebesar 47 dan hingga tahun 2045 sebesar 48, atau sebanyak 100 penduduk usia produktif akan menanggung 48 penduduk usia non produktif.

Selanjutnya, peningkatan yang signifikan terjadi pada usia 65 tahun keatas. Jumlahnya di tahun 2023 sebanyak 18.274 jiwa dan meningkat secara konsisten pada setiap periode pengamatan. Kenaikan jumlah penduduk lansia dari tahun 2023 hingga 2045 mencapai hampir dua kali lipatnya, dengan laju tumbuh sebesar 97,11%. Kondisi ini menggambarkan penduduk Kota Binjai kedepannya akan mengalami masa *aging population* (penuaan populasi). Oleh sebab itu, diperlukan suatu langkah strategis kedepan dalam menghadapi kenaikan jumlah lansia sebagai suatu peluang dan menjadikannya sebagai salah satu kekuatan sosial ekonomi di kota ini.

Integrasi proyeksi demografi dengan strategi pembangunan ekonomi di Kota Binjai harus fokus pada penguatan tenaga kerja usia produktif dan penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan. Dengan proyeksi jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat, kebijakan ekonomi inklusif harus diimplementasikan, termasuk pengembangan program pelatihan

kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta pemberian akses yang lebih baik terhadap modal dan teknologi bagi pengusaha lokal. Dukungan terhadap bisnis kecil dan menengah melalui insentif pajak dan fasilitas pendanaan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, penting untuk menyediakan fasilitas dan program yang mendorong partisipasi lansia yang masih produktif, seperti pelatihan keterampilan baru dan program magang, sehingga mereka dapat tetap berkontribusi secara aktif dalam perekonomian. Dengan pendekatan holistik ini, Kota Binjai dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mengoptimalkan potensi semua kelompok umur.

#### 4. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Berdasarkan Kecamatan

Hasil proyeksi penduduk Kota Binjai per kecamatan menunjukkan jumlah penduduk terbanyak dari tahun 2023 hingga tahun 2045 masih berada di Kecamatan Binjai Utara. Jumlahnya bertambah dari 88.364 jiwa menjadi 103.332 jiwa. Sedangkan penduduk Kota Binjai paling sedikit berada di Kecamatan Binjai Kota, dengan jumlah sebanyak 32.452 jiwa di tahun 2023, meningkat hingga tahun 2045 menjadi 37.392 jiwa.

**Tabel 2. 41. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2045 Menurut Kecamatan**

Wilayah	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Binjai Selatan	60.894	64.347	67.786	70.548	72.940	75.125
Binjai Kota	32.452	32.028	33.740	35.114	36.305	37.392
Binjai Timur	68.376	68.687	72.357	75.305	77.859	80.191
Binjai Utara	88.364	88.508	93.238	97.036	100.326	103.332
Binjai Barat	53.186	57.362	60.428	62.890	65.022	66.970
<b>Kota Binjai</b>	<b>303.272</b>	<b>310.932</b>	<b>327.548</b>	<b>340.893</b>	<b>352.451</b>	<b>363.010</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Seluruh kecamatan diproyeksikan hingga tahun 2045 mengalami peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kota Binjai dari tahun 2023 hingga 2045 mengalami kenaikan dari 303.272 jiwa menjadi 363.010 jiwa atau tumbuh selama 22 tahun sebesar 19,70%. Kondisi ini tentunya perlu diimbangi dengan penyesuaian kembali berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, pasar, dan fasilitas lainnya dalam rangka memenuhi

kebutuhan penduduk akan fasilitas tersebut di setiap kecamatannya.

Untuk memastikan distribusi layanan publik yang merata berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan di Kota Binjai, sangat penting untuk menyusun rencana yang mencakup penyesuaian kapasitas infrastruktur, seperti sekolah, puskesmas, dan sistem transportasi umum. Rekomendasi ini mencakup peningkatan jumlah sekolah dan puskesmas di kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan, terutama di Kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, pengembangan jaringan transportasi umum yang efisien dan terintegrasi perlu diprioritaskan untuk meningkatkan aksesibilitas antar kecamatan, sehingga mempermudah mobilitas penduduk dalam mencari layanan yang diperlukan. Dengan demikian, penyesuaian infrastruktur yang tepat akan mendukung proyeksi pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

## **2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**

### **1. Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal**

Penghitungan proyeksi kebutuhan fasilitas tempat tinggal dihitung dengan menggunakan asumsi 4,36 jiwa per rumah tangga di tahun 2023, lalu semakin menurun hingga 4 jiwa per rumah tangga di tahun 2045. Hasil proyeksi menunjukkan kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat di setiap periodenya, mengikuti perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kota Binjai. Kebutuhan tempat tinggal di tahun 2025 sebanyak 72.142 unit, dan meningkat hingga tahun 2045 menjadi 90.753 unit.

**Tabel 2. 42. Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal Kota Binjai Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	303.272	310.932	327.548	340.893	352.451	363.010
<b>Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal (unit)</b>	<b>69.558</b>	<b>72.142</b>	<b>77.070</b>	<b>81.165</b>	<b>85.964</b>	<b>90.753</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pembangunan tempat tinggal kedepannya di Kota Binjai perlu dikombinasikan dengan opsi pada bangunan bertingkat atau vertikal, mengingat daya dukung dari ketersediaan lahan yang semakin menyempit, seiring dengan penyediaan sarana prasarana lainnya yang juga turut meningkat. Penerapan RTH pada kawasan permukiman agar seluruh kawasan peruntukan permukiman tetap menyediakan ruang terbuka hijau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Binjai. Selain itu, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memberikan alternatif-alternatif terbaik untuk pemenuhan tempat tinggal kedepannya perlu menjadi pertimbangan.

Dalam rangka memenuhi proyeksi kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat, penting untuk menyusun rencana pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang. Rekomendasi ini mencakup pengembangan bangunan bertingkat untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, khususnya di kawasan padat penduduk, serta penempatan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Selain itu, penggunaan teknologi terkini dalam perencanaan dan pembangunan perumahan harus dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan hunian. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga penting untuk mempercepat pengembangan infrastruktur pendukung, seperti aksesibilitas transportasi dan fasilitas umum, guna menciptakan

lingkungan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Binjai.

## 2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum/ Air Bersih

Kebutuhan air minum penduduk perkotaan sebesar 43,8 m<sup>3</sup>/orang/tahun (Suheri et al., 2019). Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Binjai hingga tahun 2045, maka diketahui kebutuhan air minum di Kota Binjai meningkat secara konsisten sejalan dengan peningkatan jumlah penduduknya. Pada tahun 2025, kebutuhan air minum per tahunnya sebanyak 13,28 juta m<sup>3</sup>/tahun, hingga tahun 2045, kebutuhannya mencapai 15,89 juta m<sup>3</sup>/tahun.

**Tabel 2. 43. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Binjai Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	303.272	310.932	327.548	340.893	352.451	363.010
<b>Proyeksi Kebutuhan Air Minum (m<sup>3</sup>/tahun)</b>	<b>13.283.314</b>	<b>13.618.822</b>	<b>14.346.602</b>	<b>14.931.113</b>	<b>15.437.354</b>	<b>15.899.838</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Untuk memenuhi proyeksi kebutuhan air minum yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi di Kota Binjai, perlu disusun rencana pengelolaan sumber daya air yang komprehensif dan berkelanjutan. Rekomendasi ini mencakup pengembangan infrastruktur penyediaan air bersih, seperti pembangunan jaringan distribusi yang efisien dan fasilitas pengolahan air yang mampu menghasilkan air berkualitas tinggi. Selain itu, penting untuk menerapkan program konservasi air dan kesadaran masyarakat akan penggunaan air yang bijak, guna mengurangi pemborosan dan menjaga keberlanjutan sumber daya air. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam penyediaan dan pengelolaan air minum juga harus didorong untuk memastikan aksesibilitas dan kualitas air bersih yang memadai bagi seluruh penduduk Kota Binjai hingga tahun 2045.

### 3. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Kebutuhan listrik Kota Binjai dilakukan dengan melihat perkembangan konsumsi listrik setiap periodenya. Asumsi yang digunakan untuk konsumsi listrik sebesar 1,336 MWH per kapita per tahun, atau sekitar 5,573 MWH per rumah tangga per tahun. Kebutuhan listrik pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 415.405 MWH, dan semakin meningkat hingga 20 tahun berikutnya yang mencapai 484.981 MWH seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Binjai hingga tahun 2045.

**Tabel 2. 44. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Binjai Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	303.272	310.932	327.548	340.893	352.451	363.010
Jumlah Rumah	69.558	72.142	77.070	81.165	85.964	90.753
<b>Proyeksi Kebutuhan Listrik (MWH)</b>	-	<b>415.405</b>	<b>437.604</b>	<b>455.433</b>	<b>470.875</b>	<b>484.981</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dalam menghadapi proyeksi kebutuhan listrik yang terus meningkat di Kota Binjai, penting untuk merumuskan strategi pengelolaan energi yang berkelanjutan. Rekomendasi ini mencakup pengembangan infrastruktur kelistrikan yang dapat memenuhi kebutuhan hingga tahun 2045, termasuk perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik. Selain itu, penting untuk mendorong penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, guna mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan meningkatkan keberlanjutan. Program efisiensi energi juga harus diterapkan, baik dalam sektor domestik maupun industri, untuk mengoptimalkan penggunaan listrik dan mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penghematan energi dan pemanfaatan teknologi efisien harus diperkuat, agar seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam mencapai target kebutuhan listrik yang berkelanjutan di Kota Binjai.

#### 4. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah

Jumlah timbulan sampah di Kota Binjai pada tahun 2023 sebanyak 79.231 ton. Kondisi sampah di Kota Binjai diprediksi meningkat seiring penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2025, diperkirakan dengan jumlah penduduk sebanyak 310.932 jiwa akan menghasilkan timbulan sampah sebanyak 90.258 ton. Jumlah timbulan secara stabil meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk, dimana hingga tahun 2045, dengan jumlah penduduk sebanyak 363.010 jiwa akan menghasilkan timbulan sampah sekitar 105.375 ton.

**Tabel 2. 45. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah Kota Binjai Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	303.272	310.932	327.548	340.893	352.451	363.010
Proyeksi Timbulan Sampah (ton)	79.231	90.258	95.081	98.955	102.310	105.375
<b>Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (data diolah)

Menghadapi proyeksi timbulan sampah yang terus meningkat di Kota Binjai, penting untuk merumuskan strategi pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dengan mempertimbangkan penambahan TPST menjadi 2 (dua) unit pada tahun 2040 untuk menampung timbulan sampah yang diprediksi mencapai 102.310 ton. Selain itu, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi perlu diperkuat, termasuk penerapan konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) di tingkat masyarakat. Program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta memanfaatkan sampah sebagai sumber ekonomi, seperti dalam program daur ulang dan komposting. Kerja sama dengan sektor swasta juga harus dijalin untuk menciptakan inovasi dalam

pengelolaan sampah, sehingga dapat memaksimalkan potensi nilai ekonomi dari sampah sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Terakhir, perlu adanya kebijakan yang mendukung investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, agar Kota Binjai dapat memiliki sistem manajemen sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## 5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang dilakukan proyeksi antara lain fasilitas rumah sakit umum, fasilitas puskesmas, dan fasilitas posyandu. Penghitungan proyeksi kebutuhan fasilitas rumah sakit dilakukan dengan menggunakan asumsi ideal 3 tempat tidur per 1000 penduduk. Kemudian, penetapan jumlah tempat tidur per satuan rumah sakit dilakukan dengan menggunakan rata-rata dari jumlah tempat tidur minimal untuk rumah sakit kelas A, B, C, dan D sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020. Penghitungan proyeksi kebutuhan fasilitas puskesmas di Kota Binjai dilakukan dengan menggunakan asumsi jumlah penduduk pendukung sebanyak 50.000 jiwa per puskesmas. Angka ini merupakan hasil rata-rata jumlah penduduk pendukung untuk puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) yang disesuaikan. Sedangkan penghitungan proyeksi kebutuhan fasilitas posyandu di Kota Binjai menggunakan asumsi 1 puskesmas melayani 1.250 jiwa.

**Tabel 2. 46. Asumsi Rasio per Fasilitas Kesehatan**

Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 bed : 1000 jiwa*</li> <li>• 1 fasilitas : 150 bed (rata-rata minimal bed RS kelas A, B, C, dan D)</li> </ul>	1 fasilitas : 50.000 jiwa	1 fasilitas : 1.250 jiwa

Sumber: Badan Standardisasi Nasional

\* *ETHealthworld, 2018*

Hasil proyeksi atas fasilitas rumah sakit menunjukkan ketersediaannya saat ini sudah cukup menampung kebutuhan hingga tahun 2035. Kebutuhan akan fasilitas rumah sakit bertambah 1 unit di tahun 2040 menjadi 12 unit.

**Tabel 2. 47. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	303.272	310.932	327.548	340.893	352.451	363.010
Proyeksi Kebutuhan Rumah Sakit	11	11	11	11	12	12
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas	8	8	8	8	8	8
Proyeksi Kebutuhan Posyandu	241	241	241	241	241	241

*Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)*

Sementara itu, untuk fasilitas puskesmas dan posyandu diproyeksikan tidak mengalami peningkatan, namun kondisi ini harus disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas tenaga kesehatan. Mengingat proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Binjai, penting untuk fokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan. Meskipun jumlah rumah sakit, puskesmas, dan posyandu tidak mengalami peningkatan signifikan hingga tahun 2045, perlu ada strategi untuk memperkuat kualitas pelayanan. Disarankan untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur rumah sakit dan penambahan unit di tahun 2040, serta optimalisasi layanan puskesmas melalui peningkatan fasilitas dan pelatihan tenaga kesehatan. Pengembangan posyandu juga penting, dengan fokus pada dukungan kesehatan berbasis masyarakat untuk kelompok rentan. Implementasi program kesehatan inklusif dan berbasis bukti serta integrasi teknologi informasi dalam manajemen fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa Kota Binjai dapat memenuhi kebutuhan kesehatan penduduk secara optimal dan berkelanjutan.

## **5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan**

Fasilitas pendidikan yang dimaksud meliputi fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik sekolah formal maupun non formal, fasilitas SD/ MI, fasilitas SMP/ MTs, dan fasilitas SMA/ SMK/ MA. Untuk mengukur kebutuhan fasilitas per jenjang

pendidikan tersebut, maka ditetapkan nilai rasio yang berfungsi sebagai pembagi dari proyeksi APK (untuk PAUD) dan APM (untuk SD, SMP, SMA) pada 5 (lima) perodesasi yang ada di RPJPD Kota Binjai. Penghitungan menggunakan 2 (dua) asumsi kebutuhan, yaitu kebutuhan unit sekolah dan kebutuhan ruang kelas seiring dengan peningkatan APK (PAUD) dan APM (SD, SMP, SMA/ sederajat) kedepannya.

Asumsi rasio untuk 1 unit fasilitas PAUD yaitu sebanyak 60 siswa, sedangkan rasio pada fasilitas SD, SMP, dan SMA sebanyak 240 siswa per unit sekolah. Sementara itu, asumsi lainnya adalah dengan menggunakan kebutuhan ruang kelas. Diasumsikan 1 ruang kelas pada fasilitas PAUD sebanyak 60 siswa, sementara itu, asumsi ruang kelas pada fasilitas SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ SMK/ MA masing-masing diisi sebanyak 40 siswa.

**Tabel 2. 48. Asumsi Rasio per Unit dan Ruang Kelas Fasilitas Pendidikan**

PAUD	SD	SMP	SMA
1 unit Fasilitas : 60 siswa	1 unit Fasilitas : 240 siswa	1 unit Fasilitas : 240 siswa	1 unit Fasilitas : 240 siswa
1 Ruang Kelas : 60 siswa	1 Ruang Kelas : 40 siswa	1 Ruang Kelas : 40 siswa	1 Ruang Kelas : 40 siswa

Sumber: Badan Standarisasi Nasional

Proyeksi APK pada jenjang pendidikan PAUD disesuaikan dengan kondisi pada tahun 2023, yang kemudian persentase kedepannya diasumsikan semakin meningkat seiring dengan semangat dalam penguatan sumber daya manusia di Kota Binjai. Angka ini memuat partisipasi sekolah yang cukup rendah, sehingga proyeksinya kedepan mengalami kenaikan secara berjenjang. Sementara itu, asumsi APM pada tingkat SD ditargetkan sebesar 100% sejak tahun 2025 hingga tahun 2045. Sedangkan APM SMP dan SMA dilakukan penyesuaian di tahun 2025 masing-masing sebesar 90% dan 80% mengingat APM keduanya yang masih belum terlalu tinggi pada tahun 2023.

Hasil proyeksi kebutuhan fasilitas PAUD menunjukkan adanya gap antara kondisi eksisting di tahun 2023 dengan

kebutuhannya di tahun 2025 hingga tahun 2045. Kondisi fasilitas untuk jenjang PAUD di tahun 2023 ada sebanyak 130 unit. Jumlah ini merupakan penjumlahan dari fasilitas Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Raudhatul Athfal (RA). Namun kebutuhannya di tahun 2045 sebanyak 150 unit, atau masih terjadi *gap* sebesar 20 unit.

**Tabel 2. 49. Proyeksi Angka Partispasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni per Jenjang Pendidikan**

Jenjang Pendidikan	Proyeksi APM/APK				
	2025	2030	2035	2040	2045
PAUD (APK)	53%	66%	77%	90%	100%
SD (APM)	100%	100%	100%	100%	100%
SMP (APM)	90%	100%	100%	100%	100%
SMA APM)	80%	90%	100%	100%	100%

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (data diolah)

Untuk kebutuhan SD pada tahun 2025 hingga 2045 sebanyak 184 unit sekolah. Dengan kata lain, jumlah sekolah SD/ MI yang tersedia sudah cukup menampung jumlah siswa kedepannya. Begitu juga pada fasilitas SMP/ MTs dan fasilitas SMA/ SMK/ MA yang belum memerlukan penambahan unit sekolah hingga akhir tahun periode RPJPD.

**Tabel 2. 50. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	303.272	310.932	327.548	340.893	352.451	363.010
Proyeksi Kebutuhan PAUD	130	130	135	140	145	150
Proyeksi Kebutuhan SD/MI	184	184	184	184	184	184
Proyeksi Kebutuhan SMP/MTs	75	75	75	75	75	75
Proyeksi Kebutuhan SMA/SMK/MA	61	61	61	61	61	61

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Jika penghitungan dilakukan berdasarkan kebutuhan ruang kelas, maka kebutuhan ruang kelas pada seluruh fasilitas mengalami peningkatan hingga tahun 2045. Kebutuhan ruang kelas pada fasilitas PAUD/ sederajat pada tahun 2025 sebanyak

146 ruang kelas dan meningkat hingga tahun 2045 sebanyak 282 ruang kelas.

**Tabel 2. 51. Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas Fasilitas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2025-2045**

Uraian	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	310.932	327.548	340.893	352.451	363.010
Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas PAUD	146 RK	184 RK	215 RK	253 RK	282 RK
Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas SD/MI	376 RK	381 RK	385 RK	388 RK	391 RK
Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas SMP/MTs	318 RK	359 RK	363 RK	366 RK	368 RK
Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas SMA/SMK/MA	275 RK	342 RK	342 RK	342 RK	342 RK

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Begitu juga dengan kebutuhan ruang kelas untuk SD/ MI dan SMP/ MTs yang mengalami peningkatan kebutuhan ruang kelas secara konsisten. Sementara itu, kebutuhan ruang kelas pada jenjang SMA/ SMK/ MA mengalami peningkatan di tahun 2025 sebanyak 342 ruang kelas, dengan kapasitas yang sudah mencukupi untuk kebutuhannya hingga tahun 2045. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya penambahan ruang kelas melalui pembangunan fisik sekolah secara vertikal disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantita guru serta tenaga kependidikan.

Untuk mengatasi kekurangan fasilitas pendidikan di tingkat PAUD, strategi yang dapat diterapkan termasuk pembangunan unit baru dan pemanfaatan ruang yang ada secara lebih efisien, seperti mengadaptasi bangunan yang tidak terpakai menjadi fasilitas PAUD. Selain itu, penambahan ruang kelas perlu diprioritaskan pada jenjang pendidikan yang mengalami peningkatan kebutuhan, terutama di PAUD, SD, dan SMP, untuk mendukung kapasitas siswa yang terus bertambah. Fokus pada kualitas pendidikan juga harus dijadikan prioritas, dengan mendorong inovasi dalam pengelolaan pendidikan, seperti penerapan kelas jarak jauh dan pengajaran berbasis teknologi. Inisiatif ini tidak hanya akan mengoptimalkan penggunaan ruang dan sumber daya yang tersedia, tetapi juga memberikan akses yang

lebih luas kepada siswa, meningkatkan metode pembelajaran, dan menjawab tantangan pembelajaran di era digital.

## **2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah**

Pengertian pusat pertumbuhan wilayah adalah kawasan dengan pertumbuhan sangat pesat sehingga layak menjadi pusat pembangunan untuk memengaruhi perkembangan daerah-daerah lain di sekitarnya. Pusat pertumbuhan wilayah dibangun agar kawasan di sekitarnya bisa ikut bergerak maju. Konsep "pusat pertumbuhan" berakar dari gagasan ahli Perencanaan Wilayah asal Perancis, Francois Perroux (1955) yang merumuskan konsep tersebut dengan mengambil ide dari Teori Inovasi Schumpeter.

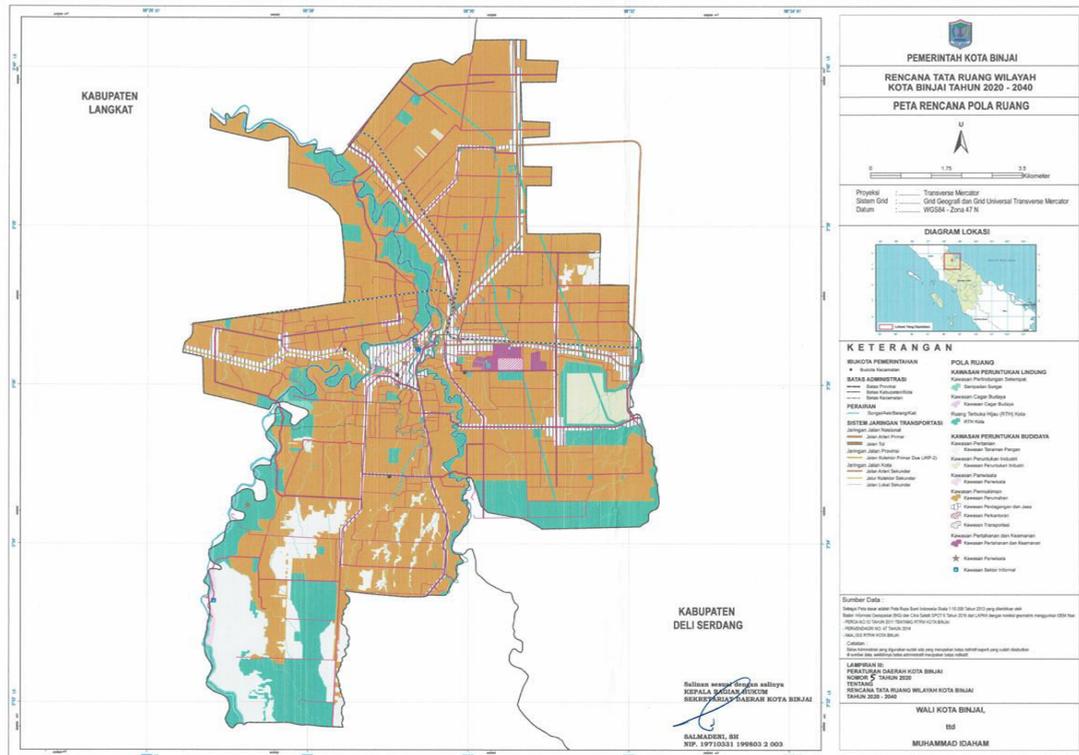
Menurut Perroux, pusat pertumbuhan bisa didefinisikan sebagai kelompok industri yang bisa menggerakkan dinamika pertumbuhan ekonomi dan unsur-unsurnya punya keterkaitan kuat satu sama lain melalui relasi *input-output* industri unggulan. Sementara itu, melalui buku Perencanaan Pembangunan Wilayah (2006), Robinson Tarigan memaparkan bahwa ada 2 (dua) sudut pandang yang bisa dipakai untuk memahami definisi konsep pusat pertumbuhan. Secara fungsional, pengertian pusat pertumbuhan adalah kawasan yang menjadi lokasi konsentrasi berbagai kelompok usaha karena memiliki unsur-unsur kedinamisan. Unsur-unsur itu dapat menstimulasi kehidupan ekonomi di dalam maupun luar kawasan.

Kota Binjai menurut RTRW 2020-2040 telah menyiapkan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Binjai Timur yang berdekatan dengan akses Jalan Tol Trans Sumatera sehingga memudahkan mobilisasi ke Provinsi Aceh maupun Provinsi Riau dan Provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Dengan adanya kawasan peruntukan industri untuk kegiatan industri ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian Kota Binjai dan juga peningkatan pendapatan masyarakat disertai dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Disisi lain, yaitu di Kecamatan Binjai Selatan juga

telah dipersiapkan Kawasan Pariwisata *Botanical Garden* untuk mendukung peningkatan pariwisata serta menjaga ekosistem yang berkelanjutan dan berimbang di Kota Binjai.

Penerapan konsep pusat pertumbuhan di Kota Binjai sejalan dengan kebijakan lokal dan strategi pembangunan jangka panjang kota, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada Kecamatan Binjai Timur sebagai kawasan peruntukan industri yang terhubung dengan Jalan Tol Trans Sumatera, dan Kecamatan Binjai Selatan sebagai pusat pariwisata berbasis ekowisata dengan *Botanical Garden* Kota Binjai mendorong sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini mendukung visi jangka panjang Kota Binjai untuk menjadi kota yang berdaya saing melalui peningkatan infrastruktur, investasi, dan kualitas hidup masyarakat. Integrasi dengan kebijakan nasional terkait pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Mebidangro dan Kawasan Strategis Industri Medan-Dumai-Pekanbaru, memperkuat peran Kota Binjai sebagai katalisator bagi pembangunan di Sumatera Utara. Proyek-proyek strategis seperti pengembangan infrastruktur transportasi, energi terbarukan, dan jaringan jalan arteri akan memperluas dampak positif konsep pusat pertumbuhan, baik di tingkat lokal maupun regional.

**Gambar 2. 57. Rencana Pola Ruang Kota Binjai Tahun 2020-2040**



Sumber: RTRW Kota Binjai 2020-2040

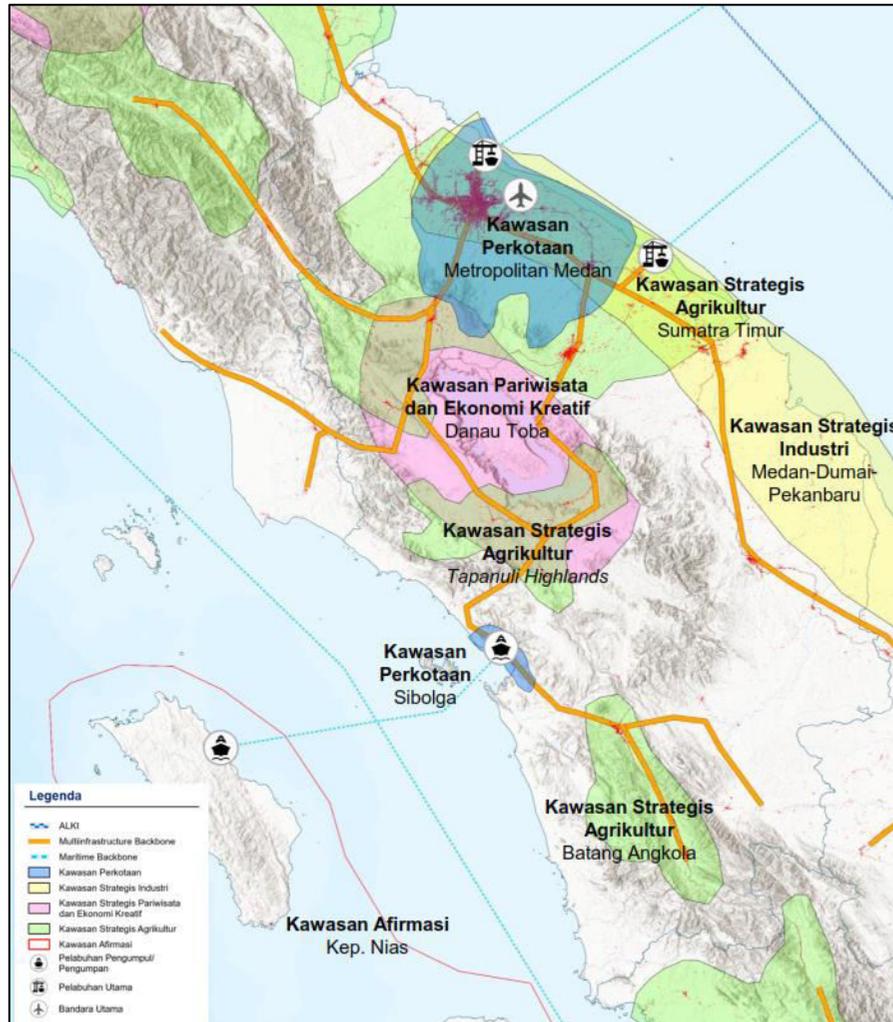
Dari aspek geografis, definisi pusat pertumbuhan adalah kawasan yang memiliki banyak fasilitas dengan kemudahan akses memadai, sehingga menjadi pusat daya tarik bagi perpindahan penduduk maupun aktivitas berbagai jenis kegiatan usaha. Dalam studi Geografi Pembangunan, istilah pusat pertumbuhan atau *growth pole* bisa diartikan sebagai wilayah yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat, jika dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga kawasan itu bisa dijadikan pusat pembangunan yang diharapkan mempengaruhi perkembangan wilayah lain di sekitarnya.

Pengembangan kawasan peruntukan budidaya di Kota Binjai mencakup langkah konkrit seperti pembangunan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Binjai Timur, yang akan didukung oleh infrastruktur vital seperti jaringan jalan arteri, sistem drainase, dan penyediaan air baku. Proyek ini dijadwalkan untuk mulai dibangun secara bertahap hingga 2040, dengan prioritas optimalisasi akses Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Kota Binjai dengan pusat-pusat ekonomi lainnya

di Sumatera Utara. Selain itu, kawasan *Botanical Garden* di Kecamatan Binjai Selatan akan dikembangkan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan, yang diharapkan dapat selesai menjelang 2040. Potensi dampak ekonominya termasuk peningkatan investasi, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan, sedangkan dampak sosial mencakup peningkatan kualitas hidup warga melalui akses yang lebih baik ke fasilitas umum dan peningkatan pariwisata. Strategi mitigasi risiko lingkungan melibatkan penerapan energi terbarukan pada sistem transportasi publik dan pengelolaan limbah industri yang berkelanjutan, sementara risiko sosial ditangani melalui program pelatihan bagi tenaga kerja lokal serta kolaborasi dengan masyarakat setempat untuk meminimalkan dampak negatif. Pengelolaan keberlanjutan juga diperkuat melalui rencana pemantauan lingkungan dan sosial secara berkala, sehingga program strategis ini dapat secara nyata mendukung pertumbuhan wilayah yang dinamis dan berkelanjutan.

Kota Binjai termasuk dalam kawasan pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Mebidangro. Kota Binjai diharapkan mampu memberikan bantuan kepada Kawasan Pembangunan Perkotaan Metropolitan Medan serta Kawasan Strategis Industri Medan-Dumai-Pekanbaru yang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan Kota Binjai. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Kota Medan dalam hal proses pembangunan berkelanjutan.

**Gambar 2. 58. Rencana Kawasan Pembangunan di Sumatera Utara**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Kota Binjai memainkan peran penting dalam pengembangan kawasan Mebidangro sebagai bagian dari Kawasan Pembangunan Perkotaan Metropolitan yang mencakup Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Kota Binjai berfungsi sebagai simpul penghubung antara Kota Medan dan kawasan industri strategis Binjai-Dumai-Pekanbaru, didukung oleh infrastruktur seperti Tol Trans Sumatera yang meningkatkan mobilitas barang dan orang. Kontribusi Kota Binjai terhadap kawasan ini mencakup pengembangan industri di Kecamatan Binjai Timur, yang diproyeksikan menjadi pusat industri manufaktur dan logistik, serta pengembangan pariwisata berbasis ekowisata di Kecamatan Binjai Selatan melalui proyek *Botanical Garden*. Kolaborasi dengan Kota Medan mencakup sinergi dalam pengembangan infrastruktur transportasi publik berbasis energi terbarukan serta

pembangunan sistem drainase terpadu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk mengoptimalkan peran ini, Kota Binjai berencana memperkuat aksesibilitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi industri, dan mendorong investasi sektor swasta melalui insentif fiskal. Proyek strategis yang diusulkan termasuk pembangunan kawasan industri terpadu, modernisasi pasar tradisional, dan pengembangan pusat inovasi teknologi yang bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai.

Kota Binjai harus bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan arteri serta drainase yang akan mendorong investor untuk mau menanamkan modal ke wilayah Kota Binjai melalui wilayah strategis industri yang telah disediakan. Optimalisasi Jaringan Jalan Tol Trans Sumatera menjadi nilai tambah bagi Kota Binjai untuk bisa mengundang para investor untuk mendirikan industri maupun pariwisata di Kota Binjai yang didukung dengan berbagai infrastruktur seperti infrastruktur air baku ke kawasan strategis maupun infrastruktur sistem transportasi publik yang lebih mengedepankan penggunaan energi terbarukan.

Kota Binjai memiliki rencana terperinci untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung kawasan strategisnya, dengan fokus pada transportasi publik berbasis energi terbarukan dan pengembangan infrastruktur air baku. Dalam sektor transportasi, Kota Binjai berencana mengimplementasikan sistem bus listrik dan kendaraan umum berbahan bakar rendah emisi untuk mengurangi polusi udara dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Jaringan transportasi ini akan terintegrasi dengan akses ke Tol Trans Sumatera, memperkuat konektivitas antar kawasan industri dan pariwisata. Disisi lain, pengembangan infrastruktur air baku akan mencakup pembangunan bendungan dan jaringan distribusi air bersih yang terjangkau untuk mendukung kebutuhan industri dan masyarakat sekitar. Strategi

penyediaan infrastruktur ini akan bersifat ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi hijau dan pengelolaan limbah yang efisien. Langkah-langkah peningkatan kualitas dan aksesibilitas, seperti modernisasi jalan arteri dan penambahan jalur pejalan kaki yang aman, diharapkan meningkatkan daya tarik investasi. Kolaborasi dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur ini, melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP), juga direncanakan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang, sehingga infrastruktur tersebut mampu mengoptimalkan peran Kota Binjai sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang kompetitif.

Optimalisasi Jaringan Jalan Tol Trans Sumatera di Kota Binjai dapat secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik investasi dengan mempercepat konektivitas antara pusat-pusat ekonomi di Sumatera, termasuk Binjai, Medan, dan Dumai. Untuk memanfaatkan potensi ini, perlu ada pengelolaan lalu lintas yang efisien melalui pemasangan teknologi *intelligent traffic systems* (ITS) yang dapat mengurangi kemacetan, memantau arus lalu lintas, dan mengoptimalkan pengaturan kendaraan di gerbang tol serta jalan penghubung. Selain itu, pengembangan layanan transportasi terintegrasi seperti bus antar-jemput industri, sistem logistik terpadu, dan fasilitas *park and ride* di sekitar akses tol akan mendukung mobilitas pekerja dan pengunjung ke kawasan industri dan pariwisata. Rencana pengembangan ini harus disertai dengan langkah-langkah untuk memperluas jaringan jalan arteri dan pembangunan jalur logistik khusus untuk mengurangi beban jalan umum, serta memastikan kemudahan akses menuju fasilitas strategis. Dengan demikian, proyek ini direncanakan untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah, meningkatkan daya tarik ekonomi daerah, dan memfasilitasi investasi jangka panjang di Kota Binjai.

Untuk memastikan sinergi yang efektif antara Kota Binjai dan kota-kota lain di kawasan Mebidangro, disarankan

pembentukan forum kerjasama lintas wilayah yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Forum ini akan menjadi wadah untuk koordinasi kebijakan, pertukaran informasi, dan pemantauan bersama dalam pelaksanaan program-program strategis, termasuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata di Kota Binjai. Rencana aksi konkret meliputi penetapan proyek-proyek prioritas seperti pengembangan infrastruktur bersama, penyediaan layanan publik terintegrasi, dan kolaborasi dalam investasi lintas wilayah. Untuk memastikan keberhasilan, indikator kinerja utama (KPI) seperti peningkatan investasi, jumlah proyek infrastruktur yang terealisasi, serta peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik akan digunakan. Mekanisme monitoring dan evaluasi akan melibatkan audit berkala, rapat koordinasi rutin, dan pelaporan kemajuan, memastikan pembangunan berkelanjutan di kedua kota, sekaligus mendukung pusat pertumbuhan wilayah dan memperkuat dampak program strategis di Kota Binjai.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **3.1. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan *gap* kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

##### **3.1.1. Sumber Daya Manusia yang Belum Berkualitas dan Daya Saing Masyarakat yang Masih Belum Optimal**

Kesejahteraan masyarakat Kota Binjai masih belum sepenuhnya teratasi, meskipun Indeks Gini Kota Binjai masuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk pemerataan pembagian distribusi kesejahteraan secara ekonomi. Ketimpangan ekonomi di Kota Binjai, yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai tambah sektor industri dan tidak berkembangnya sektor perdagangan, berkontribusi pada rendahnya penyerapan tenaga kerja.

Meskipun tingkat kemiskinan di Kota Binjai cenderung membaik dari waktu ke waktu, perlu diwaspadai dampak bonus demografi yang dapat menyebabkan komposisi penduduk usia produktif dengan pendapatan rendah di masa mendatang. Permasalahan pendidikan dan ketenagakerjaan saling berkorelasi dengan bonus demografi, berdampak signifikan terhadap kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Rata-rata lama sekolah di Kota Binjai, yang masih dibawah standar wajib belajar 12 tahun, mencerminkan tantangan dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Hal ini terlihat dari rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), serta tingginya angka putus sekolah, terutama pada jenjang SD/ MI.

Kualitas pendidikan yang rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk rasio guru terhadap murid yang belum ideal. Untuk meningkatkan daya saing SDM, perlu diimplementasikan strategi program konkret, seperti:

1. Pelatihan Kerja: Meningkatkan program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Kota Binjai untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan angkatan kerja.
2. Beasiswa Pendidikan: Menyediakan beasiswa untuk pelajar dari keluarga kurang mampu untuk mendorong partisipasi pendidikan, terutama di jenjang pendidikan tinggi.
3. Program Pemberdayaan Ekonomi: Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan akses ke pelatihan manajemen dan pemasaran.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini antara lain angka partisipasi pendidikan, rasio pengangguran, dan tingkat pendapatan rumah tangga.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana

yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

IPM Kota Binjai pada tahun 2023 merupakan tertinggi keempat untuk seluruh kabupaten/ kota di Sumatera Utara, namun jika ditelusuri dari aspek pendidikan maka ada permasalahan yang mendasar di Kota Binjai. Masalah pendidikan yang ada di Kota Binjai diantaranya masih rendahnya rata-rata lama sekolah yang menunjukkan belum mampu mencapai wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan secara nasional. Meskipun harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kota Binjai terus mengalami peningkatan, namun rata-rata lama sekolah di Kota Binjai belum mampu menuntaskan program wajib belajar 12 tahun. Penurunan beberapa indikator pendidikan di Kota Binjai ada kaitannya dengan faktor ekonomi, dimana untuk kelompok rumah tangga miskin karena keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikannya.

Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti rasio guru terhadap murid dan kualitas tenaga pendidik. Semakin banyak jumlah murid maka beban mengajar masing-masing guru meningkat sehingga mampu menurunkan kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Meskipun begitu, jumlah murid yang terlampaui sedikit atau tidak memenuhi standar juga menjadi tidak efisien. Rasio guru terhadap murid jenjang sekolah dasar di Kota Binjai masih di bawah standar yang ditetapkan.

Perpustakaan sebagai tempat berbagai buku dikumpulkan berperan penting sebagai sarana membaca dan memperoleh pengetahuan bagi masyarakat di luar lembaga formal. Permasalahan mendasar sektor perpustakaan di Kota Binjai teridentifikasi sebanyak 2 (dua) masalah, yaitu belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat dan belum optimalnya minat kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah. Permasalahan tersebut lebih banyak disebabkan karena sarana dan prasarana

belum optimal serta belum sesuai dengan standar nasional, kompetensi SDM perpustakaan yang terbatas, serta promosi layanan perpustakaan yang belum masif, meningkatnya tren literasi secara *daring* serta sebaran perpustakaan yang masih belum merata.

Tidak cukup dengan ketersediaan bangunannya, urusan perpustakaan juga perlu dilihat dari dimensi-dimensi lainnya seperti dimensi ketercukupan koleksi perpustakaan, dimensi tingkat kunjungan masyarakat per hari, dan lain-lain. Melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang didalamnya mencakup dimensi-dimensi tersebut, urusan perpustakaan dapat dinilai sudah sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Tingkat pengangguran di Kota Binjai lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional. Kondisi ini lebih disebabkan karena adanya perlambatan sektor perdagangan dan industri yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, rendahnya kompetensi angkatan kerja, terbatasnya kesempatan kerja dan terbatasnya informasi lowongan kerja serta dipengaruhi oleh kemiskinan. Pengangguran yang tinggi akan berdampak terhadap rendahnya produktivitas tenaga kerja yang akan menurunkan nilai tambah setiap sektor ekonomi. Hal ini akan menurunkan laju pertumbuhan PDRB terhadap tenaga kerja sehingga kesejahteraan sosial di Kota Binjai akan menurun.

Angka Kematian Bayi di Kota Binjai tahun 2023 masih ada yang menunjukkan belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak serta kurangnya cakupan tenaga medis. Perlu adanya tindakan cepat dalam pengambilan keputusan mengenai rujukan ke fasyankes yang tepat, kemudian alokasi waktu yang harus efisien untuk menuju ke tempat rujukan dan penanganan yang cepat dan tepat untuk bisa mengurangi dan

meminimalisir peningkatan Angka Kematian Bayi di masa mendatang.

Seiring dengan masih adanya kasus kematian bayi di Kota Binjai, maka kejadian kematian ibu juga harus bisa diminimalisir melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, peningkatan kapasitas internal terhadap ibu dan keluarga, pemenuhan gizi ibu dan bayi yang harus ditingkatkan, pendataan terhadap ibu hamil yang tidak menetap dan berpindah fasilitas kesehatan serta ibu hamil yang bekerja. Kesehatan dan pemenuhan gizi balita di Kota Binjai masih perlu diperhatikan, dimana kunjungan ke Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya yang sejenis masih rendah, kondisi ini disebabkan karena masih kurangnya fasilitas penunjang posyandu yang ada di Kota Binjai.

Masih ditemukannya kasus stunting di Kota Binjai lebih disebabkan karena upaya dan pengetahuan tentang pemenuhan gizi ibu hamil dan balita yang belum optimal, pola asuh keluarga dan ibu terhadap bayinya yang perlu adanya pendampingan serta kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal. Kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan bisa menjadi penyebab utama berbagai permasalahan kesehatan di Kota Binjai sehingga perlu adanya perhatian terhadap alokasi tenaga medis dan tenaga kesehatan sehingga rasio pemenuhan bisa sesuai dengan standar nasional.

### **3.1.2. Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana yang Belum Merata dan Berkualitas**

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan dengan pemenuhan layanan infrastruktur masyarakat dan kondisi infrastruktur wilayah di Kota Binjai. Layanan tersebut diantaranya adalah layanan sanitasi, air minum, air bersih, drainase, irigasi, jalan, dan ruang terbuka publik. Kota Binjai belum 100% memiliki rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak dan aman, selain itu akses air minum yang layak dan aman juga belum terpenuhi 100%. Kondisi ini disebabkan karena

belum adanya standar perhitungan kebutuhan minimal mengenai air minum dan juga belum berfungsinya SPAM Regional Mebidang yang dibangun oleh Pemerintah Pusat untuk Kota Binjai akibat dari kurangnya pendanaan untuk pembangunan pipa jaringan transformasi oleh Pemerintah Kota Binjai.

Berkaitan dengan kondisi ketimpangan, permasalahan infrastruktur juga diperlihatkan dari aksesibilitas di Kota Binjai. Kondisi jalan yang rusak diperlihatkan dari jalan yang sudah berlubang, tergenang air saat hujan dan sangat sulit dilewati. Kondisi jalan yang seperti ini akan mempengaruhi keselamatan dan keamanan pengguna jalan. Infrastruktur jalan juga merupakan salah satu aset penting dalam meningkatkan laju perekonomian masyarakat. Proporsi panjang jalan dalam kondisi yang baik di Kota Binjai masih belum optimal dan merata, dimana kondisi ini disebabkan karena kapasitas jalan kurang proporsional dimana lebar jalan tidak sesuai dengan volume kendaraan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sistem drainase yang belum optimal, dimana drainase dalam kondisi baik belum mencapai 100% dan merata di Kota Binjai, kondisi ini disebabkan banyaknya sedimentasi endapan berupa sampah yang menghambat aliran air drainase serta kurangnya pembangunan lokasi resapan air di Kota Binjai.

Masih adanya kawasan kumuh perkotaan yang disebabkan karena belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait dalam bidang penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan dimana masih ada pembiaran pembangunan tanpa IMB. Selain itu rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman juga merupakan salah satu faktor penyumbang masih adanya kawasan kumuh di Kota Binjai.

Kota Binjai juga menghadapi kesenjangan dalam infrastruktur pendidikan dan kesehatan, yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan fasilitas pendidikan, terutama di daerah pinggiran kota, masih

kurang memadai, dengan banyaknya anak yang tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas. Dalam hal kesehatan, fasilitas kesehatan juga belum merata, dengan akses layanan yang terbatas di beberapa wilayah, mengakibatkan kualitas pelayanan kesehatan yang rendah.

Untuk mengatasi masalah ini, direkomendasikan program intervensi yang berfokus pada penguatan akses layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Kota Binjai. Langkah konkret yang bisa dilakukan antara lain:

1. Pembangunan Fasilitas Pendidikan Baru: Membangun sekolah baru, terutama di daerah pinggiran kota, serta meningkatkan kualitas fasilitas yang ada dengan perbaikan gedung, penyediaan buku, dan alat bantu belajar.
2. Peningkatan Fasilitas Kesehatan: Membangun pusat kesehatan baru dan meningkatkan fasilitas puskesmas serta posyandu, agar semua masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.
3. Program Pelatihan untuk Tenaga Pendidik dan Kesehatan: Melaksanakan program pelatihan bagi guru dan tenaga medis untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pelayanan kesehatan.
4. Penyediaan Beasiswa dan Program Kesehatan Gratis: Menyediakan beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu dan program kesehatan gratis untuk mendukung masyarakat di daerah kurang terlayani.

Program-program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia di Kota Binjai.

### **3.1.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Transparan dan Akuntabel**

Tata kelola pemerintahan di Kota Binjai masih menghadapi tantangan serius terkait ketidaktransparanan dan akuntabilitas.

Ketidakadaptifan dalam menghadapi dinamika lingkungan dan tuntutan zaman dapat menghambat efektivitas dalam merumuskan kebijakan yang relevan. Struktur birokrasi yang kaku serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadikan kebijakan yang dihasilkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan riil warga. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Permasalahan dalam pelayanan publik di Kota Binjai juga menjadi perhatian penting, dimana respons yang lambat dan rendahnya efisiensi administratif mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Kondisi kenyamanan dan keamanan yang belum optimal di lingkungan Kota Binjai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi warga dan pelaku usaha, yang berpotensi menghambat investasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, regulasi yang rumit, serta birokrasi yang kompleks menghalangi perkembangan ekonomi daerah.

Kota Binjai menghadapi sejumlah masalah utama dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, diantaranya adalah pengelolaan data yang belum optimal akibat belum terintegrasinya sistem data administrasi kependudukan (ADMINDUK) dengan sistem pemerintah kota, kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk pelayanan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Dalam pemberdayaan masyarakat, peran aktif masyarakat yang rendah menghambat inovasi dan kreativitas dalam pengembangan kelompok binaan oleh PKK dan LPM. Selain itu, pengelolaan kearsipan belum terkelola dengan baik karena kurangnya arsiparis yang kompeten.

Dalam perencanaan pembangunan, ketidakefektifan konsistensi dokumen perencanaan disebabkan oleh koordinasi antar instansi yang lemah. Di sektor keuangan, pengelolaan

pendapatan asli daerah (PAD) belum efisien, juga akibat kurangnya koordinasi. Masalah kepegawaian terlihat dari rendahnya Indeks Profesionalitas ASN dan penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensi. Temuan BPK yang belum ditindaklanjuti secara optimal menambah tantangan dalam pengawasan. Kota Binjai juga mengalami kekurangan dalam penelitian dan pengembangan, dengan jumlah dan kualitas kajian yang minim. Koordinasi yang lemah antara kecamatan dan kelurahan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan serta pengelolaan sampah, kualitas lingkungan, dan penanganan kemiskinan juga merupakan tantangan yang memerlukan perhatian lebih.

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, langkah-langkah konkret perlu diimplementasikan. Pertama, implementasi *e-government* harus dilakukan untuk mempermudah akses informasi dan pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses administrasi. Kedua, penguatan pengawasan internal diperlukan untuk memastikan akuntabilitas setiap institusi pemerintah, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah lebih cepat. Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan akan memberikan perspektif yang lebih luas, menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

#### **3.1.4. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi yang Belum Optimal untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi**

Tingkat produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai belum mencapai potensi maksimal, menjadi masalah mendesak yang perlu ditangani oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterampilan dan pendidikan yang tidak sesuai dengan tuntutan industri, keterbatasan akses terhadap pelatihan yang relevan, dan kurangnya perhatian pada pembangunan keluarga yang berkualitas. Keterbatasan inovasi

dalam proses bisnis juga berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas secara keseluruhan.

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Binjai cenderung menurun, hal ini lebih disebabkan oleh penurunan angkatan kerja daripada penciptaan lapangan kerja baru. Permasalahan utama di bidang ketenagakerjaan adalah kualifikasi pencari kerja yang tidak memenuhi kebutuhan pasar serta informasi lowongan kerja yang terbatas. Belum optimalnya lembaga pelatihan kerja dan jenis pelatihan yang disediakan juga menjadi tantangan bagi pengembangan tenaga kerja.

Kota Binjai juga menghadapi tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, dengan sektor ekonomi yang cenderung tidak seimbang, dominasi sektor perdagangan dan industri yang memiliki produktivitas rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan diversifikasi ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dukungan yang lebih besar terhadap pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga diperlukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kendala infrastruktur yang belum memadai menghambat peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Investasi lebih besar dalam pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam rantai produksi. Optimalisasi kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan pelaku industri diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Transisi demografi menuju populasi yang semakin menua menciptakan tekanan pada sistem kesehatan dan layanan sosial, meningkatkan permintaan akan layanan kesehatan dan perlindungan sosial untuk lansia. Kebijakan yang mendukung kesejahteraan lansia perlu diintegrasikan, mengingat dampaknya

terhadap struktur keluarga dan jaringan sosial. Keterbatasan infrastruktur kota yang mendukung kebutuhan lansia juga harus diperhatikan, termasuk aksesibilitas fasilitas umum dan transportasi yang ramah lansia.

Tantangan dalam pembangunan keluarga, kesetaraan gender, dan kesejahteraan disabilitas di Kota Binjai juga perlu diatasi. Kurangnya kesadaran akan pentingnya peran keluarga dan kesetaraan gender dapat membatasi kemajuan dalam pembangunan. Akses dan dukungan bagi penyandang disabilitas juga harus diperkuat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti implementasi program pelatihan keterampilan yang relevan, peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, dan dukungan yang lebih besar bagi UMKM. Membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan juga penting untuk menciptakan ekosistem yang mendorong inovasi dan produktivitas.

### **3.1.5. Pengelolaan Tata Ruang Berkelanjutan yang Belum Optimal dan Kondisi Keamanan yang Menurun**

Pengelolaan lingkungan hidup di Kota Binjai masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pengelolaan sampah yang belum optimal dan belum 100% dapat didaur ulang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas armada pengangkut sampah di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta pertumbuhan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Binjai juga menunjukkan angka rendah, diakibatkan oleh polusi udara dari aktivitas ekonomi dan terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai penyaring kualitas lingkungan.

Kota Binjai belum sepenuhnya menerapkan konsep ekonomi hijau, termasuk dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), pembangunan rendah karbon, dan ekonomi sirkular.

Kurangnya investasi dalam EBT serta ketergantungan pada sumber energi konvensional menjadi hambatan dalam transisi menuju pola pembangunan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan masih rendah, yang berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup warga. Minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai kebersihan serta fasilitas penunjang yang tidak merata berkontribusi pada ketidakseimbangan kesadaran kebersihan.

Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kota Binjai juga perlu perhatian. Rendahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan kurangnya koordinasi antar sektor menghambat pelaksanaan peraturan yang ada. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perda juga rendah, sementara manajemen kebakaran belum memadai karena minimnya data kebencanaan, dokumen rencana induk, dan kapasitas BPBD yang terbatas. Pelayanan terhadap masyarakat rentan (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS) di Kota Binjai juga belum optimal, yang disebabkan oleh kurangnya pembinaan, pendataan yang tidak akurat, dan koordinasi lintas sektor yang belum efektif. Kesenjangan sosial, kekerasan terhadap anak dan disabilitas, serta perlunya sarana bagi anak dan lansia terlantar menjadi isu yang mendesak untuk diatasi.

Indeks Pembangunan Gender Kota Binjai masih rendah dibandingkan provinsi, dengan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang belum optimal, tercermin dari rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan. Permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan rendahnya kualitas hidup perempuan perlu mendapatkan perhatian lebih.

Untuk meningkatkan pengelolaan tata ruang dan kualitas lingkungan, langkah-langkah konkret seperti implementasi *e-government*, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan partisipasi masyarakat harus dilakukan. Langkah-langkah ini akan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan

akuntabel, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kota Binjai.

### **3.1.6. Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur antara Kota Binjai dengan Daerah Sekitar**

Kota Binjai berupaya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang maju, namun menghadapi tantangan signifikan dalam hal ketimpangan pembangunan infrastruktur antara pusat kota dan daerah pinggiran. Ketidakmerataan infrastruktur mengakibatkan kesenjangan sosial-ekonomi yang besar, dimana masyarakat di daerah pinggiran tidak mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkurangnya peluang untuk mengembangkan kebudayaan yang beragam.

Pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang, terutama di pusat pemerintahan dan ekonomi, seringkali menyebabkan konsentrasi investasi yang tinggi, dengan akses terhadap fasilitas seperti jalan yang baik, fasilitas kesehatan lengkap, dan sekolah berkualitas. Sebaliknya, daerah pinggiran sering kali tertinggal, mengalami kondisi jalan yang buruk dan akses terbatas terhadap layanan publik. Ketimpangan ini berkontribusi pada ketidakmerataan kesempatan ekonomi, dimana pusat pemerintahan menarik lebih banyak investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dibandingkan daerah pinggiran.

Akibatnya, urbanisasi yang tidak terkendali terjadi ketika penduduk dari daerah pinggiran berpindah ke pusat kota untuk mencari peluang yang lebih baik. Ini menyebabkan depopulasi dan stagnasi ekonomi di daerah pinggiran, sementara pusat kota mengalami tekanan tambahan pada infrastruktur dan layanan publik. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk berfokus pada pengurangan ketimpangan infrastruktur, memastikan semua wilayah memiliki akses setara terhadap sumber daya dan peluang.

Kualitas infrastruktur di Kota Binjai juga belum optimal, terlihat dari pelayanan yang tidak merata dalam hal sanitasi, air bersih, dan aksesibilitas jalan. Belum terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak disebabkan oleh belum berfungsinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang dan kurangnya standar perhitungan kebutuhan. Selain itu, sistem drainase yang buruk, kondisi jalan yang rusak, dan minimnya ruang terbuka publik memperburuk situasi. Masih adanya kawasan kumuh akibat penataan ruang yang kurang optimal dan rendahnya kualitas infrastruktur permukiman memperburuk ketimpangan infrastruktur.

Pembangunan transportasi yang belum optimal, rendahnya tingkat keselamatan dan keamanan lalu lintas, serta pengelolaan parkir yang tidak maksimal menjadi masalah utama di sektor transportasi. Selain itu, di bidang komunikasi dan informatika, belum optimalnya penyelenggaraan informasi publik dan keterbatasan dalam pengumpulan data antar lembaga menjadi kendala dalam evaluasi pembangunan.

Dengan fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan transportasi yang lebih baik, diharapkan ketimpangan pembangunan infrastruktur dapat diminimalkan, mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Kota Binjai.

## **3.2. Isu Strategis**

### **3.2.1. Isu Strategis Global**

Masa depan Kota Binjai dan dunia secara keseluruhan akan sangat dipengaruhi oleh megatren global yang memiliki dampak luas dan multidimensional. Disatu sisi, megatren ini menawarkan peluang untuk kemajuan sosial dan ekonomi, sementara disisi lain, mereka membawa risiko gangguan dan disrupsi.

Pertama, perkembangan demografi global menunjukkan bahwa populasi dunia diperkirakan akan mencapai 9,7 miliar jiwa

pada tahun 2050, meskipun pertumbuhan populasi diperkirakan akan melambat. Kenaikan proporsi penduduk usia tua, bersamaan dengan dominasi penduduk usia muda, menuntut perhatian untuk memastikan perlindungan sosial yang memadai serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Kota Binjai harus merumuskan strategi untuk mengatasi tantangan ini, termasuk dengan mengembangkan infrastruktur sosial dan ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan kelompok usia tersebut.

Kedua, perubahan geopolitik global menciptakan tantangan baru yang perlu diantisipasi, terutama terkait dengan persaingan yang meningkat antara negara adidaya dan kekuatan baru. Di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, dinamika geopolitik yang kompleks dapat mempengaruhi stabilitas dan pembangunan di Kota Binjai. Munculnya risiko lingkungan dan ancaman siber juga menambah lapisan kompleksitas yang harus dikelola dengan bijak.

Ketiga, dalam konteks geoekonomi, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, diperkirakan akan semakin dominan. Namun, pertumbuhan sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong utama ekonomi, sebaliknya kebijakan ekonomi yang kredibel dan inovasi akan memainkan peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja. Kota Binjai perlu mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan ini, termasuk mengembangkan sektor industri yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Perubahan teknologi yang cepat juga membawa disrupsi yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, terutama yang dipercepat oleh pandemi Covid-19. Untuk memanfaatkan potensi teknologi dengan optimal, masyarakat harus memiliki kemampuan adaptasi yang kuat dan keterampilan yang relevan. Kota Binjai dapat memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan kualitas hidup warganya.

Urbanisasi global yang diperkirakan akan membuat dua per tiga populasi dunia tinggal di perkotaan pada tahun 2050 menjadi tantangan bagi Kota Binjai. Tanpa pengelolaan yang baik, urbanisasi dapat memperburuk pelayanan publik dan menghambat kegiatan ekonomi. Disisi lain, pertumbuhan kelas menengah global yang akan meningkat mencapai lebih dari 90% dari populasi dunia pada tahun 2045 menambah tantangan baru dalam akses terhadap sumber daya esensial seperti energi, air, dan pangan. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan terus menjadi ancaman serius yang berdampak negatif pada kualitas hidup. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan ekonomi global yang berkelanjutan dan inklusif, serta penerapan prinsip ekonomi hijau dan rendah karbon, menjadi semakin penting.

Selain itu, disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan geopolitik di kawasan Samudera Hindia merupakan faktor kunci yang mempengaruhi perdagangan internasional dan keamanan energi. Interaksi antara berbagai faktor ini menciptakan tantangan kompleks sekaligus peluang yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan kebijakan. Kota Binjai harus siap untuk merespons tantangan dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh megatren ini demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

### **3.2.2. Isu Strategis Nasional**

Isu strategis nasional, seperti bonus demografi dan deindustrialisasi, memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap Kota Binjai. Bonus demografi, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, dapat berisiko mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Kota Binjai harus mempersiapkan diri menghadapi peningkatan proporsi penduduk usia lanjut di masa depan dengan memperkuat kapasitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Jika tidak ada perhatian yang cukup pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, potensi bonus demografi dapat berubah menjadi beban sosial yang berat, mengakibatkan

meningkatnya kebutuhan untuk dukungan sosial tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

Dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia mencapai 324,05 juta jiwa pada tahun 2045, tantangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan semakin mendesak. Kota Binjai harus menilai daya dukung sumber daya alam dan lingkungan secara menyeluruh, agar tidak menghadapi krisis sumber daya yang berpotensi merugikan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, dan Kota Binjai harus bersiap untuk memanfaatkan perubahan konektivitas yang dihasilkan dari proyek tersebut. Meskipun IKN dapat menciptakan peluang baru, penting untuk memastikan bahwa Kota Binjai tidak tertinggal dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih luas. Keterhubungan logistik dan rantai pasok yang baik akan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Deindustrialisasi dini yang dialami oleh Kota Binjai menjadi perhatian utama. Penurunan kontribusi sektor industri, bersamaan dengan rendahnya produktivitas, menciptakan tantangan serius bagi pertumbuhan ekonomi. Kota Binjai harus berfokus pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas di sektor industri dan pertanian untuk menghindari stagnasi. Keterbatasan dalam inovasi dan modernisasi di sektor pertanian, bersama dengan lemahnya interaksi antara sektor pertanian dan industri, memerlukan perhatian mendalam untuk menciptakan solusi terintegrasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus menjadi prioritas strategis. Dengan proyeksi penurunan permintaan komoditas, Kota Binjai perlu meningkatkan daya saing melalui pengembangan produk dan layanan pariwisata yang berkelanjutan. Namun, tantangan untuk menciptakan iklim yang

mendukung industri kreatif harus diatasi dengan regulasi yang memadai dan fasilitas yang diperlukan.

Terakhir, produktivitas tenaga kerja merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Kota Binjai perlu menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dan pelatihan vokasional sesuai dengan kebutuhan pasar untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Jika tidak, risiko stagnasi ekonomi akan semakin meningkat, menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan di Kota Binjai.

### **3.2.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara**

Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan isu global, isu nasional dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2023 serta tantangan yang mungkin dihadapi 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Adapun isu strategis Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

#### **a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Pada tahun 2045, pembangunan manusia dihadapkan pada transisi demografi dan proyeksi peningkatan jumlah penduduk yang dapat meningkatkan rasio ketergantungan dan peningkatan jumlah lanjut usia. Transisi demografi yang diiringi dengan perilaku dan pola hidup tidak sehat mengakibatkan meningkatnya beban penyakit menular dan tidak menular serta permasalahan gizi dan permasalahan kesehatan mental. Selain itu, layanan kesehatan masyarakat juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan jumlah tenaga kesehatan belum tersebar secara merata di setiap daerah. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan kesehatan menjadikan tantangan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan (jaminan kesehatan) di seluruh kabupaten/ kota. Sementara itu, sektor pendidikan dihadapkan pada belum optimalnya aksesibilitas (fisik dan non fisik), kualitas tenaga pendidik, dan peserta didik. Selain itu, kualitas pendidikan

juga masih rendah yang disebabkan oleh sarana prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, kualitas, kuantitas dan distribusi guru masih terbatas dengan sedikitnya guru yang memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan serta pendidikan non formal yang berkualitas yang belum memadai, kualifikasi pendidikan yang masih rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja.

Kondisi di atas merupakan tantangan yang besar bagi Provinsi Sumatera Utara untuk mengoptimalkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan daya saing, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial agar tersedia pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan (termasuk lansia dan disabilitas). Isu utama peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Isu ini menyangkut 2 (dua) aspek, yakni pertumbuhan ekonomi dan kualitas tenaga kerja. PDB Sumatera Utara berdasarkan lapangan usaha terutama didukung oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti oleh industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim. Oleh sebab itu, keberlanjutan sektor ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

#### **b. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Provinsi Sumatera Utara, dengan kekayaan alam dan budaya yang signifikan, berpotensi menjadi pemain utama dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, sejumlah tantangan serius masih menghambat potensi ini, terutama dalam hal infrastruktur yang kurang berkembang dan fasilitas pariwisata yang belum memadai. Jalan yang rusak dan transportasi publik yang tidak efisien menghambat akses ke destinasi utama, sementara fasilitas akomodasi dan rekreasi yang kurang berkualitas mengurangi daya

tarik bagi turis domestik dan internasional. Selain itu, pemasaran dan promosi yang belum terintegrasi serta kurangnya dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif, seperti kerajinan tangan dan kuliner lokal, menambah daftar tantangan yang harus diatasi.

Peningkatan serius dalam infrastruktur pariwisata termasuk memperbaiki aksesibilitas ke destinasi wisata dan mengembangkan transportasi publik yang lebih efisien. Investasi pada fasilitas pariwisata perlu ditingkatkan, dengan membangun lebih banyak akomodasi berkualitas tinggi dan restoran yang dapat menawarkan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung. Selain itu, pengembangan atraksi baru dan peningkatan fasilitas yang ada akan membantu menarik lebih banyak turis. Pemasaran yang agresif juga diperlukan, memanfaatkan digital marketing dan kemitraan dengan agen perjalanan internasional untuk menonjolkan Sumatera Utara sebagai destinasi utama.

Dukungan untuk ekonomi kreatif juga vital dalam strategi jangka panjang untuk pariwisata. Mendirikan inkubator bisnis untuk UMKM dan industri kreatif, menyediakan akses ke pendanaan, dan memfasilitasi sertifikasi produk adalah langkah-langkah yang akan meningkatkan standar dan akses pasar untuk produk lokal. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan di sektor pariwisata akan meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan, menjamin bahwa pengunjung menerima pengalaman yang luar biasa. Dengan strategi terintegrasi dan komitmen dari semua pihak, Sumatera Utara dapat mengoptimalkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

### **c. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan**

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons kedepan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan

akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak, infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang kedepan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi, dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian, mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di wilayah Sumatera masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimal terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatera dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan

meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi diantaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup 3 (tiga) aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek Kesehatan, serta aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi, serta pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup jaminan kesehatan sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencakup jumlah kasus kejahatan, rasa aman, dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target. Hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain, ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/ kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Serdang Bedagai. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di mana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada dibawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang.

Kekurang-tersediaan air akan menyebabkan ketidak-tercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai. Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus diikuti dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

#### **d. Pembangunan antar Daerah serta Desa-Kota**

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan, tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. Wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi *pull factor* manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

#### **e. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan**

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum, ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan. Hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus. Hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim serta pencegahan dan penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera

Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi, serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan *green waste* dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim, terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang dilengkapi secara khusus, dan penurunan Indeks Risiko Bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain, jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi Timur Sumatera Utara dan Kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim, serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan

kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

#### **f. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur**

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

#### **g. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan, dan Kolaboratif**

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi 2 (dua) persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas serta memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan *core value*.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan

keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari obyek menjadi subyek pembangunan.

### **3.2.4. Isu Strategis Kota Binjai**

#### **1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggi merupakan salah satu modal penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Di Kota Binjai, meskipun kuantitas penduduk usia produktif cukup mendominasi struktur demografi, tantangan utama terletak pada kualitas SDM yang masih rendah. Jika isu-isu kualitas ini tidak diatasi, Kota Binjai berisiko menghadapi hambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di masa depan, serta potensi peningkatan angka pengangguran.

Kualitas dan daya saing SDM ditentukan oleh banyak faktor yang saling terkait, termasuk kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, dan pendidikan. Saat ini, berbagai isu, seperti ketidakmerataan pendidikan berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang rendah, dan lemahnya inovasi serta teknologi, menghambat pengembangan SDM yang optimal. Risiko jangka panjang dari rendahnya kualitas SDM ini meliputi penurunan produktivitas, stagnasi ekonomi, dan meningkatnya ketidakpuasan sosial di kalangan penduduk.

Pendidikan berkualitas, yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, sangat penting untuk meningkatkan kesempatan kerja penduduk. Namun, kondisi pendidikan di Kota Binjai masih perlu perbaikan, ditunjukkan oleh rendahnya cakupan pendidikan anak usia dini, tingginya angka putus sekolah, serta kualifikasi tenaga pendidik yang belum optimal. Semua faktor ini dapat mengurangi motivasi murid untuk belajar, yang berdampak langsung pada kualitas SDM di masa depan.

Dalam aspek kesehatan, derajat kesehatan masyarakat Kota Binjai masih tergolong rendah, dengan angka kematian ibu dan

bayi yang masih ada. Penyebab kematian ibu seringkali terkait dengan masalah kesehatan yang dapat dicegah, sementara kematian bayi dipengaruhi oleh kondisi medis yang serius, seperti berat badan lahir rendah. Kasus stunting dan balita gizi buruk juga masih menjadi perhatian, yang menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat dalam bidang kesehatan dan gizi.

Pencegahan dan penanganan masalah kesehatan masih belum maksimal, dengan keterbatasan tenaga medis dan kelangkaan obat yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Tanpa perbaikan dalam sektor pendidikan dan kesehatan, Kota Binjai berisiko menghadapi pengangguran yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, dan peningkatan ketidakstabilan sosial di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan *stakeholder* untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di Kota Binjai demi memastikan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## **2. Pembangunan Sarana Prasarana yang Merata dan Berkualitas**

Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Kota Binjai. Ketimpangan infrastruktur dapat memiliki dampak luas dan konsekuensi jangka panjang yang signifikan, termasuk penghambatan akses terhadap layanan publik dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Ketidakmerataan dalam pembangunan infrastruktur, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya, dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang lebih besar, mengakibatkan beberapa daerah tidak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan dasar yang penting.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Binjai harus merancang dan melaksanakan kebijakan alokasi dana yang adil dan merata untuk pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Pembagian

anggaran yang proporsional akan memastikan bahwa setiap daerah di Kota Binjai mendapatkan manfaat dari pembangunan sarana dan prasarana, sehingga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Fokus harus diberikan pada proyek-proyek yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti peningkatan jaringan jalan dan transportasi publik yang efisien. Aksesibilitas terhadap fasilitas umum, seperti taman, pasar, dan pusat kesehatan, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan fasilitas seni, budaya, dan olahraga juga krusial untuk membangun interaksi sosial di antara masyarakat, yang berkontribusi pada penguatan komunitas.

Kualitas pelaksanaan proyek harus menjadi perhatian utama untuk menghindari pemborosan dan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses tender yang transparan, pemilihan kontraktor berkualitas, dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, penerapan teknologi inovatif dan ramah lingkungan dapat meningkatkan efisiensi serta keberlanjutan dari proyek-proyek yang dijalankan.

Penguatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga perlu ditingkatkan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek akan memastikan bahwa kebutuhan lokal diperhatikan, sekaligus meminimalkan potensi konflik kepentingan. Aspek berkelanjutan dan ramah lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam merancang dan membangun sarana dan prasarana, agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir, dan solusi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan air yang efisien, dapat diterapkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kota Binjai dapat dilakukan secara

merata, sehingga meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat dan mengurangi ketimpangan yang ada.

### **3. Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**

Tata kelola pemerintahan yang buruk di Kota Binjai berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang yang signifikan, termasuk hilangnya kepercayaan publik dan penghambatan investasi. Kualitas layanan publik yang belum optimal, kepastian hukum yang lemah, serta birokrasi yang tidak adaptif menciptakan persepsi negatif terhadap pemerintah. Ketidakpastian dalam penegakan hukum, yang disebabkan oleh korupsi, nepotisme, dan ketidakjelasan kebijakan, mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

Kondisi ini tidak hanya memengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Investasi, baik dari dalam maupun luar daerah, cenderung menghindari wilayah yang memiliki tata kelola yang buruk, mengingat risiko yang tinggi terkait dengan korupsi, kebijakan yang tidak konsisten, dan ketidakpastian hukum. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam jangka panjang, kurangnya profesionalisme dan efisiensi dalam aparatur sipil negara (ASN) akan semakin memperburuk keadaan. Masyarakat membutuhkan layanan publik yang responsif dan berkualitas, dan ketiadaan hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan yang lebih dalam. Selain itu, rendahnya efektivitas penggunaan anggaran dan capaian kinerja yang buruk menunjukkan bahwa fokus pada hasil masih belum terwujud. Ini juga akan berdampak pada penyelenggaraan program-program strategis yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, reformasi dalam tata kelola pemerintahan sangatlah mendesak. Penguatan sistem hukum, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan adopsi teknologi yang lebih maju akan menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Sinergi antar perangkat daerah, serta kolaborasi yang erat dengan sektor swasta dan masyarakat, akan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kemajuan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kota Binjai dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menghindari risiko yang mengancam masa depan pembangunan daerah.

#### **4. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi yang Mendukung Produktivitas Ekonomi**

Keterbatasan dalam kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTI) dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Binjai. Tanpa adanya investasi yang memadai dalam penelitian dan pengembangan, serta pelatihan sumber daya manusia, potensi pertumbuhan ekonomi akan terhambat, dan masyarakat dapat terjebak dalam kondisi stagnasi. Hal ini terjadi karena inovasi dan penerapan teknologi yang minim akan mengurangi efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, sehingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, keterbatasan IPTI juga berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan dan teknologi akan semakin terpinggirkan, sementara mereka yang memiliki akses akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari peluang yang ada. Dalam jangka panjang, ketidakmerataan ini dapat menyebabkan polarisasi yang lebih tajam di dalam masyarakat, mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran di kalangan kelompok yang kurang beruntung.

Keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pendidikan dalam bidang teknologi menjadi hambatan

serius untuk kemajuan. Jika tidak ditangani dengan baik, isu-isu ini dapat memicu kemunduran dalam daya saing global Kota Binjai. Sektor-sektor yang seharusnya dapat berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar tidak akan mampu bersaing secara efektif, sehingga menghambat potensi pertumbuhan dan menciptakan ketidakpastian ekonomi.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur digital, pendidikan dan pelatihan dalam teknologi, serta program-program subsidi yang mendukung aksesibilitas. Dengan meningkatkan kapasitas IPTI, diharapkan Kota Binjai dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## **5. Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan**

Pengelolaan tata ruang dan lingkungan yang tidak optimal di Kota Binjai memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, termasuk peningkatan risiko bencana alam dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Ketidakmampuan dalam merencanakan dan mengelola penggunaan ruang dengan baik dapat memperburuk dampak perubahan iklim dan menyebabkan kerentanan terhadap bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Mismanagement tata ruang sering kali mengakibatkan pembangunan di kawasan rawan bencana tanpa memperhatikan risiko yang ada, sehingga meningkatkan kemungkinan kerugian harta benda dan korban jiwa.

Kondisi lingkungan yang memburuk, seperti pencemaran udara dan air, akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat. Kualitas udara yang buruk, akibat emisi dari pabrik dan kendaraan, dapat memicu masalah kesehatan jangka panjang, seperti penyakit pernapasan, yang pada gilirannya akan

meningkatkan beban pada sistem kesehatan. Selain itu, kualitas air yang tidak terjaga dapat berkontribusi pada peningkatan penyakit berbasis air, yang juga akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat dan produktivitas ekonomi.

Keberadaan kawasan kumuh yang tidak dikelola dengan baik juga menciptakan kondisi yang tidak layak huni, dimana masyarakat tidak memiliki akses memadai terhadap layanan dasar seperti sanitasi, air bersih, dan infrastruktur kesehatan. Keterbatasan akses ini akan semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di Kota Binjai, menghambat perkembangan ekonomi lokal, dan mengurangi daya saing kota secara keseluruhan.

Pentingnya pembangunan berkelanjutan tidak dapat diabaikan. Tanpa pendekatan yang terintegrasi untuk mengelola ruang dan lingkungan, Kota Binjai berisiko kehilangan kualitas hidup yang telah dicapai, serta menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Kebijakan dan tindakan yang tepat, seperti rehabilitasi kawasan kumuh, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, dan upaya konservasi sumber daya alam, sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan yang dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan bagi generasi mendatang.

## **6. Kota Binjai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Menjunjung Keberagaman dan Kebudayaan Maju**

Penciptaan Kota Binjai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menghargai keberagaman dan kebudayaan maju merupakan langkah strategis yang krusial untuk masa depan kota ini. Kegagalan dalam mempromosikan keberagaman dan kebudayaan tidak hanya dapat mengakibatkan hilangnya daya tarik ekonomi, tetapi juga meningkatkan risiko konflik sosial dan ketegangan antar komunitas. Dalam konteks globalisasi saat ini, kota-kota yang sukses adalah mereka yang dapat memanfaatkan latar belakang budaya yang beragam untuk menarik talenta dari

berbagai penjuru dunia. Tanpa strategi yang mendukung keberagaman, Kota Binjai berisiko tertinggal dalam kompetisi untuk investasi, pelaku bisnis, dan wisatawan yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keberagaman budaya yang ada di Kota Binjai, termasuk seni, kuliner, dan tradisi yang kaya, harus dipromosikan secara aktif untuk menciptakan identitas kota yang kuat. Jika keberagaman ini tidak diakui dan dirayakan, kota dapat kehilangan potensi sebagai tujuan wisata, yang pada gilirannya dapat mengurangi pendapatan lokal dan menurunkan daya saing ekonomi. Lebih jauh, ketidakmampuan untuk mengelola keberagaman dapat memicu ketegangan antar kelompok, menciptakan lingkungan sosial yang tidak harmonis dan berpotensi menimbulkan konflik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kota secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur yang memadai dan layanan publik berkualitas juga sangat penting untuk mendukung keberagaman dan kebudayaan. Transportasi yang efisien, akses pendidikan yang baik, dan layanan kesehatan yang terjangkau akan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Jika masyarakat merasa aman dan nyaman, mereka lebih cenderung untuk berkontribusi secara produktif terhadap ekonomi kota. Tanpa investasi yang tepat dalam infrastruktur, Kota Binjai berisiko mengalami stagnasi ekonomi, dimana potensi pertumbuhannya tidak dapat direalisasikan.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam menciptakan Kota Binjai yang inklusif dan maju. Kemitraan yang kuat dapat menciptakan peluang kerja, mendukung inovasi, dan memperkuat industri lokal. Namun, jika sektor-sektor ini tidak berkolaborasi dengan baik, kota dapat kehilangan kesempatan untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, regulasi yang mendukung dan lingkungan bisnis yang kondusif harus menjadi prioritas pemerintah kota.

Untuk mewujudkan visi Kota Binjai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menghargai keberagaman dan kebudayaan, diperlukan komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan. Peningkatan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada keterampilan masa depan, pengembangan kebijakan yang inklusif, serta promosi kebudayaan lokal dan internasional sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, Kota Binjai tidak hanya akan tumbuh secara ekonomi, tetapi juga akan menjadi tempat yang layak huni dan penuh peluang bagi semua orang yang tinggal di dalamnya, serta meminimalkan risiko sosial yang mungkin muncul akibat ketidakadilan dan eksklusi.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI DAERAH**

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi pembangunan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat di daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

#### **4.1. Visi Kota Binjai**

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Perumusan visi mempertimbangkan faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan.

Perumusan visi pembangunan Kota Binjai 2025-2045 didasarkan pada masalah utama pembangunan Kota Binjai, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia yang Belum Berkualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Masih Belum Optimal; (2) Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana yang Belum Merata dan Berkualitas; (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Transparan dan Akuntabel; (4) Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi yang Belum Optimal untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi; (5) Pengelolaan Tata Ruang Berkelanjutan yang Belum Optimal dan Kondisi Keamanan yang Menurun; serta (6) Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur antara Kota Binjai dengan Daerah Sekitar. Tabel di bawah ini menunjukkan

perumusan pokok-pokok visi berdasarkan masalah utama pembangunan Kota Binjai.

**Tabel 4. 1. Perumusan Visi RPJPD Kota Binjai**

No	Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Sumber Daya Manusia yang Belum Berkualitas dan Daya Saing Masyarakat yang Masih Belum optimal	Maju, Sejahtera	<b>KOTA BINJAI YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN</b>
2	Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana yang Belum Merata dan Berkualitas	Maju, Sejahtera	
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Transparan dan Akuntabel	Maju, Sejahtera	
4	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi yang Belum Optimal untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi	Sejahtera, Berkelanjutan	
5	Pengelolaan Tata Ruang Berkelanjutan yang Belum Optimal dan Kondisi Keamanan yang Menurun	Maju, Berkelanjutan	
6	Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur antara Kota Binjai dengan Daerah Sekitar	Maju, Berkelanjutan	

Dengan berlandaskan pemikiran tersebut, maka visi RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 adalah:

**“KOTA BINJAI YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”**

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan visi pembangunan Kota Binjai yaitu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

1. **Maju:** Terwujudnya Kota Binjai yang unggul, inovatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai daerah yang diperlihatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap iptek, kelembagaan pemerintahan yang akuntabel, dan perekonomian yang maju. Dalam konteks ini, Kota Binjai berkontribusi pada target pembangunan nasional dan regional dengan memperkuat sektor pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, mempersiapkan SDM yang kompeten, dan mendorong inovasi

melalui pengembangan industri lokal dan teknologi. Hal ini sejalan dengan RPJPD Sumatera Utara dan RPJPN yang menekankan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. **Sejahtera:** Seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan; fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi secara berkeadilan. Kota Binjai memiliki potensi lokal yang signifikan dalam sektor pariwisata dan pengembangan UMKM yang dapat menjadi sumber pendapatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui program-program yang mendukung keberdayaan ekonomi lokal, Kota Binjai dapat membantu mencapai target pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan ketahanan sosial ekonomi sesuai dengan RPJPD Sumatera Utara.
3. **Berkelanjutan:** Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim; keadilan dan kesetaraan; serta ketangguhan ekonomi berlandaskan pembangunan ekonomi hijau. Dalam konteks ini, Kota Binjai dapat berkontribusi terhadap agenda pembangunan nasional dan regional dengan mengembangkan inisiatif ramah lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan merespons perubahan iklim juga menjadi aspek penting dalam mendukung visi berkelanjutan ini.

Dengan mengintegrasikan visi pembangunan Kota Binjai dengan kontribusi spesifik terhadap target pembangunan nasional dan regional, diharapkan dapat terwujud keselarasan dengan

RPJPD Sumatera Utara dan RPJPN, serta memaksimalkan potensi lokal yang ada.

#### **4.2. Sasaran Visi Kota Binjai**

Pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kota Binjai merupakan landasan penting dalam pencapaian sasaran utama pembangunan di Kota Binjai selama periode 2025-2045. Visi pembangunan tersebut menjadi petunjuk utama yang memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai. Adapun sasaran visi Kota Binjai adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendapatan Per Kapita Penduduk Meningkat**

Pemerintah Kota Binjai menekankan upaya untuk meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat Kota Binjai. Sasaran visi Kota Binjai ini menunjukkan pentingnya distribusi ekonomi yang merata serta peningkatan daya beli masyarakat secara umum. Peningkatan pendapatan per kapita diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Peningkatan pendapatan per kapita tidak hanya memandang peningkatan pendapatan secara nominal tetapi juga mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, fokusnya adalah pada peningkatan pendapatan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta penguatan sektor ekonomi yang berdaya saing, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.

Peningkatan pendapatan per kapita juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan konsumsi domestik dan investasi. Semakin tinggi pendapatan per individu, semakin besar juga daya beli mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sasaran visi pembangunan "pendapatan per kapita penduduk meningkat" merupakan landasan penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan meningkatkan pendapatan per kapita, tidak hanya menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, implementasi sasaran visi ini membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

## **2. Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang**

Sasaran visi Pembangunan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan berkurang menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Binjai untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata dalam hal distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Fokus utamanya adalah pada pengurangan kemiskinan ekstrem serta pengurangan kesenjangan sosial ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat. Sasaran visi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan peluang, tanpa terkecuali.

Penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan langkah krusial dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengurangi jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, masyarakat dapat mencapai stabilitas ekonomi yang lebih kokoh dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, pengurangan ketimpangan sosial ekonomi juga penting untuk memperkuat kohesi sosial dan stabilitas politik, yang merupakan elemen kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran visi ini tidak hanya melibatkan upaya untuk mengurangi kemiskinan secara langsung melalui program-program perlindungan sosial dan kesejahteraan, tetapi juga melibatkan upaya untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan, seperti akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, serta layanan kesehatan yang terjangkau. Dengan pendekatan yang holistik, sasaran visi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan seluruh anggota masyarakat secara menyeluruh.

Pengurangan ketimpangan juga memiliki implikasi positif yang luas, termasuk peningkatan stabilitas ekonomi dan sosial, peningkatan akses terhadap peluang ekonomi, serta peningkatan keadilan dan keberlanjutan. Ketika kesenjangan ekonomi mengecil, masyarakat memiliki lebih sedikit hambatan untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mobilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Sasaran visi pembangunan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan berkurang merupakan aspek penting dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, masyarakat dapat mencapai stabilitas ekonomi dan sosial yang lebih besar, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, implementasi

sasaran visi ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya menciptakan kesempatan yang sama bagi semua individu dan kelompok.

### **3. Peran dan Posisi Kepemimpinan Kepala Daerah yang Sesuai dengan Karakteristik Daerah Meningkatkan**

Sasaran visi pembangunan, peran dan posisi kepemimpinan kepala daerah yang sesuai dengan karakteristik daerah meningkatkan menandakan pentingnya memperkuat peran serta posisi kepala daerah dalam menghadapi tantangan dan peluang di tingkat nasional dan global. Sasaran visi ini mencerminkan pengakuan akan peran penting kepala daerah sebagai agen perubahan dalam pembangunan, baik dalam konteks domestik maupun internasional.

Penguatan peran dan posisi kepemimpinan kepala daerah adalah langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan kepercayaan dan dukungan yang lebih besar kepada kepala daerah, pemerintah dapat mempercepat proses pengambilan keputusan yang relevan dan responsif terhadap dinamika lokal maupun global.

Melalui peningkatan peran dan posisi kepemimpinan kepala daerah, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan yang lebih berorientasi pada kebutuhan lokal, pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks global, peningkatan peran dan posisi kepala daerah juga memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan kerja internasional dan mempromosikan kerjasama lintas batas dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan

pertukaran teknologi. Kepala daerah yang memiliki visi global dapat menjadi duta bagi daerahnya dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain, serta memperjuangkan kepentingan lokal dalam forum-forum internasional.

Sasaran visi pembangunan peran dan posisi kepemimpinan kepala daerah di tingkat nasional dan global meningkat menyoroti pentingnya memberdayakan kepala daerah sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Dengan memperkuat peran dan posisi mereka, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait lainnya dalam mendukung sasaran visi ini untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

#### **4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat**

Sasaran visi Pembangunan, daya saing sumber daya manusia meningkat menekankan pentingnya memperkuat kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan global. Sasaran visi ini mencerminkan pengakuan akan peran kunci SDM dalam memperkuat daya saing suatu daerah dalam konteks ekonomi, teknologi, dan inovasi. Peningkatan daya saing sumber daya manusia melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, akses terhadap kesehatan, serta pengembangan keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Dengan memperkuat SDM secara holistik, masyarakat dapat lebih siap menghadapi persaingan global dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

Meningkatkan daya saing SDM juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. SDM yang terampil, terdidik, dan terlatih memiliki potensi untuk menciptakan inovasi, mendorong produktivitas, dan meningkatkan efisiensi dalam

berbagai sektor ekonomi. Hal ini memberikan dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi suatu daerah. Selain itu, peningkatan daya saing SDM juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas, masyarakat dapat meningkatkan mobilitas sosial dan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks global, meningkatnya daya saing SDM juga dapat meningkatkan reputasi dan citra suatu daerah. SDM yang terampil dan terlatih dapat menjadi aset penting dalam memperkuat kerjasama regional maupun internasional, menarik investasi dalam negeri maupun luar negeri, serta mempromosikan pertukaran pengetahuan dan teknologi antarnegara. Sasaran visi pembangunan daya saing sumber daya manusia meningkat merupakan landasan penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperkuat kualitas dan kapasitas SDM, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung sasaran visi ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

## **5. Emisi Gas Rumah Kaca Menurun**

Sasaran visi pembangunan emisi gas rumah kaca menurun menekankan pentingnya mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim global. Sasaran visi ini mencerminkan kesadaran akan dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta komitmen untuk menjaga keberlanjutan planet ini bagi generasi mendatang. Penurunan emisi gas rumah kaca merupakan langkah krusial dalam mengurangi dampak negatif perubahan iklim, seperti kenaikan

suhu global, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Dengan mengurangi emisi tersebut, diharapkan dapat memperlambat laju perubahan iklim dan melindungi ekosistem bumi serta kehidupan manusia.

Sasaran visi ini melibatkan berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, energi, pertanian, dan pengelolaan limbah. Upaya-upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca meliputi penggunaan energi terbarukan, penghematan energi, pengelolaan limbah yang efisien, penanaman kembali hutan, serta pengembangan teknologi bersih. Pentingnya penurunan emisi gas rumah kaca juga terkait dengan komitmen global, seperti yang tercantum dalam Persetujuan Paris. Negara-negara di seluruh dunia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengatasi perubahan iklim global.

Selain memberikan manfaat lingkungan, penurunan emisi rumah kaca juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Penerapan teknologi hijau dan penggunaan energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kemandirian energi suatu negara, serta meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sasaran visi pembangunan emisi gas rumah kaca menurun merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan planet ini dan melindungi lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Dengan mengurangi emisi tersebut, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi perubahan iklim global dan menciptakan dunia yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan ini demi kebaikan bersama.

Adapun target sasaran visi pembangunan Kota Binjai tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2. Indikator Utama Sasaran Visi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2025-2045**

Sasaran Visi	Indikator	Baseline		Target			
		2023	2025	2029	2034	2039	2045
Pendapatan per Kapita Penduduk Meningkat	PDRB per Kapita (Rp juta)	47,68	51,50*	89,57	165,70	279,89	432,15
	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan (%)	0,08	0,09*	0,11	0,15	0,22	0,30
	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	11,47	11,70*	12,93	15,39	19,08	24,00
Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	4,79	3,70*	2,90	2,20	1,20	1,00
	Rasio Gini	0,318	0,317*	0,311	0,298	0,280	0,255
	Kontribusi PDRB Kota Binjai Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara (%)	1,39	1,40*	1,41	1,43	1,46	1,50
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75	4,90*	5,10	5,60	6,10	6,70
Peran dan Posisi Kepemimpinan Kepala Daerah sesuai dengan Karakteristik Daerah Meningkat	Indeks Inovasi Daerah	42,04	52,35*	55,22	60,95	69,55	81,01
	Indeks Daya Saing Daerah	3,38	3,52*	3,64	3,88	4,24	4,72
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	78,11	79,10*	80,12	82,15	85,20	89,27
	Indeks Modal Manusia	n.a.	0,55*	0,57	0,60	0,64	0,70
Emisi Gas Rumah Kaca Menurun	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO <sub>2</sub> eq)	n.a.	85.611,89*	138.800,72	245.178,38	404.744,87	617.500,19
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,33	74,19*	74,53	75,21	76,23	77,59

Keterangan:

\* : Angka target yang dilakukan pemutakhiran

### 4.3. Misi Kota Binjai

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam

mewujudkan visi daerah yang disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah diingat. Perumusan misi pembangunan mengacu pada visi pembangunan, masalah pokok, dan hasil evaluasi RPJPD Kota Binjai periode sebelumnya. Untuk mewujudkan visi Kota Binjai dalam RPJPD 2025-2045, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan yang meliputi:

**1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul, Berdaya Saing, dan Mendapatkan Perlindungan Sosial yang Menyeluruh**

Strategi yang perlu diterapkan untuk mewujudkan misi ini diantaranya adalah program pengentasan putus sekolah, peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, integrasi layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan komunitas.

**2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Mendukung Perekonomian yang Maju, Terintegrasi, dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan mencakup penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), digitalisasi, serta promosi pariwisata lokal, yang secara sinergis akan mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada.

**3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas serta Pelayanan Publik Berkualitas dan Inovatif**

Langkah-langkah konkret yang berfokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas yang kuat, penerapan *e-governance*, partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi antar sektor sangat diperlukan.

**4. Mewujudkan Stabilitas Daerah Melalui Penciptaan Lingkungan yang Aman, Tertib dan Nyaman, Stabilitas Ekonomi, serta Kebebasan Demokrasi yang Terjamin**

Diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, meliputi aspek penguatan keamanan fisik, keamanan digital, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik, kerja sama dengan komunitas lokal yang akan menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik.

**5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang Kuat dengan Menciptakan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, Pembangunan Inklusif serta Pembangunan Karakter dan Lingkungan**

Penting untuk mengintegrasikan upaya pelestarian budaya lokal dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen komunitas, sehingga dapat tercipta sinergi yang positif dalam menjaga warisan budaya dan keanekaragaman hayati yang ada di Kota Binjai.

**6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Adil dan Merata Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah**

Untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Kota Binjai, strategi yang terfokus dan konkret sangat diperlukan. Hal ini mencakup prioritas pembangunan infrastruktur di daerah kumuh dan pinggiran serta peningkatan layanan publik yang merata dan juga keterlibatan masyarakat melalui forum komunitas.

**7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**

Infrastruktur dasar yang meliputi jalan, air bersih, dan sanitasi tidak hanya berperan sebagai penopang kegiatan sehari-hari, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif.

**8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Melalui Perencanaan Pembangunan yang Selaras, Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah dan Pengembangan Pembiayaan Inovatif**

Strategi keberlanjutan yang efektif di Kota Binjai harus relevan dengan tantangan lokal, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kolaborasi antar sektor.

**Tabel 4. 3. Perumusan dan Penjelasan Misi RPJPD Kota Binjai**

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi	Penjelasan Misi
1	Sumber Daya Manusia yang Belum Berkualitas dan Daya Saing Masyarakat yang Masih Belum Optimal	Kota Binjai yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Pendidikan berkualitas yang belum merata	<b>Misi 1:</b> Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul, Berdaya Saing, dan Mendapatkan Perlindungan Sosial yang Menyeluruh	Sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing merupakan faktor pendukung kemajuan pembangunan Kota Binjai demi menghadapi Indonesia Emas 2045
			Derajat kesehatan masyarakat masih rendah		
			Daya saing daerah dengan Kota setara yang belum berimbang		
			Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender, disabilitas yang belum optimal		
			Stabilitas harga dan daya beli masyarakat yang belum mendukung		
2	Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana yang Belum Merata dan Berkualitas		Pembangunan belum merata dan tidak menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	<b>Misi 6:</b> Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Adil dan Merata Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah	Pemerataan pembangunan yang berkualitas antar kecamatan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana berbasis kebutuhan pada setiap wilayah
			Pembangunan yang belum inklusif		
			Infrastruktur publik yang belum mencukupi dan berkualitas		

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi	Penjelasan Misi
				<b>Misi 7:</b> Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Pembangunan sarana prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana serta perubahan iklim dengan penerapan ekonomi hijau yang memanfaatkan EBT dengan melibatkan berbagai langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penanganan sampah melalui manajemen pengelolaan sampah terpadu diimbangi dengan penguatan budaya kebersihan di masyarakat
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Transparan dan Akuntabel		<p>Kualitas layanan publik yang belum optimal</p> <p>Birokrasi yang belum adaptif</p> <p>Prinsip keterbukaan pemerintah belum optimal</p> <p>Tata kelola pemerintah yang terfragmentasi (ego sektoral)</p>	<b>Misi 3:</b> Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas serta Pelayanan Publik Berkualitas dan Inovatif	Hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berintegritas, inovatif dan adaptif demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan berkualitas

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi	Penjelasan Misi	
4	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi yang Belum Optimal untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi		Inovasi daerah yang belum optimal	<b>Misi 2:</b> Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Mendukung Perekonomian yang Maju, Terintegrasi, dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan inklusif yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi	
			Rendahnya produktivitas masyarakat			
			Belum optimalnya Pertumbuhan dan integrasi ekonomi			
5	Pengelolaan Tata Ruang Berkelanjutan yang Belum Optimal dan Kondisi Keamanan yang Menurun		Penerapan ekonomi hijau yang mencakup penggunaan EBT, pembangunan rendah karbon, dan ekonomi sirkular belum berkembang	<b>Misi 4:</b> Mewujudkan Stabilitas Daerah Melalui Penciptaan Lingkungan yang Aman, Tertib dan Nyaman, Stabilitas Ekonomi, serta Kebebasan Demokrasi yang Terjamin	Penegakan hukum dan penciptaan lingkungan yang nyaman dan aman untuk mendorong kehidupan yang kondusif dan mendorong masuknya investasi	
			Timbulan sampah yang semakin meningkat dan pengelolaan sampah belum optimal			<b>Misi 5:</b> Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang Kuat dengan Menciptakan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, Pembangunan Inklusif, serta Pembangunan Karakter dan Lingkungan
			Kepastian dan penegakan hukum yang belum optimal			

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi	Penjelasan Misi
6	Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur antara Kota Binjai dengan Daerah Sekitar		Infrastruktur dan literasi digital yang terbatas Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang masih belum optimal	<b>Misi 8:</b> Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Melalui Perencanaan Pembangunan yang Selaras, Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah dan Pengembangan Pembiayaan Inovatif	Kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pembiayaan yang inovatif sebagai katalisator untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima

Agenda pembangunan Kota Binjai untuk periode 2025-2045 dilakukan melalui perwujudan pelaksanaan Misi Kota Binjai yang berhubungan dengan 8 (delapan) misi agenda pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan juga RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045. Adapun keterkaitan agenda pembangunan Kota Binjai tahun 2025-2045 dengan agenda pembangunan Provinsi Sumatera Utara serta Nasional tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 4. Keterkaitan Agenda Pembangunan Kota Binjai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional**

No.	RPJPN Indonesia	RPJPD Sumatera Utara	RPJPD Kota Binjai
<b>Transformasi Indonesia</b>			
1	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, Berkualitas, Berdaya Saing, dan Sejahtera	Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul, Berdaya Saing, dan Mendapatkan Perlindungan Sosial yang Menyeluruh
2	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi (Termasuk Pengembangan Pariwisata, Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Keuangan Syariah), Penerapan Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, serta Perkotaan dan	Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Mendukung Perekonomian yang Maju, Terintegrasi, dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

No.	RPJPN Indonesia	RPJPD Sumatera Utara	RPJPD Kota Binjai
		Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Menjadikan Sumatera Utara Sebagai Pusat Bioindustri dan Pariwisata Bertaraf Global	
3	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola untuk Membangun Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif serta Pelayanan Publik yang Berkualitas	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas serta Pelayanan Publik Berkualitas dan Inovatif
<b>Landasan Transformasi</b>			
4	Supremasi hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mewujudkan Stabilitas Daerah Melalui Penciptaan Lingkungan yang Aman, Tertib dan Nyaman, Stabilitas Ekonomi, serta Kebebasan Demokrasi yang Terjamin
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan Memperkuat Ketangguhan Manusia, Keluarga, Masyarakat Beserta Lingkungan dan Alam Sekitarnya yang Mampu Hidup dalam Keseimbangan dan Keberkelanjutan	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang Kuat dengan menciptakan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, Pembangunan Inklusif serta Pembangunan Karakter dan Lingkungan
<b>Kerangka Implementasi Transformasi</b>			
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Adil Berbasis Karakteristik Wilayah	Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Adil, dan Merata Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah
7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
8	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Melalui Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah, dan Pengembangan Pembiayaan Inovatif	Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Melalui Perencanaan Pembangunan yang Selaras, Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah dan Pengembangan Pembiayaan Inovatif

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

#### **5.1. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 diturunkan kedalam 4 tahap berdasarkan periode jangka menengah dengan tema setiap periode yaitu:

1. Tahap I Periode 2025-2029 yang merupakan Tahapan Penguatan Fondasi Transformasi;
2. Tahap II Periode 2030-2034 yang merupakan Tahapan Percepatan Transformasi;
3. Tahap III Periode 2035-2039 yang merupakan Tahapan Peningkatan Daya Saing; dan
4. Tahap IV Periode 2040-2045 yang merupakan Tahapan Perwujudan Kota Binjai yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan pada setiap tahapan pembangunan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I Periode 2025-2029**

Arah kebijakan pembangunan tahap I periode 2025-2029 Kota Binjai difokuskan pada **Penguatan Fondasi Transformasi** sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Binjai yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Tahap I periode 2025-2029 bertujuan untuk menguatkan fondasi dalam transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang disertai dengan penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

**Mewujudkan Transformasi Sosial** diarahkan pada penguatan pelayanan dasar kesehatan yang merata dan inklusif untuk seluruh masyarakat, penguatan akses dan kualitas

pendidikan yang unggul, serta penguatan perlindungan sosial. Ini semua dilakukan untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing, dan mendapatkan perlindungan sosial yang menyeluruh. **Mewujudkan Transformasi Ekonomi** diarahkan pada penguatan pemanfaatan iptek, riset, dan inovasi, serta produktivitas tenaga kerja untuk mendukung perekonomian yang maju, terintegrasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

**Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan** difokuskan pada penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif yang diharapkan mampu menghasilkan perangkat daerah yang responsif, peningkatan kualitas ASN demi terwujudnya ASN unggul dan profesional, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik melalui penguatan ketersediaan informasi dan integrasi sistem informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. **Mewujudkan Stabilitas Daerah** melalui penguatan hukum dan stabilitas wilayah dengan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung suasana kondusif bagi investasi yang mendukung stabilitas ekonomi melalui penguatan fondasi peningkatan kapasitas fiskal daerah serta stabilitas harga untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.

**Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** difokuskan pada penguatan ketahanan sosial budaya sebagai modal dasar pembangunan sosial dan ekonomi, dan lingkungan dengan cara menciptakan ketahanan keluarga, kesetaraan gender, pembangunan inklusif serta pembangunan karakter dan lingkungan. **Mewujudkan Pembangunan Wilayah** melalui penguatan pemenuhan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah serta potensi wilayah sehingga mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan industri kecil dan menengah).

**Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana** melalui penguatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar pendidikan,

kesehatan, energi, dan transportasi. Pemanfaatan energi terbarukan dalam penyediaan transportasi massal maupun transisi energi serta perencanaan berbasis lingkungan menjadi dasar dalam pembangunan sarana dan prasarana agar mampu memberikan sumbangan penurunan emisi gas rumah kaca. **Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan** melalui optimalisasi pembiayaan alternatif (KPBU) dan penguatan regulasi insentif dan kemudahan berinvestasi yang didukung melalui reformasi tata kelola fiskal daerah.

**Tabel 5. 1 Fokus Arah Kebijakan Penguatan Fondasi Transformasi**

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
<b>Transformasi Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan pelayanan dasar kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat.</li> <li>- Penguatan akses dan kualitas pendidikan yang merata.</li> <li>- Penguatan jaminan sosial yang merata.</li> </ul>
<b>Transformasi Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan sumber daya manusia melalui pusat pelatihan dan pendidikan.</li> <li>- Memperkuat industri rumah tangga, kecil dan menengah.</li> <li>- Memperkuat ekonomi kreatif melalui UMKM.</li> <li>- Penguatan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur transportasi.</li> <li>- Penguatan kapasitas riset dan inovasi serta pemasaran digital.</li> </ul>
<b>Transformasi Tata Kelola Pemerintahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat kelembagaan yang dinamis dan responsif.</li> <li>- Penguatan kualitas ASN melalui sistem merit.</li> <li>- Penguatan digitalisasi pelayanan publik.</li> <li>- Penguatan kerjasama untuk investasi, teknologi, dan pengetahuan.</li> </ul>
<b>Stabilitas Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan keamanan dan ketertiban lingkungan.</li> <li>- Penguatan stabilitas ekonomi makro dengan penguatan kapasitas fiskal daerah, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat.</li> <li>- Penguatan perencanaan pembangunan berbasis risiko.</li> </ul>
<b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana.</li> <li>- Penguatan tata kelola potensi daerah dan lingkungan secara berkelanjutan.</li> </ul>
<b>Pembangunan Wilayah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan potensi dan kemampuan daerah dalam pembangunan.</li> <li>- Membangun kawasan industri rumah tangga, kecil dan menengah yang terpadu.</li> </ul>
<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan moda transportasi massal dan layanan air bersih.</li> <li>- Penguatan sistem drainase dan kebencanaan.</li> </ul>
<b>Pembangunan yang Berkesinambungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka proyek perintis dengan pembiayaan alternatif (KPBU).</li> <li>- Memperkuat instrumen dan sistem informasi untuk reformasi tata kelola fiskal daerah.</li> </ul>

### 5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap II Periode 2030-2034

Pada tahap kedua ini setelah terwujudnya penguatan fondasi untuk melakukan transformasi, maka arah kebijakan pembangunan akan diarahkan untuk melakukan **Percepatan Transformasi** mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Binjai yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Tahap II periode 2030-2034 bertujuan untuk mempercepat transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang disertai dengan percepatan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

**Mewujudkan Transformasi Sosial** diarahkan pada percepatan pelayanan dasar kesehatan yang merata dan inklusif untuk seluruh masyarakat, percepatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, serta percepatan perlindungan sosial yang inklusif. Ini semua dilakukan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing, dan mendapatkan perlindungan sosial yang menyeluruh. **Mewujudkan Transformasi Ekonomi** diarahkan pada percepatan pemanfaatan iptek, riset, dan inovasi dan produktivitas tenaga kerja untuk untuk mempercepat integrasi perekonomian yang maju dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

**Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan** difokuskan pada percepatan kelembagaan tepat fungsi dan kolabolatif yang diharapkan mampu mempercepat perangkat daerah yang responsif, percepatan kualitas ASN demi terwujudnya ASN unggul dan profesional, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik melalui percepatan sistem informasi yang terintegrasi, serta percepatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. **Mewujudkan Stabilitas Daerah** melalui percepatan penegakan hukum dan stabilitas wilayah dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif bagi investasi yang mendukung stabilitas ekonomi melalui percepatan

kapasitas fiskal daerah serta stabilitas harga untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.

**Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** difokuskan pada percepatan ketahanan sosial budaya sebagai modal dasar pembangunan sosial dan ekonomi, dan lingkungan dengan cara meningkatkan ketahanan keluarga, kesetaraan gender, pembangunan inklusif serta pembangunan karakter dan lingkungan. **Mewujudkan Pembangunan Wilayah** melalui percepatan pemenuhan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah serta potensi wilayah sehingga mampu mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan industri kecil dan menengah).

**Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana** melalui percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, energi, dan transportasi. Pemanfaatan energi terbarukan dalam pengembangan transportasi massal maupun transisi energi serta implementasi perencanaan berbasis lingkungan menjadi dasar dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk mampu meningkatkan sumbangan penurunan emisi gas rumah kaca. **Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan** melalui percepatan pembiayaan alternatif (KPBU) dan percepatan regulasi insentif dan kemudahan berinvestasi yang didukung melalui implementasi reformasi tata kelola fiskal daerah.

**Tabel 5. 2 Fokus Arah Kebijakan Percepatan Transformasi**

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
<b>Transformasi Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pelayanan dasar kesehatan yang inklusif untuk seluruh masyarakat.</li> <li>- Percepatan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif.</li> <li>- Percepatan jaminan sosial yang inklusif.</li> </ul>
<b>Transformasi Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan pusat pelatihan dan pendidikan untuk mempercepat produktivitas sumber daya manusia.</li> <li>- Mengembangkan industri rumah tangga, kecil dan menengah berbasis teknologi.</li> <li>- Memperluas ekonomi kreatif melalui digitalisasi UMKM.</li> <li>- Percepatan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur transportasi ramah lingkungan.</li> <li>- Percepatan kapasitas riset dan inovasi serta pemasaran digital.</li> </ul>

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
<b>Transformasi Tata Kelola Pemerintahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan kelembagaan yang dinamis dan responsif.</li> <li>- Percepatan ASN yang profesional dengan penerapan teknologi digital.</li> <li>- Percepatan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi.</li> <li>- Percepatan kerjasama untuk investasi, teknologi, dan pengetahuan.</li> </ul>
<b>Stabilitas Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan kondusifitas keamanan dan ketertiban lingkungan.</li> <li>- Percepatan stabilitas ekonomi makro dengan percepatan efektivitas belanja publik, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat.</li> <li>- Percepatan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.</li> </ul>
<b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan internalisasi nilai budaya dan agama dalam masyarakat.</li> <li>- Percepatan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan ketahanan pangan, air, dan energi.</li> </ul>
<b>Pembangunan Wilayah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan potensi dan kemampuan daerah dalam pembangunan.</li> <li>- Pengembangan kawasan industri rumah tangga, kecil dan menengah yang terpadu.</li> <li>- Percepatan penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas wilayah.</li> </ul>
<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyediaan moda transportasi massal dan layanan air bersih.</li> <li>- Percepatan sistem drainase dan kebencanaan.</li> </ul>
<b>Pembangunan yang Berkesinambungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan proyek dengan pembiayaan alternatif (KPBU).</li> <li>- Percepatan instrumen dan sistem informasi untuk reformasi tata kelola fiskal daerah.</li> </ul>

### 5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap III Periode 2035-2039

Pada tahap ketiga ini Kota Binjai memulai tahapan arah kebijakan pembangunan untuk **Peningkatan Daya Saing** setelah terwujudnya percepatan transformasi dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Binjai yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Tahap III periode 2035-2039 bertujuan untuk meningkatkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang disertai dengan peningkatan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

**Mewujudkan Transformasi Sosial** diarahkan pada pemantapan daya saing SDM melalui peningkatan pelayanan dasar kesehatan yang merata dan inklusif untuk seluruh masyarakat, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang merata

dan inklusif, serta peningkatan perlindungan sosial yang merata dan inklusif. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing, dan mendapatkan perlindungan sosial yang menyeluruh.

**Mewujudkan Transformasi Ekonomi** diarahkan pada peningkatan pemanfaatan iptek, riset, dan inovasi dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan integrasi perekonomian yang berteknologi maju dan pembangunan ekonomi ramah lingkungan.

**Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan** difokuskan pada peningkatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas ASN demi terwujudnya ASN unggul dan profesional, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik melalui peningkatan sistem satu data informasi yang terintegrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan evaluasinya.

**Mewujudkan Stabilitas Daerah** melalui peningkatan penegakan hukum dan stabilitas wilayah dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif bagi investasi yang mendukung stabilitas ekonomi melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah serta stabilitas harga untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.

**Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** difokuskan pada peningkatan ketahanan sosial budaya sebagai modal dasar pembangunan sosial dan ekonomi, dan lingkungan dengan cara meningkatkan ketahanan keluarga, kesetaraan gender, pembangunan inklusif serta pembangunan karakter dan lingkungan. **Mewujudkan Pembangunan Wilayah** melalui peningkatan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah serta potensi wilayah sehingga mampu memperluas pusat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi (kawasan industri kecil dan menengah terpadu).

**Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana** melalui peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, energi, dan transportasi. Pemanfaatan energi terbarukan dalam peningkatan kualitas transportasi massal maupun transisi energi serta implementasi perencanaan berbasis lingkungan menjadi dasar dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk mampu meningkatkan sumbangan penurunan emisi gas rumah kaca. **Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan** melalui peningkatan kemandirian fiskal daerah dan peningkatan cakupan sektor yang memanfaatkan sumber dana non pemerintah.

**Tabel 5. 3 Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Daya Saing**

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
<b>Transformasi Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif berbasis teknologi.</li> <li>- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata dan inklusif berbasis teknologi.</li> <li>- Peningkatan jaminan sosial yang merata dan inklusif berbasis teknologi.</li> </ul>
<b>Transformasi Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan daya saing SDM melalui peningkatan produktivitas dan inovasi.</li> <li>- Peningkatan modernisasi dan digitalisasi sektor utama ekonomi.</li> <li>- Peningkatan infrastruktur digital dan teknologi tinggi untuk industri rumah tangga, kecil dan menengah.</li> </ul>
<b>Transformasi Tata Kelola Pemerintahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan adaptasi kelembagaan dan kompetensi ASN untuk mendukung lingkungan bisnis yang dinamis.</li> <li>- Mengembangkan regulasi adaptif yang mendukung inovasi dan efisiensi.</li> <li>- Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan untuk menjaga relevansi dan efektivitas.</li> </ul>
<b>Stabilitas Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kondusifitas Kota Binjai sebagai wilayah yang aman untuk berbisnis dan berinvestasi.</li> <li>- Peningkatan implementasi teknologi digital dan tinggi untuk mendukung stabilitas ekonomi.</li> </ul>
<b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan adaptasi internalisasi nilai budaya dan agama dalam masyarakat.</li> <li>- Peningkatan teknologi tinggi untuk meningkatkan ketahanan pangan, air, dan energi.</li> </ul>
<b>Pembangunan Wilayah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kemampuan potensi daerah dalam pembangunan.</li> <li>- Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas wilayah.</li> </ul>
<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas moda transportasi massal dan layanan air bersih.</li> <li>- Peningkatan kualitas sistem drainase, jaringan jalan dan kebencanaan.</li> </ul>
<b>Pembangunan yang Berkesinambungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan memperluas sumber pendanaan non pemerintah.</li> <li>- Memberikan insentif untuk investasi di sektor utama ekonomi Kota Binjai.</li> </ul>

#### **5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV Periode 2040-2045**

Pada tahap keempat ini Kota Binjai akan memasuki tahapan terakhir dalam pembangunan jangka panjang dengan fokus arah kebijakan pembangunan untuk **Mewujudkan Kota Binjai yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan** setelah dilakukan pembangunan tahap I hingga tahap III. Tahap IV periode 2040-2045 bertujuan untuk menjadikan Kota Binjai dengan SDM unggul, berdaya saing, dan inovatif didukung infrastruktur modern berteknologi tinggi yang mampu mengembangkan industri rumah tangga, kecil dan menengah di Kota Binjai yang memiliki daya saing terhadap tantangan nasional maupun global.

**Mewujudkan Transformasi Sosial** melalui perwujudan transformasi sosial yang berkelanjutan untuk masyarakat Kota Binjai yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing dan sejahtera serta memiliki keterampilan yang relevan tantangan nasional maupun global yang memiliki perlindungan sosial yang terjamin. **Mewujudkan Transformasi Ekonomi** diarahkan pada peningkatan produktivitas perekonomian Kota Binjai yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan dan peningkatan kapasitas teknologi dan inovasi untuk menciptakan ekonomi berbasis digitalisasi dan teknologi tinggi dalam mendukung pengembangan kontribusi industri rumah tangga, kecil dan menengah serta perdagangan dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

**Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan** difokuskan pada tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan evaluasinya. **Mewujudkan Stabilitas Daerah** difokuskan pada masyarakat damai, demokratis, dan taat hukum serta menguatnya pengelolaan kapasitas fiskal daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat. Terwujudnya stabilitas ekonomi makro melalui pendapatan yang tinggi dalam sektor industri rumah tangga, kecil dan menengah serta perdagangan dan ekonomi kreatif.

**Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** difokuskan pada terwujudnya ketangguhan keluarga dan masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif. **Mewujudkan Pembangunan Wilayah** difokuskan pada penjagaan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang merata, berkeadilan, dan andal untuk mendukung ekonomi wilayah (termasuk mewujudkan keberhasilan sektor industri rumah tangga, kecil dan menengah serta perdagangan dan ekonomi kreatif) yang unggul, maju dan berkelanjutan serta pelayanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan.

**Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana** melalui ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta menggunakan teknologi tinggi yang ramah lingkungan. Pemanfaatan energi terbarukan dalam peningkatan kualitas transportasi massal maupun transisi energi serta implementasi perencanaan berbasis lingkungan menjadi dasar dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk mampu meningkatkan sumbangan penurunan emisi gas rumah kaca. **Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan** difokuskan pada sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin meningkat termasuk semakin banyak dan meningkatnya investasi di sektor industri rumah tangga, kecil dan menengah serta perdagangan dan ekonomi kreatif di Kota Binjai.

**Tabel 5. 4 Fokus Arah Kebijakan Perwujudan Kota Binjai yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
<b>Transformasi Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya standar tinggi layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan berbasis teknologi tinggi.</li> <li>- Terwujudnya aksesibilitas yang merata dan inklusif terhadap pendidikan dan kesehatan.</li> <li>- Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
<b>Transformasi Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya penggunaan teknologi tinggi dan inovasi dalam kegiatan ekonomi.</li> <li>- Terwujudnya integrasi ekonomi Kota Binjai terhadap ekonomi regional, nasional, maupun global.</li> <li>- Terwujudnya posisi Kota Binjai sebagai salah satu pusat industri rumah tangga, kecil dan menengah serta perdagangan dan ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Utara.</li> </ul>
<b>Transformasi Tata Kelola Pemerintahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang berintegritas dan adaptif.</li> <li>- Terwujudnya ASN yang memiliki kompetensi unggul dan profesionalisme untuk mendukung lingkungan bisnis yang dinamis.</li> <li>- Terwujudnya regulasi adaptif yang mendukung inovasi dan efisiensi ekonomi.</li> </ul>
<b>Stabilitas Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya kondusifitas Kota Binjai yang aman untuk berbisnis dan berinvestasi.</li> <li>- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan dari sektor strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.</li> </ul>
<b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya adaptasi internalisasi nilai budaya dan agama dalam masyarakat.</li> <li>- Terwujudnya implementasi teknologi tinggi ramah lingkungan untuk ketahanan pangan, air, dan energi.</li> </ul>
<b>Pembangunan Wilayah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya pembangunan wilayah yang adil dan merata berdasarkan kemampuan potensi daerah.</li> <li>- Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</li> </ul>
<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya transportasi massal dan layanan air bersih yang berkualitas dan ramah lingkungan.</li> <li>- Terwujudnya sistem drainase, jaringan jalan dan kebencanaan yang berkualitas dan ramah lingkungan.</li> </ul>
<b>Pembangunan yang Berkesinambungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya kemandirian fiskal daerah dan sumber pendanaan non-pemerintah dalam pembiayaan pembangunan.</li> <li>- Terwujudnya model pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan.</li> </ul>

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kota Binjai dalam periode 20 (dua puluh) tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 (dua puluh) tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, serta hasil evaluasi RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025. Tabel di bawah ini merupakan ringkasan arah kebijakan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045.

**Tabel 5. 5. Arah Kebijakan RPJPD Kota Binjai  
Tahun 2025-2045**

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
<b>Kota Binjai yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan</b>	1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul, Berdaya Saing, dan Mendapatkan Perlindungan Sosial yang Menyeluruh	Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial	Percepatan Pembangunan SDM Berkualitas, Inklusif, dan Perlindungan Sosial yang Menyeluruh	Peningkatan Daya Saing SDM dan Keberlanjutan Kesejahteraan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kota Binjai yang Unggul
	2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Mendukung Perekonomian yang Maju, Terintegrasi, dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Penguatan Pemanfaatan Iptek, Riset dan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Percepatan Produktivitas Tenaga Kerja Secara Masif dan Perluasan Sumber Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Peran dan Peringkat Daya Saing di Tingkat Nasional dan Global	Terwujudnya Kota Binjai Metropolitan yang Maju dan Berpendapatan Tinggi
	3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas serta Pelayanan Publik Berkualitas dan Inovatif	Penguatan Kelembagaan Tepat Fungsi dan Kolaboratif, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif, Digitalisasi Pelayanan Publik, dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Percepatan Kelembagaan yang Tangguh, ASN Profesional dan Berkualitas, Regulasi Berbasis Teknologi Informatif, dan Masyarakat Sipil Partisipatif	Peningkatan Kelembagaan yang Adaptif, SDM ASN Kompetitif, Regulasi Adaptif, dan Masyarakat Sipil Mandiri	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
	4. Mewujudkan Stabilitas Daerah Melalui Penciptaan Lingkungan yang Aman, Tertib dan Nyaman, Stabilitas Ekonomi, serta Kebebasan Demokrasi yang Terjamin	Penguatan Hukum dan Stabilitas Wilayah dengan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Suasana Kondusif bagi Investasi yang Mendukung Stabilitas Ekonomi	Percepatan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakkan Hukum dan Ketertiban yang Mempertahankan Suasana Kondusif bagi Investasi	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum dan Stabilitas Ekonomi	Terwujudnya Suasana Kota Binjai Aman dan Damai yang Mendukung Stabilitas Ekonomi

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang Kuat dengan menciptakan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, Pembangunan Inklusif serta Pembangunan Karakter dan Lingkungan	Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Sebagai Modal Dasar Pembangunan Sosial dan Ekonomi, serta Lingkungan	Percepatan Ketahanan Sosial Budaya Sebagai Pendorong Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	Peningkatan Masyarakat yang Tangguh dan Adaptif dalam Menghadapi Berbagai Perubahan dan Bencana	Terwujudnya Masyarakat yang Tangguh, dan Adaptif Terhadap Perubahan dan Bencana
	6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Adil, dan Merata Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah	Penguatan Pembangunan yang Merata dan Berkualitas di Seluruh Wilayah Berdasarkan Kebutuhan dan Lingkungan	Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkualitas dan Berdasarkan Kebutuhan serta Menjaga Lingkungan	Peningkatan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Merata serta Mampu Menghadapi Berbagai Tantangan	Terwujudnya Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas
	7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Penguatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan dan Tahan Terhadap Bencana serta Perubahan Iklim	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Ramah Lingkungan dan Tahan Terhadap Bencana serta Perubahan Iklim	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Ramah Lingkungan dan Tahan Terhadap Bencana serta Perubahan Iklim	Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Ramah Lingkungan dan Tahan Bencana serta Perubahan Iklim
	8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Melalui Perencanaan Pembangunan yang Selaras, Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah dan Pengembangan Pembiayaan Inovatif	Penguatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan Melalui Pembiayaan yang Inovatif	Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan Melalui Sinkronisasi Perencanaan dan Percepatan Pembiayaan yang Inovatif	Peningkatan Pembangunan yang Berkelanjutan Melalui Sinkronisasi Perencanaan dan Peningkatan Pembiayaan yang Inovatif	Terwujudnya Pembangunan yang Berkelanjutan Melalui Sinkronisasi Perencanaan dan Pembiayaan Yang Inovatif

## 5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok merupakan kinerja daerah untuk mencapai visi daerah yang dilakukan melalui langkah-langkah transformasi di daerah dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota

Binjai Tahun 2025-2045 yang merujuk kepada RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Sasaran pokok tersebut dicapai melalui pelaksanaan 8 (delapan) misi yang disebut agenda transformasi, landasan transformasi, dan implementasi transformasi yang telah diuraikan sebelumnya dan pencapaiannya diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang terdiri dari 17 (tujuh belas) arah pembangunan daerah yang disebut dengan 17 Indonesia Emas (17 IE).

**Transformasi Sosial** merupakan penjabaran kata kunci misi pertama RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 yang terdiri atas 3 (tiga) arah pembangunan jangka panjang, yaitu: (IE 1) Kesehatan untuk Semua Masyarakat Kota Binjai; (IE 2) Pendidikan Masyarakat Kota Binjai yang Unggul dan Merata; (IE 3) Masyarakat Kota Binjai yang Sejahtera dan Terlindungi.

**Transformasi Ekonomi** merupakan penjabaran kata kunci misi kedua RPJPD Kota Binjai tahun 2025-2045 yang terdiri atas 5 (lima) arah pembangunan jangka panjang, yaitu: (IE 4) Kota Binjai dengan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; (IE 5) Kota Binjai yang Menerapkan Ekonomi Hijau; (IE 6) Kota Binjai dengan Transformasi Digital; (IE 7) Kota Binjai yang Berintegrasi Ekonomi Domestik dan Global; (IE 8) Kota Binjai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

**Transformasi Tata Kelola Pemerintahan** merupakan penjabaran kata kunci misi ketiga RPJPD Kota Binjai tahun 2025-2045 yang terdiri atas 1 (arah) arah pembangunan jangka panjang, yaitu: (IE 9) Regulasi dan Tata Kelola Kota Binjai yang Berintegritas dan Adaptif.

**Stabilitas Daerah** merupakan penjabaran kata kunci misi keempat RPJPD Kota Binjai tahun 2025-2045 yang terdiri atas 3 (tiga) arah pembangunan jangka panjang, yaitu: (IE 10) Kota Binjai yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Idiologi Pancasila, dan Trantibunlinmas; (IE 11) Kota Binjai dengan

Stabilitas Ekonomi Makro; (IE 12) Kota Binjai dengan Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

**Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** merupakan penjabaran kata kunci misi keempat RPJPD Kota Binjai tahun 2025-2045 yang terdiri atas 5 (lima) arah pembangunan jangka panjang, yaitu: (IE 13) Kota Binjai yang Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; (IE 14) Kota Binjai dengan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif; (IE 15) Kota Binjai dengan Lingkungan Hidup Berkualitas; (IE 16) Kota Binjai yang Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan; (IE 17) Kota Binjai dengan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

**Implementasi Transformasi** terdiri atas 3 (tiga) sasaran pokok pembangunan jangka panjang, yaitu: (1) Pembangunan Wilayah yang Adil dan Merata; (2) Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan; (3) Pembangunan yang Berkesinambungan.

**Tabel 5. 6. Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045**

Agenda	Pelaksanaan Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)
Transformasi	1. Mewujudkan Transformasi Sosial	1. Kesehatan untuk Semua Masyarakat Kota Binjai	1) IE1. Kesehatan untuk Semua Masyarakat Kota Binjai
		2. Pendidikan Masyarakat Kota Binjai yang Unggul dan Merata	2) IE2. Pendidikan Masyarakat Kota Binjai yang Unggul dan Merata
		3. Masyarakat Kota Binjai yang Sejahtera dan Terlindungi	3) IE3. Masyarakat Kota Binjai yang Sejahtera dan Terlindungi
	2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi	4. Masyarakat Kota Binjai yang Produktif dengan Keunggulan Iptek dan Inovasi serta Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan	4) IE4. Kota Binjai dengan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 5) IE5. Kota Binjai yang Menerapkan Ekonomi Hijau 6) IE6. Kota Binjai dengan Transformasi Digital 7) IE7. Kota Binjai yang Berintegrasi Ekonomi Domestik dan Global

Agenda	Pelaksanaan Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)
			8) IE8. Kota Binjai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	5. Pemerintahan Kota Binjai yang Berintegritas dan Adaptif Didukung Partisipasi Masyarakat yang Tinggi	9) IE.9 Regulasi dan Tata Kelola Kota Binjai yang Berintegritas dan Adaptif
Landasan Transformasi	4. Mewujudkan Stabilitas Daerah	6. Kota Binjai yang Demokratis dan Aman dengan Stabilitas Ekonomi Makro yang Unggul dan Berdaya Gantar Kawasan	10) IE10. Kota Binjai yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Idiologi Pancasila, dan Trantibunlinmas 11) IE11. Kota Binjai dengan Stabilitas Ekonomi Makro 12) IE12. Kota Binjai dengan Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan
	5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	7. Kota Binjai yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	13) IE13. Kota Binjai yang Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 14) IE14. Kota Binjai dengan Pembangunan Keluarga Berkualitas, kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif 15) IE15. Kota Binjai dengan Lingkungan Hidup yang Berkualitas 16) IE16. Kota Binjai dengan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 17) IE17. Kota Binjai dengan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Implementasi Transformasi	6. Pembangunan Wilayah yang Adil dan Merata		
	7. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		
	8. Pembangunan yang Berkesinambungan		

Uraian gambaran kinerja dalam mencapai 7 (tujuh) sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Binjai tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut:

### 5.2.1. Kesehatan untuk Semua Masyarakat Kota Binjai

Kesehatan untuk Semua Masyarakat Kota Binjai dicapai melalui arah kebijakan transformasi berikut:

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan untuk semua.
3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap.
5. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
6. Pelayanan kesehatan mental.
7. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
8. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
9. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
10. Peningkatan gizi masyarakat.
11. Percepatan eliminasi penyakit menular.

Arah kebijakan, indikator utama pembangunan, dan target kinerja per tahapan pembangunan untuk sasaran pokok Kesehatan untuk Semua Masyarakat Kota Binjai adalah:

**Tabel 5. 7. Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kinerja Kesehatan untuk Semua Masyarakat Kota Binjai**

Arah Kebijakan				Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target			
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2029	2034	2039	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Deteksi Dini Penyakit.</li> <li>• Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan</li> <li>• Pemenuhan Kebutuhan Gizi Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akselerasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Deteksi Dini Penyakit.</li> <li>• Akselerasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan</li> <li>• Akselerasi Pemenuhan Kebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Deteksi Dini Penyakit.</li> <li>• Pemantapan Sarana dan Prasarana Kesehatan</li> <li>• Pemantapan Kebutuhan Gizi Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Masyarakat Kota Binjai yang Sehat.</li> <li>• Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelas Dunia</li> <li>• Terwujudnya Kebutuhan Gizi Masyarakat yang Optimal</li> </ul>	IE1. Kesehatan untuk Semua Masyarakat Kota Binjai					
				1. Usia Harapan Hidup (tahun)	74,50*	75,00	75,99	77,49	79,48
				2. Kesehatan Ibu dan Anak:					
				a. Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	3*	2	2	1	0

Arah Kebijakan				Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target				
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2029	2034	2039	2045	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Penguatan Kesehatan Mental Masyarakat</li> <li>• Pemenuhan Kesejahteraan dan Kompetensi Tenaga Kesehatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gizi Masyarakat</li> <li>• Eliminasi Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Penguatan Kesehatan Mental Masyarakat</li> <li>• Akselerasi Pemenuhan Kesejahteraan dan Kompetensi Tenaga Kesehatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Eliminasi Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Penguatan Kesehatan Mental Masyarakat</li> <li>• Pemantapan Kesejahteraan dan Kompetensi Tenaga Kesehatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Masyarakat yang Tangguh terhadap Penyakit Menular dan Tidak Menular.</li> <li>• Terwujudnya Tenaga Kesehatan yang Sejahtera dan Kompeten.</li> </ul>	b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,90*	13,75	10,60	7,45	4,30	
				3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):						
				a. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	60,00*	68,00	76,00	84,00	91,00	
				b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	75,00*	78,75	82,50	86,25	90,00	
				4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	87,41*	90,05	92,70	95,35	98,00	

Keterangan:

\* : Angka target yang dilakukan pemutakhiran

### 5.2.2. Pendidikan Masyarakat Kota Binjai yang Unggul dan Merata

Pendidikan Masyarakat Kota Binjai yang Unggul dan Merata dicapai melalui arah kebijakan transformasi berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar).
2. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar.
3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
4. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar aman bencana dan sarana transportasi khusus peserta didik.
5. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.
6. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter serta *digital literacy*.

7. Peningkatan kualifikasi pendidikan vokasi serta peningkatan keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
8. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
9. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
10. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
11. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

Arah kebijakan, indikator utama pembangunan, dan target kinerja per tahapan pembangunan untuk sasaran pokok Pendidikan Masyarakat Kota Binjai yang Unggul dan Merata adalah:

**Tabel 5. 8. Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kinerja Pendidikan Masyarakat Kota Binjai yang Unggul dan Merata**

Arah Kebijakan				Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target							
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2029	2034	2039	2045				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kurikulum dan Pendidikan Karakter</li> <li>• Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan</li> <li>• Pemenuhan Teknologi Pendukung Proses Pendidikan</li> <li>• Pemenuhan Akses Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu.</li> <li>• Pemenuhan Kesejahteraan, Kualitas dan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi Kurikulum dan Pendidikan Karakter</li> <li>• Akselerasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan</li> <li>• Akselerasi Pemenuhan Teknologi Pendukung Proses Pendidikan</li> <li>• Akselerasi Pemenuhan Akses Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu.</li> <li>• Akselerasi Pemenuhan Kesejahteraan, Kualitas, dan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Kurikulum dan Pendidikan Karakter</li> <li>• Pemantapan Sarana dan Prasarana Pendidikan</li> <li>• Pemantapan Teknologi Pendukung Proses Pendidikan</li> <li>• Pemantapan Akses Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu</li> <li>• Pemantapan Kesejahteraan, Kualitas, dan Kompetensi Guru Dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Masyarakat Kota Binjai yang Unggul dan Berdaya Saing</li> <li>• Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelas Dunia</li> <li>• Terwujudnya Penggunaan Teknologi dalam Proses Pendidikan</li> <li>• Terwujudnya Pendidikan yang Inklusif</li> <li>• Terwujudnya Guru dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas, Sejahtera, dan Kompeten</li> </ul>	IE2. Pendidikan Masyarakat Kota Binjai yang Unggul dan Merata									
				Hasil Pembelajaran:									
				5. Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Tingkat Nasional untuk:									
				a. Literasi Membaca	59,16*	63,54	67,91	72,29	76,66				
				b. Numerasi	48,23*	52,37	56,51	60,64	64,78				
				6. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun (tahun)	11,49*	12,13	12,77	13,40	14,10				
				7. Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,27*	14,61	14,95	15,28	15,62				

Keterangan:

\* : Angka target yang dilakukan pemutakhiran

### 5.2.3. Masyarakat Kota Binjai yang Sejahtera dan Terlindungi

Masyarakat Kota Binjai yang Sejahtera dan Terlindungi dicapai melalui arah kebijakan transformasi berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum, baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.
2. Peningkatan perlindungan sosial dan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
3. Perluasan penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, kelompok marginal dan rentan.
4. Peningkatan ekonomi masyarakat miskin yang merata dan inklusif.
5. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
6. Percepatan pembangunan sanitasi layak dan aman yang merata.
7. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau.
8. Percepatan penanganan/ pengurangan luasan kawasan kumuh.
9. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan.

Arah kebijakan, indikator utama Pembangunan, dan target kinerja per tahapan pembangunan untuk sasaran pokok Masyarakat Kota Binjai yang Sejahtera dan Terlindungi adalah:

**Tabel 5. 9. Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Masyarakat Kota Binjai yang Sejahtera dan Terlindungi**

Arah Kebijakan				Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target			
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2029	2034	2039	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Merata dan Inklusif</li> <li>•Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Akses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Akselerasi Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Merata dan Inklusif</li> <li>•Akselerasi Pemenuhan Sarana dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pemantapan Ekonomi Masyarakat yang Merata dan Inklusif</li> <li>•Pemantapan Sarana dan Prasarana serta Akses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terwujudnya Ekonomi Masyarakat Kota Binjai yang Sejahtera, Merata dan Inklusif</li> </ul>	IE3. Masyarakat Kota Binjai yang Sejahtera dan Terlindungi					
				8. Tingkat Kemiskinan (%)	3,70*	2,90	2,20	1,20	1,00

Arah Kebijakan				Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target			
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2029	2034	2039	2045
Perlindungan Sosial (Sanitasi, Air Minum, Hunian Layak) • Peningkatan Kualitas SDM pada Usia Produktif • Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Marginal	Prasarana serta Akses Perlindungan Sosial (Sanitasi, Air Minum, Hunian Layak) • Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM pada Usia Produktif • Akselerasi Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Marginal	Perlindungan Sosial (Sanitasi, Air Minum, Hunian Layak) • Pemantapan Kualitas SDM pada Usia Produktif • Pemantapan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Marginal	• Terwujudnya Sarana dan Prasarana serta Akses Perlindungan Sosial (Sanitasi, Air Minum, Hunian Layak) Kelas Dunia • Terwujudnya SDM Usia Produktif yang Berkualitas • Terwujudnya Perlindungan Sosial bagi Kelompok Marginal	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Binjai (%)	68,00*	75,75	83,50	91,25	99,00
				10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	18,25*	26,36	34,47	42,58	50,70

Keterangan:

\* : Angka target yang dilakukan pemutakhiran

#### 5.2.4. Masyarakat Kota Binjai yang Produktif dengan Keunggulan Iptek dan Inovasi serta Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan

Masyarakat Kota Binjai yang Produktif dengan Keunggulan Iptek dan Inovasi serta Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan dicapai melalui arah kebijakan transformasi berikut:

1. Pengembangan industri berteknologi menengah-tinggi, industri barang konsumsi berkelanjutan, bioekonomi, dan industri kreatif.
2. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik.
3. Pengembangan ekonomi kreatif yang holistik.
4. Peningkatan peran BUMD, UMKM, dan Koperasi.
5. Pengembangan perkotaan untuk menjadi hub ekonomi lokal, regional, dan global.
6. Pengembangan Wilayah Metropolitan Mebidang, PKW, dan PKL.
7. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.
8. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan pada kawasan perkotaan.
9. Hilirisasi industri melalui *smart and sustainable manufacturing* untuk diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.

10. Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana dan prasarana sistem transportasi publik massal.
11. Pemanfaatan revolusi industri hingga 4.0 dan tata kelola niaga.
12. Penguatan sektor padat karya, berorientasi ekspor dan bernilai tambah.
13. Akselerasi investasi pada sektor teknologi maju dan inovasi tinggi.
14. Pengembangan industri manufaktur terpadu ramah lingkungan pada kawasan peruntukan industri Kota Binjai.
15. Pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital melalui penguatan struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital.
16. Peningkatan skala industri kreatif berorientasi ekspor.
17. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan.
18. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
19. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green and grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan.
20. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.
21. Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan.
22. Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana dan prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.

23. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.
24. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
25. *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan.
26. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*).
27. Penataan dan penguatan daya tarik wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
28. Penguatan pemasaran ekonomi kreatif melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha.
29. Peningkatan konektivitas menuju/ dari kawasan strategis ekonomi kreatif.
30. Penguatan digitalisasi industri dan *green industry*.
31. Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan.
32. Peningkatan kualitas SDM dan pelaku usaha ekonomi kreatif.
33. Peningkatan riset dan inovasi keberagaman produk ekonomi kreatif.
34. Penguatan sistem investasi/ permodalan usaha ekonomi kreatif.
35. Penguatan rantai pasok dan ekosistem industri ekonomi kreatif.
36. Pemanfaatan *platform* digitalisasi *one stop service* untuk kemudahan wisata dan ekonomi kreatif.
37. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam promosi ekonomi kreatif.
38. Peningkatan ekspor industri ekonomi kreatif.
39. Penguatan ekosistem riset dan inovasi Iptek dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.

40. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan.
41. Penerapan prinsip *green economy* dan *circular economy* di sektor ekonomi kreatif.
42. Meningkatkan potensi dan peluang investasi daerah untuk menjadikan Kota Binjai sebagai salah satu daerah tujuan penanaman modal utama di Sumatera Utara.
43. Mendorong investasi ke sektor riil seperti industri makanan dan industri manufaktur.
44. Memperluas *network* dengan lembaga penanaman modal di dalam negeri dan luar negeri melalui perwakilan negara luar.
45. Perluasan peluang investasi pada sektor ekonomi digital dan teknologi serta perluasan ke luar daerah.
46. Integrasi kelembagaan dan infrastruktur pendukung penunjang sektor investasi.
47. Pengembangan peluang investasi di dalam dan luar negeri.
48. Peningkatan pemanfaatan, pengembangan, serta penguatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Arah kebijakan, indikator utama Pembangunan, dan target kinerja per tahapan pembangunan untuk sasaran pokok Masyarakat Kota Binjai yang Produktif dengan Keunggulan Iptek dan Inovasi serta Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan adalah:

**Tabel 5. 10. Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Masyarakat Kota Binjai yang Produktif dengan Keunggulan Iptek dan Inovasi serta Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan**

Arah Kebijakan				Indikator Utama	Baseline	Target				
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Pembangunan	2025	2029	2034	2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi</li> <li>• Penyediaan Bibit dan Varietas Unggul untuk Komoditas Pertanian Unggulan yang Bernilai Tinggi yang Berpotensi Masuk ke Pasar Ekspor/ Global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akselerasi Penguatan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi</li> <li>• Pengembangan Industri Berteknologi Menengah-Tinggi, Industri Barang Konsumsi Berkelanjutan, Bioekonomi, dan Industri Kreatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi</li> <li>• Peningkatan Kapasitas, Akses Informasi Petani dalam Peningkatan Produktivitas, Metode Pengembangan, Perawatan, Pengendalian Hama,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi</li> <li>• Perwujudan Produktivitas Pertanian yang Memanfaatkan Teknologi Digital</li> <li>• Perwujudan Modernisasi Pertanian dengan Teknologi Tinggi</li> </ul>	IE4. Kota Binjai dengan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
				11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,70*	12,93	15,39	19,08	24,00	
				12. Pengembangan Pariwisata:						
				a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,17*	5,78	6,39	7,00	7,61	
				b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	57*	59	61	63	65	

Arah Kebijakan				Indikator Utama	Baseline	Target								
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Pembangunan	2025	2029	2034	2039	2045			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Industri Sektor Padat Karya, Berorientasi Ekspor dan Bernilai Tambah</li> <li>• Penguatan Infrastruktur Perkotaan dan Pengelolaan Kawasan Perkotaan untuk Mewujudkan Kawasan Perkotaan Inklusif, Berkelanjutan, dan Berketahanan</li> <li>• Penguatan Hilirisasi Industri Melalui <i>Smart and Sustainable Manufacturing</i> untuk Diversifikasi Produk dan Peningkatan Nilai Tambah</li> <li>• Penguatan Revolusi Industri Hingga 4.0 dan Tata Kelola Niaga</li> <li>• Penguatan Digitalisasi Industri dan <i>Green Industry</i></li> <li>• Pemanfaatan Platform Digitalisasi <i>One Stop Service</i> untuk Kemudahan Wisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• Perluasan Peluang Investasi pada Sektor Ekonomi Digital dan Teknologi serta Perluasan ke Luar Daerah</li> <li>• Penguatan Infrastruktur Perkotaan dan Pengelolaan Kawasan Perkotaan untuk Mewujudkan Kawasan Perkotaan Inklusif, Berkelanjutan, dan Berketahanan</li> <li>• Penguatan Koordinasi dan Kerja Sama Antar Wilayah untuk Pengelolaan Kawasan Perkotaan, Salah Satunya Melalui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan Akses Pembiayaan Kredit bagi Usaha Pertanian</li> <li>• Percepatan Penyediaan Infrastruktur Energi Rendah Emisi Berbasis Jaringan Gas Perkotaan pada Kawasan Perkotaan</li> <li>• Percepatan dan Perluasan <i>Coverage</i> Sarana-Prasarana Sistem Transportasi Publik Massal</li> <li>• Percepatan Prinsip <i>Green Economy</i> dan <i>Circular Economy</i> di Sektor Ekonomi Kreatif</li> <li>• Akselerasi Investasi pada Sektor Teknologi Maju dan Inovasi Tinggi</li> <li>• Percepatan Industri Manufaktur Terpadu Ramah Lingkungan pada Kawasan Strategis Industri</li> <li>• Percepatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Melalui Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital</li> <li>• Percepatan Penyediaan Infrastruktur Air Baku dan Air Minum pada Kawasan Perkotaan</li> <li>• Percepatan Pembangunan Jalan Arteri Lingkar Kawasan Perkotaan</li> <li>• Percepatan Pengelolaan Jalan dan Drainase Kota serta Lingkungan Yang Berkualitas</li> <li>• Percepatan Sistem Telekomunikasi dan Internet yang Merata</li> <li>• Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemupukan, Teknologi Pascapanen dan Pemasaran Pertanian lewat <i>Digital Marketplace/ Platform</i></li> <li>• Peningkatan Produktivitas Pertanian Berkelanjutan melalui Modernisasi Pertanian dan Implementasi Teknologi</li> <li>• Peningkatan Ketahanan Bencana Melalui Pendekatan pada Kawasan Perkotaan</li> <li>• Peningkatan Ketahanan Bencana melalui Pendekatan <i>Hybrid (Green and Grey Infrastructure)</i> pada Kawasan Perkotaan</li> <li>• Peningkatan Industri Kreatif Berorientasi Ekspor</li> <li>• Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Promosi Ekonomi Kreatif</li> <li>• Peningkatan Investasi Sektor Ekonomi Riil Berteknologi Tinggi di Kota Binjai</li> <li>• Peningkatan Infrastruktur Terpadu yang Menerapkan Teknologi Tinggi</li> <li>• Peningkatan Konektivitas menuju/ dari Kawasan Strategis Ekonomi Kreatif</li> <li>• Peningkatan Infrastruktur Distribusi</li> <li>• Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Jalan dan Drainase Kota serta Lingkungan</li> <li>• Peningkatan Infrastruktur dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Kawasan Perkotaan Inklusif, Berkelanjutan dan Berketahanan</li> <li>• Terwujudnya <i>Green Economy</i> dan <i>Circular Economy</i> di Kota Binjai</li> <li>• Terwujudnya Infrastruktur Rendah Emisi yang Berkelanjutan</li> <li>• Terwujudnya Sistem Transportasi Publik Massal yang Berkelanjutan</li> <li>• Terwujudnya Kawasan Industri di Kota Binjai yang Menerapkan Teknologi Digital Tinggi</li> <li>• Terwujudnya Penggunaan Energi Terbarukan dalam Kawasan Industri di Kota Binjai</li> <li>• Terwujudnya Ekonomi Kreatif di Kota Binjai yang Sepenuhnya Menerapkan Teknologi Digital</li> <li>• Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Drainase Kota Binjai yang Berkualitas dan Merata</li> <li>• Terwujudnya Konektivitas Antar Kawasan Strategis Ekonomi</li> <li>• Terwujudnya Infrastruktur Air Baku dan Air Minum yang Merata dan Berkualitas</li> <li>• Terwujudnya Kerjasama Antar Wilayah Kota Binjai dengan Akses Internet Tinggi dan Cepat</li> <li>• Terwujudnya Sistem Transportasi Massal yang Terintegrasi dan Ramah Lingkungan</li> <li>• Terwujudnya Investasi Dalam Negeri dan Luar</li> </ul>	13. Pengembangan Ekonomi Kreatif:										
				a. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	n.a.									
				b. Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Memiliki HAKI	n.a.									
				14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:										
				a-i. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian pada Level Kota Binjai (%)	10,66*	11,21	11,75	12,30	12,84					
				a-ii. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Kota Binjai (%)	5,04*	6,20	7,35	8,51	9,66					
				b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,68*	4,76	5,84	6,92	8,00					
				c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,61*	0,75	0,85	0,95	1,00					
				d. <i>Return on Aset (ROA) BUMD (%)</i>	-10,23*	-6,27	-2,32	1,64	5,60					
				15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik:										
				a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,84*	5,39	4,94	4,49	4,04					
				b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	43,00*	52,25	61,50	70,75	80,00					
				16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,24*	50,87	54,49	58,12	61,74					
				17. Tingkat Penguasaan Iptek										
				a. Indeks Inovasi Daerah	52,35*	55,22	60,95	69,55	81,01					
				b. Belanja Riset (Rp. milyar)	0,60*	1,52	2,43	3,35	4,25					
				IE5. Kota Binjai yang Menerapkan Ekonomi Hijau										
				18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:										
a. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	3,00*	3,05	3,10	3,15	3,20									

Arah Kebijakan				Indikator Utama	Baseline	Target									
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Pembangunan	2025	2029	2034	2039	2045				
Pembentukan Regulasi Dan Kelembagaan Pengelolaan Lintas Wilayah dan Lintas Pemerintahan • Penguatan Pengelolaan Jalan dan Drainase Kota serta Lingkungan • Penguatan Sistem Tele-komunikasi dan Internet • Penguatan Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi Publik Massal Rendah Emisi Berbasis Rel dan/atau Jalan • Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Holistik • Penguatan Daya Tarik Wisata Kultural • Penguatan Investasi ke Sektor Riil seperti Industri Makanan dan Industri Manufaktur	Transportasi Publik Rendah Emisi • Percepatan Investasi melalui <i>Network</i> dengan Lembaga Penanaman Modal di Dalam Negeri dan Luar Negeri • Percepatan Integrasi Kelembagaan dan Infrastruktur Pendukung Penunjang Sektor Investasi	Kecepatan Akses Internet • Peningkatan Tata Kelola, Aksesibilitas Masyarakat, dan Kualitas Layanan Sistem Transportasi Publik Massal di Kawasan Perkotaan • Peningkatan Potensi dan Peluang Investasi Daerah • Peningkatan Peluang Investasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri	Negeri ke Sektor Produktif di Kota Binjai	IE6. Kota Binjai dengan Transformasi Digital											
				19. Tingkat Pemanfaatan Teknologi Digital:											
				a. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,79*	7,27	7,74	8,22	8,69						
				b. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	49,50*	60,00	65,00	70,00	75,00						
				IE7. Kota Binjai yang Berintegrasi Ekonomi Domestik dan Global											
				20. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,00*	31,12	30,23	29,35	28,46						
				21. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	2,00*	2,80	4,40	6,80	10,00						
				IE8. Kota Binjai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi											
				Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:											
				22. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Binjai (Bagian Wilayah Metropolitan Mebidangro) terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara (%)	1,40*	1,41	1,43	1,46	1,50						
23. Rumah Tangga dengan Akses terhadap Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	91,59*	93,69	95,79	97,90	98,00										

Keterangan:

\* : Angka target yang dilakukan pemutakhiran

### 5.2.5. Pemerintahan Kota Binjai yang Berintegritas dan Adaptif Didukung Partisipasi Masyarakat yang Tinggi

Pemerintahan Kota Binjai yang Berintegritas dan Adaptif Didukung Partisipasi Masyarakat yang Tinggi dicapai melalui arah kebijakan transformasi berikut:

1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi.
2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

3. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat.
4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif.
5. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.
6. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
7. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta serta *reward* dan *punishment* termasuk melalui peningkatan/ perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
8. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
9. Penguatan pendidikan politik.

Arah kebijakan, indikator utama pembangunan, dan target kinerja per tahapan pembangunan untuk sasaran pokok pembangunan Pemerintahan Kota Binjai yang Berintegritas dan Adaptif Didukung Partisipasi Masyarakat yang Tinggi adalah:

**Tabel 5. 11. Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Pemerintahan Kota Binjai yang Berintegritas dan Adaptif Didukung Partisipasi Masyarakat yang Tinggi**

Arah Kebijakan				Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target			
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2029	2034	2039	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyederhanaan dan Peningkatan Kualitas Regulasi</li> <li>• Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan</li> <li>• Penguatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik</li> <li>• Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas ASN</li> <li>• Penguatan Peran Pemerintah dalam Pendidikan Politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akselerasi Penyederhanaan dan Peningkatan Kualitas Regulasi</li> <li>• Akselerasi Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan</li> <li>• Akselerasi Penguatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik</li> <li>• Akselerasi Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Penyederhanaan dan Peningkatan Kualitas Regulasi</li> <li>• Pemantapan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan</li> <li>• Pemantapan Penguatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik</li> <li>• Pemantapan Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Regulasi yang Sederhana dan Berkualitas.</li> <li>• Terwujudnya Masyarakat yang Partisipatif dalam Proses Pembangunan</li> <li>• Implementasi Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik</li> <li>• Terwujudnya Kelembagaan dan ASN yang Berkualitas</li> <li>• Terwujudnya Peran Pemerintah</li> </ul>	IE9. Regulasi dan Tata Kelola Kota Binjai yang Berintegritas dan Adaptif					
				24. Indeks Reformasi Hukum	60,00*	67,50	75,00	82,50	90,00
				25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,24*	3,68	4,12	4,56	5,00
				26. Indeks Pelayanan Publik	2,35*	2,71	3,07	3,42	3,78

Arah Kebijakan				Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target			
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2029	2034	2039	2045
	• Akselerasi Penguatan Peran Pemerintah dalam Pendidikan Politik	• Pemantapan Penguatan Peran Pemerintah dalam Pendidikan Politik	dalam Pendidikan Politik	27. Indeks Integritas Nasional	66,78*	70,20	73,61	77,03	80,44

Keterangan:

\* : Angka target yang dilakukan pemutakhiran

### 5.2.6. Kota Binjai yang Demokratis dan Aman dengan Stabilitas Ekonomi Makro yang Unggul dan Berdaya Gentar Kawasan

Kota Binjai yang Demokratis dan Aman dengan Stabilitas Ekonomi Makro yang Unggul dan Berdaya Gentar Kawasan dicapai melalui arah kebijakan transformasi berikut:

1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
2. Pemahaman wawasan kebangsaan dan idiologi Pancasila.
3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBU, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dan sebagainya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
4. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

Arah kebijakan, indikator utama pembangunan, dan target kinerja per tahapan pembangunan untuk sasaran pokok pembangunan Kota Binjai yang Demokratis dan Aman dengan Stabilitas Ekonomi Makro yang Unggul dan Berdaya Gentar Kawasan adalah:

**Tabel 5. 12. Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Kota Binjai yang Demokratis dan Aman dengan Stabilitas Ekonomi Makro yang Unggul dan Berdaya Gentar Kawasan**

Arah Kebijakan				Indikator Utama	Baseline	Target								
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Pembangunan	2025	2029	2034	2039	2045			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Keamanan dan Ketertiban</li> <li>• Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila</li> <li>• Penguatan Pengendalian Stabilitas Harga</li> <li>• Penguatan Reformasi Anggaran Daerah</li> <li>• Penguatan Sinergi Perencanaan Daerah dan Pusat</li> <li>• Penguatan Kemampuan Keuangan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akselerasi Penguatan Keamanan dan Ketertiban</li> <li>• Akselerasi Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila</li> <li>• Percepatan Pengendalian Stabilitas Harga.</li> <li>• Percepatan Reformasi Anggaran Daerah.</li> <li>• Percepatan Sinergi Perencanaan Daerah Dan Pusat</li> <li>• Percepatan Kemampuan Keuangan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Keamanan dan Ketertiban</li> <li>• Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila</li> <li>• Peningkatan Pengendalian Stabilitas Harga</li> <li>• Peningkatan Reformasi Anggaran Daerah</li> <li>• Peningkatan Sinergi Perencanaan Daerah dan Pusat</li> <li>• Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Kota Binjai yang Aman dan Tertib</li> <li>• Terwujudnya Masyarakat dan Berwawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila</li> <li>• Terwujudnya Stabilitas Harga di Kota Binjai</li> <li>• Terwujudnya Reformasi Anggaran Daerah Kota Binjai</li> <li>• Terwujudnya Sinergi Perencanaan Daerah dan Pusat</li> <li>• Terwujudnya Kemampuan Keuangan Daerah Kota Binjai yang Tangguh, Inovatif, dan Adaptif</li> </ul>	IE10.Kota Binjai yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Idiologi Pancasila, dan Trantibunlinmas										
				Tingkat Pembangunan Hukum:										
				28. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah						70,00*	77,50	85,00	92,50	100,00
				29. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM						70,00*	75,00	80,00	85,00	90,00
				30. Angka Kriminalitas (kasus)						1.800	1.500	1.200	900	600
				31. Indeks Demokrasi Indonesia						Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
				IE11.Kota Binjai dengan Stabilitas Ekonomi Makro										
				32. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)						0,93	1,12	1,30	1,49	1,66
				33. Tingkat Inflasi (%)						3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
				IE12.Kota Binjai dengan Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan										
				34. Jumlah Kerjasama Kota Binjai/ Kota Kembar/ Bersaudara ( <i>Sister City</i> )						3*	6	9	12	15
				35. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk						2,00*	2,25	2,50	2,75	3,00

Keterangan:

\* : Angka target yang dilakukan pemutakhiran

### 5.2.7. Kota Binjai yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan

Kota Binjai yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan dicapai melalui arah kebijakan transformasi berikut:

1. Peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran.

3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis ekologis.
4. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau.
5. Peningkatan pendidikan kebencanaan melalui penguatan kurikulum pada pendidikan dasar, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana serta pengembangan mitigasi bencana perkotaan.
6. Peningkatan ketangguhan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan.
7. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dari tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
8. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
9. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan dalam pembangunan.
10. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
11. Pengelolaan sampah terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan *circular economy*.

Arah kebijakan, indikator utama pembangunan dan target kinerja per tahapan pembangunan untuk sasaran pokok pembangunan Kota Binjai yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan adalah:

**Tabel 5. 13. Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Kota Binjai yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**

Arah Kebijakan				Indikator Utama	Baseline	Target				
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Pembangunan	2025	2029	2034	2039	2045	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Masyarakat yang Beragama Masalah dan Berkebudayaan Tangguh</li> <li>• Penguatan Perlindungan Anak, Perempuan, Pemuda, Penyandang Disabilitas, dan Lansia</li> <li>• Penguatan Kapasitas, Kemandirian, Kemampuan dalam Pengambilan Keputusan, serta Peningkatan Partisipasi Anak, Perempuan, Pemuda, Penyandang Disabilitas dan Lansia di Berbagai Bidang Pembangunan</li> <li>• Penguatan Pengarus-utamaan Gender dan Inklusi Sosial yang Efektif dan Berkelanjutan dalam Pembangunan</li> <li>• Penguatan Tata Ruang Berbasis Ekologis</li> <li>• Penguatan Pengelolaan Sampah dan Drainase Terpadu</li> <li>• Penguatan Ketangguhan Keluarga dan Masyarakat dalam Pembangunan</li> <li>• Penguatan terhadap Pendidikan Bencana dan Perubahan Iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan Masyarakat yang Beragama Masalah dan Berkebudayaan Tangguh</li> <li>• Percepatan Perlindungan Anak, Perempuan, Pemuda, Penyandang Disabilitas, dan Lansia</li> <li>• Percepatan Kapasitas, Kemandirian, Kemampuan dalam Pengambilan Keputusan, serta Peningkatan Partisipasi Anak, Perempuan, Pemuda, Penyandang Disabilitas dan Lansia di Berbagai Bidang Pembangunan</li> <li>• Percepatan Pengarus-utamaan Gender dan Inklusi Sosial yang Efektif dan Berkelanjutan dalam Pembangunan</li> <li>• Percepatan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Ekologis</li> <li>• Percepatan Pengelolaan Sampah dan Drainase Terpadu</li> <li>• Percepatan Ketangguhan Keluarga dan Masyarakat dalam Pembangunan</li> <li>• Percepatan Pendidikan Bencana dan Perubahan Iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Masyarakat yang Beragama Masalah dan Berkebudayaan Tangguh</li> <li>• Peningkatan Perlindungan Anak, Perempuan, Pemuda, Penyandang Disabilitas, dan Lansia</li> <li>• Peningkatan Kapasitas, Kemandirian, Kemampuan dalam Pengambilan Keputusan, serta Peningkatan Partisipasi Anak, Perempuan, Pemuda, Penyandang Disabilitas dan Lansia di Berbagai Bidang Pembangunan</li> <li>• Peningkatan Pengarus-utamaan Gender dan Inklusi Sosial yang Efektif dan Berkelanjutan dalam Pembangunan</li> <li>• Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Ekologis</li> <li>• Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Drainase Terpadu</li> <li>• Peningkatan Ketangguhan Keluarga dan Masyarakat dalam Pembangunan</li> <li>• Pemantapan Pendidikan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Masyarakat yang Beragama Masalah dan Berkebudayaan Tangguh</li> <li>• Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif</li> <li>• Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas</li> <li>• Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, an Pangan</li> <li>• Terwujudnya Masyarakat yang Tangguh terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</li> </ul>	IE13.Kota Binjai yang Beragama Masalah dan Berkebudayaan Maju						
				36. Persentase Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar budaya (Benda dan Tak Benda) (%)	45,00*	55,00	65,00	75,00	85,00	
				37. Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,41*	80,40	82,39	84,37	86,36	
				IE14.Kota Binjai dengan Pembangunan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif						
				38. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	63,13*	64,38	65,63	66,88	68,13	
				39. Indeks Ketimpangan Gender	0,280*	0,270	0,260	0,250	0,240	
				IE15.Kota Binjai dengan Lingkungan Hidup yang Berkualitas						
				Kualitas Lingkungan Hidup:						
				40. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,85*	68,00	71,00	74,00	77,59	
				41. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	5,00*	15,00	30,00	45,00	60,00	
				42. Pengelolaan Sampah:						
				- Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	10,00*	30,00	50,00	70,00	90,00	
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	72,00*	79,00	86,00	93,00	100,00	
				IE16.Kota Binjai dengan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan						
				43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan:						
a. Ketahanan Energi:										

Arah Kebijakan				Indikator Utama	Baseline	Target					
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Pembangunan	2025	2029	2034	2039	2045
				- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.102*	1.552	2.002	2.452	2.902		
				b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%)	11,00*	9,13	7,25	5,38	3,50		
				c. Ketahanan Air:							
				- Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)	0,34*	0,56	0,77	0,99	1,20		
				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	0,00*	10,00	30,00	60,00	100,00		
				IE17. Kota Binjai dengan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim							
				44. Indeks Risiko Bencana	100,76*	94,32	87,88	81,44	74,99		
				45. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO <sub>2</sub> eq)	85.611,89*	218.583,97	351.556,04	484.528,12	617.500,19		

Keterangan:

\* : Angka target yang dilakukan pemutakhiran

## 5.2.8. Implementasi Transformasi Kota Binjai

### 1. Pembangunan Wilayah yang Adil dan Merata

Sasaran pokok untuk mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Adil dan Merata di Kota Binjai akan dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah daerah pada kawasan Mebidang, penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah, penyelenggaraan otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

### 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Sasaran pokok untuk mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan di Kota Binjai akan dilakukan melalui perencanaan tata ruang berbasis ekologis, pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/ low cost financing*, bantuan/ subsidi operasional

dan ketenagakerjaan, insentif fiskal/ non fiskal lainnya bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif, riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.

### **3. Pembangunan yang Berkesinambungan**

Sasaran pokok untuk mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan di Kota Binjai akan dilakukan melalui pembiayaan inovatif, sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional.

Adapun arah kebijakan implementasi transformasi Kota Binjai dilakukan melalui:

1. Penguatan kerjasama antar pemerintah daerah pada kawasan Mebidang.
2. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/ wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan, dan sebagainya).
3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan.
4. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/ low cost financing*, bantuan/ subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/ non fiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, serta energi baru dan terbarukan.
5. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam negeri dan luar negeri.

6. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
7. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.
8. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
9. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW daerah.
10. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional.
11. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
12. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

### **5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kota Binjai**

Arah kebijakan pembangunan wilayah Kota Binjai merupakan perwujudan dari tahapan implementasi transformasi pembangunan jangka panjang yang akan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian berbagai indikator dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai secara menyeluruh. Kota Binjai yang merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang ada di Sumatera Utara dengan karakteristik volume lalu lintas sedang serta merupakan wilayah komuter bagi Kota Medan yang menjadikan Kota Binjai lebih fokus dalam pengembangan industri rumah tangga, kecil, dan menengah yang bercirikan kearifan lokal, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Inovasi produk yang diharapkan dapat dihasilkan oleh industri rumah tangga, kecil, dan menengah di Kota Binjai diantaranya adalah produk pangan siap saji, pakaian jadi, kain batik, minuman kesehatan, serta kreatifitas bambu yang bahan

bakunya bisa diperoleh dari wilayah sekitar seperti Kabupaten Langkat maupun Kabupaten Deli Serdang. Adapun arah kebijakan untuk mewujudkan implementasi transformasi ini adalah:

1. Peningkatan Infrastruktur

- a. Modernisasi dan pengembangan infrastruktur transportasi serta sistem drainase yang berkelanjutan.
- b. Pembangunan sentra industri rumah tangga, kecil, dan menengah sesuai dengan RTRW Kota Binjai.
- c. Pengembangan infrastruktur pendukung seperti fasilitas logistik untuk distribusi barang maupun mobilitas orang.

2. Penerapan Teknologi dan Digitalisasi

- a. Kemudahan maupun insentif bagi investasi di bidang atau yang menggunakan teknologi serta inovasi dalam proses efisiensi produksi.
- b. Implementasi digitalisasi industri rumah tangga, kecil, dan menengah untuk meningkatkan visibilitas dan koordinasi antar *stakeholder*.

3. Kolaborasi dan Kemitraan

Memperkuat kolaborasi dan kemitraan dengan *stakeholder* seperti pelaku industri rumah tangga, kecil, dan menengah, lembaga pendidikan, maupun pemerintahan sehingga suasana sinergitas dan efisiensi bisa tercipta.

4. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas SDM

- a. Memberikan pelatihan kepada pelaku industri rumah tangga, kecil, dan menengah tentang manajemen rantai pasok, teknologi produksi, dan standar kualitas.
- b. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal untuk mendukung pengembangan industri rumah tangga, kecil, dan menengah yang berkelanjutan.

Pariwisata merupakan aktivitas yang melibatkan perjalanan dan tinggal sementara di luar lingkungan yang biasa dilakukan seseorang untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau kegiatan lainnya. Industri pariwisata mencakup berbagai layanan dan produk yang

mendukung aktivitas ini, termasuk akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, serta atraksi wisata. Kota Binjai memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam dan kaya warisan budaya, serta keragaman etnis dan tradisi, sehingga Kota Binjai memiliki potensi pengembangan wisata yang berbentuk taman kota serta fasilitas rekreasi keluarga lainnya.

**Tabel 5. 14. Arah Kebijakan Pengembangan Wisata Kota Binjai**

2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Penguatan fasilitas sejarah, budaya, ekowisata, akses jalan, promosi nasional dan internasional	Akselerasi akomodasi, promosi nasional internasional, fasilitas ekowisata	Pemantapan pusat wisata sejarah, budaya, dan ekowisata skala internasional	Terwujudnya Kota Binjai sebagai pusat wisata sejarah, budaya, dan ekowisata berkelanjutan

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Kaidah Pelaksanaan**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2025-2045 memuat strategi transformasi pembangunan sebagai manifestasi dari Visi yang ingin dituju dalam 20 (dua puluh tahun) pembangunan kedepan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat dideteksi melalui target yang telah ditetapkan dari beragam indikator per 5 (lima) tahunan sebagai bahan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja pembangunan yang dilaksanakan. Dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang beraktivitas di Kota Binjai, agar saling berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan Kota Binjai yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Dokumen RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 memerlukan kaidah pelaksanaan untuk menciptakan koordinasi, sinergi, dan konsistensi. Kaidah pelaksanaan yang dimaksud mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Kaidah pelaksanaan menjadi instrumen pengaman untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045.

#### **6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Binjai kedepannya, diperlukan konsistensi dalam perencanaan dan pendanaan. Dokumen RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan Kota Binjai. Penyusunan juga memperhatikan hasil evaluasi RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025 yang diakomodir kedalam penyusunan perencanaan. Sementara itu, penyusunan

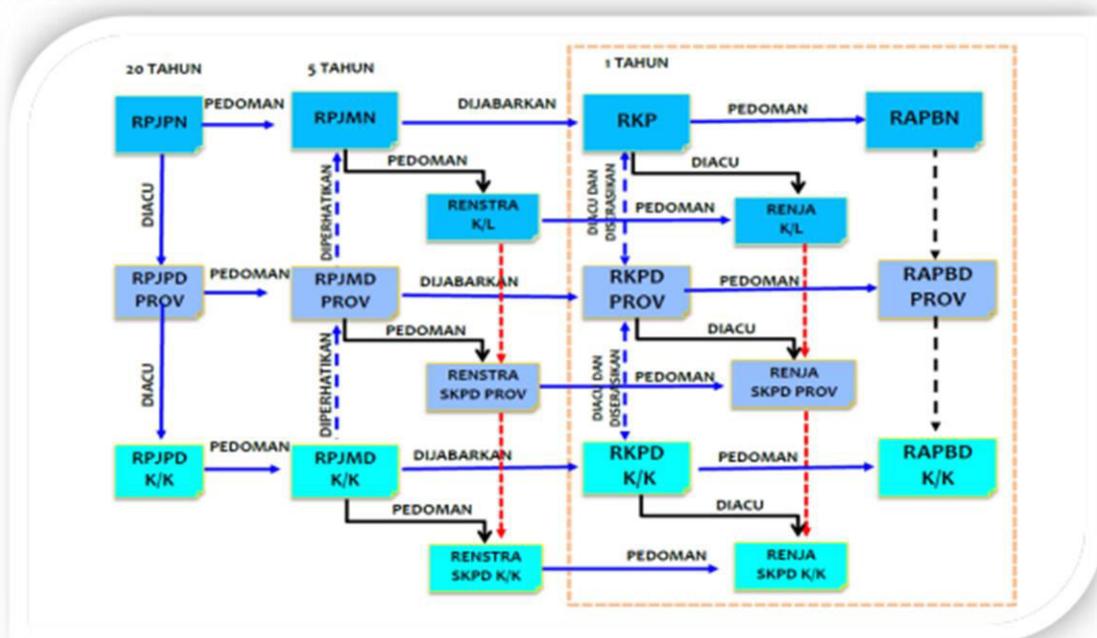
dokumen juga diselaraskan dengan RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040 dan KLHS RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045.

Dokumen RPJPD Kota Binjai akan menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD Kota Binjai, yang akan diturunkan melalui berbagai program dan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang senafas dengan Visi dan Misi Kota Binjai. Berbagai program dan kegiatan tersebut tentunya perlu didukung dengan pendanaan, baik dengan APBD maupun non APBD yang pembagiannya didasarkan skala prioritas dan kebutuhan pada setiap momen pelaksanaan. Sehingga pengaplikasiannya, Rencana Anggaran dan Belanja Daerah Kota Binjai setiap tahun harus senyawa dengan semangat yang tertuang dalam RPJPD Kota Binjai.

### **Keterkaitan RPJPD Kota Binjai dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya**

Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Binjai berkaitan dengan dokumen perencanaan Nasional, Provinsi Sumatera Utara, hingga Kabupaten/ Kota sekitar. Gambaran hubungan dokumen perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek pada struktur pemerintahan adalah sebagai berikut:

**Gambar 6. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan pada Skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota**



Keterkaitan dokumen perencanaan yang ditampilkan pada gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai periode tahun 2025-2045 yang ditetapkan memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RTRW, KLHS hingga RPJPD wilayah sekitar.
- b. Dokumen RPJPD Kota Binjai merupakan implementasi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta tantangan yang ada di Kota Binjai.
- c. Dokumen RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 merupakan pedoman umum dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai pada periode yang sama.
- d. Dokumen RPJPD Kota Binjai menjadi dasar gambaran arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Kota Binjai.
- e. Dokumen RPJPD Kota Binjai merupakan penjabaran operasional 5 (lima) tahunan yang dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai.
- f. Penjabaran terhadap dokumen RPJMD adalah Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan bagi setiap Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

### **Skema Pendanaan dan Penganggaran**

Sinkronisasi perencanaan dengan pendanaan diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Berbagai kebutuhan pembangunan kedepannya yang tergambar dari arah belanja daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhannya, baik secara mandiri maupun dengan bersinergi terhadap pelaku pembangunan lainnya. Kebutuhan belanja setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh berbagai tantangan kedepan, harus bermuara menuju pencapaian

sasaran pokok yang dapat dideteksi dari target-target indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Efisiensi dan efektivitas belanja menjadi kunci untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis kedepannya.

Kebutuhan belanja ini memerlukan dukungan dari pendapatan daerah Kota Binjai, sehingga kemandirian fiskal menjadi satu hal yang harus dipenuhi. Kemandirian ini direalisasikan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin membaik dan penyerapan dana bagi hasil untuk Kota Binjai yang semakin menguat. Penerimaan daerah yang semakin berkualitas tersebut dapat terpenuhi melalui dukungan dalam membentuk perekonomian kota yang mampu menciptakan nilai tambah produksi berlipat serta iklim investasi yang sehat. Selain itu, Pemerintah Kota Binjai memerlukan alternatif serta inovasi pembiayaan, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan kota, baik melalui pemanfaatan obligasi daerah, dana abadi daerah, KPBU, pengelolaan aset daerah maupun mekanisme pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Binjai, yang merupakan salah satu bagian yang berkepentingan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 memerlukan pembiayaan daerah yang berkesinambungan, baik dengan cara meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor publik dan pembiayaan sektor non publik. Selain itu, diperlukan manajemen investasi yang berkualitas, yang mampu mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

### **6.1.2. Kerangka Pengendalian**

Pengendalian perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RPJPD Kota Binjai dengan RPJPN dan RTRW Nasional, konsistensi antara RPJMD Kota Binjai dengan RPJPD dan RTRW Kota Binjai, serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengungkapkan bahwa Wali Kota Binjai merupakan aktor pengendalian terhadap perencanaan pembangunan di Kota Binjai.

Diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Adapun pengendalian perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi:

#### 1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian perencanaan pembangunan, kesesuaian program dengan sasaran, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

#### 2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian terhadap pelaksanaan dilakukan untuk memastikan implementasi pembangunan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahapan ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek.

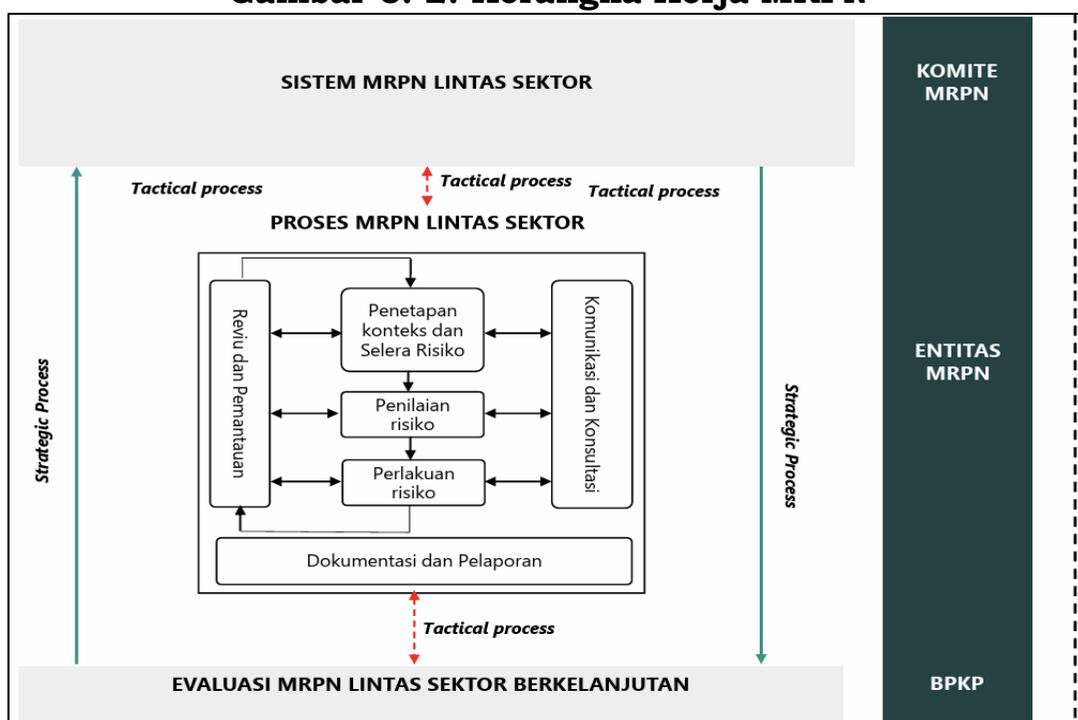
Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung dengan sistem elektronik terpadu yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik tersebut diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

### **Manajemen Risiko Pembangunan Nasional**

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional atau MRPN merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya efek dari

ketidakpastian pada sasaran pembangunan Nasional. Pengendalian dan pengelolaan risiko dilakukan pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Hasil dari manajemen risiko ini akan digunakan sebagai penilaian kinerja salah satunya terhadap Pemerintah Daerah. MRPN mengkolaborasikan eksisting Manajemen Risiko Organisasi ke dalam sebuah Pengendalian Manajemen Risiko Lintas Sektor yang secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Kerangka Kerja MRPN dapat dilihat pada Gambar 6.2 berikut.

**Gambar 6. 2. Kerangka Kerja MRPN**

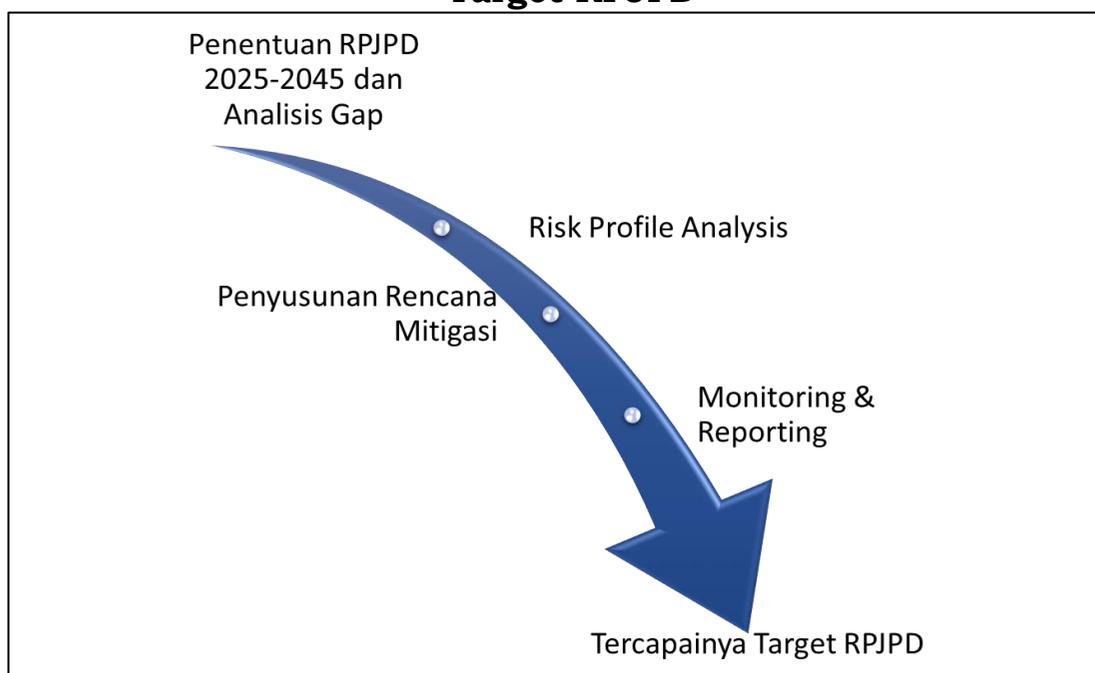


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan BPKP, 2024

Pemerintah Daerah, sebagai salah satu entitas MRPN, perlu menerapkan MRPN sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Penerapan MRPN di daerah dilakukan dengan pembentukan Komite Manajemen Risiko dan penyusunan kebijakan manajemen risiko. Proses yang dilakukan untuk menerapkan MRPN antara lain, perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penentuan objek dan entitas MRPN, dan proses

*assessment* risiko. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari manajemen risiko sangat diperlukan dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian bagi entitas MRPN. Penerapan MRPN merupakan ikhtiar untuk meningkatkan capaian pembangunan, kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, serta efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

**Gambar 6. 3. Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJPD**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Penyusunan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 harus berkesinambungan serta menjaga sinkronisasi antar periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJPN. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang menyeluruh serta pembentukan dasar hukum yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko.

Tahapan manajemen risiko untuk membantu tercapainya target RPJPD dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penentuan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 dilakukan dengan menetapkan arah kebijakan dan target yang akan dicapai pada tahun 2045. Penentuan ini mencakup penetapan visi, misi, serta sasaran pembangunan jangka panjang yang diharapkan dapat membawa Kota Binjai berkontribusi dalam pencapaian Indonesia Emas tahun 2045. Hal tersebut perlu dilakukan melalui *gap analysis* terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJPD periode sebelumnya. *Gap analysis* dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja dengan harapannya, sehingga upaya strategis dapat ditentukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam RPJPD.
- 2) *Risk profile analysis* dilakukan dengan proses identifikasi dan *assessment* risiko. Proses identifikasi risiko mencakup pengenalan dan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target dalam RPJPD periode tahun 2025-2045. Selanjutnya, dilakukan *assessment* risiko untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak serius dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian ini membantu untuk memahami tingkat urgensi dan tingkat risiko yang harus dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang sesuai dapat diambil dalam penyusunan RPJPD.
- 3) Penyusunan Rencana Mitigasi (*Mitigation Plan Formulation*) yang dilakukan bersama dengan Kementerian/ Lembaga/ Daerah terkait dalam proses perumusan rencana mitigasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko yang diprioritaskan untuk ditangani dan menetapkan jadwal yang jelas untuk pelaksanaan rencana mitigasi. Dengan demikian, rencana mitigasi dapat disusun secara sistematis dan efektif untuk

mengatasi risiko yang dihadapi dalam penyusunan RPJPD periode 2025-2045.

- 4) Melakukan *monitoring and reporting* untuk memastikan bahwa implementasi RPJPD berjalan dengan baik, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta memastikan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah. Proses tersebut mencakup pemantauan secara internal terhadap implementasi RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 dan mengikutsertakan pihak eksternal, seperti lembaga pengawas, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJPD, sekaligus mendapatkan masukan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan implementasi RPJPD.

Identifikasi risiko yang dilakukan terhadap misi atau tujuan pembangunan yang telah ditetapkan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 antara lain:

- 1) Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi sosial, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama yaitu dari sisi kesehatan melalui peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan penurunan *stunting*, penurunan penyakit menular dan tidak menular, penguatan kesehatan mental masyarakat serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga kesehatan. Isu yang disebutkan tersebut berhubungan erat dengan pencapaian target pada aspek kesehatan untuk semua. Keberhasilan dalam upaya penanganan isu-isu tersebut berkorelasi dengan pencapaian target dari indikator-indikator kesehatan yang ditetapkan.
- 2) Dari sisi pendidikan meliputi penciptaan transformasi pendidikan unggul dan merata dilakukan melalui percepatan

wajib belajar, pemerataan dan peningkatan akses pendidikan usia dini dan dasar, peningkatan kesejahteraan, kualitas dan kompetensi tenaga pendidik, penurunan jumlah anak tidak sekolah dan putus sekolah, serta peningkatan pendidikan karakter dan budi pekerti. Kelemahan dan/atau perlambatan kinerja atas salah satu aspek tersebut dapat mengakibatkan tidak tercapainya target indikator pendidikan yang sudah ditetapkan.

Kemudian, beberapa isu utama yang mendukung aspek masyarakat yang sejahtera dan terlindungi antara lain mengenai peningkatan sarana, prasarana dan akses perlindungan sosial serta penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas dan peningkatan ekonomi masyarakat miskin yang merata dan inklusif. Isu yang disuarakan tersebut penanganannya masih belum berkinerja optimal, sehingga upaya-upaya terarah dan berkesinambungan kedepannya diperlukan untuk menancapkan proses transformasi sosial di Kota Binjai secara kokoh.

- 3) Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi ekonomi, beberapa aspek menjadi perhatian utama. Pada aspek iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi perlu diupayakan penguatan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi, pengembangan industri berteknologi menengah-tinggi, industri barang konsumsi berkelanjutan, bioekonomi, dan industri kreatif, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang holistik, peningkatan kapasitas, akses informasi petani dalam peningkatan produktivitas, metode pengembangbiakan, perawatan, pengendalian hama, pemupukan, teknologi pascapanen dan pemasaran pertanian lewat *digital marketplace/ platform*, akselerasi investasi pada sektor teknologi maju dan inovasi tinggi, perluasan akses pembiayaan kredit bagi usaha pertanian, peningkatan peran BUMD, UMKM

dan Koperasi, peningkatan kualitas SDM dan pelaku usaha ekonomi kreatif, penguatan industri sektor padat karya berorientasi ekspor dan bernilai tambah, peningkatan riset dan inovasi keberagaman produk ekonomi kreatif, penguatan sistem investasi/ permodalan usaha ekonomi kreatif, penguatan ekosistem riset dan inovasi iptek dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI daerah yang berdaya saing di tataran global, serta peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri melalui peningkatan akses sumber daya, teknologi dan kemitraan usaha. Isu utama tersebut menjadi tantangan kedepannya untuk pencapaian target indikator yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya, pada aspek penerapan ekonomi hijau, mengangkat isu penerapan prinsip *green economy* dan *circular economy* di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan bioekonomi, percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy*, serta pengembangan industri manufaktur terpadu ramah lingkungan pada kawasan strategis industri. Seluruh isu tersebut berhubungan dengan target indeks ekonomi hijau, porsi EBT dalam bauran energi primer, dan menyinggung beberapa target dari indikator transformasi ekonomi lainnya.

Pada aspek transformasi digital, isu yang menjadi perhatian yaitu mengenai konsep digitalisasi dan *green* industri, pemanfaatan teknologi, integrasi pertanian dan tata niaga, pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital melalui penguatan struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital, peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage*

di kawasan perkotaan, pemanfaatan *platform* digitalisasi *one stop service* untuk kemudahan wisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam promosi ekonomi kreatif, penguatan proses bisnis UMKM melalui peran ekosistem digital, ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis. Beberapa isu terkait berhubungan dengan pencapaian indeks daya saing digital.

Pada aspek integrasi ekonomi domestik dan global, memuat isu mengenai penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, perluasan peluang investasi pada sektor ekonomi digital dan teknologi serta perluasan ke luar daerah, pengembangan peluang investasi di dalam negeri dan luar negeri, memperluas *network* dengan lembaga penanaman modal di dalam negeri dan luar negeri melalui perwakilan negara luar, peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis ekonomi kreatif, pengelolaan jalan kota, pembangunan jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan terutama menuju jalan tol intraregional, serta pengembangan sarana dan prasarana yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan sentra produksi. Beberapa isu tersebut perlu mendapat perhatian kedepannya untuk mencapai target dari koefisien variasi harga antar wilayah, *share* Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan *share* ekspor Kota Binjai terhadap PDRB Kota Binjai.

Kemudian, aspek perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memerlukan penanganan dalam hal percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik, pengembangan Wilayah Metropolitan Mebidang (Kota Binjai), peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan pada kawasan perkotaan, penyediaan infrastruktur air baku dan air minum, pembangunan dan perluasan *coverage* sarana

prasarana sistem transportasi publik massal, peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan, penguatan pengelolaan jalan kota dan drainase lingkungan, serta penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan. Beragam isu tersebut diharapkan bermuara kepada pencapaian target mengenai indikator *share* PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Provinsi serta indikator rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

- 4) Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi tata kelola, aspek regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif membutuhkan perhatian dalam hal percepatan kinerja atas penyederhanaan regulasi yang berkualitas, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat, tata kelola kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif, pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi berdasarkan capaian kinerja, penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan penguatan pendidikan politik. Beberapa isu tersebut berkaitan erat dengan pencapaian target pada indeks reformasi hukum, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, indeks pelayanan publik, dan indeks integritas nasional.
- 5) Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro, maka beberapa aspek kunci perlu dipertimbangkan. Pertama, mengenai pemahaman wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila dan Trantibunlinmas. Aspek ini perlu didukung dengan penguatan keamanan dan

ketertiban, serta penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Kemudian pada aspek stabilitas ekonomi makro, isu yang menjadi perhatian adalah mengenai pengendalian inflasi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, penguatan kualitas belanja daerah, dan penguatan kesempatan kerja. Keempat isu tersebut berhubungan erat dengan tercapainya stabilitas ekonomi makro di Kota Binjai. Selanjutnya pada aspek ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan perlu diupayakan penguatan keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung stabilitas sosial. Percepatan kinerja atas berbagai isu tersebut diharapkan dapat bermuara kepada pemenuhan target dari indikator yang telah ditetapkan.

- 6) Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi, maka beberapa aspek kunci perlu dipertimbangkan. Pertama, mengenai aspek beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian kedepannya yaitu mengenai penguatan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, penguatan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran. Isu ini berkaitan dengan pencapaian target dari indeks kerukunan umat beragama. Kedua, mengenai aspek keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Isu penting pada aspek ini yaitu mengenai penguatan ketangguhan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan, perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, kemudian isu tentang kemandirian dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia di berbagai bidang pembangunan, serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan dalam pembangunan. Seluruh kinerja dari penanganan isu tersebut dapat bermuara pada ketercapaian target dari indeks

pembangunan kualitas keluarga dan indeks ketimpangan gender. Ketiga, mengenai aspek lingkungan hidup berkualitas. Isu yang diangkat pada aspek ini antara lain mengenai tata ruang berbasis ekologis, pengelolaan sampah terpadu, dan kurikulum pendidikan kebencanaan. Keempat, aspek tentang berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Isu yang mendapat perhatian pada aspek ini yaitu mengenai ketangguhan kota dalam menyediakan air, ketahanan energi serta kemandirian pangan perkotaan. Kelima yaitu aspek mengenai resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Aspek ini perlu didukung dengan penguatan ketangguhan kota terhadap bencana banjir dan penguatan pengelolaan sampah terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan *circular economy*.

### **6.1.3. Sistem Insentif**

Peran aktif dari para pelaku pembangunan diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan di Kota Binjai. Pelaku pembangunan yang dimaksud bukan hanya pemerintah, namun juga diharapkan adanya keterlibatan dan komitmen penuh dari pelaku pembangunan non pemerintah seperti lembaga penelitian, dunia usaha, filantropi, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Melihat pentingnya peran dari seluruh pelaku pembangunan dalam mewujudkan sasaran pokok yang ditetapkan, maka perlu adanya sistem insentif. Harapannya, sistem insentif ini dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja dari setiap perangkat daerah Pemerintah Kota Binjai terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek

konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

#### **6.1.4. Mekanisme Perubahan**

Berangkat dari adanya beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan, maka dokumen perencanaan memerlukan ruang penyesuaian agar adaptif dengan keadaan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan lagi sasaran pembangunan jangka panjang yang ditetapkan dapat tercapai, maka target RPJPD Kota Binjai dapat dimutakhirkan melalui RPJMD Kota Binjai. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

#### **6.1.5. Komunikasi Publik**

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam

perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Komunikasi kepada OPD dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora/ perantau, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

## **6.2. Pembiayaan Pembangunan**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kota Binjai 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi

pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi daerah dan pembentukan kelembagaan daerah yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang saling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata Kelola, dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas, dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri daerah dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana abadi daerah), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pembiayaan untuk merespons

perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru, dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik, ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah; (iii) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (iv) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

### **6.3. Kesimpulan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan didalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Binjai selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi Calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai yang

berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai yang berdimensi tahunan.

RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 telah mengikuti mekanisme perubahan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga telah dikomunikasikan kepada publik, baik itu dalam bentuk Forum Konsultasi Publik, Musrenbang maupun pendampingan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Sumatera Utara. RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 ini juga memungkinkan untuk melakukan pembiayaan pembangunan yang inovatif dari non pemerintah dan menyesuaikan berbagai regulasi daerah yang terkait.

#### **6.4. Saran**

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Binjai dalam mewujudkan visi “KOTA BINJAI YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Binjai; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

Dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, peran aktif, serta komitmen berbagai pihak di Kota Binjai sangat diharapkan dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Binjai 2045. Terwujudnya visi pembangunan tersebut, diharapkan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2045 dan Indonesia Emas 2045.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

  
MUHAMMAD IQBAL, SH, MH  
NIP. 19791120 200501 1 004

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH